



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
(RPJPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2005-2025**

**PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2008 - 2028**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2015**



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR 7 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008**  
**TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008-2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 dan Pasal 297 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2008 - 2028.

Pasal I

Jangka waktu RPJP Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 235) dan beberapa ketentuan di dalamnya diubah, sebagai berikut:

1. Jangka waktu RPJP Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2028, diubah menjadi Tahun 2005 - 2025.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga Pasal 1 angka 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah Tahun 2005 - 2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional.
- (2) Sistematika Perubahan RPJP Daerah Tahun 2005 - 2025 sebagai berikut:
  - BAB I Pendahuluan
  - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - BAB III Analisis Isu-Isu Strategis

BAB IV Visi dan Misi Daerah

BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

BAB VI Kaidah Pelaksanaan

BAB VII Penutup.

(3) Rincian RPJP Daerah Tahun 2005 – 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, baik substansi dan jangka waktunya sesuai kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah periode sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 14 September 2015

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**SYAHRUL YASIN LIMPO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal September 2015

**SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

**ABDUL LATIF**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (7/2015)

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>I - 1</b>
	1.1. Latar Belakang.....	I - 1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I - 2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I - 4
	1.4. Sistematika Penulisan.....	I - 5
	1.5. Maksud Dan Tujuan.....	I - 5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>II - 1</b>
	2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II - 1
	2.1.1 . Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	II - 1
	2.1.2 . Potensi Pengembangan wilayah .....	II - 4
	2.1.3 . Wilayah Rawan bencana .....	II - 5
	2.1.4 . Demografi.....	II - 16
	2.1.5 . Geomorfologi.....	II - 6
	2.2. Aspek Kesejahteraan .....	II - 7
	2.2.1 . Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II - 7
	2.2.2 . Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II - 15
	2.2.3 . Fokus Seni Budaya & Olahraga .....	II - 17
	2.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II - 19
	2.3.1 . Fokus Layanan Urusan Wajib .....	II - 19
	2.3.2 . Fokus layanan Urusan Pilihan .....	II - 120
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	II - 133
	2.4.1 . Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II – 131
	2.4.2 . Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur .....	II – 134
	2.4.3 . Fokus Iklim Berinvestasi .....	II – 144
	2.4.4 . Fokus Sumber Daya Manusia .....	II – 145
<b>BAB III</b>	<b>ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS.....</b>	<b>III - 1</b>
	3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III - 1
	3.2. Isu Strategis .....	III - 10
<b>BAB IV</b>	<b>VISI DAN MISI DAERAH.....</b>	<b>IV - 1</b>
	4.1. Visi.....	IV - 1
	4.2. Misi.....	IV - 2
	4.3. Tujuan dan Sasaran .....	IV - 4

<b>BAB V</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG</b>	
	<b>DAERAH.....</b>	<b>V - 1</b>
	5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang.....	V - 1
	5.2. Tahapan dan Prioritas.....	V - 17
<b>BAB VI</b>	<b>KAIDAH PELAKSANAAN .....</b>	<b>VI - 1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VII - 1</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan, sejatinya adalah proses perubahan sosial yang dilakukan secara terencana dengan partisipatori yang luas dari seluruh masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik (kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dsb.) bagi manusia dan komunitas. Pembangunan harus menempatkan manusia dan komunitas sebagai tujuan, muara, dan bahkan esensi pembangunan.

Sulawesi Selatan, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, terus melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan guna menciptakan peluang bagi segenap komunitas sesuai dengan potensi spesifik yang dimilikinya. Bagi Sulawesi Selatan, pembangunan juga dapat menjadi media bagi berkembangnya tatanan internal yang berbasis wilayah seperti kabupaten/kota maupun tatanan fungsional seperti lembaga dan organisasi kemasyarakatan menurut cara yang dipilih secara mandiri, sehingga pada gilirannya Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tatanan secara Nasional. Dengan demikian tercipta sinergitas antara kabupaten/kota dengan provinsi dan pemerintah pusat dalam membangun suatu tatanan yang lebih baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan pada tatanan provinsi semestinya mewujudkan dalam bentuk penciptaan peluang kepada setiap daerah kabupaten/kota dan setiap kelompok masyarakat untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas keberadaannya menurut karakteristik budaya dan kearifan lokal masing-masing. Dalam hal ini, budaya lokal bukan hanya sekadar diacu, tetapi juga terus dikembangkan, antara lain dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses reaktualisasi dan revitalisasi budaya lokal agar senantiasa terkait dengan perubahan yang dibawa oleh spirit jaman, sehingga dapat memelihara keterkaitan (interkoneksi) dengan lingkungan strategisnya. Pada saat yang sama pembangunan senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai religius yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat yang agamis. Dengan demikian, pembangunan bukan lagi sekadar penyaluran aspirasi dari tatanan internal, tetapi jauh lebih maju, yaitu memfasilitasi setiap tatanan internal untuk mewujudkan aspirasi masing-masing dengan cara yang dipilihnya secara mandiri pula.

Pendekatan pembangunan ini merupakan interpretasi kreatif dari semangat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dengan tetap mencermati hasil review terhadap muatan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Bagi Sulawesi Selatan, keinginan untuk melakukan perubahan RPJPD lebih disebabkan oleh dinamika lingkungan strategis yang mengalami perubahan secara dinamis, baik dari sisi *instrumental input* (seperti munculnya berbagai regulasi dan kebijakan baru pemerintah pusat) maupun *environmental input* (seperti menguatnya arus demokratisasi, meluasnya praktek desentralisasi dan otonomi daerah, bergesernya cara pandang pembangunan, dsb.). Ketidaksihinggaan tahun periode dokumen RPJPD

Sulawesi Selatan dengan arahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007, juga menjadi alasan lainnya dibalik keinginan untuk melakukan perubahan RPJPD.

Alasan dibalik Perubahan RPJPD ini tampaknya sejalan dengan arahan peraturan perundangan yang menyebutkan bahwa perubahan dokumen RPJPD dapat dilakukan karena empat alasan: (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata-cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; (2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Permendagri 54/2010; (3) terjadi perubahan yang mendasar dalam hal perubahan kebijakan nasional.

Dalam perspektif ke depan, Perubahan RPJPD ini harus didesain sedemikian rupa dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan pelayanan publik, dan pengembangan daya saing daerah melalui pendekatan Kemandirian Lokal. Seluruh desain perencanaan tersebut harus bertumpu pada karakteristik daerah, potensi daerah, masalah dan tantangan yang dihadapi daerah, dan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah di masa depan.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Perubahan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan Pancasila sebagai landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai landasan operasional serta dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102), dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9).
  23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10).

### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Indonesia bersifat hirarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah pada level yang lebih tinggi harus menjadi rujukan bagi dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah dibawahnya. Meskipun tampak bersifat hirarkis, namun tetap memberi ruang bagi unit pemerintahan yang lebih rendah dan unit organisasi di daerah (SKPD) untuk mengembangkan desain perencanaan sesuai dengan karakteristik unik yang dimilikinya.

Dengan demikian, dokumen Perubahan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Mengingat bahwa dokumen Perubahan RPJPD ini merupakan dokumen induk yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan ke depan, maka dokumen ini harus menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen RPJPD-nya.

Oleh karena dokumen ini berdimensi 20 tahun, maka semua dokumen yang berdimensi lima tahun (RPJMD) dan berdimensi tahunan (RKPD dan APBD) harus mengacu pada dokumen Perubahan RPJPD ini. Seluruh dokumen ini selanjutnya dijabarkan oleh seluruh SKPD lingkup pemerintah Sulawesi Selatan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA) SKPD. Berdasarkan RKPD dan RKA SKPD tersebut selanjutnya disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Terkait hubungan antara RTRW dan RPJPD, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, disebutkan bahwa RTRW dan RPJPD merupakan dokumen yang satu sama lain saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Bagi daerah yang belum memiliki RTRW, maka RPJPD merupakan acuan penyusunan RTRW. Sedangkan jika daerah telah memiliki RTRW yang masih berlaku, maka RTRW tersebut digunakan sebagai acuan. Dengan demikian, menjadi tidak penting dokumen mana yang menjadi acuan, tetapi yang jauh lebih penting adalah konsistensi, sinkronisasi, dan keserasian antara kedua dokumen.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Struktur dan sistematika penulisan dokumen Perubahan RPJPD Sulawesi Selatan 2005-2025 sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Dokumen ini terdiri atas enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab pertama**, merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan RPJPD, hubungan RPJPD Sulawesi Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD.

**Bab kedua**, merupakan Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah yang mendeskripsikan berbagai aspek terkait dengan geomorfologi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

**Bab ketiga**, merupakan Bab Analisis Isu-Isu Strategis Daerah yang mengulas mengenai permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan daerah Sulawesi Selatan dalam perspektif jangka panjang.

**Bab keempat**, merupakan Bab Visi dan Misi Daerah yang menguraikan mengenai Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bab ini juga memuat tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam perspektif jangka panjang.

**Bab kelima**, merupakan Bab Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang mendeskripsikan mengenai sasaran-sasaran pembangunan daerah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan pentahapan lima tahunan pembangunan daerah Sulawesi Selatan.

**Bab keenam**, merupakan Bab Kaidah Pelaksanaan yang menguraikan mengenai langkah-langkah pelaksanaan dari visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah, termasuk perandatangan jawab masing-masing pelaku pembangunan daerah dalam pelaksanaan RPJPD Sulawesi Selatan.

#### 1.5. Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, danduniausaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama.

Sedangkan Perubahan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan arah kebijakan pembangunan Nasional sebagaimana tertuang di dalam RPJPN guna mendorong perkembangan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan setiap 5 (lima) tahun untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan APBD setiap tahunnya.
3. Menjadi acuan pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD masing-masing, dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan daerahnya.
4. Merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam penyusunan seluruh dokumen perencanaan pemerintahan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH**

Gambaran umum dan kondisi daerah di Sulawesi Selatan tercermin dari uraian beberapa aspek yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

##### **2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

Secara geografis wilayah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai luas wilayah **46.083,94** km persegi, dengan luas wilayah daratan kurang lebih 45.519,24 km<sup>2</sup>. dimana sebagian besar wilayah daratnya berada pada jazirah barat daya Pulau Sulawesi serta sebagian lainnya berada pada jazirah tenggara Pulau Sulawesi. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL. Terdapat sekitar 65 sungai yang mengalir di provinsi ini, dengan jumlah sungai terbesar ada di bagian utara wilayah provinsi ini. Lima danau besar menjadi rona spesifik wilayah ini, yang tiga di antaranya yaitu Danau Matana, Danau Towuti dan Danau Mahalona di Kabupaten Luwu Timur, serta dua danau lainnya yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki daerah administratif yaitu 21 (duapuluh) kabupaten, 3 (tiga) kota. Propinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara dan Teluk Bone dan berbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur, kemudian sebelah Barat dan Timur masing-masing berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Flores.

Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dilalui oleh garis khatulistiwa yang terletak antara 0012'~80 Lintang Selatan dan 1160 48'~122' 36' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara dan Teluk Bone serta Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah timur, serta berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat dan Laut Flores di sebelah timur. Geografi wilayah mencakup pesisir dan pulau, dataran rendah dan dataran tinggi, dengan 67 aliran sungai dan tiga danau. Terdapat gunung Bawakaraeng di selatan, serta gunung Lompobatang dan Rante Mario di Utara, pada bagian tengah membentang bukit karst sepanjang Maros dan Pangkep, dengan klimatologi yang terbedakan antar musim pada pantai Barat dan Timur.

Wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Kondisi Kemiringan tanah 0 sampai 3 persen merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 persen merupakan tanah yang kemiringannya agar curam, lebih dari 45 persen tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL.

Daerah Sulawesi Selatan termasuk ke dalam propinsi Busur Vulkanik Tersier Sulawesi Barat, yang memanjang dari Lengan Selatan sampai ke Lengan Utara. Secara umum, busur ini tersusun oleh batuan-batuan plutonik-vulkanik berumur Paleogen-Kuarter serta batuan-batuan metamorf dan sedimen berumur Tersier. Geologi Sulawesi Selatan bagian timur dan barat sangat berbeda, di mana keduanya dipisahkan oleh Depresi Walanae yang berarah UUB-SST. Secara struktural, Sulawesi Selatan terpisah dari anggota Busur Barat Sulawesi lainnya oleh suatu depresi berarah UB-ST yang melintas di

sepanjang Danau Tempe (van Leeuwen, 1981). Struktur geologi batuan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari volkan tersier, Sebaran formasi volkan tersier ini relatif luas mulai dari Cenrana sampai perbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles) sampai Pegunungan Molegraf, Pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai Tanjung Pattiro, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi. Batuan volkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tana Toraja) dan di Gunung Lompobatang (Gowa).

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sebanyak 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 25 aliran sungai. Sungai terpanjang yakni Sungai Saddang yang mengalir melalui Kabupaten Tator, Enrekang dan Pinrang dengan panjang sungai sekitar 150 km. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau yakni Danau Tempe dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta danau Matana dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur.

Kondisi alam di Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan pengamatan pada tiga Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin dan Maritim Paotere) selama tahun 2014 hingga 2015 rata-rata suhu udara 27,4 °C di Kota Makassar dan sekitarnya. Kondisi ini dari tahun ketahun tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin 32,1 °C dan suhu minimum 24,0 °C.

Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Tipe Iklim B, termasuk iklim basah dimana Curah hujan rata-rata 3000 – 3500 mm/Tahun. Wilayah tipe ini terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi Kabupaten Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba, dan Bantaeng. Tipe iklim C termasuk iklim agak basah dimana Curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/Tahun. Tipe iklim C terbagi 3 yaitu Iklim tipe C1 meliputi Kabupaten Wajo, Luwu, dan Tana Toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jeneponto. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana Toraja, Parepare, Selayar. Tipe iklim D dengan Curah hujan rata-rata 2000 – 2500 mm/Tahun. Tipe iklim ini terbagi 3 yaitu Wilayah yang masuk ke dalam iklim D1 meliputi Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Luwu, Tana Toraja, dan Enrekang. Wilayah yang termasuk ke dalam iklim D2 terdiri dari Kabupaten Wajo, Bone, Soppeng, Sinjai, Luwu, Enrekang, dan Maros. Wilayah yang termasuk iklim D3 meliputi Kabupaten Bulukumba, Gowa, Pangkep, Jeneponto, Takalar, Sinjai dan Kota Makassar. Tipe iklim E dengan Curah hujan rata-rata antara 1500 – 2000 mm/Tahun dimana tipe iklim ini disebut sebagai tipe iklim kering. Tipe iklim E1 terdapat di Kabupaten Maros, Bone dan Enrekang. Tipe iklim E2 terdapat di Kabupaten Maros, Bantaeng, dan Selayar.

Luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan yang digunakan sebagai lahan utama tahun 2013 seluas 4.505.369 Ha. Dari total luasan tersebut terbagi dalam golongan penggunaan lahan antara lain Hutan Primer, Hutan Sekunder, Kebun Campuran dan seterusnya. Penggolongan penggunaan lahan ini merupakan penggunaan lahan utama yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**

<b>Penggunaan Lahan Utama</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Persentase</b>
Awan/Tidak teridentifikasi	53,264	1.16
Hutan Primer	1,294,061	28.28
Hutan Sekunder	558,617	12.21
Kebun Campuran	1,329,302	29.05
Mangrove	7,090	0.15
Perkebunan	7,681	0.17
Permukiman	32,676	0.71
Rawa	60,805	1.39
Sawah	154,959	3.39
Semak/Belukar	383,615	8.38
Tambak/Empang	79,784	1.74
Tanah Terbuka	259,873	5.68
Tegalan/Ladang	110,178	2.41
Tubuh Air	170,465	3.72
Lain-lain	74,084	1.62
<b>T o t a l</b>	<b>4,502,369</b>	<b>100.00</b>

Sumber : Lingkungan Hidup Daerah, 2013

Berdasarkan data tersebut, penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Selatan masih didominasi oleh kebun campuran, hutan primer, hutan sekunder, dan selebihnya penggunaan lahannya berada di bawah 10 (sepuluh) persen. Dalam kaitannya dengan kawasan hutan, dari keseluruhan luas Provinsi Sulawesi Selatan menurut Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2009 tentang RTRWP Sulsel tercatat 2.523.493,73 Ha yang termasuk dalam kawasan hutan atau merupakan 55,14% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan.

Kawasan Budidaya diarahkan pada pengembangan kawasan budidaya unggulan sesuai dengan potensi daerah khususnya pada pengembangan komoditi unggulan sulawesi selatan. Luas lahan wilayah budidaya sebesar 2.551.072 Ha., dari seluruh luas kawasan budidaya umumnya merupakan kawasan sentra produksi pertanian yang luasnya mencapai 424.938 Ha.

Kawasan lindung dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi hutan lindung seluas 1.232.683 Ha., dan kawasan pelestarian suaka alam seluas 851.267 Ha. Keseluruhan kawasan hutan yang terluas adalah lahan hutan negara yang luasnya mencapai 28,45% dari total wilayah (13.014,56 km<sup>2</sup>), kemudian untuk lahan sawah yang secara keseluruhan luasnya mencapai 5.983,89 km<sup>2</sup> atau 13,08% dari total luas lahan yang ada terdiri dari lahan sawah seluas 5.983,89 km<sup>2</sup> dan lahan bukan sawah seluas 39.768,91 km<sup>2</sup>. Penggunaan lahan lain yang cukup signifikan adalah kebun/tegalan yang luasnya mencapai 12,10% dari luas wilayah keseluruhan yaitu seluas 5.534,24 km<sup>2</sup>. Penggunaan lahan terendah adalah kolam/empang yang hanya sebesar 145,79 km<sup>2</sup> (0,32%) dan rawa seluas 194,12 km<sup>2</sup> (0,42%).

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Dari uraian karakteristik dan lokasi memperlihatkan bahwa wilayah Sulawesi Selatan mempunyai potensi dan peluang menjadi wilayah yang maju, mandiri. Struktur tata ruang Provinsi Sulawesi Selatan menentukan kualitas interkoneksi antar daerah dan antarkawasan, sekaligus merupakan suatu komunitas yang utuh yang memungkinkan Sulsel berartikulasi secara optimal terhadap dinamika lingkungan eksternalnya. Struktur dimaksud terdiri atas jaringan transportasi, jaringan irigasi dan air baku, jaringan energi (listrik), serta jaringan telekomunikasi.

Sulawesi Selatan sangat berpeluang menjadi acuan dalam pembangunan di Wilayah Timur Indonesia, yang membuka jalan baik untuk pembangunan wilayah maupun ruang. Pengembangan sumberdaya di Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan pada berbagai isu yang perlu ditangani secara terpadu berdasarkan potensi dan kondisi wilayah khususnya pada sumberdaya alam perlu lebih dipromosikan demi perluasan ekonomi, peningkatan pendapatan penduduk, dan pengentasan kemiskinan.

Potensi wilayah Sulawesi Selatan yang terletak di Jalur Pembangunan Sumberdaya di Kawasan Timur Indonesia, antara Kalimantan dan Papua membuka peluang Sulawesi Selatan agar dapat memainkan perannya secara maksimal sebagai pusat pemasok sumberdaya dan berfungsi sebagai pusat pengolahan dan perdagangan untuk industri-industri berbasis sumberdaya. Tata Ruang Wilayah Sulawesi Selatan mengharuskan terciptanya pengelolaan kawasan lindung yang mantap sehingga fungsi lindungnya dapat optimal. Adanya arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan budi daya yang dapat mengakomodasi kebutuhan pengembangan seluruh sektor pembangunan yang potensial secara optimal dalam beberapa kawasan andalan.

Menciptakan sistem pusat pemukiman di setiap kawasan andalan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan daerah hinterlandnya, sistem prasarana wilayah terpadu yang dapat mendukung pengembangan sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Tersedianya kebijaksanaan pembangunan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam serta kebijaksanaan penunjang pemanfaatan ruang lainnya.

Arah pengembangan wilayah provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dalam RTRW Nasional mengamanatkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional yang diwujudkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang nasional dan kawasan strategis nasional yang mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Sulawesi Selatan. Rencana struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan meliputi sistem perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi nasional, system jaringan energy nasional, system jaringan telekomunikasi nasional dan system jaringan sumber daya air. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang RTRW Sulawesi Selatan megamanatkan rencana pola ruang mencakup kawasan lindung nasional, dan kawasan budidaya yang secara nasional memiliki nilai strategis serta kawasan strategis nasional.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan menguraikan potensi dan peluang pengembangan wilayah sehingga menempatkan Sulawesi Selatan sebagai perekat bagi daerah daerah lain. Untuk mewujudkan interkoneksi antar daerah, maka Sulawesi Selatan dikembangkan sebagai simpul transportasi, industry, perdagangan, pariwisata, dan pertanian serta hub pendidikan dan kesehatan yang seiring dengan peningkatan kualitas lingkungan.

Rencana struktur ruang Provinsi Sulawesi Selatan sebagai alat pendukung aktifitas sosial ekonomi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan interkoneksi antar kawasan perkotaan, antar Pusat kegiatan nasional, Pusat kegiatan wilayah, dan Pusat kegiatan lokal yang didukung oleh peningkatan kualitas jaringan transportasi, energy, telekomunikasi, dan sumber daya air secara terpadu.

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi terhadap rawan bencana alam, seperti banjir yaitu pada daerah wilayah selatan dan wilayah barat pesisir pantai yaitu daerah dataran antara yang berada pada 0 – 100 DPL, wilayah rawan longsor, abrasi yaitu pada wilayah Utara dan Timur Sulawesi Selatan yaitu daerah dataran tinggi yang permukimannya berada pada 500 – 1000 DPL. Permukiman pada daerah lereng pegunungan adalah daerah rawan banjir yang diikuti dengan longsor dan abrasi.

Bencana yang berpotensi melanda wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah banjir, gerakan tanah, gempa bumi, dan tsunami. Banjir yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan disebabkan karena terjadinya proses degradasi kawasan lindung yang sebagian besar berupa hutan lindung baik di hulu maupun di hilir daerah sungai yang sering dijumpai pada kawasan perdesaan dan juga disebabkan oleh sistem drainase yang tidak berfungsi dengan optimal serta tersumbatnya sungai dan saluran air oleh sampah yang biasanya terjadi di kawasan perkotaan. Berdasarkan data tahun 2012, luas wilayah genangan di Provinsi Sulawesi Selatan seluas 5.154 Km<sup>2</sup> atau sekitar 20% dari luas kawasan budidaya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada umumnya merupakan kawasan sentra produksi pertanian. Kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan di wilayah Kabupaten Jeneponto, Maros, Pangkep Kepulauan, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, Pinrang, Luwu, dan Luwu Timur.

Berdasarkan proses terbentuknya Pulau Sulawesi, maka terdapat garis sesar gempa memanjang dari perairan kanan dan kiri Pulau Selayar menuju ke utara melewati Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidrap, bercabang di Kabupaten Enrekang yang merupakan kawasan pengaruh kegempaan. Garis sesar gempa ini menunjukkan daerah rawan gempa di daerah yang dilewatinya yang berpusat di Kabupaten Bone, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara. Selain daripada itu garis sesar di sebelah barat Kabupaten Pinrang dan di sebelah selatan Selat Makassar menyebabkan daerah pantai di kabupaten Pinrang, kabupaten Bulukumba, dan kabupaten Selayar serta Kota Makassar rawan terhadap bencana Tsunami.

Berdasarkan peta gerakan tanah Provinsi Sulawesi Selatan, wilayah Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh zona kerentanan gerakan tanah rendah dan menengah. Hal ini mengindikasikan bahwa bencana gerakan tanah di Provinsi Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi oleh kegiatan manusia khususnya pada pemanfaatan ruang di wilayah DAS dan pegunungan yang rentan akan bencana longsor. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan wilayah yang rawan bencana gerakan tanah adalah Kabupaten Takalar, Gowa, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, Bone, dan Luwu Timur.

### 2.1.4 Demografi

Dari jumlah penduduk di Indonesia provinsi Sulawesi Selatan terbesar ketujuh setelah DKI Jakarta, dari segi kepadatan penduduk Sulawesi Selatan berada pada urutan 12 setelah provinsi Sumatra Utara. Laju pertumbuhan penduduk urutan enam terendah Sumatra Utara dan masih berada dibawah rata-rata nasional.

Penduduk Sulawesi Selatan pada tahun 2013 adalah 8.342.047 jiwa terdiri dari 4.071.434 laki-laki dan 4.270.613 perempuan. Struktur umur penduduk berusia 0-14 tahun berjumlah 2.454.694 jiwa atau 21,82 persen, penduduk berusia 15- 64 tahun berjumlah 5.415.286 jiwa atau 63,31 persen dan penduduk berusia 65 tahun ke atas berjumlah 472.067 jiwa 5,89 persen. Dalam lima tahun terakhir, laju pertumbuhan penduduk setiap tahun cenderung stabil dengan rata-rata 1,34 persen. Jika rata-rata laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak dapat dikurangi, maka pada tahun 2028, jumlah penduduk Sulawesi Selatan akan menjadi sekitar 11 juta orang, atau bertambah sekitar 34 persen dari Tahun 2013. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kota Makassar yang merupakan pusat kegiatan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 1.406.072 jiwa, sedang yang paling rendah adalah Kabupaten Selayar sebesar 127.220 jiwa.

Pada tahun 2013, jumlah angkatan kerja 3.468.192 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja 60,49 persen dimana tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,10 persen dengan jumlah nominal pencari kerja sebanyak 176.912 ribu orang. Tenaga kerja yang terserap dari setiap sektor ekonomi sebanyak 2,8 juta pekerja, yang bekerja pada sektor pertanian turun 0,6 persen menjadi 43,39 persen; sektor industri pengolahan turun 0,77 persen menjadi 5,97 persen; perdagangan naik 0,03 persen menjadi 18,35 persen; jasa-jasa naik 1,05 persen menjadi 18,46 persen dan sisanya terserap 14,10 persen pada sektor selain sektor diatas. Dibandingkan dengan 6 (enam) provinsi lain di Wilayah Sulawesi, kinerja penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan relatif rendah yaitu berada pada urutan kelima namun akselerasi peningkatan kinerjanya semakin baik.

### 2.1.5 Geomorfologi

Modal dasar pengembangan tatanan Sulawesi Selatan memiliki aspek yang luas, mulai dari kondisi geografis dan topografi wilayah, kondisi klimatologis, kondisi demografis dan etnisitas, serta latar belakang sejarah dan budaya.

Dari sisi fisik, Sulawesi Selatan memiliki kondisi dan potensi yang sangat beragam yang terdiri dari 21 kabupaten dan tiga kota serta 263 kecamatan. Topografi Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Wilayah daratan ini dikelilingi oleh laut, di sebelah selatan terdapat laut Flores, di sebelah barat terdapat selat Makassar dan di sebelah Timur terdapat teluk Bone dan pulau-pulau tersebar pada perairan tersebut.

Kawasan ketinggian di Sulawesi Selatan terbentuk melalui keberadaan sejumlah gunung. Pada perbatasan kabupaten Gowa, Bantaeng, Sinjai dan Bulukumba membentang gunung Lompobattang dengan ketinggian 2.871 meter, juga terdapat gunung Bawakaraeng dengan ketinggian 2.830 meter di perbatasan Kabupaten Gowa dan Sinjai. Di wilayah Luwu terdapat gunung Bukit Rantai Kombala dengan ketinggian 3.103 meter, gunung Kambuno (2.900 meter) dan gunung Balease (3.016 meter). Pada wilayah perbatasan Kabupaten Luwu dan Enrekang terdapat gunung Rante Mario dengan ketinggian 3.470 meter dan gunung Latimojong dengan ketinggian 3.305 meter. Sulawesi Selatan juga ditandai oleh keberadaan bukit Kars di sekitar Kabupaten Pangkep

dan Maros. Kondisi temperatur, kelembaban, curah hujan, penyinaran matahari dan kecepatan angin antara dua wilayah tersebut berbeda pada periode yang sama. Temperatur maksimum di sekitar Makassar adalah 34,5 derajat dan temperatur minimum 22,3 derajat, kelembaban nisbi 66-87 persen, rata-rata penyinaran matahari antara 41-98 persen, serta kecepatan angin rata-rata 3,6 - 7,2 km/jam.

## 2.2.ASPEK KESEJAHTERAAN

### 2.2.1.Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Lebih dari satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan menunjukkan pencapaian yang cukup impresif. Secara rata-rata, perekonomian Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013 bertumbuh sebesar 7,65, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya sebesar 6,01, ini tentunya menempatkan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sekaligus sebagai kawasan paling dinamis di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan persisten tersebut telah berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan per kapita Sulawesi Selatan.

**Gambar 2.2**  
**Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan dan Nasional**  
**Tahun 2009-2013**

No	Pertumbuhan PDRB	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-Rata Per tumbuhan Ekonomi
1	Nasional	4,63	6,2	6,49	6,23	6,5	6,01
2	Prov Sul-Sel (Thn Dasar 2000)	6.23	8.19	7.61	8.37	7,65	7,65
3	Prov Sul-Sel (Thn Dasar 2010)		8.60	8.10	8.90	7.63	

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

Menjaga momentum pertumbuhan terus berlanjut, menjadi tantangan utama bagi Sulawesi Selatan, mengingat dalam dua tahun terakhir terjadi perlambatan. Bahkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 mengalami perlambatan. Penyebab utama melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut, disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sebagai sektor penyumbang terbesar terhadap PDRB dan berperan sebagai mesin pertumbuhan, maka perlambatan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran akan berdampak luas terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan.

**Tabel 2.3**  
**Laju Pertumbuhan Sektoral PDRB Sulawesi Selatan, 2009-2013**

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	4.68	2.34	6.45	5.40	3.95
2	Pertambangan dan Penggalian	-4.51	15.74	-7.89	4.44	9.26
3	Industri Pengolahan	3.64	6.19	7.64	8.86	8.12
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	8.75	8.03	8.60	12.53	8.36
5	Bangunan	14.10	9.17	12.09	9.73	10.92
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	10.77	11.64	10.88	10.54	9.38
7	Pengangkutan dan Komunikasi	10.20	14.82	12.11	14.87	8.92
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	11.21	16.80	14.84	15.87	14.18

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
9	Jasa-jasa	6.10	4.27	6.70	2.27	3.67
PDRB DENGAN MIGAS		6.23	8.19	7.65	8.33	7.65

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

**Tabel 2.4**  
**Sumber Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan, 2009-2013**

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	1.36	0.67	1.74	1.44	1.03
2	Pertambangan dan Penggalian	-0.41	1.28	-0.69	0.33	0.67
3	Industri Pengolahan	0.51	0.85	1.03	1.16	1.10
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.09	0.08	0.09	0.13	0.09
5	Bangunan	0.74	0.51	0.68	0.57	0.65
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	1.70	1.92	1.85	1.85	1.67
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.84	1.26	1.10	1.39	0.89
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0.72	1.14	1.09	1.23	1.18
9	Jasa-jasa	0.69	0.48	0.72	0.24	0.37
PDRB DENGAN MIGAS		6.23	8.19	7.65	8.33	7.65

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

Pertumbuhan sektor jasa (terutama sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor transportasi dan komunikasi) yang sangat impresif (mencapai angka dua digit) telah merubah secara signifikan struktur ekonomi Sulawesi Selatan beberapa tahun terakhir. Transformasi ekonomi berlangsung dari dominasi pertanian (sektor primer) ke dominasi jasa (sektor tertier). Pada tahun 2013, kontribusi sektor jasa terhadap total PDRB Sulawesi Selatan telah mencapai 51,17 persen., sebaliknya sektor pertanian menurun menjadi 23,90 persen pada tahun 2013. Fenomena ini umum terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia, dimana pergeseran struktur ekonomi berlangsung dari sektor pertanian ke sektor jasa.

Fenomena semacam ini lazim disebut “*dutch disease*”, yaitu suatu kondisi dimana *booming* komoditas (akibat eksploitasi sumberdaya alam) akan menyebabkan aliran modal dari pendapatan komoditas meningkat, dan pada gilirannya akan mengakibatkan permintaan yang lebih tinggi untuk barang yang tidak diperdagangkan seperti jasa (restoran, hotel, dll.) dan konstruksi. Akibatnya, sektor industri kurang berkembang dan pada gilirannya akan menekan pertumbuhan sektor industri. Fakta mengenai rendahnya kontribusi sektor industri (setidaknya dibandingkan sektor jasa) terhadap perekonomian Sulawesi Selatan dan lambatnya pertumbuhan sektor industri hanya sekedar mengkonfirmasi gejala ini. Selama 10 tahun terakhir, peran sektor industri pengolahan terhadap PDRB Sulawesi Selatan hanya 12.77 persen per tahun dengan tren yang semakin menurun, dan laju pertumbuhan hanya rata-rata 6,94 persen per tahun.

Secara sektoral, aktifitas ekonomi Sulawesi Selatan terkonsentrasi pada dua sektor utama, yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kedua sektor ini menyumbang paling besar terhadap pembentukan PDRB dalam beberapa tahun terakhir. Secara rata-rata kedua sektor ini menyumbang lebih dari 40 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan. Meski demikian, kedua sektor ini menunjukkan tren kontribusi yang berbeda. Sektor pertanian terus menunjukkan penurunan peran, dan sebaliknya sektor perdagangan, hotel, dan restoran justru menunjukkan peningkatan kontribusi secara sistematis.

**Tabel 2.5**  
**Kontribusi Sektoral Produk Domestik Regional Bruto**  
**Sulawesi Selatan, 2009-2013**

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	27.98	25.83	25.30	24.78	23.90
2	Pertambangan dan Pengalihan	5.51	6.04	6.07	5.61	5.99
3	Industri Pengolahan	12.53	12.27	12.21	12.14	12.21
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0.95	0.92	0.91	0.90	0.90
5	Bangunan	5.39	5.54	5.64	5.67	5.84
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	16.71	17.34	17.63	17.98	17.88
7	Pengangkutan dan Komunikasi	7.96	8.01	7.89	8.12	8.05
8	Kuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	6.25	6.63	6.92	7.38	7.89
9	Jasa-jasa	16.72	17.42	17.44	17.41	17.35
PDRB DENGAN MIGAS		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

Sektor industri pengolahan, meskipun menempati posisi keempat terbesar sebagai penyumbang pembentukan PDRB, namun menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2013, sektor ini mengalami penurunan menjadi 12,21 . Pertumbuhan sektor jasa, terutama sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang berlangsung secara konsisten dalam 10 tahun terakhir, secara meyakinkan telah menekan peran sektor industri pengolahan. Pada tahun 2013, ketigasektor ini telah menyumbang lebih dari sepertiga terhadap PDRB.

Secara spasial, aktivitas ekonomi Sulawesi Selatan terkonsentrasi di Kota Makassar. Pada tahun 2013, Kota Makassar menyumbang hampir sepertiga terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan. Bahkan kontribusi tersebut terus membesar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap PDRB Sulawesi Selatan meningkat menjadi 31,82 persen. Membesarnya peran Kota Makassar terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan, tidak terlepas dari tingginya laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, yaitu rata-rata 9,04 persen per tahun, yang merupakan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi Selatan.

Gambaran PDRB antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan juga menegaskan eksisnya ketimpangan skala ekonomi antar kabupaten/kota. Sepuluh kabupaten/kota dengan nilai PDRB terendah hanya menyumbang 15,42 persen terhadap PDRB Sulawesi Selatan atau kurang dari setengah PDRB Kota Makassar. Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan nilai PDRB terbesar, yaitu Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur dan Bone, menyumbang hampir setengah (45,12%) terhadap pembentukan PDRB Sulawesi Selatan.

**Tabel 2.6**  
**Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota**  
**Sulawesi Selatan, 2009-2013**

No	Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kep. Selayar	7.89	8.01	8.52	9.18	9.47
2	Bulukumba	6.47	6.27	6.38	8.97	8.01
3	Bantaeng	7.61	7.90	8.43	8.49	8.82

No	Kab/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
4	Jeneponto	5.38	7.25	7.32	7.27	6.97
5	Takalar	6.58	6.85	7.34	7.40	7.33
6	Gowa	7.99	6.05	6.20	7.28	7.78
7	Sinjai	7.02	6.03	5.90	6.33	7.29
8	Maros	6.27	7.03	7.57	8.00	8.67
9	Pangkep	5.91	6.34	9.17	9.61	7.93
10	Barru	5.72	6.54	7.41	7.76	7.81
11	Bone	7.51	7.63	6.20	8.01	6.09
12	Soppeng	6.81	4.45	7.95	7.48	7.57
13	Wajo	5.10	5.71	10.93	8.99	7.72
14	Sidrap	6.66	4.45	11.82	8.37	7.44
15	Pinrang	7.65	6.23	7.12	8.26	6.81
16	Enrekang	6.62	5.00	6.90	7.17	6.96
17	Luwu	6.82	6.95	7.47	7.49	7.78
18	Tator	6.10	6.31	7.88	8.12	7.47
19	Luwu Utara	6.68	5.93	7.29	8.03	8.17
20	Luwu Timur	-4.04	15.39	-5.33	2.54	10.69
21	Toraja Utara	5.74	7.00	7.90	8.47	8.52
22	Makassar	9.20	9.83	9.65	9.88	8.91
23	Pare-Pare	8.09	8.26	7.79	7.92	8.47
24	Palopo	7.86	7.29	8.16	8.68	8.99
	Sulawesi Selatan	6.23	8.19	7.65	8.33	7.66

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

### 2.2.1.2 Tingkat Pendapatan Per Kapita

PDRB (pendapatan) per kapita Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Pendapatan per kapita Kota pada tahun 2009 sebesar Rp 12,63 juta pada tahun 2013 menjadi 22,150 juta. Signifikannya peningkatan pendapatan per kapita Kota Makassar disebabkan oleh peningkatan PDRB yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan jumlah penduduk. Dalam 10 tahun terakhir, PDRB meningkat rata-rata 13,54 persen per tahun, sedangkan jumlah penduduk hanya bertumbuh rata-rata 1,36 persen per tahun.

Meski demikian, tingkat pendapatan per kapita Sulawesi Selatan masih berada jauh di bawah angka Nasional. Pada tahun 2013, pendapatan per kapita Sulawesi Selatan hanya sekitar 60 persendari angka Nasional. Berita baiknya, peningkatan pendapatan per kapita Sulawesi Selatan bergerak sedikit lebih cepat ketimbang Nasional. Sulawesi Selatan meningkat rata-rata 15,73 persen per tahun, sedangkan Nasional hanya rata-rata 14,45 persen per tahun.

Komparasi tingkat pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan juga menunjukkan terjadinya disparitas yang cukup tajam. Kabupaten Luwu Timur mencatat angka tertinggi, disusul Kota Makassar di posisi kedua, dan Pangkajene Kepulauan di urutan ketiga. Posisi ini tidak mengalami perubahan, sedikitnya dalam lima tahun terakhir. Kabupaten Jeneponto yang merupakan daerah dengan tingkat pendapatan per kapita terendah, hanya memiliki tingkat pendapatan per kapita hampir seperlima dari Kabupaten Luwu Timur.

**.Tabel 2.7**  
**Pendapatan Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota**  
**Sulawesi Selatan, 2009-2013**  
**(Ribu Rupiah) Tahun Dasar 2000**

No	Kab./Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kep. Selayar	7,534.19	9,271.72	11,242.91	13,721.71	15,845.70
2	Bulukumba	8,246.34	9,537.33	10,755.40	12,580.79	14,399.99
3	Bantaeng	8,800.92	10,366.61	12,218.44	14,131.70	16,302.66
4	Jeneponto	5,604.18	6,634.11	7,730.83	8,890.87	10,115.38
5	Takalar	7,123.20	7,622.69	8,696.18	9,997.93	11,158.49
6	Gowa	6,981.29	7,783.59	6,900.86	7,801.66	11,252.44
7	Sinjai	10,690.01	12,293.65	13,994.77	15,975.75	18,241.83
8	Maros	7,020.20	8,144.36	9,432.27	10,743.54	12,111.00
9	Pangkep	15,393.10	17,594.53	20,766.93	24,635.69	28,059.76
10	Barru	8,840.83	10,036.57	11,358.64	13,032.42	14,784.88
11	Bone	9,009.71	10,492.62	12,188.54	14,234.07	16,058.53
12	Soppeng	10,041.07	12,189.64	14,195.79	16,315.86	18,868.09
13	Wajo	12,241.17	14,046.56	17,111.12	19,858.94	22,891.63
14	Sidrap	11,660.74	12,381.99	15,350.41	17,777.95	19,916.03
15	Pinrang	12,798.91	15,068.41	17,528.82	20,267.80	22,866.65
16	Enrekang	8,470.19	10,099.50	11,926.13	13,841.23	16,887.48
17	Luwu	9,737.48	11,181.44	12,956.48	14,856.37	16,826.20
18	Tator	5,241.29	6,658.05	8,035.83	9,754.55	11,352.18
19	Luwu Utara	8,357.29	10,673.52	12,298.00	14,194.80	16,317.58
20	Luwu Timur	27,031.49	34,288.86	39,387.29	41,761.04	48,628.39
21	Toraja Utara	5,516.37	6,916.52	8,319.15	10,006.13	11,742.19
22	Makassar	24,580.85	27,648.08	32,118.18	37,019.70	41,761.04
23	Pare-Pare	12,774.57	13,899.44	15,881.68	17,997.47	20,502.69
24	Palopo	11,243.61	13,160.43	15,291.02	17,272.42	19,162.16
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>Thn Dsr 2000</b>	<b>12,632.53</b>	<b>14,668.10</b>	<b>16,929.03</b>	<b>19,465.50</b>	<b>22,150.81</b>
	<b>Thn Dsr 2010</b>		<b>21,374.67</b>	<b>24,432.96</b>	<b>27,872.92</b>	<b>31,009.53</b>

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

### 2.2.1.3 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Mengiringi proses pertumbuhan ekonomi yang impresif di Sulawesi Selatan, ketimpangan distribusi pendapatan justru semakin melebar. Dengan kata lain, derajat ketimpangan di Sulawesi Selatan – dengan menggunakan kriteria dari UNDP – bergeser dari kriteria “moderat” menuju kriteria “tinggi”. Angka 0,43 bukan hanya berada di atas angka Nasional (0,41), tetapi juga telah memposisikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah dengan tingkat ketimpangan tertinggi setelah Papua, Gorontalo dan Yogyakarta.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan melebarnya ketimpangan di sisi lain, sesungguhnya mengungkapkan banyak hal: (1) kemajuan ekonomi Sulawesi Selatan lebih bias ke kelompok masyarakat kelas atas (*top level*) ketimbang kelas bawah (*bottom level*); (2) orang-orang kaya memperoleh irisan “kue ekonomi” yang semakin besar relatif terhadap orang-orang miskin seiring dengan kemajuan ekonomi Sulawesi Selatan; (3) secara implisit, fakta ini menunjukkan bahwa desain kebijakan selama ini lebih diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ketimbang mewujudkan pemerataan; dan (4) jika fenomena ini terus berlanjut di masa depan, maka akan terjadi pemusatan penguasaan asset dan mesin ekonomi pada kelompok tertentu, dan tentu saja, memiliki

efek merusak dalam jangka panjang, terutama dilihat dari aspek stabilitas sosial, politik dan keamanan.

#### 2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) secara sistematis merupakan salah satu pencapaian penting Sulawesi Selatan dalam satu dasawarsa terakhir. Pencapaian ini menjadi tampak semakin istimewa karena angka TPT Sulawesi Selatan sudah berada di bawah Nasional sejak 2012. Penurunan angka TPT disebabkan oleh membaiknya daya serap tenaga kerja dalam perekonomian akibat bertumbuhnya semua sektor ekonomi, terutama sektor yang memiliki elastisitas penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi seperti sektor bangunan.

**Gambar 2.8**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka**  
**Sulawesi Selatan dan Nasional, 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	Orang	314,664	298,952	236,926	208,983	176.912
b.	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	3,536,920	3,571,317	3,612,424	3,560,891	3.468.192
c.	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	%	<b>8.90</b>	<b>8.37</b>	<b>6.56</b>	<b>5.87</b>	<b>5,10</b>

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

Pada tahun 2013, jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan mencapai 176.912 orang atau sekitar 5,10 persen dari total angkatan kerja (3.468.192 orang). Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai 314.664 orang atau 8,90 persen dari total angkatan kerja. Penurunan jumlah pengangguran tampaknya dikontribusi oleh laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yaitu rata-rata di atas 7,22 persen per tahun selama periode 2005-2013. Ini memberi pesan kuat bahwa untuk menurunkan angka pengangguran di Sulawesi Selatan, pertumbuhan ekonomi harus terus dijaga di kisaran 8,0 – 9,0 persen per tahun. Meskipun korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan angka pengangguran seringkali tidak sepenuhnya berlangsung linear, namun pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka pengangguran di Sulawesi Selatan tampak cukup kuat. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun terakhir misalnya, telah menyebabkan angka TPT menurun perlahan.

**Tabel 2.9**  
**Perbandingan Kondisi Ketenagakerjaan antar Kabupaten/Kota**  
**Sulawesi Selatan, 2013**

No	Kab/Kota	Angkatan Kerja	Bekerja	Menganggur	TPT
1	Kep. Selayar	52,947	50,501	2,446	4.62
2	Bulukumba	174,972	167,698	7,274	4.16
3	Bantaeng	86,291	80,732	5,559	6.44
4	Jeneponto	149,628	145,480	4,148	2.77
5	Takalar	113,084	109,992	3,092	2.73
6	Gowa	305,390	297,347	8,043	2.63
7	Sinjai	110,830	110,349	481	0.43

No	Kab/Kota	Angkatan Kerja	Bekerja	Menganggur	TPT
8	Maros	137,732	129,866	7,866	5.71
9	Pangkep	117,201	110,517	6,684	5.70
10	Barru	62,526	59,707	2,819	4.51
11	Bone	322,922	310,636	12,286	3.80
12	Soppeng	94,461	88,267	6,194	6.56
13	Wajo	166,140	159,958	6,182	3.72
14	Sidrap	104,006	96,076	7,930	7.62
15	Pinrang	126,453	123,973	2,480	1.96
16	Enrekang	88,157	86,740	1,417	1.61
17	Luwu	129,836	120,563	9,273	7.14
18	Tana Toraja	101,741	98,426	3,315	3.26
19	Luwu Utara	120,418	114,593	5,825	4.84
20	Luwu Timur	111,957	104,930	7,027	6.28
21	Toraja Utara	90,201	87,657	2,544	2.82
22	Makassar	583,384	527,765	55,619	9.53
23	Pare Pare	53,678	51,070	2,608	4.86
24	Palopo	64,237	58,437	5,800	9.03
	Sulawesi Selatan	3,468,192	3,291,280	176,912	5.10

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

Komparasi TPT antar kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memperlihatkan bahwa Kota Makassar adalah daerah dengan TPT tertinggi dan Kabupaten Sinjai dengan TPT terendah. Meskipun Kota Makassar mencatat pertumbuhan ekonomi paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan, namun pertumbuhan ekonomi tersebut belum sanggup menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Tingginya laju pertumbuhan angkatan kerja, yang boleh jadi akibat besarnya migrasi masuk penduduk ke Kota Makassar (tidak ada angka pasti mengenai hal ini, namun laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar yang cukup tinggi diduga akibat adanya migrasi masuk), menjadi salah satu penyebab tingginya TPT di Kota Makassar.

### 2.2.1.5 Laju Inflasi

Selama rentang waktu 2009-2013, laju inflasi tahunan di Sulawesi Selatan sangat fluktuatif dengan rentang yang cukup lebar, yaitu 2,78 s/d 6,24 persen. Dibandingkan dengan tingkat inflasi Nasional, tingkat inflasi di Sulawesi Selatan secara umum masih lebih rendah. Dalam 10 tahun terakhir, tingkat inflasi di Sulawesi Selatan rata-rata 6,48 persen per tahun (y.o.y), sedangkan secara Nasional rata-rata 7,59 persen per tahun. Namun dalam tiga tahun terakhir, tingkat inflasi baik di Sulawesi Selatan maupun Nasional, menunjukkan tren meningkat. Kecenderungan ini merupakan sesuatu yang negatif bagi Sulawesi Selatan karena berpotensi menurunkan daya beli masyarakat di Sulawesi Selatan.

**Gambar 2.10**

#### Tingkat Inflasi di Sulawesi Selatan dan Nasional, 2009-2013

No	Inflasi	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Nasional	%	2,78	6,96	3,79	4,3	8,38
2	Prov. Sul-Sel	%	3,39	6,56	2,86	4,41	6,24

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

Kelompok bahan makanan, kelompok sandang, dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau merupakan penyumbang terbesar terhadap laju inflasi di Sulawesi Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok bahan makanan meningkat rata-rata 9,87 persen per tahun, yang merupakan angka tertinggi dari tujuh kelompok pengeluaran pembentuk inflasi. Sedangkan kelompok sandang dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau masing-masing meningkat rata-rata 6,76 persen dan 6,67 persen per tahun selama periode 2008-2014. Ketiga kelompok pengeluaran ini meningkat rata-rata di atas tingkat inflasi umum. Sebaliknya, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olah raga menunjukkan perubahan tingkat harga yang paling kecil, yaitu hanya rata-rata 3,14 persen per tahun pada periode yang sama.

**Tabel 2.11**  
**Tingkat Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran**  
**Kota Makassar, 2009-2013**

No	Kelompok Pengeluaran	2009	2010	2011	2012	2013
1	Bahan Makanan	3.59	14.25	0.23	6.56	6.97
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6.23	5.90	4.40	5.03	4.47
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	3.55	4.14	3.67	3.35	6.06
4	Sandang	7.30	7.35	8.70	7.09	2.36
5	Kesehatan	2.85	3.06	7.66	2.84	3.71
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	6.91	1.80	2.89	3.42	1.39
7	Transpor dan Komunikasi dan Jasa Keuangan	-2.32	1.75	0.73	1.16	11.58
<b>Tingkat Inflasi</b>		<b>3.39</b>	<b>6.56</b>	<b>2.88</b>	<b>4.41</b>	<b>6.22</b>

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

Penting dicatat bahwa laju inflasi di Sulawesi Selatan dihitung berdasarkan komposit inflasi di empat kota di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar, Pare-Pare, Palopo, dan Watampone. Kota Makassar memiliki bobot inflasi terbesar terhadap Sulawesi Selatan, yaitu rata-rata 83,75 persen per tahun dalam lima tahun terakhir. Sedangkan kota yang terendah bobot inflasinya adalah Watampone, yaitu hanya rata-rata 5,08 persen per tahun. Selama periode 2009-2013, secara rata-rata, laju inflasi Sulawesi Selatan per tahun sebesar 4,69 persen. Dari angka tersebut, 3,93 persen bersumber dari Kota Makassar, 0,24 persen bersumber dari Kota Watampone, dan selebihnya bersumber dari Kota Parepare dan Kota Palopo.

**Tabel 2.12**  
**Sumbangan Inflasi Empat Kota di Sulawesi Selatan, 2009-2013 (%)**

No	Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Watampone	0.2	0.32	0.14	0.22	0.31
2	Makassar	2.74	5.51	2.42	3.71	5.25
3	Palopo	0.24	0.36	0.16	0.24	0.34
4	Parepare	0.2	0.36	0.16	0.24	0.33
	Sulawesi Selatan	3.38	6.56	2.88	4.41	6.23

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### 2.2.2.1 Kemiskinan

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan, terus mengalami penurunan secara konsisten selama rentang waktu 2009 s/d 2013. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin mencapai 963.600 orang atau 12,31 persen dari total penduduk. Dengan kata lain, setiap 100 penduduk di Sulawesi Selatan, sekitar 15 orang diantaranya terkategori miskin. Angka tersebut terus bergerak turun hingga menjadi 863.200 orang atau 10,32 persen pada tahun 2013. Membaiknya kinerja ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat inflasi, serta meningkatnya nilai tukar petani (NTP) telah berkontribusi besar terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 2013, angka kemiskinan, baik dari segi jumlah maupun persentase, meningkat. Pada 2013, jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 863.200 orang atau dibandingkan dengan tahun 2012. Meskipun peningkatannya relatif kecil, namun kondisi ini telah memberi pesan kuat bahwa penanganan kemiskinan di Sulawesi Selatan tidak sepenuhnya berjalan efektif.

**Gambar 2.13**

**Persentase Penduduk Miskin di Sulawesi Selatan dan Nasional, 2009-2013**

No	Penduduk Miskin	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	<b>Jumlah Kota+Desa</b>	Ribu Jw	<b>963,60</b>	<b>913,40</b>	<b>832,91</b>	<b>805,90</b>	<b>863,2</b>
	a. Perkotaan	Ribu Jw	124,50	119,20	137,02	133,60	160,53
	b. Perdesaan	Ribu Jw	839,10	794,20	695,89	672,30	696,91
2	<b>Persentase Kota+Desa</b>	%	<b>12,31</b>	<b>11,60</b>	<b>10,27</b>	<b>9,82</b>	<b>10,32</b>
	a. Perkotaan	%	4,94	4,70	4,48	4,44	5,23
	b. Perdesaan	%	15,81	14,88	13,63	12,93	13,31
3	<b>Jumlah Nasional Kota+Desa</b>	Ribu Jw	<b>32.530,00</b>	<b>31.023,40</b>	<b>30.018,93</b>	<b>29.132,40</b>	<b>28.169,22</b>
4	<b>persentase Nasional Kota+Desa</b>	%	<b>14,15</b>	<b>13,33</b>	<b>12,49</b>	<b>11,66</b>	<b>11,47</b>

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

Secara spasial, daerah yang menjadi konsentrasi penduduk miskin di Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Jeneponto, Bone, Toraja Utara, Luwu Utara, Luwu dan Maros. Hampir setengah dari seluruh penduduk miskin di Sulawesi Selatan bermukim di daerah ini. Keseluruhan daerah ini memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin yang relatif besar. Persentase penduduk miskin di daerah ini rata-rata berada di atas 14 persen dari total penduduk. Kota Makassar dan Kabupaten Gowa meskipun memiliki jumlah penduduk miskin yang tergolong besar, namun persentasenya relatif kecil. Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan mencatat persentase penduduk miskin paling tinggi, sedangkan Kota Makassar paling rendah. Dari segi jumlah penduduk miskin, Kabupaten Bone mencatat angka paling besar, sedangkan Kota Pare-Pare paling kecil.

Jika diamati lebih lanjut dalam perspektif wilayah (kota-des), tampak jelas bahwa wilayah perdesaan merupakan tempat bermukim sebagian besar penduduk miskin. Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin yang bermukim di perdesaan mencapai 81,20 persen dari total penduduk miskin. Artinya, setiap 10 orang penduduk miskin di Sulawesi Selatan, sekitar delapan orang bermukim di perdesaan. Persentase penduduk miskin di

perdesaan juga relatif cukup besar, yaitu mencapai 13,31 persen dari total penduduk perdesaan. Bandingkan dengan perkotaan yang hanya mencatat angka 5.23 persen. Ini memberi impresi, bahwa untuk mengurangi kemiskinan di Sulawesi Selatan, kebijakan pembangunan harus lebih diarahkan pada wilayah perdesaan dan sektor pertanian.

**Tabel 2.14**  
**Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2005-2013**

No	Kab./Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kep. Selayar	16.41	14.98	13.49	12.87	14.23
2	Bulukumba	10.50	9.02	8.12	7.82	8.04
3	Bantaeng	9.96	10.24	9.21	8.89	10.45
4	Jeneponto	20.58	19.09	17.16	16.58	16.52
5	Takalar	11.06	11.16	10.04	9.59	10.42
6	Gowa	10.93	9.49	8.55	8.05	8.73
7	Sinjai	11.37	10.68	9.63	9.28	10.32
8	Maros	16.35	14.62	13.14	12.55	12.94
9	Pangkep	19.35	19.26	17.36	16.62	17.75
10	Barro	11.43	10.69	9.59	9.28	10.32
11	Bone	15.19	14.08	12.67	12.25	11.92
12	Soppeng	9.95	10.42	9.36	9.12	9.43
13	Wajo	8.93	8.96	8.06	7.83	8.17
14	Sidrap	6.73	7.00	6.29	6.00	6.30
15	Pinrang	8.70	9.01	8.12	7.82	8.86
16	Enrekang	18.10	16.86	15.18	14.44	15.11
17	Luwu	16.96	15.44	13.93	13.33	15.10
18	Tator	16.14	14.61	13.22	12.72	13.81
19	Luwu Utara	16.40	16.25	14.64	14.02	15.52
20	Luwu Timur	8.91	9.18	8.29	7.71	8.38
21	Toraja Utara	*	19.08	17.06	16.27	16.53
22	Makassar	5.52	5.86	5.29	5.02	4.70
23	Pare-Pare	6.52	6.53	5.91	5.58	6.38
24	Palopo	11.85	11.28	10.22	9.46	9.57
	Sulawesi Selatan	11.93	11.40	10.27	9.82	10.32

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

#### 2.2.2.2 Pembangunan Manusia

Secara absolut, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan telah mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2009, IPM Sulawesi Selatan mencatat angka terus bergerak naik hingga mencapai 73,28 pada tahun 2013. Ini berarti, angka IPM Sulawesi Selatan meningkat sebesar 5 *point* selama periode 2009-2013, yang merupakan peningkatan tertinggi keempat secara Nasional, sesudah Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Peningkatan ini telah merapatkan angka IPM Sulawesi Selatan dengan angka Nasional. Pada tahun 2013, selisih IPM Sulawesi Selatan dengan Nasional sisa 0,53 *point*, padahal 10 tahun yang lalu masih bekisar 1,5 *point*.

Gambaran IPM menurut kabupaten/kota di Sulawesi Selatan juga menunjukkan fakta menarik. Seperti bisa diduga, daerah-daerah yang berciri perkotaan (kota) menunjukkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif lebih tinggi

ketimbang daerah-daerah yang berciri perdesaan (kabupaten). Dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Kota Makassar mencatat angka IPM paling tinggi, dan sebaliknya, Kabupaten Jeneponto memperlihatkan angka IPM paling rendah. Jika merujuk pada kriteria UNDP, maka hanya dua daerah yang masuk dalam kategori/status IPM tinggi (di atas 79), yaitu Kota Makassar dan Pare-pare. Sedangkan 22 kabupaten/kota lainnya tergolong IPM menengah atas ( $60 <$  sampai  $>79$ ).

Perhitungan tahun dasar pada IPM Mengalami perubahan, dan terdapat beberapa metodologi perhitungan yang mengalami perubahan, antara lain pada komponen angka melek huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.

**Tabel 2.15**  
**IPM Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2005-2013**

No	Kab./Kota	2009	2010	2011	2012	2013
1	Kep. Selayar	68.90	69.34	70.00	70.49	71.00
2	Bulukumba	70.60	71.19	71.77	72.33	73.21
3	Bantaeng	69.40	70.10	70.66	71.51	72.22
4	Jeneponto	64.50	64.92	65.27	65.56	66.22
5	Takalar	68.00	68.62	69.09	70.14	70.77
6	Gowa	70.00	70.67	71.29	71.60	72.12
7	Sinjai	69.20	69.53	70.16	70.64	71.45
8	Maros	70.60	71.12	71.74	72.54	73.48
9	Pangkep	69.10	69.43	69.89	70.65	71.26
10	Barru	70.30	70.86	71.19	71.70	72.16
11	Bone	69.60	70.17	70.77	71.47	72.08
12	Soppeng	71.30	71.89	72.23	72.57	73.31
13	Wajo	69.40	70.22	71.04	71.67	72.55
14	Sidrap	72.10	72.37	72.74	73.36	74.05
15	Pinrang	72.60	73.21	73.80	74.39	74.87
16	Enrekang	74.20	74.55	74.84	75.30	75.67
17	Luwu	73.60	73.98	74.42	74.68	75.33
18	Tator	71.40	71.87	72.29	72.90	73.76
19	Luwu Utara	73.70	74.32	74.69	74.97	75.36
20	Luwu Timur	72.30	72.79	73.11	73.56	73.96
21	Toraja Utara	68.90	69.56	70.15	71.04	71.69
22	Makassar	78.20	78.79	79.11	79.49	80.17
23	Pare-Pare	77.50	77.78	78.19	78.63	79.02
24	Palopo	76.10	76.55	76.85	77.28	77.70
Sulawesi Selatan	Thn Dsr 2000	<b>70.90</b>	<b>71.62</b>	<b>72.14</b>	<b>72.70</b>	<b>73.28</b>
	Thn Dsr 2010	-	<b>66,65</b>	<b>67,26</b>	<b>67,92</b>	<b>68,49</b>

Sumber: BPS Prov. SulSel Tahun 2015

### 2.2.3. Fokus Seni Budaya & Olahraga

#### 2.2.3.1. Jumlah Grup Kesenian & Prasarana Penyelenggaraan Seni & budaya & Jumlah Klub Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pencapaian pembangunan bidang olahraga di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2009 terdapat 1.311 klub olahraga dan pada tahun 2013 turun menjadi 1.126 klub olahraga, sementara jumlah sarana olahraga berupa gedung dan lapangan olahraga pada tahun 2009 berjumlah 2.494 buah, dan menjadi 2.480 buah pada tahun 2012.

**Tabel 2.16**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Uraian	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah grup kesenian.	102	177	203	290	291
2	Jumlah sarana gedung kesenian.	2	3	3	10	10
3	Jumlah klub olahraga .	1.311	1.251	1.394	1.532	1.126
4	Jumlah gedung/lap. olahraga.	2.494	2.357	2.305	2.480	2.480

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga & Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Pada tabel menunjukkan jumlah grup seni di Sulawesi Selatan sebanyak 290, jumlah sarana gedung kesenian sebanyak 10, jumlah gedung/lapangan olahraga sebanyak 2.480, dan jumlah klub olahraga sebanyak 1.126.

**Tabel 2.17**  
**Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah grup kesenian	Jumlah sarana gedung kesenian	Jumlah gedung/lap. olahraga	Jumlah Klub olahraga
1`	Kota Makassar	69	2	256	12
2	Kabupaten Gowa	21	1	8	103
3	Kab. Takalar	21	1	7	12
4	Kab. Jeneponto	12	1	32	12
5	Kab. Bantaeng	6	1	43	12
6	Kab. Bulukumba	24	-	4	12
7	Kab. Selayar	4	2	4	192
8	Kab. Sinjai	21	-	32	15
9	Kab. Bone	10	-	226	44
10	Kab. Soppeng	17	-	29	6
11	Kab. Maros	9	-	13	20
12	Kab. Pangkep	29	-	120	10
13	Kab. Barru	16	-	11	8
14	Kota. Pare – Pare	15	1	82	47
15	Kab. Pinrang	6	-	5	14
16	Kab. Sidrap	12	-	273	200
17	Kab. Wajo	10	-	571	38
18	Kota. Palopo	8	1	68	38
19	Kab. Luwu	-	-	58	15
20	Kab. Luwu Utara	5	-	72	91
21	Kab. Luwu Timur	-	-	9	199
22	Kab. Enrekang	5	-	386	13
23	Kab. Tana Toraja	7	-	103	5
24	Kab. Toraja Utara	5	-	68	8
	<b>JUMLAH</b>	<b>290</b>	<b>10</b>	<b>2,480</b>	<b>1.126</b>

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga & Dinas Kebudayaan & Pariwisata Prov. Sul-Sel Tahun 2014

## 2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Propinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

### 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Fokus layanan urusan wajib diarahkan pada urusan pendidikan, kesehatan, penataan ruang, perencanaan pembangunan dll.,

#### 2.3.1.1. Pendidikan

##### a. Pendidikan Dasar

##### a.a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs mengalami peningkatan setiap tahun selama periode 2009-2013. APS SD/MI (7-12 tahun) meningkat dari 96.53 pada tahun 2008 menjadi 98.25 pada tahun 2013, demikian pula APS SMP/MTs (13-15 tahun) meningkat dari 80.96 menjadi 87,43 pada tahun 2013.

**Tabel 2.18**

**Tabel Angka Partisipasi Sekolah  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 tahun	1.003.790	1.011.337	1.051.750	1.043.273	956.812
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	1.039.874	1.042.615	1.082.493	1.064.347	977.136
<b>1.3.</b>	<b>APS SD/MI</b>	<b>96.53</b>	<b>97.00</b>	<b>97.16</b>	<b>97.59</b>	<b>98.25</b>
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 tahun	417,355	429,653	408.650	403.358	357.228
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	490,508	477,108	481,910	471.929	457.105
<b>2.3.</b>	<b>APS SMP/MTs</b>	<b>80.96</b>	<b>82.63</b>	<b>84.04</b>	<b>87.69</b>	<b>87.43</b>

Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014  
- Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 berdasarkan kelompok umur 7-12 tahun (SD/MI) dan kelompok umur 13-15 tahun (SMP/MTs). Kabupaten Kota dengan APS SD/MI yang telah mencapai 100 adalah Kabupaten Barru dan Kota Palopo

Selanjutnya Kab./Kota dengan APS SD/MI terendah adalah Kabupaten Bulukumba (97,07) Luwu (97,09) Toraja (97,49) Bone (97,50) Makassar (97,71).

**Tabel 2.19**  
**Tabel Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**

No.	Kab./Kota	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah murid usia 7-12 tahun	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	APS	Jumlah murid usia 13-15 tahun	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	APS
1	Kep. Selayar	15,837	16,073	98.53	6,748	7,765	86.90
2	Bulukumba	47,315	48,741	97.07	20,024	23,015	87.00
3	Bantaeng	19,411	20,148	96.34	8,569	10,018	85.53
4	Jeneponto	45,498	46,608	97.62	17,979	21,121	85.12
5	Takalar	31,564	32,203	98.02	12,498	14,554	85.88
6	Gowa	78,004	79,290	98.38	31,016	34,665	89.47
7	Sinjai	26,657	27,118	98.30	13,703	16,025	85.51
8	Maros	40,917	41,512	98.57	15,119	17,214	87.83
9	Pangkep	40,093	40,703	98.50	12,899	14,204	90.81
10	Barru	20,637	20,637	100.00	10,260	11,298	90.81
11	Bone	89,978	92,286	97.50	33,585	39,888	84.20
12	Soppeng	24,188	24,412	99.08	10,345	11,565	89.45
13	Wajo	40,193	40,633	98.92	16,270	19,241	84.56
14	Sidrap	30,059	30,259	99.34	13,557	16,155	83.92
15	Pinrang	45,596	45,728	99.71	17,456	20,707	84.30
16	Enrekang	26,426	26,497	99.73	10,941	12,048	90.81
17	Luwu	43,814	45,126	97.09	19,596	22,552	86.89
18	Tana Toraja	30,997	31,795	97.49	11,797	13,328	88.51
19	Luwu utara	38,918	39,527	98.46	17,507	20,147	86.90
20	Luwu Timur	30,171	30,358	99.39	12,177	13,409	90.81
21	Toraja utara	30,748	31,153	98.70	11,903	13,188	90.25
22	Kota Makassar	133,199	136,326	97.71	61,834	69,690	88.73
23	Kota Pare-pare	13,923	14,098	98.76	6,770	7,496	90.32
24	Kota Palopo	15,905	15,905	100.00	7,094	7,812	90.81
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>960,047</b>	<b>977,136</b>	<b>98.25</b>	<b>399,647</b>	<b>457,105</b>	<b>87.43</b>

Sumber : - Statistik Indonesia Tahun 2014  
- Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### a.b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu. Selama periode 2009-2013 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2009 rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk pendidikan dasar adalah sebesar 151,34 kemudian pada tahun 2013 terjadi penurunan menjadi 139,69. Selanjutnya rasio ketersediaan sekolah pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2009 sebesar 242,35 dan pada tahun 2013 juga mengalami penurunan menjadi 183,16.

**Tabel 2.20**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Jenjang Pendidikan	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	6.871	6.933	6.957	6.974	6.995
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	1.039.874	1.042.615	1.086.493	1.064.347	977.136
1.3.	Rasio	151,34	150,38	156,17	152,62	139.69
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	2.024	2.103	2.126	2.137	2.182
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	490.508	506.322	486.256	471.929	399.647
2.3.	Rasio	242,35	240,76	228,72	220,84	183.16

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 20134  
 Statistik Sosek Ekonomi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**Tabel 2.21**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah & Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**

No.	Nama Kab/Kota	SD/MI		Rasio	SMP/MTs		Rasio
		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk 7-12 th		Jumlah Gedung Sekolah	Jumlah penduduk 13-15 th	
1	Selayar	153	16,073	105.05	60	6,748	112.46
2	Bulukumba	387	48,741	125.95	121	20,024	165.49
3	Bantaeng	154	20,148	130.83	55	8,569	155.79
4	Jeneponto	310	46,608	150.35	105	17,979	171.23
5	Takalar	246	32,203	130.91	63	12,498	198.39
6	Gowa	486	79,290	163.15	157	31,016	197.56
7	Sinjai	273	27,118	99.33	73	13,703	187.72
8	Bone	281	41,512	147.73	95	15,119	159.15
9	Maros	307	40,703	132.58	104	12,899	124.03
10	Pangkep	226	20,637	91.31	53	10,260	193.58
11	Barro	765	92,286	120.64	187	33,585	179.60
12	Soppeng	276	24,412	88.45	65	10,345	159.15
13	Wajo	437	40,633	92.98	99	16,270	164.34
14	Sidrap	245	30,259	123.51	70	13,557	193.67
15	Pinrang	346	45,728	132.16	73	17,456	239.12
16	Enrekang	236	26,497	112.28	65	10,941	168.32
17	Luwu	303	45,126	148.93	125	19,596	156.77
18	Tana Toraja	228	31,795	139.45	87	11,797	135.59
19	Luwu Utara	273	39,527	144.79	103	17,507	169.97
20	Luwu Timur	168	30,358	180.70	59	12,177	206.39
21	Toraja Utara	188	31,153	165.71	69	11,903	172.50
22	Makassar	531	136,326	256.73	234	61,834	264.25
23	Pare Pare	98	14,098	143.86	34	6,770	199.12
24	Palopo	78	15,905	203.91	26	7,094	272.85
	<b>Jumlah</b>	<b>6,995</b>	<b>977,136</b>	<b>139.69</b>	<b>2,182</b>	<b>399,647</b>	<b>183.16</b>

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014  
 Statistik Sosek Ekonomi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**a.c.Rasio Guru Terhadap Murid**

Rasio guru terhadap murid di Sulawesi Selatan pada tahun 2009-2013 sedikit mengalami perbaikan. Tahun 2009, rasio guru terhadap murid pada jenjang SD/MI sebesar 14,59 dan tahun 2013 turun menjadi 13,49, artinya setiap satu orang guru rata-rata menangani 14 murid. Pada tingkat SMP/MTs tahun 2009 sebesar 9,59 dan mengalami penambahan menjadi 12,10 pada tahun 2013.

Rasio guru murid pada kedua jenjang tersebut rata-rata masih dibawah 25, yang berarti bahwa proses belajar mengajar masih berlangsung secara optimal, sebab rasio maksimal/ideal adalah 25 murid untuk seorang guru.

**Tabel 2.22**  
**Rasio Guru Terhadap Murid**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Jenjang Pendidikan	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.1.	Jumlah Guru	76.069	68.288	65.024	79.821	72.174
1.2.	Jumlah Murid	1.117.812	1.131.992	1.109.215	1.096.840	973.286
1.3.	Rasio	14,59	16,58	17,06	13,74	13,49
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
2.1.	Jumlah Guru	39.122	30.678	46.209	63.577	29.456
2.2.	Jumlah Murid	375.115	379.977	423.756	466.974	356.409
2.3.	Rasio	9,59	12,39	9,17	7,35	12,10

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014  
- Dinas Pendidikan Prov. Sul- Sel Tahun 2014

Sedangkan rasio guru dengan murid menurut Kab./Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012 dapat digambarkan bahwa rasio guru dengan murid SD/MI pada Kab./Kota tertinggi adalah Kota Makassar 27,75 KabupatenJeneponto19,96; dan KabupatenLuwu Timur 17,01.

Sementara rasio guru dengan murid SMP/MTs tertinggi adalah Kabupaten sidrap 13,17 dan wajo 13,14. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses belajar mengajar pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs berlangsung optimal karena rasio guru dengan murid diatas rasio ideal yaitu 25.

**Tabel 2.23**  
**Rasio Guru Terhadap Murid Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No.	Nama Kab/Kota	SD/MI		Rasio	SMP/MTs		Rasio
		Jumlah Guru	Jumlah Murid		Jumlah Guru	Jumlah Murid	
1	Selayar	1,983	15,631	7.88	1,403	6,495	4.63
2	Bulukumba	4,497	53,978	12.00	1,842	21,893	11.89
3	Bantaeng	2,563	24,561	9.58	1,122	9,865	8.79
4	Jeneponto	2,892	57,721	19.96	2,428	25,128	10.35
5	Takalar	3,902	37,674	9.65	1,669	16,651	9.98
6	Gowa	4,667	78,532	16.83	5,021	33,783	6.73
7	Sinjai	3,070	32,085	10.45	2,551	13,014	5.10
8	Bone	8,421	101,913	12.10	7,250	40,271	5.55
9	Maros	3,275	44,048	13.45	1,947	18,303	9.40
10	Pangkep	3,262	49,926	15.31	2,768	19,310	6.98
11	Barru	2,642	22,956	8.69	1,871	9,918	5.30
12	Soppeng	2,841	29,011	10.21	1,379	12,371	8.97
13	Wajo	4,266	51,057	11.97	1,617	21,248	13.14
14	Sidrap	2,134	34,761	16.29	1,221	16,087	13.17
15	Pinrang	3,961	56,390	14.24	1,465	23,955	16.35
16	Enrekang	2,386	28,611	11.99	2,315	11,813	5.10
17	Luwu	3,716	46,398	12.49	3,511	19,240	5.48
18	Tana Toraja	3,739	49,196	13.16	3,868	19,092	4.94
19	Luwu Utara	3,435	30,736	8.95	3,646	14,173	3.89
20	Luwu Timur	2,044	34,766	17.01	1,834	15,142	8.26
21	Toraja Utara	2,114	33,719	15.95	1,388	14,768	10.64
22	Makassar	5,352	148,523	27.75	7,226	62,821	8.69
23	Pare Pare	1,510	16,930	11.21	2,058	6,716	3.26
24	Palopo	1,151	17,717	15.40	2,175	14,914	6.86
<b>Jumlah</b>		<b>79,821</b>	<b>1,096,841</b>	<b>13.74</b>	<b>63,577</b>	<b>466,974</b>	<b>7.35</b>

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2013  
 - Statistik Sosek Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2013

**Tabel 2.24**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  
 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025

**Rasio Murid Per Kelas Rata-Rata  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

NO.	Jenjang Pendidikan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>1</b>	<b>SD/MI</b>						
	Jumlah Guru	62,976	76,069	68,288	65,024	79,821	72,174
	Jumlah Kelas	36,254	38,541	40,230	40,270	40,890	43,209
	Rasio Guru/Kelas	1.74	1.97	1.70	1.61	1.95	1.67
	Jumlah Murid	1,145,592	1,117,812	1,131,992	1,109,215	1,096,840	973,286
	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	31.60	29.00	28.14	27.54	26.82	22.53
<b>2</b>	<b>SMP/MTs</b>						
	Jumlah Guru	31,743	39,122	30,678	46,209	63,577	29,456
	Jumlah Kelas	7,461	7,217	7,704	7,732	7,768	10,614
	Rasio Guru/Kelas	4.25	5.42	3.98	5.98	8.18	2.78
	Jumlah Murid	348,096	375,115	379,977	423,756	466,974	356,409
	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	46.66	51.98	49.32	54.81	60.12	33.58

Sumber : - BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2014  
- Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

## b. Pendidikan Menengah

### b.a. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga terjadi peningkatan pada kelompok umur 16-18 tahun (SMA/MA/SMK). Pada kelompok umur 16-18 tahun, APS meningkat dari 51,67 persen tahun 2009 menjadi 65,25 persen pada tahun 2013, dan masih jauh diatas APS Nasional yaitu 57,85 persen.

Tabel 2.25

**Tabel Angka Partisipasi Sekolah  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	<b>SMA/SMU/MA/SMK</b>					
1	Jumlah Murid Usia 16-19 th	254.455	259.306	272.589	272.589	304.841
2	Jumlah Penduduk Usia 16-19 th	465.805	471.487	477.239	457.735	467.190
3	<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18 th</b>	51,67	53,00	56,66	61,66	65,25

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### b.b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Perbandingan antara murid dan sekolah, mencerminkan besarnya daya tampung anak usia sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA dan SMK. Selama periode 2009-2013, daya tampung sekolah pada jenjang pendidikan SMA/MA/SMK cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk 446 orang, dan pada tahun 2013 rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sebesar 512 orang.

**Tabel 2.26**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>SMA/MA/SMK</b>						
1	Jumlah Sekolah	966	1003	1041	1148	912
2	Jumlah Penduduk Usia 16-18 th	431.142	476.085	431.766	457.735	467.190
3	Rasio Ketersediaan Sekolah	446	475	415	399	512

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014  
 - Statistik Sosek Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014

#### **b.c. Rasio Guru Terhadap Murid**

Rasio guru pada Tahun 2009, rasio guru terhadap murid pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 13 dan mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 11, artinya setiap satu orang guru rata-rata menangani atau mengawasi 14 murid.

**Tabel 2.27**  
**Rasio Guru Terhadap Murid**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No.	Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012	2013
<b>SMA/MA/SMK</b>						
1.	Jumlah Guru	20.926	21.574	22.064	22.168	25.855
2.	Jumlah Murid	271.087	321.957	285.684	319.253	294.429
3.	Rasio Guru Terhadap Murid	13	15	13	14	11

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014  
 - Statistik Sosek Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014

#### **b.d. Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata**

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMA/MA/SMK pada tahun 2008-2013 mengalami perbaikan. Tahun 2008, rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata pada jenjang SMA/MA/SMK sebesar 3.29 dan pada tahun 2013 turun menjadi 2.64 artinya setiap satu orang guru rata-rata menangani 3 kelas.

**Tabel 2.28**  
**Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-Rata**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

Jenjang Pendidikan	Tahun					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>SMA/MA/SMK</b>						
Jumlah Guru	20,182	20,926	21,574	22,064	22,168	25,855
Jumlah Kelas	6,128	5,768	7,521	8,060	8,388	9,134
Rasio Guru/Kelas	3,29	3,63	2,87	2,74	2,64	2,83
Jumlah Murid	228,556	271,087	321,957	285,684	319,253	295,429
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas	37,30	47,00	42,81	35,44	38,06	32,34

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014  
 - Statistik Sosek Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2014

**b.e. Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)****Tabel 2.29****Penduduk Yang Berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Indikator	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	persentase Penduduk Usia >15 thn melek huruf	86.50	87.00	87.75	88.07	88.39
2	Jumlah Penduduk Usia 15 >Thn	4.809.182	4.942.743	4.885.570	4.946.636	5.008.398
3	Jumlah penduduk melek huruf	4.159.942	4.300.186	4.284.645	4.353.040	4.422.415

Sumber : - Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2013

**c. Fasilitas Pendidikan****c.a. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik**

Pada Tabel 2.43 Menunjukkan bahwa laju peningkatan kondisi Rg. Kelas dalam kondisi baik dari tahun 2008 sebesar 54 persen menjadi 60 persen di tahun 2012 sangatlah rendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dari data menunjukkan bahwa kondisi bangunan baik untuk sekolah dasar masih minim, hal ini tentunya akan berpengaruh pada kualitas belajar murid.

**Tabel 2.30****Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jml Rg. Kelas SD Kondisi Baik	23.296	23.893	24.506	25.134	37.765
2.	Jml Rg. Kelas seluruh SD	41.675	41.675	41.675	41.675	43.209
3.	Sekolah SD Kondisi baik(%)	55,90	57,33	58,80	60,31	87,40

Sumber : - Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2014

**c.b. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang KelasBaik**

Sarana pendidikan memegang peranan penting, sehingga penyediaan sarana pendidikan diperlukan untuk tujuan pelaksanaan pendidikan seefektif mungkin. Kondisi Rg. Kelas baik untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2009-2013, persentase untuk jumlah sekolah kondisi baik pada tahun 2009 sebesar 68.24% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 84.80%.

**Tabel 2.31****Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jml Rg. Kelas SMP Kondisi Baik	26.001	28.413	29.717	31.567	9.001
2.	Jml Rg. Kelas seluruh SMP	38.103	39.726	40.337	40.837	10.614
3.	Sekolah SMP Kondisi baik (%)	68,24	71,52	73,67	77,30	84.80

Sumber : - Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2014

**c.c. Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik**

Kondisi bangunan baik untuk jenjang SMA/SMK pada tahun 2009-2013, persentase untuk jumlah sekolah kondisi baik pada tahun 2009 sebesar 64.00% dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 77.00%.

**Tabel 2.32**

**Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jml SMP Kondisi Baik	436	491	560	631	702
2.	Jml seluruh SMP	682	712	789	842	912
3.	Sekolah SMP Kondisi baik (%)	64,00	69,00	71,00	75,00	77,00

Sumber :Dinas PendidikanProv. Sul-Sel Tahun 2014

**d. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini diSulawesi Selatan pada taun 2009 -2013 khusus untuk APK, pada tahun 2009 mencapai sebesar 48.26% dan pada tahun 2013 sebesar 51,71%. mengalami kenaikan dari tahun ketahun seperti tabel berikut

**Tabel 2.33**

**Pendidikan Anak Usia Dini  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jml siswa pada jenjang tk	525.347	557.560	600.747	648.030	562.204
2.	Jml anak usia 4-6 thn	1.095.025	1.155.246	1.218.760	1.285.786	1.098.699
3.	PAUD (%)	47.98	48.26	49.29	50.40	51.71

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**e. Angka Putus Sekolah**

Angka putus sekolah pada usia sekolah 7-12 tahun (SD/MI), usia 13-15 tahun (SMP/MTs), dan usia 16-18tahun ( SMA/MA/SMK) di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013 mengalami penurunan. Angka putus sekolah usia 7-12 tahun (SD/MI) pada tahun 2009 sebesar 2.10 persen, dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1,12 persen. Demikian halnya angka putus sekolah usia 13-15 tahun (SMP/MTs)mengalami penurunan dari 1.55 persen pada tahun 2009 menjadi 1.05 persen pada tahun 2013. Kemudian angka putus sekolah usia 16-18 tahun (SMA/MA/SMK) mengalami penurunan dari 2.16 persen pada tahun 2009 menjadi 1.18 persen di tahun 2013. Walaupun angka putus sekolah mengalami penurunan.

**Tabel 2.34**  
**Angka Putus Sekolah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI	2.10	1.85	1.72	1.20	1,12
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MT's	1.55	1.45	1.38	1.09	1,05
3.	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	2.16	2.07	1.63	1.30	1,18

Sumber : - BPSProv. Sul-Sel Tahun 2014  
- Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### f. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2009-2013 yaitu angka kelulusan SD pada tahun 2009 sebesar 95,12 persen dan selama tiga tahun berturut-turut (2010-2012) capaian angka kelulusan 100 persen, sedangkan angka kelulusan SMP sebesar 94,22 persen pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 99,85 persent atau mendekati 100 persen pada tahun 2013. Sementara angka kelulusan SMA dan SMK pada tahun 2009 sebesar 95,00 persen dan 96,36 persen, kemudian meningkat menjadi 99,48 persen dan 99,91 persen pada tahun 2013.

**Tabel 2.35**  
**Angka Kelulusan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Angka Kelulusan SD	95,12	100	100	100	100
2.	Angka Kelulusan SMP	94,22	99,77	99,83	99,81	99,85
3.	Angka Kelulusan SMA	95,00	95,25	99,12	99,07	99,48
4.	Angka Kelulusan SMK	96,36	99,87	99,41	99,93	99,91

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### f.a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MT's Dan dari SMP/MT's keSMA/SMK/MA

Berdasarkan data menunjukkan angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke jenjang pendidikan SMP/MT's selama kurun waktu 2009-2013 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2013, angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MT's sebesar 98,52 persen, dari 93,00 persen pada tahun 2009.

Demikian pula angka melanjutkan (AM) dari SMP/MT's ke SMA/SMK/MA mengalami peningkatan sebesar 96,08 persen pada tahun 2013 dari 92,00 persen pada tahun 2009. Kondisi tersebut mewujudkan bahwa masih terdapat kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI sudah melanjutkan ke jenjang SMP/MT's sebesar 2,18 persen dan sebesar 4,97 persen yang tidak melanjutkan pendidikan dari SMP/MT's ke SMA/SMK/MA pada tahun 2012.

**Tabel 2.36**  
**Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Dan**  
**dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
1	Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	%	93,00	95,65	97,22	97,84	98,52
2	Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	92,00	93,95	94,83	95,03	96,08

Sumber : - Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014  
 - Statistik Sosek Ekonomi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### f.b. Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang qualified adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV pada tahun 2009-2013, pada tahun 2009 jumlah guru yang memenuhi sebanyak 45.344 guru kemudian naik pada tahun ketahun.

**Tabel 2.37**  
**Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jml guru ijazah s1-d4	65.864	63.667	75.624	86.769	54.706
2	Jml guru sd-sma	111.208	113.787	149.988	183.391	134.947
3	Guru yang memenuhi kualifikasi S1-Diploma 4	45.344	50.120	74.364	76.622	

Sumber : Dinas Pendidikan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### 2.3.1.2. Kesehatan

#### a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Keberadaan posyandu merupakan upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi, dan balita. Berdasarkan data Dinas Kesehatan tahun 2009-2013 mewujudkan jumlah posyandu dan jumlah balita di Provinsi Sulawesi Selatan relative meningkat .

Pada tahun 2009, jumlah posyandu sebanyak 8.944 unit, meningkat menjadi 9.414 unit pada tahun 2013. Sedangkan jumlah balita pada tahun 2009 sebanyak 860.066 jiwa, meningkat pada tahun 2013 sebanyak 656.298 jiwa. Rasio Posyandu persatuan Balita pada tahun 2009 adalah 78,41 dan 69,71 pada tahun 2013.

**Tabel 2.38**  
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah posyandu	unit	8.642	8.944	9.068	9.268	9.758	9.414
b.	Jumlah balita	Jiwa	677.611	860.066	691.408	698.609	733.764	<b>656.298</b>
c.	<b>Rasio Posyandu per 1000 balita</b>		<b>12,75</b>	<b>10,40</b>	<b>13,12</b>	<b>13,27</b>	<b>13,30</b>	<b>14,34</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**Tabel 2.39**  
**Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**

No	Kabupaten/kota	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Selayar	273	10.103	27,02
2	Bulukumba	539	32.758	16,45
3	Bantaeng	235	14.454	16,25
4	Jeneponto	463	27.732	17,28
5	Takalar	422	21.408	19,71
6	Gowa	686	51.229	13,39
7	Sinjai	327	18.946	17,26
8	Maros	394	25.451	16,11
9	Pangkep	376	24.788	15,17
10	Barru	244	13.526	18,04
11	Bone	956	59.065	16,19
12	Soppeng	316	19.149	16,50
13	Wajo	436	31.623	13,79
14	Sidrap	297	20.953	14,17
15	Pinrang	354	29.132	12,15
16	Enrekang	293	15.815	18,53
17	Luwu	419	27.234	15,38
18	Tator	277	19.937	13,89
19	Luwu Utara	350	26.720	13,09
20	Luwu Timur	264	19.697	13,40
21	Toraja Utara	277	19.011	14,57
22	Makassar	979	105.548	9,27
23	Parepare	119	9.862	12,06
24	Palopo	141	12.156	0,13
	<b>Jumlah</b>	<b>9.414</b>	<b>656.298</b>	<b>14,34</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk**

Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2009 adalah 0,22 dan pada tahun 2013 mengalami menjadi 0,23.

**Tabel 2.40**  
**Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah Puskesmas, Poliklinik, Pustu	Jml	1.751	1.807	1.823	2.134	<b>1.938</b>
b.	Jumlah Penduduk	Jiwa	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.306.848	<b>8.342.000</b>
c.	<b>Rasio puskesmas, poliklinik (klinik), pustu per 100.000 penduduk</b>		<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,21</b>	<b>0,23</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Ketersediaan pusat pelayanan kesehatan masyarakat pada tahun 2012 di Kabupaten/Kota yaitu berupa Puskesmas sebanyak 440 unit dan Puskesmas Pembantu sebanyak 1.257 unit. Rasio Puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 5,27, sedangkan rasio Puskesmas Pembantu adalah 15,07.

**Tabel 2.41**  
**Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
1	Selayar	127.200	14	11,01	5	3,93	68	53,46
2	Bulukumba	404.900	19	4,69	8	1,98	61	15,07
3	Bantaeng	181.000	12	6,63	0	0	22	12,15
4	Jeneponto	353.100	18	5,13	1	0,28	55	15,67
5	Takalar	280.600	14	4,99	0	0	50	17,82
6	Gowa	696.100	25	3,59	19	2,73	115	16,52
7	Sinjai	234.900	<b>16</b>	6,81	0	0	62	26,39
8	Maros	331.800	14	4,22	8	2,41	27	8,14
9	Pangkep	317.100	23	7,25	1	0,32	60	18,92
10	Barru	169.300	10	5,91	0	0	33	19,49
11	Bone	734.100	38	5,18	8	1,09	78	10,63
12	Soppeng	225.500	17	7,54	0	0	44	19,51
13	Wajo	390.600	23	5,89	0	0	54	13,82
14	Sidrap	283.300	14	4,94	0	0	42	14,83
15	Pinrang	361.300	15	4,15	2	0,55	52	14,39
16	Enrekang	196.400	13	6,62	0	0	69	35,13
17	Luwu	343.800	21	6,11	6	1,75	108	31,41
18	Tator	226.200	<b>21</b>	9,28	0	0	31	13,70
19	Luwu Utara	297.300	13	4,37	0	0	62	20,85
20	Luwu Timur	263.000	15	5,70	0	0	60	22,81

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Poliklinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7=6/3)	(8)	(9=8/3)
21	Toraja Utara	222.400	25	11,24	0	0	27	12,14
22	Makassar	1.408.100	43	3,05	178	12,64	37	2,63
23	Parepare	135.200	6	4,44	1	0,74	19	14,05
24	Palopo	160.800	11	6,84	4	2,49	21	13,06
	<b>Jumlah</b>	<b>8.342.000</b>	<b>440</b>	<b>5,27</b>	<b>241</b>	<b>2,89</b>	<b>1.257</b>	<b>15,07</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Salah satu upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan sarana prasarana kesehatan yaitu Rumah Sakit. Pada tahun 2008, jumlah RS 89 unit dan pada tahun 2013 jumlah rumah sakit menjadi 91 unit. Sedangkan rasio rumah sakit persatuan penduduk selama lima tahun terakhir (2008-2013) mengalami fluktuasi yang rendah.

Tabel 2.42

**Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Uraian	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Jumlah Rumah Sakit Kementerian Kesehatan (Pusat/Vertikal)	2	2	2	2	2	3
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	6	6	6	6	6	6
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI	7	7	7	7	7	7
4.	Jumlah Rumah Sakit Pemprov dan Pemkab/Kota	29	30	31	32	32	32
5.	Jumlah Rumah Sakit Swasta	45	45	45	46	49	43
6.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	89	90	91	93	95	91
7.	Jumlah Penduduk	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.306.848	8.342.000
8.	Rasio	<b>1,14</b>	<b>1,14</b>	<b>1,13</b>	<b>1,15</b>	<b>1,14</b>	<b>1,09</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.43

**Jumlah Rumah Sakit  
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2011**

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Thn 2011	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
1	Selayar	127,200	0	0	0	0	0	0	1	0,79	0	0	1	0,79
2	Bulukumba	404,900	0	0	0	0	0	0	1	0,25	0	0	1	0,25

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Thn 2011	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
			Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio	Jmlh	Rasio
3	Bantaeng	181,000	0	0	0	0	0	0	1	0,55	0	0	1	0,55
4	Jeneponto	351,100	0	0	0	0	0	0	1	0,28	0	0	1	0,28
5	Takalar	280,600	0	0	0	0	0	0	1	0,36	0	0	1	0,36
6	Gowa	696,100	0	0	0	0	0	0	1	0,14	1	0,14	2	0,29
7	Sinjai	234,900	0	0	0	0	0	0	1	0,43	0	0	1	0,43
8	Maros	331,800	0	0	0	0	1	0,30	1	0,30	0	0	2	0,60
9	Pangkep	317,100	0	0	0	0	0	0	1	0,32	0	0	1	0,32
10	Barru	169,300	0	0	0	0	0	0	1	0,59	0	0	1	0,59
11	Bone	734,100	0	0	0	0	1	0,14	1	0,14	0	0	2	0,27
12	Soppeng	225,500	0	0	0	0	0	0	1	0,44	0	0	1	0,44
13	Wajo	390,600	0	0	0	0	0	0	2	0,51	1	0,26	3	0,77
14	Sidrap	283,300	0	0	0	0	0	0	2	0,71	1	0,35	3	1,06
15	Pinrang	361,300	0	0	0	0	0	0	1	0,28	2	0,55	3	0,83
16	Enrekang	196,400	0	0	0	0	0	0	2	1,02	0	0	2	1,02
17	Luwu	343,800	0	0	0	0	0	0	1	0,29	0	0	1	0,29
18	Tator	226,200	0	0	0	0	0	0	1	0,44	1	0,44	2	0,88
19	Luwu Utara	297,300	0	0	0	0	0	0	1	0,34	1	0,34	2	0,67
20	Luwu Timur	263,000	0	0	0	0	0	0	1	0,38	1	0,38	2	0,76
21	Toraja Utara	222,400	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,45	1	0,45
22	Makassar	1,408,100	4	0,28	0	0	3	0,21	7	0,50	31	2,20	45	3,20
23	Parepare	135,200	0	0	0	0	1	0,74	1	0,74	3	2,22	5	3,70
24	Palopo	160,800	0	0	0	0	1	0,62	1	0,62	3	1,87	5	3,11
	<b>Jumlah</b>	<b>8,342,000</b>	<b>4</b>	<b>0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0,08</b>	<b>32</b>	<b>0,38</b>	<b>46</b>	<b>0,55</b>	<b>89</b>	<b>1,07</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2012

#### d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter persatuan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2008 jumlah dokter 942 orang dengan rasio 0,12 dan pada tahun 2012 jumlah dokter meningkat menjadi 1.005 orang dokter dengan rasio 0,12. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah dokter dari tahun 2008-2012 tidak dibarengi dengan besarnya penduduk yang dilayani.

Tabel 2.44

#### Rasio Dokter Umum Per Satuan Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah dokter Umum	Jiwa	942	1.215	1.212	1.005	1.005	1.186
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.306.848	8.342.000
c.	<b>Rasio dokter persatuan penduduk</b>		<b>12,06</b>	<b>15,36</b>	<b>15,08</b>	<b>12,38</b>	<b>12,09</b>	<b>14,21</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**Tabel 2.45**  
**Jumlah Dokter Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Selayar	127.200	52	40,88
2	Bulukumba	404.900	61	15,07
3	Bantaeng	181.000	44	24,31
4	Jeneponto	353.100	54	15,38
5	Takalar	280.600	78	27,80
6	Gowa	696.100	117	16,81
7	Sinjai	234.900	45	19,16
8	Maros	331.800	94	28,33
9	Pangkep	317.100	89	28,07
10	Barru	169.300	53	31,31
11	Bone	734.100	59	8,04
12	Soppeng	225.500	41	18,18
13	Wajo	390.600	23	5,89
14	Sidrap	283.300	73	25,77
15	Pinrang	361.300	66	18,27
16	Enrekang	196.400	55	28,00
17	Luwu	343.800	47	13,67
18	Tator	226.200	52	22,99
19	Luwu Utara	297.300	51	17,15
20	Luwu Timur	263.000	66	25,10
21	Toraja Utara	222.400	32	14,39
22	Makassar	1.408.100	703	49,93
23	Parepare	135.200	78	57,69
24	Palopo	160.800	64	39,80
	Jumlah	<b>8.342.000</b>	2.097	25,13

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### e. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis di Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2008-2012 mengalami penurunan yaitu dari 2.024 orang pada tahun 2008 menjadi 1.592 orang pada tahun 2012. Penurunan jumlah tenaga medis tersebut mengakibatkan rasio tenaga medis persatuan penduduk juga mengalami penurunan dari 0,26 persen pada tahun 2008 menjadi 0,19 persen pada tahun 2012.

**Tabel 2.46**  
**Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah tenaga medis	Jiwa	2.024	2.675	2.736	1.592	1.592	2.097
b.	Jumlah penduduk	Jiwa	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.306.848	8.342.000
c.	<b>Rasio tenaga medis per 100.000Penduduk</b>		<b>25,93</b>	<b>33,82</b>	<b>34,05</b>	<b>19,61</b>	<b>19,16</b>	<b>25,13</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### f. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Data cakupan komplikasi kebidanan dari Dinas Kesehatan tahun 2008-2012, menggambarkan jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive pada tahun 2008 sebanyak 20.062 dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 52,34 persen, sementara pada tahun 2012, jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive 19.177 dengan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 57,73 persen. Kondisi tersebut menunjukkan komplikasi kebidanan yang tidak ditangani dan akan menyebabkan resiko kematian ibu yang akan berdampak pada angka kematian ibu masih cukup besar.

**Tabel 2.47**  
**Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitive di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jml	20.062	18.104	17.794	18.284	19.177	<b>21.860</b>
b.	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Jml	38.330	36.061	36.285	34.760	33.447	<b>33.634</b>
c.	<b>Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani</b>	%	<b>52,34</b>	<b>50,27</b>	<b>49,04</b>	<b>52,60</b>	<b>57,73</b>	<b>64,99</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### g. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 80,03 persen pada tahun 2008 dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 145.796 ibu bersalin (jiwa). Sedangkan pada tahun 2012, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yaitu 94,00 persen dengan jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 149.572 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di Sulawesi Selatan sudah ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

**Tabel 2.48**  
**Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan**  
**Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	Jml	145.796	144.185	149.353	151.614	149.572	148.822
b.	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	Jml	182.180	180.081	173.744	164.488	159.665	160.467
c.	<b>Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan</b>	%	<b>80,03</b>	<b>83,88</b>	<b>85,96</b>	<b>92,17</b>	<b>94,00</b>	<b>92,74</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### **h. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Data menunjukkan cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008-2012. Pada tahun 2008, jumlah desa/kelurahan dari 2.898 desa/kelurahan dan cakupan desa/kelurahan UCI yaitu 81,78 persen. Sementara pada tahun 2012, jumlah desa/kelurahan UCI yaitu 2598 desa/kelurahan dari 2.984 desa/kelurahan dengan cakupan desa/kelurahan UCI yaitu 87,10 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih cukup besarnya desa/kelurahan yang belum mencapai UCI.

**Tabel 2.49**  
**Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah desa/kelurahan UCI	jml	2.370	2.459	2.841	2.507	2.598	2.720
b.	Jumlah seluruh desa/kelurahan	jml	2.898	2.941	2.947	2.960	2.984	3.107
c.	<b>Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)</b>	%	<b>81,78</b>	<b>83,60</b>	<b>84,20</b>	<b>84,70</b>	<b>87,10</b>	<b>90,16</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### **i. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**

Cakupan balita gizi buruk di provinsi Sulawesi Selatan yang mendapat perawatan sudah mencapai angka 100 persen sejak tahun 2009 hingga tahun 2012. Hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis melalui sarana pelayanan kesehatan.

**Tabel 2.50**  
**Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	jml	89	52	144	791	498	299

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
b.	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	jml	95	52	144	791	498	299
c.	<b>Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan</b>	%	<b>93,11</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### j. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebanyak 17.138, sementara jumlah yang ditemukan dan diobati selama 1 bulan sebanyak 6.170 penderita. Kemudian pada tahun 2012 jumlah perkiraan penderita baru TBC TBA (+) berjumlah 16.921 penderita, sedangkan yang ditemukan dan diobati selama 1 bulan berjumlah 9.439 penderita.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) meningkat dari 36 persen pada tahun 2008 menjadi 55,78 persen di tahun 2012. Peningkatan tersebut masih jauh dari target angka keberhasilan penyembuhan TBC (Success Rate/SR).

**Tabel 2.51**

**Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 bulan	Jml	6.170	6.428	7.783	9.162	9.439	<b>8.929</b>
b.	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	Jml	17.138	16.070	16.214	16.620	16.921	<b>12.208</b>
	<b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA</b>	%	<b>36,00</b>	<b>40,00</b>	<b>48,00</b>	<b>55,13</b>	<b>55,78</b>	<b>73,14%</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### k. Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan pada tahun 2008 yaitu 3.546 kasus, yang ditangani sesuai SOP berjumlah 1.920 kasus. Pada tahun 2012, jumlah penderita penyakit DBD yang ditemukan dan yang ditangani sesuai SOP sebanyak 2.333 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mencapai 100 persen, resiko penularan di masyarakat seperti angka bebas jentik 100 persen.

**Tabel 2.52**  
**Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun	jml	1.920	1.289	868	1.133	2.333	<b>3.894</b>
b.	Jumlah penderita DBD yang ditemukan disatu wikayah dalam kurun waktu yang sama	jml	3.546	3.411	4.083	1.876	2.333	<b>4.261</b>
c.	<b>Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD</b>	%	<b>54,37</b>	<b>37,80</b>	<b>21,26</b>	<b>60,39</b>	<b>100,00</b>	<b>91,39%</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### 1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami penurunan dari 96,41 persen pada tahun 2008 menjadi 44,80 persen di tahun 2012. Hal ini diakibatkan jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata I berkurang dari 2.361.838 pada tahun 2008 menjadi 1.097.539 pada tahun 2012.

**Tabel 2.53**  
**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan Strata I	Jml	2.361.838	1.283.672	2.368.881	1.565.506	1.097.539	<b>3.252.066</b>
b.	Jumlah seluruh miskin di Kabupaten/Kota	Jml	2.449.737	2.449.737	2.449.737	2.449.737	2.449.737	<b>2.944.969</b>
	<b>Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin</b>	%	<b>96,41</b>	<b>52,40</b>	<b>96,69</b>	<b>63,91</b>	<b>44,80</b>	<b>110,43%</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### m. Cakupan Kunjungan Bayi

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standard pada tahun 2008-2012 di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada tahun 2008 jumlah kunjungan sebanyak 87,971 dan pada tahun 2012 meningkat sebesar 135.418 kunjungan. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2008 adalah 69,75 persen dan pada tahun 2012 cakupan kunjungan bayi meningkat menjadi 99,46 persen.

**Tabel 2.54**  
**Cakupan Kunjungan Bayi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	jml	87.971	92.653	128.003	145.381	135.418	145.633
b.	Seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	jml	126.130	142.573	128.222	147.059	164.013	159.135
	<b>Cakupan kunjungan bayi</b>	<b>%</b>	<b>69,75</b>	<b>64,99</b>	<b>99,83</b>	<b>98,86</b>	<b>99,46</b>	<b>91,52</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Beberapa kemajuan telah berhasil dicapai dalam pembangunan transportasi jalan, yaitu dengan meningkatnya kinerja transportasi jalan yang ditunjukkan dengan bertambahnya kapasitas jaringan jalan dari 24.307 Km pada tahun 2008 menjadi 32.486 Km pada Tahun 2012 dengan kondisi mantap mencapai 66,24% (17.332 Km), rusak ringan 4.236 Km (12,58%) dan rusak berat 6.167 Km (21,17%).

**Tabel 2.55**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun									
			2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%
1.	Kondisi Baik	Km	10.087,05	41,50	10.617,90	43,68	17.421	53,42	17.241	53,16	17.332	53,16
2.	Kondisi Sedang	Km	7.528,12	30,97	6.253,72	25,73	4.243	13,01	4.243	13,08	4.749	13,91
3.	Kondisi Rusak	Km	4.231,42	17,41	4.701,58	19,34	4.081	12,51	4.081	12,58	4.236	12,59
4.	Kondisi RusaK Berat	Km	2.460,54	10,12	2.733,93	11,25	6.867	21,06	6.867	21,17	6.167	21,17
5.	<b>Jalan secara keseluruhan (Nasional, Provinsi dan Kab/Kota)</b>	<b>Km</b>	<b>24.307,13</b>		<b>24.307,13</b>		<b>32.612</b>		<b>32.432</b>		<b>32.486</b>	

Sumber : Dinas Bina MargaProv. Sul-Sel Tahun 2013

**Tabel 2.56**  
**Proporsi Panjang Jaringan Jalan Provinsi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011**

NO	Kabupaten/kota	Kondisi Baik			Kondisi Sedang			Kondisi Rusak Ringan			Kondisi Rusak Berat			Jalan secara keseluruhan		
		Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota
1	Kepulauan Selayar	63,670	-	409,61	7,122	-	76,55	0,400	-	104,25	35,508	-	98,60	106,700	-	689,00
2	Bulukumba	93,029	31,35	498,67	7,117	28,99	273,02	0,785	6,24	294,65	0,796	1,30	276,66	101,727	67,88	1.343,00
3	Bantaeng	34,610	5,18	201,58	-	10,03	189,13	-	3,55	61,15	-	-	104,15	34,610	18,76	556,00
4	Jeneponto	32,140	11,10	628,08	0,404	27,45	392,95	-	2,27	235,50	-	0,03	190,47	32,544	40,85	1.468,00
5	Takalar	45,762	9,65	382,50	5,900	17,05	326,50	0,400	3,11	114,50	5,221	0,78	32,50	57,283	30,60	789,5
6	Gowa	21,806	87,69	902,81	0,700	103,86	82,00	0,100	13,48	280,39	0,300	3,15	1.203,79	22,906	208,18	2.469,00
7	Sinjai	41,049	37,75	310,48	3,581	26,57	221,98	-	4,58	337,36	2,445	2,70	448,18	47,075	71,60	1.318,00
8	Maros	85,279	-	536,50	1,900	-	104,50	0,400	-	268,50	0,300	-	482,50	87,879	-	1.392,00
9	Pangkep	40,818	-	571,73	0,213	-	125,08	0,100	-	55,09	-	-	38,11	41,131	-	790,00
10	Barru	21,102	14,64	493,50	-	14,05	97,50	-	4,69	64,50	-	-	195,50	21,102	33,38	851,00
11	Bone	160,384	52,31	871,32	22,600	78,04	263,70	5,400	15,19	524,38	7,703	22,23	844,58	196,087	167,76	2.504,00
12	Soppeng		61,91	444,06		38,89	68,95		12,22	139,22		7,77	166,79	-	120,79	819,00
13	Wajo	89,529	31,10	773,75	13,391	37,10	136,75	2,300	6,69	282,75	5,300	-	186,75	110,520	74,90	1.380,01
14	Sidrap	70,125	28,90	1.688,25	3,100	8,92	81,25	0,600	2,52	(347,75)	-	-	(26,75)	73,825	40,34	1.395,00
15	Pinrang	70,315	22,29	135,38		25,96	243,06		5,43	304,54		-	57,02	70,315	53,67	740,00
16	Enrekang	90,424	14,80	454,33	2,600	11,83	287,92	0,300	2,55	190,53	-	3,36	100,23	93,324	32,55	1.033,00
17	Luwu		-	500,08		-	387,54		-	453,52		-	112,86	-	-	1.454,00

Bab II Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

NO	Kabupaten/kota	Kondisi Baik			Kondisi Sedang			Kondisi Rusak Ringan			Kondisi Rusak Berat			Jalan secara keseluruhan		
		Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota	Nasional	Provinsi	Kab/Kota
18	Tana Toraja	107,698	15,50	(29,25)	10,844	8,50	150,05	1,100	-	387,35	-	2,98	915,85	119,642	26,98	1.424,00
19	Luwu Utara	69,978	27,20	2.045,75	0,700	70,30	378,75	-	8,00	127,75	-	41,00	7,75	70,678	146,50	2.560,01
20	Luwu Timur	171,546	-	2.366,00	1,447	-	-	-	-	-	-	-	-	172,993	-	2.366,00
21	Toraja Utara		-			-			-			-		-	-	-
22	Makassar	35,128	9,68	713,75	0,600	1,86	135,75	-	0,68	158,75	0,100	0,55	584,75	35,828	12,77	1.693,00
23	Pare Pare	80,321	-	191,00	0,589	-	33,00	-	-	87,00	-	-	-	80,910	-	311,00
24	Palopo	133,350		223,25	11,127		90,25	0,700		9,25	0,600		3,25	145,777	-	325,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.558,063</b>	<b>461,06</b>	<b>15.313,13</b>	<b>93,935</b>	<b>509,40</b>	<b>4.146,18</b>	<b>12,585</b>	<b>91,21</b>	<b>4.133,17</b>	<b>58,273</b>	<b>85,84</b>	<b>6.023,54</b>	<b>1.722,856</b>	<b>1.147,51</b>	<b>29.616,02</b>

Sumber Data : Dinas Bina Marga Prov. Sul-Sel Tahun 2013

\*SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.55 Tahun 2000

\*\*SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 4650/XII/2008

\*\*\*SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 4261/XII/2010

Sementara kondisi jalan menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2011, masih banyak dalam kondisi rusak berat dan rusak sedang/ ringan. Jaringan jalan terbanyak yang kondisinya rusak berat terdapat di Kabupaten Bulukumba sepanjang 471 km, Kabupaten Maros sepanjang 504 km, Kabupaten Sidrap sepanjang 513 km, Kota Makassar sepanjang 597 km, Kabupaten Tana Toraja sepanjang 940 km, Kabupaten Bone sepanjang 978 km, dan Kabupaten Gowa sepanjang 1.313 km. Kemudian Jaringan jalan yang kondisinya lebih banyak yang rusak sedang dan ringan terdapat di Kabupaten Luwu sepanjang 843 km, Kabupaten Bone sepanjang 699 km, Kabupaten Luwu Utara sepanjang 635 km, Kabupaten Sinjai sepanjang 596 km, kabupaten Pinrang sepanjang 561 km, Kabupaten Wajo sepanjang 526 km, Kabupaten Sidrap sepanjang 490 km, Kabupaten Enrekang sepanjang 465 km, Kabupaten Takalar sepanjang 456 km, Kabupaten Maros sepanjang 416 km, dan Kabupaten Tana Toraja sepanjang 414 km.

Tabel 2.57

**Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011**

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan				Jumlah Total
		Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Kep. Selayar	506	80	107	101	794
2	Bulukumba	756	216	46	471	1.489
3	Bantaeng	376	65	63	107	611
4	Jeneponto	1.495	28	18	-	1.541
5	Takalar	390	334	122	40	886
6	Gowa	1.010	97	260	1.313	2.680
7	Sinjai	701	399	197	138	1.435
8	Maros	558	126	290	504	1.478
9	Pangkep	660	104	58	52	874
10	Barru	518	122	89	220	949
11	Bone	1.201	219	480	978	2.878
12	Soppeng	382	142	174	242	940
13	Wajo	827	190	336	240	1.593
14	Sidrap	497	294	196	513	1.500
15	Pinrang	239	256	305	61	861
16	Enrekang	593	325	140	91	1.149
17	Luwu	547	373	470	182	1.572
18	Tana Toraja	215	151	263	940	1.569
19	Luwu Utara	2.110	443	192	72	2.817
20	Luwu Timur	2.512	-	-	-	2.512
21	Toraja Utara	-	-	-	-	-
22	Makassar	726	148	171	597	1.642
23	Pare-Pare	197	39	93	-	329
24	Palopo	225	92	11	5	333
	<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>17.241</b>	<b>4.243</b>	<b>4.081</b>	<b>6.867</b>	<b>32.432</b>

Sumber : Dinas Bina MargaProv. Sul-Sel Tahun 2012

### b. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau ber HPL/HGB dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2008 sebesar 1,73 dan pada tahun 2012 menjadi 17,73. Peningkatan rasio ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah yang meningkatkan status ruang terbuka hijau.

Tabel 2.58

**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGB  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	3,627	3,990	8,690	8,690	14,944.57
2	Luas Wilayah ber HPL/HGB	2,092	1,294	1,483	593	843.00
3	Luas Wilayah	45,707	45,707	45,707	45,707	45,707.44
4	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1/2)	1.73	3.08	5.86	14.65	17.73

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.59

**Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Luas Wilayah ber HPL/HGB (Km <sup>2</sup> )	Luas Ruang Terbuka Hijau (Km <sup>2</sup> )	Rasio RTH
1	Kepulauan Selayar	903.50		100.94	100.94
2	Bulukumba	1,154.67	116.00	113.35	0.98
3	Bantaeng	395.83		27.21	27.21
4	Jeneponto	903.40		90.98	90.98
5	Takalar	566.51	32.00	35.75	1.12
6	Gowa	1,883.33	176.00	266.35	1.51
7	Sinjai	819.96		117.20	117.20
8	Maros	1,619.12		564.50	564.50
9	Pangkep	1,112.30		511.16	511.16
10	Barru	1,174.72		512.26	512.26
11	Bone	4,559.00		438.47	438.47
12	Soppeng	1,359.50		358.59	358.59
13	Wajo	2,506.12		76.80	76.80
14	Sidrap	1,883.25		453.22	453.22
15	Pinrang	1,961.77	9.00	451.69	50.19
16	Enrekang	1,786.01		722.25	722.25
17	Luwu	3,000.25		853.72	853.72
18	Tana Toraja	2,054.30	124.00	928.26	7.49
19	Luwu Utara	7,502.58		3,622.15	3,622.15
20	Luwu Timur	6,944.90		4,073.70	4,073.70
21	Toraja Utara	1,151.47		502.77	502.77
22	Makassar	175.77	385.00	10.55	0.03
23	Pare Pare	99.33		20.04	20.04
24	Palopo	247.50		92.66	92.66

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

### c. Rasio Jaringan Irigasi

Dalam upaya memenuhi kebutuhan irigasi untuk mendukung pencapaian target “overstock pangan” dan mendukung ketahanan pangan nasional dilakukan peningkatan luas layanan jaringan irigasi dan optimalisasi fungsi irigasi pada lahan seluas 476.141 hektar. Kinerja jaringan irigasi di Provinsi Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya peningkatan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan rasio jaringan irigasi pada tahun 2008 sebesar 9,5 meningkat menjadi 13,23 pada akhir tahun 2014 dengan indeks efisiensi dan efektivitas pengelolaan jaringan irigasi sebesar 0,75. Sehingga dengan adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas peningkatan pengelolaan jaringan irigasi melalui penambahan luasan lahan budidaya yang terairi, maka pencapaian target Sulawesi Selatan sebagai pendukung ketahanan pangan nasional dapat terwujud.

**Tabel 2.60**

**Rasio Jaringan Irigasi  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (m)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jaringan Irigasi	329.291	329.291	329.291	1.164.918	1.164.918
2.	Jaringan Sekunder	1.194.074	1.194.074	1.194.074	2.257.440	2.257.440
3.	Jaringan Tersier	2.073.309	2.073.309	2.073.309	2.695.253	2.695.253
4.	Luas Lahan Budidaya	423.173	423.173	423.173	474.938	474.938
5.	<b>Rasio</b>	9,50	9,50	8,50	13,88	13,88

Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2013

**Tabel 2.61**

**Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi (M)			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Terairi /Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	2	3	4	5	(6 = 3 + 4 + 5)	7	(8 = 6 / 7)
1.	Kepulauan Selayar	-	-	-	0	3,880	0
2.	Bulukumba	19,185	80,297	1,754	101,236	28,252	3,58
3.	Bantaeng	54,678	4,233	84,393	143,304	13,672	10,48
4.	Jenepono	10,800	70,590	133,358	214,748	28,537	7,53
5.	Takalar	20,479	34,784	48,249	103,512	18,243	5,67
6.	Gowa	59,157	242,341	201,351	502,849	30,462	16,51
7.	Sinjai	19,460	22,403	16,950	58,813	15,369	3,83
8.	Maros	28,480	69,145	205,538	303,163	21,494	14,10
9.	Pangkep	15,518	120,418	276,290	412,226	16,186	25,47
10.	Barru	8,262	25,700	29,474	63,436	6,638	9,56
11.	Bone	91,322	186,163	314,548	592,033	50,970	11,62
12.	Soppeng	40,705	91,087	211,230	343,022	24,726	13,87

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi (M)			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Terairi /Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
13.	Wajo	28,173	115,919	105,450	249,542	26,915	9,27
14.	Sidrap	153,958	527,243	219,357	900,558	40,206	22,40
15.	Pinrang	45,826	402,332	386,210	834,368	47,108	17,71
16.	Enrekang	24,035	5,858	-	29,893	13.914	2,15
17.	Luwu	443,520	132,774	148,050	724,344	33,468	21,64
18.	Tana Toraja	21,997	5,761	7,550	35,308	19,030	1,86
19.	Luwu Utara	27,160	16,451	102,230	145,841	14,531	10,04
20.	Luwu Timur	49,302	95,391	203,271	347,964	19,167	18,15
21.	Toraja Utara	-	-	-	0	-	-
22.	Makassar	-	-	-	0	-	-
23.	Pare - Pare	-	3,200	-	3,200	565	5,66
24.	Palopo	2,901	5,350	-	8,251	1,605	5,14
*	<b>Jumlah</b>	<b>1,164,918</b>	<b>2,257,440</b>	<b>2,695,253</b>	<b>6,117,611</b>	<b>474.938</b>	<b>12,88</b>

Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2013

**Tabel 2.62**  
**Efisiensi & Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO	PASOKAN IRIGASI	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasok Irigasi Per Area	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
2.	Pasok Irigasi Relatif	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
3.	Pasok Air Relatif	4	4	4	4	4
4.	Indek Luas Areal	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
5.	Rancangan Luas Areal	635.555	635.555	635.555	635.555	635.555

Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2012

**Tabel 2.63**  
**Efisiensi & Efektivitas Pengelolaan Jaringan Irigasi Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten/ Kota	Luas Rancangan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebutuhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (Lt/dtk)	Pasok Air Irigasi Total (Lt/dtk)	Total Pasok Air (Lt/dtk)	PIA (Lt/dtk /Ha)	PIR (Lt/dtk /Ha)	PAR (Lt/dtk /Ha)	IA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9 = 6 / 4)	(10 = 7 / 5)	(11 = 8 / 5)	(12 = 4 / 3)
1.	Kepulauan Selayar	3,880	3,880	1.25	4	1.4	5	0,0010	1.12	4	1.00
2.	Bulukumba	34,817	26,456	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.8
3.	Bantaeng	16,386	13,672	1.25	4	1.4	5	0,0003	1.12	4	0.83
4.	Jeneponto	29,039	28,537	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.98

No	Kabupaten/ Kota	Luas Rancan gan (Ha)	Luas Lahan Terairi (Ha)	Kebut uhan Air Tanaman (Ha)	Pasok Air Irigasi (Lt/dtk)	Pasok Air Irigasi Total (Lt/dtk)	Total Pasok Air (Lt/dtk)	PIA (Lt/dtk /Ha)	PIR (Lt/dtk /Ha)	PAR (Lt/dtk /Ha)	IA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	(9 = 6 / 4)	(10 = 7 / 5)	(11 = 8 / 5)	(12 = 4 / 3)
5.	Takalar	19,866	18,243	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	0.92
6.	Gowa	31,657	30,462	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.96
7.	Sinjai	18,710	15,369	1.25	4	1.4	5	0,0003	1.12	4	0.82
8.	Maros	24,447	21,494	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	0.88
9.	Pangkep	18,284	16,186	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	0.89
10.	Barru	11,348	6,638	1.25	4	1.4	5	0,0006	1.12	4	0.58
11.	Bone	63,782	50,970	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.78
12.	Soppeng	34,883	24,726	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	0.71
13.	Wajo	39,918	26,915	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.67
14.	Sidrap	45,115	40,206	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.89
15.	Pinrang	54,277	47,108	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.87
16.	Enrekang	13,645	13,914	1.25	4	1.4	5	0,0003	1.12	4	1,02
17.	Luwu	47,527	33,468	1.25	4	1.4	5	0,0001	1.12	4	0.70
18.	Tana Toraja	19,082	19,030	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	1.00
19.	Luwu Utara	80,465	14,531	1.25	4	1.4	5	0,0003	1.12	4	0.18
20.	Luwu Timur	25,822	19,167	1.25	4	1.4	5	0,0002	1.12	4	0.74
21.	Toraja Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	Pare - Pare	600	565	1.25	4	1	5	0,0069	-	4	0.94
24.	Palopo	2,005	1,605	1.25	4	1.44	5	0,0024	1.12	4	0.80
	<b>Jumlah</b>	<b>635,555</b>	<b>474.938</b>	<b>1,25</b>	<b>4</b>	<b>1,4</b>	<b>5</b>	<b>0,001</b>	<b>1,12</b>	<b>4</b>	<b>0,75</b>

Sumber : Dinas PSDAProv. Sul-Sel Tahun 2013

**d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (Tps) Per Satuan Penduduk**

Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman berupa air minum dan sanitasi secara merata dan berkelanjutan turut menentukan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan persampahan di Provinsi Sulawesi Selatan sudah menunjukkan kinerja yang memadai yang dindikasikan dengan meningkatnya rasio daya tampung TPS dari 0,48 pada tahun 2008 menjadi 0,53 pada tahun 2012.

**Tabel 2.64**

**Rasio Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah TPS	219	224	233	238	268
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (M <sup>3</sup> )	1,543.80	1,575.45	1,639.47	1,672.30	1,883.27
3.	Jumlah Penduduk	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.306.848
4.	Rasio Daya Tampung TPS	0.48	0.45	0.46	0.47	0.53

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
	thd Jumlah penduduk					

Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013

**Tabel 2.65**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk**  
**Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (Unit)	Jumlah Daya Tampung (Ton)	
1	Kepulauan Selayar	121.853	2	14,45	0,27
2	Bulukumba	389.772	6	39,05	0,23
3	Bantaeng	178.176	2	16,40	0,21
4	Jeneponto	346.204	1	5,84	0,04
5	Takalar	267.114	3	23,56	0,20
6	Gowa	653.726	18	124,79	0,43
7	Sinjai	230.262	3	22,36	0,22
8	Maros	315.092	4	27,08	0,20
9	Pangkep	316.972	2	13,12	0,09
10	Barru	165.906	3	22,94	0,31
11	Bone	712.023	12	82,88	0,26
12	Soppeng	223.826	4	27,18	0,28
13	Wajo	380.979	7	52,66	0,31
14	Sidrap	291.272	7	49,90	0,39
15	Pinrang	350.973	7	49,19	0,32
16	Enrekang	193.946	1	7,24	0,08
17	Luwu	331.932	1	9,56	0,07
18	Tana Toraja	222.872	4	28,96	28,96
19	Luwu Utara	315.688	1	10,03	10,03
20	Luwu Timur	246.592	1	7,96	7,96
21	Toraja Utara	306.328	2	16,24	16,24
22	Makassar	1.288.178	150	1.058,65	1,87
23	Pare Pare	111.014	13	92,32	1,89
24	Palopo	148.526	11	80,92	1,24

Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013

#### e. Rasio Rumah Layak Huni

Berdasarkan luasan lantai bangunan, pada tahun 2008 jumlah rumah tangga yang menempati rumah dengan luasan 20 – 150 M<sup>2</sup> sebanyak 1.753.185 RT, sisanya sebanyak 68.926 menempati rumah dengan luasan <20 M<sup>2</sup>. Walaupun mendapat penanganan jumlah rumah yang luasannya < 20 M<sup>2</sup>, semakin bertambah yang ditunjukkan dengan rasio rumah layak huni yang mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2009 dengan rasio 0,17 dan pada tahun 2013 hanya meningkat menjadi 0,19.

**Tabel 2.66**  
**Rasio Rumah Layak Huni**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah rumah layak huni	1.391.124	1.375.838	1.409.557	1.522.034	1.586.023
b.	Jumlah penduduk	7.908.519	8.034.776	8.115.638	8.222.631	8.342.049
c.	<b>Rasio Rumah Layak Huni</b>	<b>0,176</b>	<b>0,171</b>	<b>0,173</b>	<b>0,185</b>	<b>0,190</b>

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### f. Rasio Pemukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni dari tahun ke tahun semakin meningkat, seperti yang terlihat pada tabel, rasio permukiman layak huni tahun 2009 sebesar 0,61 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,86 hal ini menunjukkan bahwa peningkatan luas area permukiman dibarengi juga dengan peningkatan kualitas rumah layak huni.

**Tabel 2.67**  
**Rasio Permukiman Layak Huni**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012**

No	Bidang/Urusan	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
a.	Luas area permukiman Layak Huni (Ha)	43.190	97.776	104.744	114.346
b.	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	70.246	122.579	125.368	132.790
c.	<b>Rasio Permukiman Layak Huni (Ha)</b>	0,61	0,80	0,84	0,86

Sumber : Dinas Tata Ruang & Pemukiman Tahun 2013

#### g. Tabel Lingkungan Pemukiman Kumuh

Kawasan permukiman perkotaan pada kota-kota besar di Indonesia identik dengan adanya kawasan permukiman kumuh. Lingkungan permukiman kumuh umumnya didiami oleh golongan menengah bawah. Sebagaimana juga di kawasan perkotaan di Sulawesi Selatan, persentase lingkungan permukiman kumuh dari tahun 2009 sampai 2013 mengalami peningkatan sebesar 0,040 point.

**Tabel 2.68**  
**Lingkungan Permukiman Kumuh**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
a.	Luas kawasan kumuh (Ha)	2.888,59	2.788	2.543	4.511	4.145
b.	Luas Wilayah Kota (Ha)	4.269.270	4.269.270	4.269.270	4.110.976	4.110.976
c.	<b>Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh</b>	<b>0,068</b>	<b>0,065</b>	<b>0,060</b>	<b>0,1097</b>	<b>0,101</b>

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**Tabel 2.69**  
**Luas Lingkungan Permukiman Kumuh Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Luas Lingkungan Permukiman Kumuh (Km <sup>2</sup> )
1	Kepulauan Selayar	903.50	182
2	Bulukumba	1,154.67	3.351
3	Bantaeng	395.83	6.997
4	Jeneponto	903.40	3.402
5	Takalar	566.51	4.205
6	Gowa	1,883.33	41.458
7	Sinjai	819.96	4.273
8	Maros	1,619.12	14.286
9	Pangkep	1,112.30	2.439
10	Barru	1,174.72	12.540
11	Bone	4,559.00	64.291
12	Soppeng	1,359.50	27.373
13	Wajo	2,506.12	11.961
14	Sidrap	1,883.25	2.651
15	Pinrang	1,961.77	3.465
16	Enrekang	1,786.01	8.873
17	Luwu	3,000.25	6.327
18	Tana Toraja	2,054.30	5.607
19	Luwu Utara	7,502.58	1.617
20	Luwu Timur	6,944.90	7.600
21	Toraja Utara	1,151.47	1.617
22	Makassar	175.77	8.985
23	Pare Pare	99.33	1.138
24	Palopo	247.50	93.585

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

### 2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

#### a. Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah didasarkan pada kriteria BPS yang menggolongkan Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah berdasarkan indikator kemiskinan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan perumahan antara lain; rumah dengan bahan lantai, dinding atau atap yang tidak memenuhi standar layak huni dengan luas lantai paling rendah 20 m<sup>2</sup>.

**Tabel 2.70**

**Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan Kondisi Bahan**  
**Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga MBR	Persentase
1	Kepulauan Selayar	30,849	365	1,18
2	Bulukumba	96,240	2.427	2,52
3	Bantaeng	44,103	2.405	5,45

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga MBR	Persentase
4	Jeneponto	83,827	1.308	1,56
5	Takalar	63,599	14.887	23,41
6	Gowa	148,237	5.903	3,98
7	Sinjai	51,283	2.240	4,37
8	Maros	70,648	3.308	4,68
9	Pangkep	72,534	3.207	4,42
10	Barru	41,373	1.763	4,26
11	Bone	160,728	6.563	4,08
12	Soppeng	57,098	1.716	3,01
13	Wajo	95,007	10.530	11,08
14	Sidrap	70,356	2.240	3,18
15	Pinrang	81,432	2.900	3,56
16	Enrekang	44,999	1.252	2,78
17	Luwu	72,952	1.111	1,52
18	Tana Toraja	53,319	2.613	4,90
19	Luwu Utara	74,985	929	1,24
20	Luwu Timur	56,428	16.290	28,87
21	Toraja Utara	67,772	2.942	4,34
22	Makassar	293,435	12.295	4,19
23	Pare Pare	25,462	6.200	24,35
24	Palopo	33,988	10.201	30,01

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

#### b. Rumah Tangga Ber-Sanitasi

Lingkungan dan perilaku yang mempunyai pengaruh besar terhadap derajat kesehatan masyarakat. persentase rumah tangga yang bersanitasi dilihat dari data pada tahun 2009 persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 62,37 persen, dan pada tahun 2013 menjadi 81,08 persen dengan persentase terendah di Kabupaten Jeneponto, Maros, Barru, Bone, Kepulauan Selayar, Bantaeng, dan Kabupaten Pangkep. Hal ini tentunya masih membutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai angka di atas 90 persen.

**Tabel 2. 71**  
**persentase Rumah Tangga Bersanitasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Rumah Tangga berakses sanitasi	1,163,559	1,275,557	1,283,307	1,423,241	1,579,900
2	Jumlah Rumah Tangga	1,865,662	1,848,068	1,892,944	1,890,654	1,948,608
3	Persentase	62.37	69.02	67.79	75.28	81,08

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**Tabel 2.72**  
**persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	Persentase
1	Kepulauan Selayar	31,720	19,390	61.13
2	Bulukumba	99,726	79,212	79.43
3	Bantaeng	43,933	29,479	67.10
4	Jenepono	83,009	42,210	50.85
5	Takalar	67,778	51,789	76.41
6	Gowa	161,514	139,112	86.13
7	Sinjai	51,282	39,846	77.70
8	Maros	73,732	57,076	77.41
9	Pangkep	74,794	52,244	69.85
10	Barro	40,997	33,675	82.14
11	Bone	167,989	112,699	67.09
12	Soppeng	57,969	54,439	93.91
13	Wajo	95,264	76,897	80.72
14	Sidrap	68,102	60,543	88.90
15	Pinrang	84,818	72,273	85.21
16	Enrekang	43,741	35,531	81.23
17	Luwu	74,412	43,159	58.00
18	Tana Toraja	54,508	50,463	92.58
19	Luwu Utara	70,113	51,869	73.98
20	Luwu Timur	62,919	52,166	82.91
21	Toraja Utara	48,769	44,511	91.27
22	Makassar	326,711	322,365	98.67
23	Pare Pare	30,452	28,942	95.04
24	Palopo	34,356	30,010	87.35

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### c. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Lingkungan permukiman kumuh di Sulawesi Selatan pada tahun 2009 sebesar 38,52 persen dan pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 13,98 persen. Penurunan persentase luas permukiman kumuh ini dibarengi dengan meningkatnya kualitas lingkungan permukiman.

**Tabel 2.73**  
**Lingkungan Pemukiman Kumuh**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012**

No	Bidang/Urusan	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
a.	Luas area permukiman Kumuh (Ha)	27.056	24.803	20.624	18.444
b.	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	70.246	122.579	125.368	132.790
	<b>persentase luas permukiman kumuh</b>	<b>38.52</b>	<b>20.23</b>	<b>16.45</b>	<b>13.98</b>

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Tahun 2013

### 2.3.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

#### a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk meningkat tiap tahunnya, pada tahun 2008 sebesar 1,70 sampai tahun 2012 sebesar 2,09 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 1,99.

**Tabel 2.74**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah polisi pamong praja	orang	1.767	1.580	1.744	1.679	1.654
b.	Jumlah penduduk	orang	7.805.024	7.908.519	8.034.776	8.306.848	8.305.154
	<b>Rasio jumlah polisi pamong Praja per 10.000 penduduk</b>		<b>2,23</b>	<b>1,97</b>	<b>2,17</b>	<b>2,09</b>	<b>1,99</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014

**Tabel 2.75**  
**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio
<b>I</b>	<b>Provinsi</b>	111			111			116			112			107		
<b>II</b>	<b>Kota</b>															
1	Kota Makassar	113	1.271.870	0,89	113	1.338.663	0,84	107	1.352.136	0,79	97	1.368.902	0,71	93	1,383,711	0.67
2	Kota Pare-Pare	48	118.842	4,04	48	129.262	3,71	45	130.563	3,45	43	132.181	3,25	43	133,612	3.22
3	Kota Palopo	52	146.482	3,55	52	147.932	3,52	48	149.421	3,21	48	151.273	3,17	52	152,911	3.40
<b>III</b>	<b>Kabupaten</b>															
1	Maros	95	306.687	3,10	95	319.002	2,98	93	322.212	2,89	80	326.207	2,45	84	329,737	2.55
2	Pangkep	45	298.701	1,51	45	305.737	1,47	45	308.814	1,46	43	312.643	1,38	40	316,025	1.27
3	Barru	62	162.985	3,80	62	165.983	3,74	59	167.653	3,52	59	169.731	3,48	55	171,568	3.21
4	Pinrang	15	351.042	0,43	15	351.118	0,43	38	354.652	1,07	157	359.049	4,37	157	362,933	4.33
5	Sidrap	44	252.483	1,74	40	271.911	1,47	39	274.648	1,42	38	278.053	1,37	40	281,061	1.42
6	Wajo	68	381.066	1,78	43	385.109	1,12	54	388.985	1,39	54	393.808	1,37	51	398,068	1.28
7	Soppeng	69	230.744	2,99	81	223.826	3,62	81	226.079	3,58	75	231.919	3,23	71	231,358	3.07
8	Enrekang	49	190.576	2,57	49	190.248	2,58	30	192.163	1,56	30	194.545	1,54	30	196,650	1.53
9	Tana Toraja	40	240.249	1,66	55	221.081	2,49	52	223.306	2,33	52	226.074	2,30	53	228,521	2.32
10	Toraja utara	5	229.090	0,22	5	216.762	0,23	40	218.943	1,83	40	221.657	1,80	40	224,056	1.79
11	Luwu	40	328.180	1,22	38	332.482	1,14	36	335.828	1,07	33	339.992	0,97	32	343,670	0.93
12	Luwu Utara	65	321.979	2,02	69	287.472	2,40	77	290.365	2,65	78	293.965	2,65	74	297,146	2.49
13	Lumu timur	42	237.354	1,77	40	243.069	1,65	38	245.515	1,55	38	248.559	1,53	38	251,249	1.51

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah Pol. PP	Jmlah Pddk	Rasio
14	Bone	138	711.748	1,94	140	717.682	1,95	142	724.905	1,96	140	733.893	1,91	144	741,833	1.94
15	Sinjai	68	228.304	2,98	68	228.879	2,97	71	231.182	3,07	69	231.182	2,98	58	236,581	2.45
16	Kep.Selayar	52	121.749	4,27	55	122.055	4,51	60	123.283	4,87	52	123.283	4,22	52	126,162	4.12
17	Bulukumba	89	394.746	2,25	84	394.560	2,13	82	398.531	2,06	71	398.531	1,78	65	407,837	1.59
18	Bantaeng	47	174.176	2,70	51	176.699	2,89	49	178.477	2,75	46	178.477	2,58	39	182,645	2.14
19	Jeneponto	66	334.175	1,98	89	342.700	2,60	84	346.149	2,43	84	346.149	2,43	84	354,232	2.37
20	Takalar	96	257.974	3,72	83	269.603	3,08	78	272.316	2,86	78	272.316	2,86	86	278,675	3.09
21	Gowa	63	617.317	1,02	60	652.941	0,92	63	659.512	0,96	66	659.512	1,00	66	674,913	0.98
	<b>Sul-Sel</b>	<b>1.582</b>	<b>7.908.519</b>	<b>2,00</b>	<b>1.591</b>	<b>8.034.76</b>	<b>1,98</b>	<b>1.627</b>	<b>8.115.638</b>	<b>2,00</b>	<b>1.683</b>	<b>8.191.901</b>	<b>2,05</b>	1,654	8,305,154	1.99

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014

### b. Jumlah Linmas Per Jumlah 10.000 Penduduk

Tabel 2.76

#### Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio
<b>II</b>	<b>Kota</b>															
1	Kota Makassar	1430	1.271.870	11,24	1430	1.338.663	10,68	2145	1.352.136	15,86	2.145	1.368.902	15,67	2145	1,383,711	15.50
2	Kota Pare-Pare	220	118.842	18,51	220	129.262	17,02	308	130.563	23,59	286	132.181	21,64	584	133,612	43.71

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio
3	Kota Palopo	480	146.482	32,77	480	147.932	32,45	672	149.421	44,97	672	151.273	44,42	586	152,911	38.32
<b>III</b>	<b>Kabupaten</b>															
1	Maros	1030	306.687	33,58	1030	319.002	32,29	1296	322.212	40,22	1404	326.207	43,04	1212	329,737	36.76
2	Pangkep	1020	298.701	34,15	1020	305.737	33,36	1020	308.814	33,03	1122	312.643	35,89	1122	316,025	35.50
3	Barru	540	162.985	33,13	540	165.983	32,53	540	167.653	32,21	540	169.731	31,82	540	171,568	31.47
4	Pinrang	1040	351.042	29,63	1040	351.118	29,62	1040	354.652	29,32	1040	359.049	28,97	1040	362,933	28.66
5	Sidrap	1060	252.483	41,98	1060	271.911	38,98	1060	274.648	38,59	1060	278.053	38,12	1060	281,061	37.71
6	Wajo	1760	381.066	46,19	1760	385.109	45,70	1760	388.985	45,25	1760	393.808	44,69	1760	398,068	44.21
7	Soppeng	700	230.744	30,34	700	223.826	31,27	700	226.079	30,96	700	231.919	30,18	700	231,358	30.26
8	Enrekang	1290	190.576	67,69	1290	190.248	67,81	1290	192.163	67,13	1290	194.545	66,31	936	196,650	47.60
9	Tana Toraja	800	240.249	33,30	800	221.081	36,19	800	223.306	35,83	800	226.074	35,39	800	228,521	35.01
10	Toraja utara	800	229.090	34,92	800	216.762	36,91	800	218.943	36,54	800	221.657	36,09	800	224,056	35.71
11	Luwu	2270	328.180	69,17	2270	332.482	68,27	2270	335.828	67,59	2270	339.992	66,77	1850	343,670	53.83
12	Luwu Utara	1710	321.979	53,11	1710	287.472	59,48	1780	290.365	61,30	1780	293.965	60,55	1248	297,146	42.00
13	Lumu Timur	1070	237.354	45,08	1070	243.069	44,02	1070	245.515	43,58	1070	248.559	43,05	1070	251,249	42.59
14	Bone	3710	711.748	52,13	3710	717.682	51,69	4901	724.905	67,61	5278	733.893	71,92	2724	741,833	36.72
15	Sinjai	790	228.304	34,60	790	228.879	34,52	1106	231.182	47,84	1106	231.182	47,84	950	236,581	40.16
16	Kep.Selayar	740	121.749	60,78	740	122.055	60,63	740	123.283	60,02	740	123.283	60,02	592	126,162	46.92
17	Bulukumba	1260	394.746	31,92	1260	394.560	31,93	1260	398.531	31,62	1260	398.531	31,62	1000	407,837	24.52
18	Bantaeng	670	174.176	38,47	670	176.699	37,92	670	178.477	37,54	670	178.477	37,54	670	182,645	36.68
19	Jenepono	1130	334.175	33,81	1130	342.700	32,97	1130	346.149	32,64	1130	346.149	32,64	1130	354,232	31.90
20	Takalar	830	257.974	32,17	830	269.603	30,79	830	272.316	30,48	830	272.316	30,48	830	278,675	29.78

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio	Jumlah linmas	Jmlah Pddk	Rasio
21	Gowa	1670	617.317	27,05	1670	652.941	25,58	2004	659.512	30,39	2004	659.512	30,39	2004	674,913	29.69
	<b>Sul-Sel</b>	<b>28.020</b>	<b>7.908.519</b>	<b>35,43</b>	<b>28.020</b>	<b>8.034.776</b>	<b>34,87</b>	<b>31.192</b>	<b>8.115.638</b>	<b>38,43</b>	<b>31.757</b>	<b>8.191.901</b>	<b>38,77</b>	<b>27,353</b>	<b>8,305,154</b>	<b>32.93</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013

**c.Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan**

**Tabel 2.77**

**Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/ Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/ Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/ Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/ Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/ Kelurahan	Rasio
II	<b>Kota</b>															
1	Kota Makassar	1.001	143	7,00	1.001	143	7,00	1.001	143	7,00	1.001	143	7,00	572	143	4.00
2	Kota Pare-Pare	176	22	8,00	176	22	8,00	176	22	8,00	176	22	8,00	88	22	4.00
3	Kota Palopo	336	48	7,00	336	48	7,00	336	48	7,00	336	48	7,00	144	48	3.00
III	<b>Kabupaten</b>															
1	Maros	309	103	3,00	309	103	3,00	309	103	3,00	309	103	3,00	309	103	3.00
2	Pangkep	306	102	3,00	306	102	3,00	306	102	3,00	306	102	3,00	204	102	2.00
3	Barru	162	54	3,00	162	54	3,00	162	54	3,00	162	54	3,00	216	54	4.00
4	Pinrang	312	104	3,00	312	104	3,00	312	104	3,00	312	104	3,00	312	104	3.00
5	Sidrap	318	106	3,00	318	106	3,00	318	106	3,00	318	106	3,00	315	105	3.00

No	Kabupaten/kota	2009			2010			2011			2012			2013		
		Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/ Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/ Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/ Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/ Kelurahan	Rasio	Jmlah Pos Siskmlng	Jmlh Desa/ Kelurahan	Rasio
6	Wajo	528	176	3,00	528	176	3,00	528	176	3,00	528	176	3,00	528	176	3,00
7	Soppeng	210	70	3,00	210	70	3,00	210	70	3,00	210	70	3,00	210	70	3,00
8	Enrekang	387	129	3,00	387	129	3,00	387	129	3,00	387	129	3,00	387	129	3,00
9	Tana Toraja	480	160	3,00	480	160	3,00	480	160	3,00	489	163	3,00	477	159	3,00
10	Toraja utara	453	151	3,00	453	151	3,00	453	151	3,00	456	152	3,00	453	151	3,00
11	Luwu	681	227	3,00	681	227	3,00	681	227	3,00	681	227	3,00	681	227	3,00
12	Luwu Utara	531	177	3,00	531	177	3,00	531	177	3,00	531	177	3,00	528	176	3,00
13	Lumu Timur	321	107	3,00	321	107	3,00	321	107	3,00	321	107	3,00	306	102	3,00
14	Bone	1.113	371	3,00	1.113	371	3,00	1.116	372	3,00	1.116	372	3,00	1116	372	3,00
15	Sinjai	237	79	3,00	237	79	3,00	237	79	3,00	237	79	3,00	240	80	3,00
16	Kep.Selayar	222	74	3,00	222	74	3,00	222	74	3,00	222	74	3,00	222	74	3,00
17	Bulukumba	393	131	3,00	393	131	3,00	393	131	3,00	393	131	3,00	378	126	3,00
18	Bantaeng	201	67	3,00	201	67	3,00	201	67	3,00	201	67	3,00	201	67	3,00
19	Jeneponto	339	113	3,00	339	113	3,00	339	113	3,00	339	113	3,00	339	113	3,00
20	Takalar	249	83	3,00	249	83	3,00	249	83	3,00	249	83	3,00	249	83	3,00
21	Gowa	501	167	3,00	501	167	3,00	501	167	3,00	501	167	3,00	501	167	3,00
	<b>Se Sul-Sel</b>	<b>9.766</b>	<b>2.964</b>	<b>3,2</b>	<b>9.766</b>	<b>2.964</b>	<b>3,2</b>	<b>9.769</b>	<b>2.965</b>	<b>3,2</b>	<b>9.781</b>	<b>2.969</b>	<b>3,2</b>	8,986	2,953	3,04

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014

**d. Penegakan PERDA**

Rasio penegakan PERDA mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2009 sebesar 100 persen namun pada tahun 2013 terjadi penurunan, dimana hanya sebesar 91 persen.

**Tabel 2.78**  
**Penegakan PERDA Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten/ Kota	TARGET KINERJA TAHUN														
		2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlanggan ran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlanggan ran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlanggan ran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlanggan ran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlanggan ran Perda	Rasio
<b>I</b>	<b>Provinsi</b>	9	9	100%	9	9	100%	9	9	100%	12	12	100%	5	25	20%
<b>II</b>	<b>Kota</b>															
1	Kota Makassar	152	152	100%	793	793	100%	48	48	100%	87	87	100%	83	85	98%
2	Kota Pare-Pare	0	0		321	427	75%	332	332	100%	332	332	100%	130	132	98%
3	Kota Palopo	6	6	100%	5	5	100%	97	97	100%	97	97	100%	85	87	98%
<b>III</b>	<b>Kabupaten</b>															
1	Maros	0	0		51	51	100%	51	51	100%	51	51	100%	51	52	98%
2	Pangkep				25	25	100%	26	26	100%	26	26	100%	28	31	90%
3	Barru	14	14	100%	14	14	100%	7	7	100%	7	7	100%	7	7	100%
4	Pinrang	4	4	100%	14	14								29	29	100%
5	Sidrap	19	19	100%	24	61	39%	56	100	56%	56	100	56%	87	100	87%

No	Kabupaten/ Kota	TARGET KINERJA TAHUN														
		2009			2010			2011			2012			2013		
		Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlanggan ran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlang garan Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlanggar an Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlanggan ran Perda	Rasio	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Jumlah Perlanggan ran Perda	Rasio
6	Wajo				6	6	100%	17	17	100%	17	17	100%	17	17	100%
7	Soppeng	14	14	100%	1	2	50%	2	6	33%	2	6	33%	2	8	25%
8	Enrekang				3	3	100%	3	3	100%	3	3	100%	2	22	9%
9	Tana Toraja				5	5	100%	10	10	100%	10	10	100%	10	10	100%
10	Toraja Utara					0		5	5	100%	5	5	100%	2	2	100%
11	Luwu				47	47	100%	2	18	11%	2	18	11%	4	8	50%
12	Luwu Utara	6	6	100%		0		51	63	81%	51	63	81%	60	63	95%
13	Luwu Timur				4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	8	50%
14	Bone				2	2	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
15	Sinjai	33	33	100%	8	8	100%	44	44	100%	100	124	81%	111	124	90%
16	Kep. Selayar				69	69	100%	209	209	100%	207	207	100%	200	207	97%
17	Bulukumba	18	18	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	30	100%	30	34	88%
18	Bantaeng	3	3	100%	22	22	100%	47	74	64%	57	74	77%	47	47	100%
19	Jeneponto				22	22	100%									
20	Takalar				21	21	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%
21	Gowa	14	14	100%	3	7	43%	327	327	100%	307	327	94%	27	27	100%
	<b>Se Sul Sel</b>	292	292	100%	1,499	1647	91%	1,385	1,479	94%	1,471	1,608	91%	1,029	1,133	91%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2014

### e. Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Cakupan patroli petugas satpol PP mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2009 jumlah patroli petugas satpol PP sebesar 385 petugas satpol PP, dan pada Tahun 2013 meningkat menjadi 2072 petugas patroli satpol PP, atau mengalami peningkatan sebesar 100 persen lebih dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.79

#### Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 s.d 2013

No	Kabupaten / Kota	2009	2010	2011	2012	2013
		Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam	Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam	Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam	Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam	Jumlah Patroli petugas Sat.Pol.PP Pemantauan dan Penyelesaian pelanggaran k3 dalam 24 jam
<b>I</b>	<b>Provinsi</b>	120	100	12	50	40
<b>II</b>	<b>Kota</b>					
1	Kota Makassar	152	793	580	931	950
2	Kota Pare-Pare	0	557	243	183	187
3	Kota Palopo	6	5	117	196	200
<b>III</b>	<b>Kabupaten</b>					
1	Maros	0	51	51	51	68
2	Pangkep		26	30	30	30
3	Barru	14	4	31	3	3
4	Pinrang	4	6	14	3	3
5	Sindrap	19	28	46	85	85
6	Wajo		2	19	12	12
7	Soppeng	14	12	17	7	7
8	Enrekang		20	65	66	66
9	Tana Toraja		4	35	10	10
10	Toraja Utara		12	97	65	65
11	Luwu		47	36	16	16
12	Luwu Utara	6	18	213	65	65
13	Luwu Timur		43	46	43	43
14	Bone		42	12	3	3
15	Sinjai	33	8	133	133	133
16	Kep.Selayar		27	21	12	12
17	Bulukumba		31	35		
18	Banteang	3	22	49	49	49
19	Jeneponto		43	35	22	22
20	Takalar		20	29	20	20
21	Gowa	14	506	17	17	17
	<b>Se Sul-Sel</b>	<b>385</b>	<b>2427</b>	<b>1983</b>	<b>2072</b>	<b>2,106</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013

**f. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Di Kabupaten**

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana pada tahun 2008, persentase penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 52 persen dan pada Tahun 2012 meningkat menjadi 91 persen.

Tabel 2.80

**Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Kabupaten/kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio
I	<b>Provinsi</b>															
II	<b>Kota</b>															
1	Kota Makassar	97	97	100%	152	152	100%	163	217	75%	545	580	94%	931	931	100%
2	Kota Pare-Pare	-	-		0	0		418	557	75%	35	35	100%	169	183	92%
3	Kota Palopo	4	4	100%	6	6	100%	50	66	76%	98	117	84%	98	196	50%
III	<b>Kabupaten</b>															
1	Maros	6	6	100%	0	0		51	51	100%	51	51	100%	51	51	100%
2	Pangkep	13	13	100%				15	35	43%	13	30	43%	30	30	100%
3	Barru	16	16	100%	14	14	100%	7	7	100%	22	31	71%	3	3	100%
4	Pinrang	1	1	100%	4	4	100%	14	14	100%	14	14	100%	3	3	100%
5	Sidrap	-	-		19	19	100%	34	49	69%	46	46	100%	61	85	72%
6	Wajo	7	7	100%				8	8	100%	19	19	100%	12	12	100%
7	Soppeng	-	-		14	14	100%	6	6	100%	17	17	100%	7	7	100%
8	Enrekang	6	6	100%				26	52	50%	65	65	100%	64	66	97%
9	Tana Toraja	-	-					30	30	100%	35	35	100%	10	10	100%

No	Kabupaten/kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio	Jmlh Pnylsaian Pelanggaran K3	Jmlh Pelanggaran K3	Rasio
10	Toraja utara	-	-					64	85	75%	97	97	100%	65	65	100%
11	Luwu	-	-					30	40	75%	36	36	100%	16	16	100%
12	Luwu Utara	3	3	100%	6	6	100%	80	106	75%	23	213	11%	50	65	77%
13	Lumu Timur	-	-					10	46	22%	46	46	100%	43	43	100%
14	Bone	-	-					3	3	100%	12	12	100%	3	3	100%
15	Sinjai	178	178	100%	33	33	100%	8	8	100%	103	133	77%	133	133	100%
16	Kep.Selayar	4	4	100%				76	101	75%	21	21	100%	12	12	100%
17	Bulukumba	14	14	100%				25	25	100%	35	35	100%			
18	Bantaeng	4	4	100%	3	3	100%	23	23	100%	49	49	100%	39	49	80%
19	Jeneponto	-	-					30	30	100%	35	35	100%	12	22	55%
20	Takalar	-	-					20	20	100%	29	29	100%	20	20	100%
21	Gowa	-	-		14	14	100%	7	7	100%	17	17	100%	12	17	71%
	<b>Sul-Sel</b>	<b>353</b>	<b>353</b>	<b>52%</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>40%</b>	<b>1.198</b>	<b>1.586</b>	<b>76%</b>	<b>1.463</b>	<b>1.763</b>	<b>83%</b>	<b>1.844</b>	<b>2.022</b>	<b>91%</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013

**g. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Di Kabupaten**

Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, seperti terlihat pada table berikut.

**Tabel 2.81**

**Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten / Kota	2009	2010	2011	2012	2013
		Jumlah Linmas	Jumlah Linmas	Jumlah Linmas	Jumlah Linmas	Jumlah Linmas
<b>II</b>	<b>Kota</b>					
1	Kota Makassar	1430	1430	2145	2145	4599
2	Kota Pare-Pare	220	220	308	286	584
3	Kota Palopo	480	480	672	672	586
<b>III</b>	<b>Kabupaten</b>					
1	Maros	1030	1030	1296	1404	1212
2	Pangkep	1020	1020	1020	1122	1212
3	Barru	540	540	540	540	826
4	Pinrang	1040	1040	1040	1040	1446
5	Sindrap	1060	1060	1060	1060	1280
6	Wajo	1760	1760	1760	1760	1888
7	Soppeng	700	700	700	700	1004
8	Enrekang	1290	1290	1290	1290	936
9	Tana Toraja	800	800	800	800	1060
10	Toraja Utara	800	800	800	800	1042
11	Luwu	2270	2270	2270	2270	1850
12	Luwu Utara	1710	1710	1780	1780	1248
13	Luwu Timur	1070	1070	1070	1070	1030
14	Bone	3710	3710	4901	5278	2724
15	Sinjai	790	790	1106	1106	950
16	Kep.Selayar	740	740	740	740	592
17	Bulukumba	1260	1260	1260	1260	1000
18	Banteang	670	670	670	670	710
19	Jeneponto	1130	1130	1130	1130	1272
20	Takalar	830	830	830	830	856
21	Gowa	1670	1670	2004	2004	2388
	<b>Se Sul-Sel</b>	<b>28.020</b>	<b>28.020</b>	<b>31.192</b>	<b>31.757</b>	<b>32,295</b>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Sul-Sel 2013

**h. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah**

Pembinaan terhadap LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2008 pembinaan dilakukan sebanyak 4 dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 10.

**Tabel 2.82**  
**Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas, OKP dan Politik Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Kegiatan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Pembinaan Terhadap LSM, Ormas Dan OKP	2	2	3	3	4
2	Pembinaan Politik Daerah	2	5	5	3	5
<b>3</b>	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>9</b>

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Prov. Sul-Sel 2013

### 2.3.1.6. Sosial

#### a. Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi

Sarana Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan.

**Tabel 2.83**  
**Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitas	Jml	287	298	298	304	296

Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**Tabel 2.84**  
**Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Makassar	84	83	83	87	90
2	Gowa	47	52	52	54	54
3	Takalar	4	3	3	4	4
4	Jeneponto	36	41	41	32	25
5	Bantaeng	9	10	10	9	9
6	Bulukumba	17	18	18	18	17
7	Sinjai	7	8	8	9	9
8	Pare-Pare	6	8	8	10	9
9	Sidrap	2	2	2	2	2
10	Soppeng	1	3	3	3	2
11	Enrekang	4	4	4	4	6
12	Tana Toraja	3	2	2	2	3
13	Palopo	6	6	6	6	7
14	Luwu	7	9	9	10	9
15	Luwu Timur	6	8	8	8	8
16	Luwu Utara	11	10	10	10	10
17	Barru	4	4	4	6	5
18	Pangkep	4	4	4	4	4
19	Maros	10	9	9	9	8
20	Bone	5	3	3	5	3
21	Selayar	1	1	1	2	2

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
22	Pinrang	11	6	6	6	6
23	Wajo	2	2	2	2	2
24	Toraja Utara	-	2	2	2	2
Jumlah		287	298	298	304	296

Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### b. PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pada tahun 2009 jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sebesar 27.388 jiwa atau 2,4 persen dari jumlah PMKS yang ada, dan pada tahun 2013 jumlah tersebut menurun menjadi 2,16 persen.

Tabel 2.85

#### PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Jiwa	27.388	21.770	56.890	42.021	117.385
b.	Jumlah PMKS yang belum mendapatkan bantuan	Jiwa	1.071.211	1.049.441	992.551	950.530	426.808
c.	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	1.098.599	1.071.211	1.049.441	992.551	544.193
	<b>PMKS Memperoleh Bantuan Sosial</b>	%	<b>2,4</b>	<b>2,1</b>	<b>5,4</b>	<b>4,2</b>	<b>2,16</b>

Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### c. persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2013 persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial selama lima tahun terakhir memperlihatkan rata-rata persentase yang cukup mengembirakan, yaitu sebesar 95 persen.

Tabel 2.86

#### Prsentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah PMKS yang tertangani	Jenis	24	18	18	18	18
b.	Jumlah PMKS yang ada	Jenis	24	24	18	18	18
	<b>Penanganan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial</b>	%	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Dinas Sosial Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

#### 2.3.2.1. Perhubungan

##### a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang angkutan penumpang umum dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, ini tentunya harus menjadi perhatian yang serius, dan dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Rata rata peningkatan jumlah penumpang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 1 juta penumpang.

Tabel 2.87

**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah penumpang Bis	-	-	-	-	99.648
2.	Jumlah penumpang Kereta api	-	-	-	-	-
3.	Jumlah penumpang Kapal laut	632.783	688.830	512.469	823.177	823.177
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara	4.700.000	5.400.000	6.500.000	7.300.000	8.400.000
5.	Total Jumlah Penumpang	5.323.783	6.088.830	7.012.469	8.123.177	9.322.825

Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.88

**Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten/kota	Jumlah penumpang				Total Jumlah Penumpang
		Bis	Kereta api	Kapal laut	Pesawat udara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=3+4+5+6)
1	Kepulauan Selayar	1662.755	-	-	-	1662.755
2	Bulukumba	5475.716	-	-	-	5475.716
3	Bantaeng	2435.937	-	-	-	2435.937
4	Jeneponto	4699.507	-	-	-	4699.507
5	Takalar	457.7606	-	-	-	457.7606
6	Gowa	8375.522	-	-	-	8375.522
7	Sinjai	3169.612	-	-	-	3169.612
8	Maros	4251.178	-	-	-	4251.178
9	Pangkep	4132.1	-	-	-	4132.1
10	Barru	2270.397	-	-	-	2270.397
11	Bone	9950.937	-	-	-	9950.937
12	Soppeng	324.4955	-	-	-	324.4955
13	Wajo	5341.685	-	-	-	5341.685
14	Sidrap	352.6187	-	-	-	352.6187
15	Pinrang	4858.905	-	-	-	4858.905
16	Enrekang	2626.087	-	-	-	2626.087

No	Kabupaten/kota	Jumlah penumpang				Total Jumlah Penumpang
		Bis	Kereta api	Kapal laut	Pesawat udara	
17	Luwu	4539.337	-	-	-	4539.337
18	Tana Toraja	2856.6	-	-	-	2856.6
19	Luwu Utara	4268.66	-	-	-	4268.66
20	Luwu Timur	3135.004	-	-	-	3135.004
21	Toraja Utara	3524.787	-	-	-	3524.787
22	Makassar	17475.68	-	823.177	8.400.000	9.240.652
23	Pare Pare	1643.63	-	-	-	1643.63
24	Palopo	1919.092	-	-	-	1919.092
	Jumlah	99.648	-	823.177	8.400.000	9.322.825

Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013

#### b. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Berikut adalah data uji Kir yang dilakukan di beberapa Kabupaten/Kota.

Tabel 2.89

Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Selama 1 (satu) Tahun.  
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Angkutan Umum	Mobil penumpang umum			Mobil bus			Mobil barang			Kereta gandengan			Kereta tempelan			Jmlh Angkutan	Jmlh KIR	%
		Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)	(6)	(7)	(8=7/6)	(9)	(10)	(11=10/9)	(12)	(13)	(14=13/12)	(15)	(16)	(17=16/15)	(18)	(19)	(20=19/18)
1	Kepulauan Selayar	163	163	100%	17	17	100%	173	137	100%	-	-	-	-	-	-	317	317	
2	Bulukumba																		
3	Bantaeng																		
4	Jeneponto																		
5	Takalar	90	90	100%	-	-	-	150	150	100%	-	-	-	-	-	-	240	240	
6	Gowa	1754	1753	99%	49	49	100%	4247	4055	90%	-	-	-	-	-	-	6050	5857	
7	Sinjai	178	178	100%	1.208	1.208	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1368	1386	
8	Maros																		
9	Pangkep																		
10	Barru	20	40		744	1178		716	1374	-	-	-	-	-	-	-	1480	2592	
11	Bone	1077	1075		4543	1063		1571	2179	-	-	-	-	-	-	-	7137	4317	
12	Soppeng																		
13	Wajo																		
14	Sidrap																		
15	Pinrang																		
16	Enrekang																		
17	Luwu																		
18	TaTor																		
19	Luwu Utara																		
20	Luwu Timur																		

No	Angkutan Umum	Mobil penumpang umum			Mobil bus			Mobil barang			Kereta gandengan			Kereta tempelan			Jmlh Angkutan	Jmlh KIR	%
		Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%	Jml	Jmlh KIR	%			
21	Torut																		
22	Makassar	12.316	5.410		293	189		35.710	26.488		-	-	-	212	237		48.531	32.324	
23	Pare Pare	64	64		169	169		1264	1264		-	-	-	14	14		1511	1511	
24	Palopo	3014	3012		1821	1816		593	590		-	-	-	-	-		5.428	5.418	
	Jumlah																		

Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013

### c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis mengalami peningkatan, pada tahun 2008 sebesar 96, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 101, peningkatan jumlah ini diakibatkan semakin meningkatnya jumlah penumpang yang melalui pelabuhan laut/udara/terminal, namun peningkatan jumlah tersebut masih sangat kurang dibandingkan dengan peningkatan jumlah penumpang dari tahun ke tahun.

Tabel 2.90

#### Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah pelabuhan laut	59	60	61	61	62
2.	Jumlah pelabuhan udara	11	11	11	12	13
3.	Jumlah terminal bis	26	26	26	26	26
	<b>Jumlah</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>101</b>

Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013

Tabel 2.91

#### Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Menurut Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012

No	Kabupaten/kota	Jumlah		
		Pelabuhan laut	Pelabuhan udara	Terminal bis
1	Kepulauan Selayar	13	2	1
2	Bulukumba	3	-	1
3	Bantaeng	1	-	1
4	Jeneponto	1	-	1
5	Takalar	1	-	1
6	Gowa	-	-	1
7	Sinjai	3	-	1
8	Maros	-	-	1
9	Pangkep	5	-	1
10	Barru	4	-	1
11	Bone	7	1	1
12	Soppeng	-	-	1
13	Wajo	4	-	-
14	Sidrap	1	-	1
15	Pinrang	4	-	1
16	Enrekang	-	-	1

No	Kabupaten/kota	Jumlah		
		Pelabuhan laut	Pelabuhan udara	Terminal bis
17	Luwu	4	1	1
18	Tana Toraja	-	2	1
19	Luwu Utara	1	3	1
20	Luwu Timur	5	1	1
21	Toraja Utara	-	-	1
22	Makassar	2	1	2
23	Palopo	1	1	1
24	Pare-pare	2	-	2
	<b>Jumlah</b>	<b>62</b>	<b>13</b>	<b>26</b>

Sumber : Dinas PerhubunganProv. Sul-Sel Tahun 2013

### 2.3.1.2. Lingkungan Hidup

#### a. persentase Penanganan Sampah

Jumlah produksi sampah dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2009 produksi sampah sebesar 2,3 juta M3 dan pada tahun 2013 menjadi 2,7 juta M3, namun hal tersebut tidak dibarengi dengan jumlah sampah yang ditangani, persentase sampah yang ditangani dari tahun 2009 sebesar 84,80 persen, namun pada tahun 2013 menurun menjadi 81,85 persen.

**Tabel 2.92**  
persentase Penanganan Sampah  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah sampah yang ditangani (M <sup>3</sup> /Thn)	1,983,080	2,063,667	2,104,995	2,147,498	2.273,702
2	Jumlah produksi sampah (M3/Thn)	2,338,596	2,537,022	2,589,619	2,643,827	2,778,016
3	<b>Persentase</b>	<b>84.80</b>	<b>81.34</b>	<b>81.29</b>	<b>81.23</b>	<b>81.85</b>

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**Tabel 2.93**  
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Sampah yang Ditangani (M3/Thn)	Jumlah Volume Produksi Sampah (M3/Thn)	Persentase
1	Kepulauan Selayar	18,190	21,884	83.12
2	Bulukumba	55,264	61,785	100.00
3	Bantaeng	20,638	43,967	46.94
4	Jeneponto	14,037	21,535	100.00
5	Takalar	29,651	38,205	77.61
6	Gowa	145,858	191,916	76.00
7	Sinjai	42,705	76,121	56.10
8	Maros	34,091	59,115	57.67
9	Pangkep	33,950	52,470	73.68

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Sampah yang Ditangani (M3/Thn)	Jumlah Volume Produksi Sampah (M3/Thn)	Persentase
10	Barru	28,873	41,597	69.41
11	Bone	70,419	113,190	62.21
12	Soppeng	88,239	112,145	76.27
13	Wajo	66,286	79,544	83.33
14	Sidrap	62,815	86,641	72.50
15	Pinrang	61,916	69,568	89.00
16	Enrekang	9,118	19,538	46.67
17	Luwu	21,989	27,595	82.43
18	Tana Toraja	33,849	65,582	51.61
19	Luwu Utara	12,620	16,042	78.67
20	Luwu Timur	8,683	43,413	20.00
21	Toraja Utara	20,440	44,548	45.88
22	Makassar	1,193,348	1,263,029	93.71
23	Pare Pare	100,713	106,128	94.90
24	Palopo	100,010	122,458	81.67

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Sulawesi Selatan Tahun 2014

#### b. persentase Penduduk Berakses Air Minum

Peningkatan kualitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kualitas air minum, pada tahun 2009 persentase penduduk terhadap akses air bersih sebesar 80,95 persen, dan pada tahun 2013 menjadi 85,87 persen.

Tabel 2.94

Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah penduduk yang mendapat akses air minum	6,402,141	6,481,108	6,691,486	6,785,324	7,162,581
2	Jumlah penduduk	7,908,512	8,034,776	8,115,638	8,222,631	8,342,049
3	Persentase penduduk berakses air bersih	80.95	80.66	82.45	82.52	85.87

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Tabel 2.95

Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses  
Air Minum dan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum	Persentase
1	Kepulauan Selayar	127,197	115,291	90.54
2	Bulukumba	404,886	327,675	80.85
3	Bantaeng	181,006	170,126	93.89
4	Jeneponto	351,127	305,095	86.92
5	Takalar	280,599	260,285	92.66

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum	Persentase
6	Gowa	696,124	645,308	92.61
7	Sinjai	234,873	162,414	69.08
8	Maros	331,795	285,210	85.87
9	Pangkep	317,126	222,020	69.93
10	Barru	169,319	159,683	94.21
11	Bone	734,114	613,424	83.47
12	Soppeng	225,501	216,231	95.79
13	Wajo	390,584	323,480	82.73
14	Sidrap	283,303	279,083	98.41
15	Pinrang	361,326	325,337	89.94
16	Enrekang	196,396	144,804	73.65
17	Luwu	343,784	258,559	75.08
18	Tana Toraja	226,210	116,791	51.57
19	Luwu Utara	297,278	227,627	76.33
20	Luwu Timur	263,002	205,036	77.88
21	Toraja Utara	222,387	112,016	50.31
22	Makassar	1,408,123	1,406,857	99.80
23	Pare Pare	135,205	132,692	98.04
24	Palopo	160,784	147,537	91.66

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### c. persentase Luas Pemukiman Yang Tertata

persentase luas permukiman yang tertata pada tahun 2009 sebesar 61,48 persen dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 86,11 persen, atau meningkat 25 persen dalam kurun waktu 4 tahun.

**Tabel 2.96**  
persentase Luas Permukiman yang Tertata  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas area permukiman tertata(Ha)	-	43,190	97,776	104,744	114,345.83
2	Luas area permukiman keseluruhan (Ha)	-	70,246.24	122,579.24	125,368.04	132,790.04
3	persentase luas permukiman yang tertata (Ha)	-	61.48	79.77	83.55	86.11

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

**Tabel 2.97**  
**persentase Luas Permukiman yang Tertata Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011**

No	Kabupaten / Kota	Luas Area Permukiman Keseluruhan (Ha)	Luas Area Permukiman Tertata (Ha)	persentase
1	Kepulauan Selayar	872.15	690.15	79.13
2	Bulukumba	237,87	202.56	85.16
3	Bantaeng	7,253.00	6,553.30	90.35
4	Jeneponto	2,674.00	2,333.80	87.28
5	Takalar	1,929.00	1,508.50	78.20
6	Gowa	9,793.26	9,378.68	95.77
7	Sinjai	169.00	126.27	74.72
8	Maros	3,420.48	1,991.88	58.23
9	Pangkep	3,336.70	3,092.80	92.69
10	Barru	2,767.92	1,514.10	54.70
11	Bone	17,779.00	11,349.90	63.84
12	Soppeng	272.73	188.73	69.20
13	Wajo	150.00	138.04	92.03
14	Sidrap	21,395.22	21,130.11	98.76
15	Pinrang	508.20	473.55	93.18
16	Enrekang	3,351.00	2,463.70	73.52
17	Luwu	7,318.00	6,685.30	91.35
18	Tana Toraja	1,474.83	914.13	61.98
19	Luwu Utara	17,717.00	16,106.30	90.91
20	Luwu Timur	10,059.44	9,299.44	92.44
21	Toraja Utara	9,865.00	9,706.50	98.39
22	Makassar	5,400.24	4,501.74	83.36
23	Pare Pare	424.00	310.20	73.16
24	Palopo	4,622.00	3,686.15	79.75

Sumber : Dinas Tata Ruang & Permukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2012

#### **d. Sumber Air yang Dipantau Status Mutu Airnya**

Pemantauan sumber air dilakukan pada sungai-sungai yang ada Sulawesi Selatan, pada tahun 2008 dilakukan pemantauan pada 1 sungai dan menjadi 4 sungai pada tahun 2012. Pemantauan ini akan terus dilakukan pada sungai-sungai lainnya.

**Tabel 2.98**  
**Persentase Jumlah Sumber Air yang Dipantau Status Mutu Airnya**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah sungai yang dipantau mutu airnya	1	1	2	3	4
2.	Jumlah sungai yang dipantau	27	27	27	27	27
3.	persentase Jumlah sumber air yang dipantau Mutu Airnya (1)/(2)	3.70 %	3.70 %	7.41 %	11.11 %	14.81 %

Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013

**e. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah wajib Amdal yang diawasi. persentase pengawasan pada tahun 2008 sebesar 94,94% meningkat menjadi 98,21% di tahun 2012.

**Tabel 2.99**  
**persentase Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi	225	242	267	298	329
2.	Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	237	251	272	300	335
3.	persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (1)/(2)	94,94 %	96,41 %	98,16 %	99,33 %	98,21 %

Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013

**f. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk**

Rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk perlu ditingkatkan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tabel terlihat bahwa rasio daya tampung TPS tahun 2008 sebesar 0,0015% menurun menjadi 0,0014% pada tahun 2012.

**Tabel 2.100**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah Daya Tampung TPS (M <sup>3</sup> )	122,24	122,24	122,24	122,24	122,24
2.	Jumlah Penduduk	7.700.255	7.908.519	8,034,776	8.115.638	8.199.999
3.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah penduduk	0,0015 %	0,0015 %	0,0015 %	0,0015 %	0,0014 %

Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013

**Tabel 2.101**  
**Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk**  
**Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No.	Uraian	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Daya Tampung TPS (Ton)	Rasio
1	Kepulauan Selayar	124.854	18.000,00	14,41 %
2	Bulukumba	399.785	29.040,00	7,26 %
3	Bantaeng	178.861	27.000,00	15,09 %
4	Jeneponto	346.894	-	-
5	Takalar	275.567	-	-
6	Gowa	677.456	43.920,00	6,48 %
7	Sinjai	231.910	46.800,00	20,18 %
8	Maros	325.994	23.400,00	7,18 %
9	Pangkep	311.821	28.800,00	9,23 %
10	Barru	167.580	25.051,20	14,95 %
11	Bone	725.743	126.000,00	17,36 %
12	Soppeng	224.184	98.280,00	43,84 %
13	Wajo	387.423	41.277,60	10,65 %
14	Sidrap	278.091	32.850,00	11,81 %
15	Pinrang	356.334	49.680,00	13,94 %
16	Enrekang	193.534	17.683,56	9,14 %
17	Luwu	338.494	9.000,00	2,66 %
18	Tana Toraja	223.653	12.045,00	5,39 %
19	Luwu Utara	292.670	11.340,00	3,87 %
20	Luwu Timur	254.080	4.200,00	1,65 %
21	Toraja Utara	219.676	-	-
22	Makassar	1.377.494	1.196.513,80	86,86 %
23	Pare Pare	132.540	164.520,00	124,13 %
24	Palopo	155.360	120.600,00	77,62 %
	Jumlah	8.199.999	2.126.001,16	

Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013

#### g. Penegakan Hukum Lingkungan

Kasus lingkungan ditindaklanjuti secara menyeluruh kecuali pada tahun 2011 yang menindaklanjuti 15 dari 16 kasus lingkungan.

**Tabel 2.102**  
**persentase Penegakan Hukum Lingkungan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan penda	5	6	10	15	22
2.	Jumlah kasus lingkungan yang ada	5	6	10	16	22
3.	persentase Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti (1)/(2)	100 %	100 %	100 %	93.75 %	100 %

Sumber : Badan Lingkungan Hidup DaerahProv. Sul-Sel Tahun 2013

### 2.3.1.3. Pertanahan

#### a. persentase Luas Lahan Bersertifikat

Lahan bersertifikat terdiri atas lahan Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGU), dan Hak Pengelolaan (HPL)

Tabel 2.103

#### Luas Lahan Bersertifikat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No.	KABUPATEN /KOTA	2008				2009				2010				2011				2012			
		HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL
1	Makassar	5,703,483		225,346	51,439	1,992,613		708,424		545,822		628,712		473,885		424,490		459,524		385,471	
2	Gowa	8,507,650	491	1,026,243	4,186	4,248,694		334,168		10,183								80,604		176,052	
3	Takalar	2,998,656	7,733	3,747	39,790	2,524,087		5,358		5,605,881		634		285,778		10,787		1,086,873		32,540	
4	Jeneponto	2,208,071	1,420	423,686	6,714	2,257,362				1,116											
5	Maros	1,387,135	1,025	50,571	11,120	1,487,920		61,181													
6	Pangkep	31,966,321				6,458,008				601,992		124,793		1,800,774		154,094		663			
7	Barru																	49,012			
8	Luwu	2,289,090		102,587		2,433,045		12,031		10,442								24,848,000			
9	Tana Toraja	2,230,725	8,300	3,546	143	2,881,629		19,879		857,733		68,615		323,628	60	972		544,152		123,688	
10	Soppeng	99,049,471	1,231			3,041,456				208				3,504,680				8,890,000			
11	Sinjai	2,504,384			8,080	296,264		68,663		2,345,736		359,024		218,004				102,369			
12	Selayar	112,039,223				19,283				53,750		15,445						9,137			
13	Bone	2,726,966	18,170	9,305	42	683,667				1,153,000								530,253			
14	Wajo	608,436	11,528	12,629						2,678				5,548,670				420,232			
15	Pare-Pare	187,714				614,026															
16	Pinrang	5,184,060	1,244	5,250	10,020	3,320,953		14,212		2,130,070		2,048	360	1,265,240		1,512		919,411		9,052	
17	Sidrap	344,096	8,986	19,633	66,068									224,466				27,588			

No.	KABUPATEN /KOTA	2008				2009				2010				2011				2012			
		HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL
18	Enrekang	2,312,079	7,005	403		165,202															
19	Bantaeng	473,860		9,166		3,942,789		41,640		5,881,014		30,392		104,134				14,705			
20	Bulukumba	3,479,244	6,194	15,941	106,259	884,407		4,866		858,729		111,215		3,695,774		1,247		8,111,403		116,433	
21	Luwu Utara	2,422,889	26,330	179,972		4,579,215		21,263		7,870,181		89,500		140,638				1,333,254			
22	Palopo	217,352	495	2,315		102,304				34,131								893,080			
23	Luwu Timur	1,135,581	14,337	1,549	6,881,047	4,637,511		1,995		73,446		52,276						174,087,000			
24	Toraja Utara																				
	<b>Jumlah</b>	289,976,486	114,489	2,091,889	7,184,908	46,543,435		1,293,680		28,036,112		1,482,654	360	17,585,641	60	593,102		222,407,260		843,236	

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

**Tabel 2.104**  
**Rasio Luas Lahan Bersertifikat**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Kab/Kota	2008				2009				2010				2011				2012			
		HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL
1	Makassar	4,616		225,346	51,439	1,567		708,424		408		470		350		314		334		280	
2	Gowa	14,042	1	1,694	7	6,883		334,168		16								120		262	
3	Takalar	11,752	30	15	156	9,784		5,358		20,793		2		1,049		40		3,933		118	
4	Jeneponto	6,644	4	1,275	20	6,755				3											
5	Maros	4,575	3	167	37	4,852		61,181													
6	Pangkep	108,310				21,620				1,969		408		5,831		499		2			
7	Barru																	290			
8	Luwu	7,060		316		14,928		12,031		31								73,308			
9	Tana Toraja	4,839	18	8	0	11,994		19,879		3,880		310		1,449	0	4		2,377		540	

No.	Kab/Kota	2008				2009				2010				2011				2012			
		HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL	HM	HGU	HGB	HPL
10	Soppeng	431,584	1,231			13,064				1				15,502				39,250			
11	Sinjai	11,084			36	1,298		68,663		10,249		1,569		943				440			
12	Selayar	935,133				158				440		127						73			
13	Bone	3,864	26	13	42	961				1,607								726			
14	Wajo	1,607	11,528	12,629						7				14,264				1,073			
15	Pare-Pare	1,596				5,167															
16	Pinrang	14,940	4	15	29	9,460		14,212		6,067		6	360	3,568		4		2,575		25	
17	Sidrap	1,373	36	78	264									817				99			
18	Enrekang	12,294	37	2		867															
19	Bantaeng	2,741		53		22,637		41,640		33,283		172		583				82			
20	Bulukumba	8,909	16	41	272	2,240		4,866		2,176		282		9,273		3		20,228		290	
21	Luwu Utara	7,724	84	574		14,222		21,263		27,377		311		484				4,544			
22	Palopo	1,531	495	2,315		698				231								5,884			
23	Luwu Timur	4,920	62	7	29,881	19,538		1,995		302		215						697,070			
24	Toraja Utara																				
	Jumlah	1,601,179	13,575	244,547	82,113	168,693		1,293,680		108,839		3,872	360	54,116	0	864		852,409		1,516	

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

### b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah penyelesaian kasus tanah negara dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 87,26 persen, namun hal tersebut perlu lebih ditingkatkan lagi.

**Tabel 2.105**  
**Penyelesaian Kasus Tanah Negara**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Kasus yang Diselesaikan	80	119	49	69	139
2	Jumlah Kasus yang Terdaftar	100	131	49	78	169
3	<b>Rasio Penyelesaian Kasus Tanah Negara</b>	<b>80</b>	<b>90,84</b>	<b>100</b>	<b>88,46</b>	<b>82</b>

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### 2.3.1.4. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

##### a. Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber KTP pada Tahun 2009 sebesar 0,38 dan menjadi 0,34 pada tahun 2014, dari data tersebut menunjukkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memiliki KTP.

**Tabel 2.106**  
**Rasio penduduk br KTP per satuan penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2014**

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jml penduduk usia >17 yang ber KTP	1.098.314	1.432.484	1.729.846	2.580.551	1.129.708
2	Jml penduduk usia >17 telah menikah	2.899.394	3.182.705	4.003.715	4.168.185	4.162.610
3	<b>Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk</b>	<b>0.38</b>	<b>0.45</b>	<b>0.43</b>	<b>0.62</b>	<b>0.27</b>

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Prov. Sul-Sel Tahun 2014

##### b. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran dari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami penurunan dari 1,69 pada tahun 2008 menjadi 0,66 pada tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait administrasi akte kelahiran sangat kurang

Pemenuhan hak atas identitas anak melalui kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-17 tahun di Sulawesi Selatan mencapai rata-rata 77.96% (tertinggi Kab. Selayar 71.76%, terendah Kab. Jeneponto 14.10%), namun hanya 54,01% yang dapat menunjukkan bukti akte kelahiran (Susenas, 2012). Akte kelahiran sangat penting untuk mencegah anak dari pemalsuan identitas dan eksploitasi. Banyak anak korban trafficking direkrut dengan dipalsukan umur dan identitasnya. Pada beberapa daerah, banyak anak yang tidak dapat bersekolah karena tidak memiliki akte kelahiran.

Sebagian besar Kabupaten/Kota telah memiliki regulasi untuk penerbitan akte kelahiran gratis, namun ternyata belum sepenuhnya efektif untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran. Untuk itu upaya peningkatan kesadaran masyarakat/ orang

tua untuk mengurus akte kelahiran serta perluasan akses pelayanan pendaftaran akte kelahiran perlu didekatkan ke masyarakat melalui kelurahan/desa dan kecamatan.

**Tabel 2.107**  
**Rasio Bayi Berakte Kelahiran**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jml penduduk ber KK	98.641	57.565	38.478	92.791	64.132
2	Jml penduduk telah menikah	58.461	54.648	83.060	137.002	96.698
3	<b>Rasio bayi br akte kelahiran</b>	<b>1,69</b>	<b>1,05</b>	<b>0,46</b>	<b>0,68</b>	<b>0,66</b>

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Tahun 2013

### c. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2009 sebesar 0,17 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 0,05.

**Tabel 2.108**  
**Rasio Pasangan Berakte Nikah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jml pasangan nikah ber akte nikah	142.046	167.133	183.920	251.398	243.534
2	Jml keseluruhan pasangan nikah	841.584	945.172	938.483	1.140.387	4.162.610
3	<b>Rasio pasangan berakte nikah</b>	<b>0.17</b>	<b>0.18</b>	<b>0.20</b>	<b>0.22</b>	<b>0.05</b>

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Tahun 2014

### d. Kepemilikan KTP

Jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar 40,05 persen dari jumlah penduduk wajib KTP pada tahun 2009 dan pada tahun 2013 menurun menjadi 0,20 persen.

**Tabel 2.109**  
**Kepemilikan KTP**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jml penduduk memiliki KTP	1.504.374	1.783.228	2.405.168	3.154.578	1.129.708
2	Jml penduduk wajib KTP	3.756.032	4.675.309	6.186.197	6.684.925	5.727.660
3	<b>Kepemilikan KTP (%)</b>	<b>40.05</b>	<b>38.14</b>	<b>38.88</b>	<b>47.19</b>	<b>0.20</b>

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Tahun 2014

### e. Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk

Kepemilikan akte kelahiran dalam kurun lima tahun terakhir mengalami peningkatan, dari tahun 2009 sebesar 0,21 persen menjadi 0,29 persen pada tahun 2012, namun peningkatan tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

**Tabel 2.110**  
**Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				2013
		2009	2010	2011	2012	
1	Jml penduduk memiliki akte kelahiratan	1.539.708	1.752.094	2.154.038	2.509.234	1.219.742
2	Jml penduduk	5.752.167	7.142.984	8.486.264	8.710.299	9.414.387
3	<b>Kepemilikan akte kelahiran (%)</b>	<b>0.27</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>	<b>0.29</b>	<b>0.13</b>

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**Tabel 2.111**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP, KK, Akte Lahir, Akte Nikah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan							
		KTP		KK		Akte lahir		Akte nikah	
		Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	blm	Sdh	Blm
1	Selayar	36.181	58.225	40.185	-	15.597	117.932	28.170	32.752
2	Bulukumba	64.995	270.841	109.142	64.596	1.221	433.510	1.234	223.563
3	Bantaeng	20.982	123.253			38.146	154.422	5.265	92.501
4	Jeneponto	54.699	252.262	86.789	64.596	20.122	385.370	618	210.668
5	Takalar	88.715	121.857			10.888	262.893	5.495	134.548
6	Gowa	99.160	437.521	126.535	108.114	3.487	742.826	6.191	353.543
7	Sinjai	103.568	78.120	75.548	33.511	73.369	182.162	5.050	108.108
8	Bone	59.331	569.020	156.091	76.280	32.210	826.703	1.053	384.918
9	Maros	44.175	242.620			1.956	393.104	83	181.188
10	Pangkajene Kepulauan	76.029	177.695	82.504	12.795	48.619	309.411	41.474	116.369
11	Barro	33.183	94.518			24.057	144.681	10.334	73.624
12	Soppeng	31.061	155.207			35.948	215.568	8.490	109.195
13	Wajo	48.943	312.607	122.935	19.028	56.679	418.923	2.501	218.754
14	Sidenreng Rappang	63.878	161.749			61.130	256.546	2.420	146.657
15	Pinrang	97.036	174.138	91.606	-	110.385	296.663	811	179.277
16	Enrekang	56.616	108.674	74.906	97.092	24.342	212.502	2.726	92.337
17	Luwu	46.222	203.739			33.699	337.239	13.802	136.390
18	Tana Toraja	45.854	146.899			3.489	245.183	1.322	94.232
19	Luwu Utara	65.372	182.752	105.768	1.026	58.753	294.084	3.969	151.369
20	Luwu Timur	24.511	169.991			44.061	246.659	11.444	117.141
21	Toraja Utara	34.016	119.033	63.955	357	44.929	188.960	25.027	65.550
22	Kota Makasar	189.934	1.045.085			201.428	1.449.263	19.568	678.627
23	Kota Parepare	32.049	95.078	38.257	10.741	19.918	155.117	17.139	58.907
24	Kota Palopo	36.895	92.933	45.487	6.408	34.977	145.149	17.139	59.839
	Jumlah se-provinsi	1.453.405	5.395.817	1.316.800	260.036	999.410	8.414.870	228.280	4.020.057

Sumber : Biro Pemerintahan Umum Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### 2.3.1.5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### a. persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintahan

persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tabel diatas, menunjukkan angka lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jika dilihat berdasarkan golongan ruang, perbedaan ini lebih banyak dipengaruhi oleh PNS laki-laki yang berada di golongan ruang I-a sampai II-b yang mencapai hampir seperempat dari jumlah total. Hal menarik yang dapat dicermati dari tabel diatas adalah semakin tinggi golongan ruang, maka semakin kecil persentase atau jumlah

perempuannya. Ini menunjukkan masih terdapat perbedaan peluang dan partisipasi perempuan dalam jabatan struktural yang berkorelasi positif dengan golongan ruang. Data dari Badan Kepegawaian Daerah menunjukkan bahwa partisipasi perempuan pada jabatan struktural pemerintah provinsi pada tahun 2012 baru mencapai 36 %, dimana hampir pada seluruh jenjang eselon jabatan struktural, dominasi laki-laki masih sangat menonjol. Jika hal ini dikaitkan dengan golongan ruang PNS, khususnya pada golongan ruang III-a sampai III-d yang hanya selisih 1% antara laki-laki dan perempuan, maka dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan akses bagi PNS perempuan untuk menduduki jabatan struktural.

**Tabel 2.112**  
**persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Golongan Ruang	Tahun 2012			
		PNS Pria		PNS Wanita	
		Jumlah	ersentase	Jumlah	persentase
1	I/a	65	81%	15	19%
2	I/b	36	95%	2	5%
3	I/c	106	87%	16	13%
4	I/d	55	83%	11	17%
5	II/a	618	70%	263	30%
6	II/b	422	66%	216	34%
7	II/c	219	36%	395	64%
8	II/d	171	45%	207	55%
9	III/a	595	50%	604	50%
10	III/b	1106	55%	904	45%
11	III/c	530	51%	513	49%
12	III/d	730	48%	797	52%
13	IV/a	478	55%	398	45%
14	IV/b	186	68%	89	32%
15	IV/c	58	64%	33	36%
16	IV/d	48	72%	19	28%
17	IV/e	5	71%	2	29%
	<b>Total</b>	<b>5428</b>	<b>55%</b>	<b>4484</b>	<b>45%</b>

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

#### **b. Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta**

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, dalam hal ini ditinjau dari jumlah tenaga kerja perempuan di perusahaan swasta, menunjukkan persentase yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini bermakna rendahnya partisipasi perempuan yang kemungkinan besar disebabkan oleh terbatasnya akses perempuan di lapangan kerja swasta. Budaya patriarkhi masih menempatkan perempuan pada jenis-jenis pekerjaan dalam kategori marginal, seperti buruh perusahaan dan pelayan toko. Peluang kerja yang ditawarkan oleh perusahaan swasta lebih banyak terbuka untuk laki-laki.

**Tabel 2.113**  
**persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO	JENIS DATA	Tahun										
		2008	%	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	
1	Jenis Perusahaan	10.177		11.348		12.059		11.067		11.358		
2	Jumlah	153.492		174.166		175.783		190.736		186.345		
3	Jumlah Tenaga Kerja Formal	L	113.670	74	133.639	77	122.661	70	135.802	71	144.298	77
		W	39.822	26	40.527	23	53.122	30	54.934	29	44.047	24

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

### c. Jumlah Laporan Penanganan KDRT

Penanganan kasus KDRT merupakan mandat SPM urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana tertuang dalam SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pelayanan terpadu ini menuntut jejaring kerja antar lembaga pemerintah yang meliputi Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BPPKB, Kementerian Agama, Bapas dan Lapas, serta lembaga non pemerintah dalam penyediaan layanan bantuan hukum dan konseling psikologis. Berdasarkan laporan dari beberapa lembaga dan kabupaten/kota sebagaimana tercermin dalam tabel diatas, nampak terjadi peningkatan jumlah aduan kasus yang ditangani. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan menjadi tantangan nyata di provinsi dan kabupaten/kota yang menuntut keseriusan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan terpadu sesuai standar SPM dan peraturan perundangan lainnya terkait perlindungan perempuan dan anak.

**Tabel 2.114**  
**Jumlah Laporan Penanganan Kasus KDRT Terhadap Perempuan & Anak**  
**Tahun 2009 - 2012**

Uraian	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Laporan Penanganan Kasus KDRT	315	313	540	728

Sumber Data : Diolah dari Data UPPA Polda, LPA dan P2TP2A kab/Kota Tahun 2013

**Tabel 2.115**  
**Data Pelayanan TKTPA (Korban Kekerasan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013**

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Laki-laki	0	0	56	40	28
Perempuan	0	0	90	26	85

Sumber Data : BPPKB Tahun 2014

### d. Angkatan Kerja Dibawah Umur

Angkatan kerja dibawah umur di Sulawesi Selatan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan adanya penurunan jumlah. Namun demikian, data diatas memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja. Pada umumnya anak bekerja karena faktor ekonomi keluarga atau pengetahuan orang tua yang relative rendah tentang hak tumbuh kembang anak, sehingga penguatan ketahanan

keluarga menjadi sangat penting maknanya dalam upaya pengurangan jumlah anak yang bekerja. Kondisi ini menjadi lebih memprihatinkan karena sebagian besar pekerja di bawah umur terlibat pada jenis-jenis pekerjaan terburuk. Di Sulawesi Selatan telah dibentuk Komite Aksi Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan sejak tahun 2011 yang lalu telah disusun Rencana Aksi Penghapusan Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang dilegalkan melalui Peraturan Gubernur. Namun demikian, nampaknya kerja komite aksi ini masih harus lebih ditingkatkan dengan memperhatikan masih banyaknya jumlah anak di bawah umur yang terpaksa bekerja.

**Tabel 2.116**  
**Angkatan Kerja Menurut Umur 15-19 Tahun**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

Uraian	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Angkatan Kerja Usia 15-19 Tahun</b>	296.560	230.906	210.975	216.494	183.833

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### e. Indeks Pembangunan Gender

Pembangunan pada dasarnya harus memberikan keadilan dan kemakmuran kepada semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, namun pembangunan di Sulawesi Selatan belum memberikan kemanfaatan yang adil dan setara. Dalam beberapa bidang pembangunan, keadaan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki dan dalam bidang pembangunan lainnya keadaan laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan yang tercermin dalam IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) Sulawesi Selatan masih berada di papan bawah diantara 33 provinsi di Indonesia. Indeks pembangunan gender ini menggambarkan capaian indikator IPM yang dilihat dalam perspektif gender dimana angka melek huruf laki-laki 92,67% dan perempuan 88,26%, rata-rata lama sekolah laki-laki 8,3 tahun dan perempuan 7,8 tahun, sumbangan pendapatan laki-laki 69,78 dan perempuan hanya 30,22.

**Tabel 2.117**  
**Indeks Pembangunan Gender**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2013**

No	Indeks Pembangunan Gender	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Sulawesi Selatan	62,75	63,50	64,57
2	Nasional	63,38	63,88	64,42

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2014

Pada tahun 2013, IPG, yang merupakan pembangunan manusia berbasis gender, hanya berada di urutan ke 26. Nilai IPG di bawah nilai IPM menunjukkan adanya kesenjangan gender di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. IDG yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, hanya berada di urutan ke 21. Capaian dua indikator utama pembangunan gender di Sulawesi Selatan tersebut menunjukkan masih terdapat kesenjangan kesetaraan dan keadilan gender di sektor pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi yang menuntut

peran aktif seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah maupun non pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

### 2.3.1.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### a. Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga

Pembangunan berwawasan kependudukan dapat diperkuat melalui pelaksanaan pembangunan kependudukan melalui upaya pengendali kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk dalam lingkungan hidup. Upaya pengendalian kuantitas penduduk dapat dilakukan melalui program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga guna terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera serta memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi sebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk ( SP ) tahun 2010, jumlah penduduk Prov. Sulsel sebanyak **8.034.776** jiwa terdiri dari laki- laki sebanyak **3.924.431** jiwa dan perempuan sebanyak **4.110.345** jiwa. Mencermati hasil sensus penduduk tersebut, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulsel periode tahun 2000- 2010 rata-rata laju pertumbuhan adalah 1,17% pertahun dan dibawah rata-rata laju pertumbuhan nasional pada periode yang sama yakni 1,49 % pertahun. Rata-rata jumlah anak per keluarga mengindikasikan terhadap angka fertilitas pasangan usia subur atau TFR (Total Fertility Rate). Berdasarkan data tahun 2008 sampai tahun 2012, menunjukkan adanya peningkatan jumlah anah per keluarga. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, karena akan berkorelasi positif terhadap peningkatan jumlah penduduk di daerah. Peningkatan jumlah penduduk di sebuah wilayah, pada umumnya akan berdampak pada meningkatnya masalah-masalah sosial masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karenanya, perlu ada upaya terintegrasi dari seluruh sektor dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Sulawesi Selatan. Pendewasaan usia perkawinan dan perencanaan jumlah anak di keluarga, juga menjadi bagian penting dalam hal ini. Gambaran rata-rata jumlah anak per keluarga di Sulawesi Selatan secara rinci disajikan pada tabel berikut

**Tabel 2.118**  
**Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Anak	2.232.014	2.136.138	3.357.960	3.383.461	3.376.553
2	Jumlah Keluarga	1.869.608	1.914.890	1.956.436	2.041.425	2.008.646
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,19	1,12	1,72	1,66	1,68

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

#### b. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB menunjukkan perbandingan jumlah akseptor dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah. Berdasarkan data tahun 2008 sampai 2012 menunjukkan peningkatan rasio akseptor KB, meskipun dari tahun 2011 ke tahun 2012 terjadi penurunan persentase. Namun demikian, secara umum angka rasio ini masih harus ditingkatkan, mengingat pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun selalu

meningkat. Salah satu bentuk upaya sejak dini untuk mendorong peningkatan jumlah akseptor ini adalah melalui pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan Genre (generasi berencana), yang diharapkan mampu merubah pandangan generasi tentang pentingnya KB.

**Tabel 2.119**  
**Rasio Akseptor KB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Jumlah Akseptor KB	Jml	254,738.00	312,494.00	342,660.00	385,636.00	381,469.00
b.	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jml	1,250,080.00	1,283,553.00	1,324,031.00	1,351,935.00	1,388,691.00
	<b>Rasio Akseptor KB</b>	<b>%</b>	<b>20.38</b>	<b>24.35</b>	<b>25.88</b>	<b>28.52</b>	<b>27.47</b>

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

### c. Cakupan Peserta KB Aktif

Cakupan peserta KB aktif di Sulawesi Selatan meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana tabel diatas. Namun angka peningkatannya di tahun 2011 ke tahun 2012 relatif rendah jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga penyuluh lapangan yang diharapkan dapat mendorong motivasi dan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif. Selain itu, kepesertaan KB pria yang rendah menjadi persoalan yang mempengaruhi angka cakupan. Oleh karenanya, kepesertaan KB pria hendaknya menjadi agenda utama dalam rangka peningkatan cakupan peserta KB aktif, disamping peningkatan ketersediaan tenaga penyuluh lapangan.

**Tabel 2.120**  
**Tabel Cakupan Peserta KB Aktif**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Jumlah Peserta Program KB Aktif	Jml	775,049.00	825,220.00	932,461.00	980,883.00	1,020,312.00
b.	Jumlah Pasangan Usia Subur	Jml	1,250,080.00	1,283,553.00	1,324,031.00	1,351,935.00	1,388,691.00
	<b>Cakupan Peserta KB Aktif</b>	<b>%</b>	<b>62.00</b>	<b>64.29</b>	<b>70.43</b>	<b>72.55</b>	<b>73.47</b>

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

### d. Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 masih menjadi salah satu tolok ukur kemiskinan di masyarakat. Tingginya jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 mencerminkan masih ada persoalan kemiskinan di wilayah tersebut yang harus diselesaikan secara holistic. Penurunan jumlah keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 setiap tahunnya di Sulawesi Selatan, jika dirata-ratakan dari tahun 2008 sampai tahun 2012, hanya mampu pada kisaran 0,87%. Angka ini tentunya harus lebih ditingkatkan dalam rangka akselerasi penghapusan kemiskinan di Sulawesi Selatan.

**Tabel 2.121**  
**Keluarga Pra Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Jumlah Keluarga pra sejahtera dan Sejahtera 1	Jml	781,366.00	792,483.00	788,725.00	782,640.00	769,176.00
b.	Jumlah Keluarga	Jml	1,869,608.00	1,914,890.00	1,956,436.00	2,041,425.00	2,008,646.00
	<b>Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I</b>	<b>%</b>	<b>41.79</b>	<b>41.39</b>	<b>40.31</b>	<b>38.34</b>	<b>38.29</b>

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. Sul-Sel Tahun 2013

**e. Posyandu Aktif**

persentase Jumlah Posyandu aktif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 98 persen tiap tahunnya, ini tentunya didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang arti kesehatan.

**Tabel 2.122**  
**Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO.	KABUPAT EN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Total Posyandu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)	Total Posyandu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)	Total Posyandu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)	Total Posyandu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)	Total Posyandu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$	9	10	11 = $\frac{10}{9} \times 100\%$	12	13	14 = $\frac{13}{12} \times 100\%$	15	16	17 = $\frac{16}{15} \times 100\%$
1	Makassar	910	910	100.00	284	284	100.00	939	939	100.00	894	894	100.00	920	920	100.00
2	Gowa	577	577	100.00	655	655	100.00	688	668	97.09	492	492	100.00	613	613	100.00
3	Takalar	359	359	100.00	387	387	100.00	402	387	96.27	390	390	100.00	374	374	100.00
4	Jeneponto	428	428	100.00	381	363	95.28	411	355	86.37	365	365	100.00	328	323	98.48
5	Bantaeng	254	193	75.98	254	193	75.98	254	193	75.98	200	200	100.00	200	200	100.00
6	Bulukumba	471	436	92.57	482	482	100.00	511	511	100.00	472	472	100.00	454	454	100.00
7	Selayar	248	248	100.00	258	258	100.00	258	252	97.67	258	258	100.00	258	258	100.00
8	Sinjai	309	309	100.00	316	316	100.00	318	317	99.69	322	322	100.00	322	322	100.00
9	Maros	386	389	100.78	386	386	100.00	391	390	99.74	386	386	100.00	369	369	100.00
10	Pangkep	272	272	100.00	303	303	100.00	300	300	100.00	305	305	100.00	342	342	100.00
11	Barru	198	198	100.00	209	197	94.26	197	197	100.00	192	192	100.00	227	227	100.00
12	Pare-pare	112	110	98.21	114	110	96.49	115	112	97.39	115	112	97.39	115	112	97.39
13	Bone	783	783	100.00	915	915	100.00	3,491	3,491	100.00	875	875	100.00	875	875	100.00

NO.	KABUPAT EN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Total Posya ndu	Juml. Posyandu Aktif	Posyandu Aktif (%)	Total Posya ndu	Juml. Posyandu Aktif	Posyand u Aktif (%)	Total Posya ndu	Juml. Posyandu Aktif	Posyand u Aktif (%)	Total Posya ndu	Juml. Posyandu Aktif	Posyand u Aktif (%)	Total Posya ndu	Juml. Posyand u Aktif	Posyandu Aktif (%)
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100\%$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100\%$ %	9	10	11 = $\frac{10}{9} \times 100\%$	12	13	14 = $\frac{13}{12} \times 100\%$	15	16	17 = $\frac{16}{15} \times 100\%$
14	Soppeng	311	298	95.82	196	170	86.73	324	324	100.00	309	271	87.70	302	302	100.00
15	Wajo	443	424	95.71	442	419	94.80	733	733	100.00	704	704	100.00	707	707	100.00
16	Sidrap	278	255	91.73	315	315	100.00	308	308	100.00	309	309	100.00	310	310	100.00
17	Pinrang	338	338	100.00	353	319	90.37	354	349	98.59	363	342	94.21	353	342	96.88
18	Luwu	350	348	99.43	372	334	89.78	378	363	96.03	378	378	100.00	382	382	100.00
19	Luwu Utara	247	247	100.00	267	267	100.00	288	278	96.53	340	340	100.00	287	287	100.00
20	Luwu Timur	230	230	100.00	177	177	100.00	232	232	100.00	245	227	92.65	245	245	100.00
21	Palopo	131	128	97.71	139	139	100.00	136	136	100.00	198	127	64.14	206	127	61.65
22	Enrekang	360	275	76.39	257	257	100.00	279	267	95.70	225	225	100.00	228	228	100.00
23	Toraja	246	246	100.00	246	246	100.00	246	246	100.00	246	246	100.00	246	246	100.00
24	Toraja Utara	-	-	-	135	135	100.00	143	143	100.00	135	135	100.00	138	138	100.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>8,241</b>	<b>8,001</b>	<b>97.09</b>	<b>7,843</b>	<b>7,627</b>	<b>97.25</b>	<b>11,696</b>	<b>11,491</b>	<b>98.25</b>	<b>8,718</b>	<b>8,567</b>	<b>98.27</b>	<b>8,801</b>	<b>8,703</b>	<b>98.89</b>

Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013

### 2.3.1.7. Tenaga Kerja

#### a. Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerjadan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin.

Pada Tahun 2013 penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan pada tingkat partisipasi angkatan kerja masih didominasi oleh angkatan kerja laki-laki sebesar 80,47 persen dan angkatan kerja perempuan hanya sebesar 42,27 persen.

Tabel 2.123

#### Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	ANGKATAN KERJA	2.200.143	1.268.049	3.468.192
	Bekerja	2.093.498	1.197.782	3.291.280
	Pengangguran	106.645	70.267	176.912
2	BUKAN ANGKATAN KERJA	534.038	1.731.528	2.265.566
	Sekolah	242.585	269.349	511.934
	Mengurus RT	62.034	1.323.865	1.385.899
	Lainnya	229.419	138.314	367.733
	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	2.734.181	2.999.577	5.733.758
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja)	80,47	42,27	60,49
4	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	4,85	5,54	5,10

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### b. Penduduk Angkatan Kerja

Pada tabel penduduk angkatan kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 menunjukkan bahwa penduduk pada usia 20-24 tahun merupakan jumlah pencari pekerjaan terbesar, yaitu sebesar 54.600 orang atau 30,86% dari total pencari kerja, ini memperlihatkan bahwa masih banyaknya pencari pekerjaan yang berasal dari tamatan SMA.

Tabel 2.124

#### Penduduk Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
(1)	(2)	(3)	(4=2+3)
15-19	183.833	50.758	234.591
20-24	303.535	54.600	358.135
25-29	420.527	30.440	450.967
30-34	487.940	18.504	506.444
35-39	411.456	5.486	416.942
40-44	447.316	9.466	456.782
45-49	322.419	3.317	325.736
50-54	262.895	2.232	265.127

Golongan Umur	Angkatan Kerja		Jumlah
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	
55-59	177.698	1.656	179.354
60-64	273.661	453	274.114
Total	3.291.280	176.912	3.468.192

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### c. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Dari tabel penduduk bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa 44,02 persen penduduk bekerja di bidang pertanian, hal ini menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja di bidang pertanian lebih besar dibandingkan dengan penyediaan lapangan kerja lainnya.

**Tabel 2.125**  
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013

No	Kabupaten /Kota	Lapangan Usaha									Jml
		Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	Pertambangan dan Penggalian	Industri	Listrik, Gas dan Air Minum	Konstruksi	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	Lmbg Keuangan, Real Estate, Ush Persewaan & Js Perusahaan	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	
1	Selayar	26.004	363	3.707	272	2.678	5.661	652	423	10.741	52.064
2	Bulukumba	88.679		10.447	267	8.097	30.198	8.244	463	21.303	188.255
3	Bantaeng	39.642	87	2.847		2.311	10.796	4.535	321	20.193	84.827
4	Jeneponto	96.663	937	683		8.280	13.539	10.616	218	14.544	156.601
5	Takalar	38.563	2.251	5.103	266	15.313	19.650	8.164	3.693	16.989	113.782
6	Gowa	142.509	695	21.324	499	20.425	52.638	12.343	5.413	41.501	273.211
7	Sinjai	72.562	559	1.443	393	464	13.963	1.621	800	18.544	112.493
8	Maros	42.328	1.891	9.764	233	9.072	29.848	.977	2.872	25.881	134.344
9	Pangkep	30.969	2.502	14.035	403	10.315	18.665	6.228	4.412	22.988	113.656
10	Baru	25.943	136	2.258	288	3.281	8.976	1.252	959	16.614	63.983
11	Bone	182.946	2.521	13.071		5.270	49.051	13.445	2.378	41.954	322.088
12	Soppeng	58.178	492	4.077		1.431	7.873	1.608	946	13.662	97.953
13	Wajo	78.569	210	17.843	2.941	7.641	26.144	6.030	2.421	18.159	168.455
14	Sidrap	43.556	819	5.537	144	2.351	20.871	7.939	1.906	12.953	104.710
15	Pinrang	63.389	685	6.792	168	6.349	21.541	3.248	2.641	19.160	126.724
16	Enrekang	56.521		2.967	111	2.383	7.789	2.022	953	13.994	90.720
17	Luwu	69.684	683	15.670		3.301	12.783	4.376	1.088	12.978	118.667
18	Tana Toraja	79.949	197	1.018	603	2.664	4.318	4.264	735	4.678	105.929
19	Luwu Utara	66.067		5.925		3.617	20.238	1.870	1.136	15.740	121.584
20	Luwu Timur	49.063	3.606	5.325	271	9.403	16.510	2.558	2.086	16.108	101.769
21	Toraja Utara	61.162	138	1.193	93	5.617	5.796	4.165	515	8.978	89.993
22	Makassar	1.082	276	3.105	130	5.589	17.692	6.145	2.120	14.931	502.308
23	Parepare	12.569	435	3.172	212	4.071	15.614	4.654	1.488	16.222	51.819
24	Palopo	1.554	2.298	39.026	1.052	51.823	173.650	46.031	32.151	180.180	55.973
Total se provinsi		1.475.783	1.428.151	21.781	196.332	8.346	191.746	603.804	169.987	72.138	598.995

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**d. Angka Partisipasi Angkatan Kerja**

Angka partisipasi angkatan kerja dalam kurun lima tahun terakhir relatif stagnan, tidak ada peningkatan yang cukup signifikan, hal ini tentunya perlu menjadi perhatian di masa yang akan datang.

**Tabel 2.126**  
**Angka Partisipasi Angkatan Kerja**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	TAHUN				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Angkatan Kerja 15 Tahun keatas	Jiwa	3.536.920	3.571.317	3.612.424	3.560.891	3.468.192
b.	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun keatas	Jiwa	5.660.624	5.567.601	5.616.709	5.667.985	5.733.758
	<b>Angka Partisipasi Angkatan Kerja</b>		<b>62,48</b>	<b>64,14</b>	<b>64,32</b>	<b>62,82</b>	<b>60,48</b>

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**e. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun**

Angka sengketa antara pengusaha dengan pekerja selama kurun waktu lima tahun rata-rata sebesar 8,47 persen, pada tahun 2013 jumlah perusahaan sebesar 11.452 perusahaan dengan jumlah sengketa sebanyak 155, hal ini tentunya perlu upaya pemerintah untuk dapat memfasilitasi sengketa antara pemilik perusahaan dan karyawan.

**Tabel 2.127**  
**Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	Jml	276	210	189	142	155
b.	Jumlah Perusahaan	Jml	11.348	12.059	11.067	11.358	11.452
c.	<b>Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per-Tahun</b>		<b>2,43</b>	<b>1,74</b>	<b>1,70</b>	<b>1,25</b>	<b>1,35</b>

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**f. Pencari Kerja Yang Ditempatkan**

Pencari kerja yang ditempatkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2009 pencari kerja yang ditempatkan sebesar 7,69 persen dan pada tahun 2013 menjadi 12,89 persen.

**Tabel 2.128**  
**Pencari Kerja Yang Ditempatkan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	Orang	15.722	25.754	21.067	30.094	31.503
b.	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	Orang	204.373,00	225.371,00	232.496,00	235.115,00	244.300

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
c.	Pencari Kerja yang ditempatkan	%	7,69	11,43	9,06	12,80	12,89

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2013

### g. Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2009 pengangguran terbuka sebesar 8,90 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi 5,10 persen atau turun sebesar 3,80 point.

#### Tingkat 2.129

#### Pengangguran Terbuka

#### Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja	Orang	314,664	298,952	236,926	208,983	176.912
b.	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	3,536,920	3,571,317	3,612,424	3,560,891	3.468.192
c.	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>%</b>	<b>8.90</b>	<b>8.37</b>	<b>6.56</b>	<b>5.87</b>	<b>5,10</b>

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### h. Keselamatan Dan Perlindungan

Persentase jumlah perusahaan yang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja selama kurun waktu lima tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar 100 persen.

#### Tabel 2.130

#### Keselamatan Dan Perlindungan

#### Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Jml	11.348	12.059	11.067	11.358	11.452
b.	Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten	Jml	11.348	12.059	11.067	11.358	11.452
c.	<b>Keselamatan dan Perlindungan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### i. Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

persentase penyelesaian perselisihan buruh dan Pengusaha terhadap pemerintah sebesar seratus persen tiap tahunnya.

**Tabel 2.131**  
**Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	Jml	276	210	189	142	155
b.	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan Pemda	Jml	276	210	189	142	155
c.	<b>persentase penyelesaian perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### 2.3.1.8. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

#### a. persentase Koperasi Aktif Kabupaten/Kota

Persentase koperasi aktif mengalami penurunan, dari tahun 2009 persentase koperasi aktif sebesar 67 persen dan pada tahun 2013 menurun menjadi 69 persen.

**Tabel 2.132**  
**persentase Koperasi Aktif Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah Koperasi Aktif	4.949	5.105	5.452	5.554	5.771
b.	Jumlah Koperasi	7.292	7.497	7.958	8.026	8.230
c.	<b>persentase Koperasi Aktif</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>69</b>

Sumber Data : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013

#### b. Jumlah UKM Non BPR/LKM

Jumlah UMKM Non BPR/LKM mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pada tahun 2009 jumlah umkm sebesar 820.324 dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 901.563, atau meningkat sebesar 99.616 (12 persen).

**Tabel 2.133**  
**Jumlah UKM Non BPR/LKM**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah seluruh UMKM	824.417	860.163	894.163	914.902	916.232
2	Jumlah BPR/LKM	22	22	22	22	22
3	Jumlah UMKM Non BPR/LKM	820.324	856.909	889.396	900.263	901.563

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013

**Tabel 2.134**  
**Jumlah UKM Non BPR/LKM Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Maros					
	Jumlah seluruh UMKM	27.998	29.210	30.113	30.526	<b>30.554</b>
	Jumlah BPR/LKM	2	2	2	2	<b>2</b>
	Jumlah UMKM non BPR	27.858	29.063	29.962	30.037	<b>30.401</b>
2	Kabupaten Pangkep					
	Jumlah seluruh UMKM	29.951	31.253	31.904	32.352	<b>32.372</b>
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	<b>1</b>
	Jumlah UMKM non BPR	29.801	31.096	31.744	31.834	<b>32.210</b>
3	Kabupaten Barru					
	Jumlah seluruh UMKM	16.990	17.717	18.098	18.350	18.358
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	16.905	17.628	18.007	18.056	18.266
4	Kota Pare-Pare					
	Jumlah seluruh UMKM	14.158	14.752	15.221	15.489	15.515
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	14.087	14.678	15.144	15.241	15.437
5	Kabupaten Pinrang					
	Jumlah seluruh UMKM	29.946	31.248	31.899	32.346	32.367
	Jumlah UMKM non BPR	-	-	-	-	-
	Jumlah UKM non BPR	29.796	31.091	31.729	32.828	32.205
6	Kabupaten Sidrap					
	Jumlah UMKM non BPR	26.535	27.689	28.269	28.677	28.952
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	26.402	27.550	28.127	28.218	28.807
7	Kabupaten Wajo					
	Jumlah seluruh UMKM	54.337	56.724	57.885	58.709	58.742
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
	Jumlah UMKM non BPR	54.065	56.440	57,595	57.769	58.448
8	Kabupaten Soppeng					
	Jumlah seluruh UMKM	26.147	27.283	27.855	28.255	28.262
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	26.016	27.148	27.715	27.802	28.120
9	Kabupaten Luwu					
	Jumlah seluruh UMKM	29.543	30.832	31.475	31.920	31.936
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UKM non BPR	29.395	30.677	31.317	31.409	31.776
10	Kota Palopo					
	Jumlah seluruh UMKM	12.851	13.383	13.811	14.029	14.076
	Jumlah BPR/LKM					
	Jumlah UMKM non BPR	12.786	13.316	13.471	13.804	14.005

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
11	Kabupaten Luwu Utara					
	Jumlah seluruh UMKM	22.569	23.543	24.040	24.364	24.390
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
	Jumlah UMKM non BPR	22.456	23.425	23.919	23.974	24.268
12	Kabupaten Luwu Timur					
	Jumlah seluruh UMKM	18.532	19.324	19.737	19.992	20.022
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
	Jumlah UMKM non BPR	18.439	19.227	19.638	19.672	19.921
13	Kabupaten Tana Toraja					
	Jumlah seluruh UMKM	19.962	14.298	14.754	14.940	14.964
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
	Jumlah UMKM non BPR	19.862	14.226	14.680	14.700	14.889
14	Kabupaten Toraja Utara					
	Jumlah seluruh UMKM	14.323	21.459	22.130	22.450	22.461
	Jumlah BPR/LKM					
	Jumlah UMKM non BPR	14.251	21.351	22.019	22.337	22.348
15	Kabupaten Bone					
	Jumlah seluruh UMKM	77.889	81.325	85.418	87.372	87.372
	Jumlah BPR/LKM	3	3	3	3	3
	Jumlah UMKM non BPR	77.499	80.918	84.990	86.879	86.935
16	Kabupaten Sinjai					
	Jumlah seluruh UMKM	23.205	24.211	24.479	24.699	24.714
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	23.088	24.089	24,356	24.328	24.590
17	Kabupaten Bulukumba					
	Jumlah seluruh UMKM	41.090	42.871	44.184	44.752	44.836
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	40.884	42.656	43.963	44.528	44.611
18	Kabupaten Bantaeng					
	Jumlah seluruh UMKM	21.356	22.281	22.753	23.073	23.083
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	21.249	22.169	22.639	22.957	22.967
19	Kabupaten Selayar					
	Jumlah seluruh UMKM	14.215	14.822	15.145	15.354	15.361
	Jumlah BPR/LKM	1	1	1	1	1
	Jumlah UMKM non BPR	14.143	14.747	15.069	15.277	15.284
20	Kabupaten Jeneponto					
	Jumlah seluruh UMKM	35.675	37.238	38.009	38.550	38.568
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	35.496	37.051	37.818	38.357	38.375
21	Kabupaten Takalar					
	Jumlah seluruh UMKM	34.420	35.922	36.667	37.177	37.206
	Jumlah BPR/LKM	2	2	2	2	2

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Jumlah UMKM non BPR	34.247	35.742	36.483	37.991	37.019
22	Kabupaten Enrekang					
	Jumlah seluruh UMKM	16.977	17.706	18.087	18.336	18.347
	Jumlah BPR/LKM	-	-	-	-	-
	Jumlah UMKM non BPR	16.892	17.617	17.996	18.244	18.255
23	Kabupaten Gowa					
	Jumlah seluruh UMKM	74.327	77.613	79.971	81.127	81.157
	Jumlah BPR/LKM	3	3	3	3	3
	Jumlah UMKM non BPR	73.955	77.224	79.568	80.721	80.751
24	Kota Makassar					
	Jumlah seluruh UMKM	141.421	147.482	162.259	172.632	172.632
	Jumlah BPR/LKM	5	5	5	5	5
	Jumlah UMKM non BPR	140.712	146.744	161.447	169.210	171.768

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013

### c. Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil

persentase jumlah usaha mikro dan kecil dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2009 persentase usaha mikro dan kecil sebesar 99,47 persen dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 99,48 persen..

**Tabel 2.135**

#### Usaha Mikro Dan Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
A	Jumlah usaha mikro	jml	723,288	755,292	780,452	797,081	797,081
B	Jumlah usaha kecil	jml	96,760	101,205	109,323	112,657	114,656
C	Jumlah UKM	jml	824,416	860,810	894,160	916,500	916,500
d.	<b>Usaha Mikro dan Kecil</b>	%	<b>99.47</b>	<b>99.50</b>	<b>99.51</b>	<b>99.26</b>	<b>99.48</b>

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013

**Tabel 2.136**

#### Jumlah Usaha Mikro Dan Jumlah seluruh UMKM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kabupaten Maros					
	Jumlah Usaha Mikro	24.234	25.361	26.019	26.358	26.358
	Jumlah seluruh UMKM	27.998	29.236	30.113	30.565	<b>30.554</b>
2	Kabupaten Pangkep					
	Jumlah Usaha Mikro	26.851	28.082	28.551	28.910	28.910
	Jumlah seluruh UMKM	29.951	31.279	31.904	32.383	<b>32.372</b>
3	Kabupaten Barru					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Jumlah Usaha Mikro	15.217	15.939	16.206	16.409	16.409
	Jumlah seluruh UMKM	16.990	17.743	18.098	18.369	18.358
4	Kota Pare-Pare					
	Jumlah Usaha Mikro	11.741	12.267	12.600	12.828	12.828
	Jumlah seluruh UMKM	14.158	14.778	15.221	15.526	15.515
5	Kabupaten Pinrang					
	Jumlah Usaha Mikro	26.035	27.163	27.633	27.991	27.991
	Jumlah seluruh UMKM	29.946	31.274	31.899	32.378	32.367
6	Kabupaten Sidrap					
	Jumlah Usaha Mikro	23.782	24.784	25.200	25.518	25.518
	Jumlah seluruh UMKM	26.535	27.715	28.269	28.963	28.952
7	Kabupaten Wajo					
	Jumlah Usaha Mikro	48.778	50.828	51.679	52.331	52.331
	Jumlah seluruh UMKM	54.337	56.750	57.885	58.753	58.742
8	Kabupaten Soppeng					
	Jumlah Usaha Mikro	23.219	24.206	24.615	24.929	24.929
	Jumlah seluruh UMKM	26.147	27.309	27.855	28.273	28.262
9	Kabupaten Luwu					
	Jumlah Usaha Mikro	27.550	28.667	29.130	29.484	29.484
	Jumlah seluruh UMKM	29.543	30.858	31.475	31.947	31.936
10	Kota Palopo					
	Jumlah Usaha Mikro	10.116	10.590	10.892	11.099	11.099
	Jumlah seluruh UMKM	12.851	13.409	13.811	14.087	14.076
11	Kabupaten Luwu Utara					
	Jumlah Usaha Mikro	19.160	20.049	20.403	20.673	20.673
	Jumlah seluruh UMKM	22.569	23.569	24.040	24.401	24.390
12	Kabupaten Luwu Timur					
	Jumlah Usaha Mikro	16.284	16.978	17.268	17.490	17.490
	Jumlah seluruh UMKM	18.532	19.350	19.737	20.033	20.022
13	Kabupaten Tana Toraja					
	Jumlah Usaha Mikro	18.402	13.036	13.358	13.524	13.524
	Jumlah seluruh UMKM	19.962	14.324	14.754	14.975	14.964
14	Kabupaten Toraja Utara					
	Jumlah Usaha Mikro	12.165	18.247	18.730	18.979	18.979
	Jumlah seluruh UMKM	14.323	21.485	22.130	22.461	22.461
15	Kabupaten Bone					
	Jumlah Usaha Mikro	72.511	75.689	78.739	80.213	80.213
	Jumlah seluruh UMKM	77.889	81.351	85.418	87.383	87.372
16	Kabupaten Sinjai					
	Jumlah Usaha Mikro	21.288	22.280	22.462	22.645	22.645
	Jumlah seluruh UMKM	23.205	24.237	24.479	24.725	24.714
17	Kabupaten Bulukumba					

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	Jumlah Usaha Mikro	38.104	39.833	40.926	41.490	41.490
	Jumlah seluruh UMKM	41.090	42.897	44.184	44.847	44.836
18	Kabupaten Bantaeng					
	Jumlah Usaha Mikro	20.257	21.158	21.493	21.749	21.749
	Jumlah seluruh UMKM	21.356	22.307	22.753	23.094	23.083
19	Kabupaten Selayar					
	Jumlah Usaha Mikro	13.498	14.117	14.355	14.537	14.537
	Jumlah seluruh UMKM	14.215	14.848	15.145	15.372	15.361
20	Kabupaten Jenepono					
	Jumlah Usaha Mikro	32.625	34.169	34.728	35.155	35.155
	Jumlah seluruh UMKM	35.675	37.264	38.009	38.579	35.155
21	Kabupaten Takalar					
	Jumlah Usaha Mikro	30.390	31.834	32.373	32.786	32.876
	Jumlah seluruh UMKM	34.420	35.948	36.667	37.217	37.217
22	Kabupaten Enrekang					
	Jumlah Usaha Mikro	15.371	16.012	16.278	16.481	16.481
	Jumlah seluruh UMKM	16.977	17.732	18.087	18.358	18.358
23	Kabupaten Gowa					
	Jumlah Usaha Mikro	64.878	68.060	69.807	70.707	70.750
	Jumlah seluruh UMKM	74.327	77.639	79.968	81.168	81.168
24	Kota Makassar					
	Jumlah Usaha Mikro	110.772	115.943	127.007	134.795	134.795
	Jumlah seluruh UMKM	141.420	147.508	162.259	172.643	172.643

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2014

**Tabel 2.137**  
**Jumlah Usaha Kecil Dan Jumlah seluruh UMKM**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Kabupaten Maros					
	Jumlah Usaha Kecil	3.524	3.634	3.743	3.926	4.075
	Jumlah seluruh UMKM	26.761	27.998	29.236	30.113	30.565
2	Kabupaten Pangkep					
	Jumlah Usaha Kecil	2.896	2.992	3.086	3.245	3.365
	Jumlah seluruh UMKM	28.623	29.951	31.279	31.904	32.383
3	Kabupaten Barru					
	Jumlah Usaha Kecil	1.686	1.715	1.745	1.833	1.901
	Jumlah seluruh UMKM	16.238	16.990	17.743	18.098	18.369
4	Kota Pare-Pare					
	Jumlah Usaha Kecil	2.192	2.285	2.378	2.489	2.565

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
	Jumlah seluruh UMKM	13.538	14.158	14.778	15.221	15.526
5	Kabupaten Pinrang					
	Jumlah Usaha Kecil	3.595	3.794	3.993	4.150	4.269
	Jumlah seluruh UMKM	28.619	29.946	31.274	31.899	32.378
6	Kabupaten Sidrap					
	Jumlah Usaha Kecil	2.499	2.676	2.853	2.992	3.098
	Jumlah seluruh UMKM	25.355	26.535	27.715	28.269	28.963
7	Kabupaten Wajo					
	Jumlah Usaha Kecil	4.995	5.357	5.719	6.003	6.220
	Jumlah seluruh UMKM	51.924	54.337	56.750	57.885	58.753
8	Kabupaten Soppeng					
	Jumlah Usaha Kecil	2.678	2.853	3.027	3.164	3.268
	Jumlah seluruh UMKM	24.984	26.147	27.309	27.855	28.273
9	Kabupaten Luwu					
	Jumlah Usaha Kecil	1.734	1.932	2.129	2.283	2.401
	Jumlah seluruh UMKM	28.228	29.543	30.858	31.475	31.947
10	Kota Palopo					
	Jumlah Usaha Kecil	2.501	2.584	2.668	2.769	2.838
	Jumlah seluruh UMKM	12.293	12.851	13.409	13.811	14.087
11	Kabupaten Luwu Utara					
	Jumlah Usaha Kecil	3.186	3.295	3.405	3.523	3.613
	Jumlah seluruh UMKM	21.569	22.569	23.569	24.040	24.401
12	Kabupaten Luwu Timur					
	Jumlah Usaha Kecil	1.998	2.120	2.243	2.340	2.414
	Jumlah seluruh UMKM	17.714	18.532	19.350	19.737	20.033
13	Kabupaten Tana Toraja					
	Jumlah Usaha Kecil	1.752	1.486	1.219	1.326	1.382
	Jumlah seluruh UMKM	25.600	19.962	14.324	14.754	14.975
14	Kab. Toraja Utara					
	Jumlah Usaha Kecil	1.074	2.149	3.223	3.384	3.467
	Jumlah seluruh UMKM	7.162	14.323	21.485	22.130	22.461
15	Kabupaten Bone					
	Jumlah Usaha Kecil	4.936	5.218	5.501	6.518	7.009
	Jumlah seluruh UMKM	74.427	77.889	81.351	85.418	87.383
16	Kabupaten Sinjai					
	Jumlah Usaha Kecil	1.814	1.854	1.894	1.955	2.016
	Jumlah seluruh UMKM	22.137	23.205	24.237	24.479	24.725
17	Kabupaten Bulukumba					
	Jumlah Usaha Kecil	2.689	2.767	2.844	3.037	3.137
	Jumlah seluruh UMKM	39.282	41.090	42.897	44.184	44.847
18	Kabupaten Bantaeng					
	Jumlah Usaha Kecil	1.010	1.060	1.109	1.220	1.306
	Jumlah seluruh UMKM	20.405	21.356	22.307	22.753	23.094

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
19	Kabupaten Selayar					
	Jumlah Usaha Kecil	665	679	692	751	797
	Jumlah seluruh UMKM	13.582	14.215	14.848	15.145	15.372
20	Kabupaten Jeneponto					
	Jumlah Usaha Kecil	2.976	3.021	3.207	3.350	3.350
	Jumlah seluruh UMKM	34.086	35.675	37.264	38.009	38.579
21	Kabupaten Takalar					
	Jumlah Usaha Kecil	3.848	3.933	4.017	4.196	4.334
	Jumlah seluruh UMKM	32.891	34.420	35.948	36.667	37.217
22	Kabupaten Enrekang					
	Jumlah Usaha Kecil	1.434	1.548	1.661	1.749	1.817
	Jumlah seluruh UMKM	16.222	16.977	17.732	18.087	18.358
23	Kabupaten Gowa					
	Jumlah Usaha Kecil	9.145	9.274	9.402	9.985	10.284
	Jumlah seluruh UMKM	71.016	74.327	77.639	79.968	81.168
24	Kota Makassar					
	Jumlah Usaha Kecil	27.621	28.534	29.447	33.135	33.731
	Jumlah seluruh UMKM	153.333	141.420	147.508	162.259	172.643

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sul-Sel Tahun 2013

### 2.3.1.9. Penanaman Modal

#### a. Jumlah Investor/Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investor berskala nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Peningkatan tersebut sebesar 500 persen. Peningkatan investor tersebut tidak terlepas dari dukungan beberapa kebijakan pemerintah daerah yang memberi berbagai kemudahan dan kerjasama terhadap investor.

Tabel 2.138

#### Investor/Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)

##### Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Jumlah Investor/Proyek	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	PMA	6	34	53	42	88
2	PMDN	6	23	49	54	57
3	Total	12	57	102	96	145

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014

#### b. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Seiring dengan meningkatnya jumlah investor, maka nilai investasi pun semakin meningkat, hingga akhir tahun 2013 nilai investasi sebesar 5,268 trilyun dimana pada tahun 2009 nilai investasi sebesar 1,918 trilyun.

**Tabel 2.139**  
**Jumlah Proyek dan Nilai Investasi (PMDN/PMA)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Jumlah Investasi	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	<b>Persetujuan</b>					
	Jumlah Proyek	33	14	20	26	....
	Nilai Investasi	5.553.150.057.462	4.073.669.821.053	9.683.212.201.289	21.604.651.396.034	10.489.958.620.358
2.	<b>Realisasi</b>					
	Jumlah Proyek	12	57	102	96	145
	Nilai Investasi	1.918.263.711.520	7.630.256.431.280	4.881.895.243.368	8.144.168.200.000	5.268.483.537.000

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014

### c. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Meningkatnya investor yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan tentunya akan berdampak juga kepada penyediaan Lapangan Kerja, dari tahun 2009 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 91 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat drastis sebesar 301.

**Tabel 2.140**  
**Daya Serap Tenaga Kerja (PMDN/PMA)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	<b>Jumlah Tenaga Kerja PMA/PMDN</b>	1.096	5.211	22.025	82.879	43.622
2	<b>Jumlah Seluruh PMA/PMDN</b>	12	57	102	96	145
3	<b>Rasio Daya Serap Tenaga Kerja</b>	91	91	216	863	301

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014

### d. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Dari tabel data sebahagian besar perusahaan pada tahun 2012 sudah melaksanakan IUT (Izin Usaha Tetap) pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2012 tersebut investasi di hitung berdasarkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).

**Tabel 2.141**  
**Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

Rumus	Capaian Kinerja 2011	Capaian Kinerja 2012	Capaian Kinerja 2013
$\frac{\text{Realisasi PMDN Thn 2013} - \text{Realisasi PMDN Thn 2012}}{\text{Rp. 2.318.829.900.000}} \times 100\%$ <p align="center">Rp. 2.318.829.900.000 Realisasi PMDN Thn 2012</p>	24,1%	-41,83%	127%

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tahun 2014

### 2.3.1.10. Kebudayaan

Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya, Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

**Tabel 2.142**  
**Seni & Kebudayaan Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten/Kota	Budaya				
		Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah Benda Situs dan Kawasan cagar budaya di daerah	Jumlah Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	% Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang di lestarikan
1	2	3	4	6	7	8 = 7/6*100%
<b>a.</b>	<b>Kota</b>					
1	Makassar	6	2	188	3	1,60
2	Pare-Pare	1	1	23	0	0,00
3	Palopo	1	1	3	1	33,33
	<b>Jumlah (Kota)</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>214</b>	<b>4</b>	<b>1,87</b>
<b>b.</b>	<b>Kabupaten/Kota</b>					
1	Maros	1	0	75	0	0,00
2	Pangkep	1	0	75	0	0,00
3	Baru	1	0	27	1	3,70
4	Sidrap	1	0	12	0	0,00
5	Pinrang	1	0	11	0	0,00
6	Soppeng	1	0	27	0	0,00
7	Bone	2	0	22	1	4,55
8	Wajo	1	0	25	0	0,00
9	Enrekang	1	0	21	0	0,00
10	Tana Toraja	1	0	11	0	0,00
11	Toraja Utara	1	0	19	3	15,79
12	Luwu	2	0	8	0	0,00
13	Luwu Utara	1	0	0	0	0,00
14	Luwu Timur	1	0	8	0	0,00
15	Gowa	5	1	25	0	0,00
16	Takalar	1	1	27	0	0,00
17	Jeneponto	1	1	23	1	4,35
18	Bantaeng	1	1	12	0	0,00
19	Sinjai	2		13	1	7,69
20	Bulikumba	1		43	1	2,33
21	Selayar	2	2	21	0	0,00
	<b>Jumlah (Kabupaten)</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>505</b>	<b>8</b>	<b>1,58</b>
	<b>Jumlah se Provinsi (Kabupaten + Kota)</b>	<b>37</b>	<b>10</b>	<b>719</b>	<b>12</b>	<b>1,67</b>

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013

### 2.3.1.11. Kepemudaan Dan Olahraga

#### a. Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah organisasi pemuda dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dalam kurun waktu lima tahun rata-rata mengalami peningkatan sebesar 12 persen tiap tahunnya.

**Tabel 2.143**  
**Jumlah Organisasi Pemuda Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

NO	KABUPATEN / KOTA	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1`	Kota Makassar	15	15	15	15	195
2	Kabupaten Gowa	32	32	32	32	36
3	Kab. Takalar	16	16	17	17	17
4	Kab. Jeneponto	43	43	43	43	43
5	Kab. Bantaeng	0	0	22	50	50
6	Kab. Bulukumba	11	11	11	11	11
7	Kab. Selayar	12	12	12	12	24
8	Kab. Sinjai	12	12	19	50	19
9	Kab. Bone	37	37	81	114	114
10	Kab. Soppeng	23	23	23	10	23
11	Kab. Maros	52	52	52	52	4
12	Kab. Pangkep	24	24	24	24	46
13	Kab. Barru	30	30	29	29	29
14	Kota Pare - Pare	11	11	11	11	10
15	Kab. Pinrang	20	20	20	20	4
16	Kab. Sidrap	28	28	28	28	28
17	Kab. Wajo	23	23	69	22	22
18	Kota Palopo	24	24	22	22	38
19	Kab. Luwu	6	6	6	6	3
20	Kab. Luwu Utara	25	25	27	27	26
21	Kab. Luwu Timur	17	17	16	16	18
22	Kab. Enrekang	9	9	9	9	10
23	Kab. Tana Toraja	15	15	14	14	14
24	Kab. Toraja Utara	17	17	17	17	17
	<b>JUMLAH</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>619</b>	<b>651</b>	<b>836</b>

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel Tahun 2014

#### b. Jumlah Klub Olahraga

Jumlah organisasi olahraga mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2009 jumlah organisasi olahraga sebesar 1.311, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 1.532 tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 1.126.

**Tabel 2.144**  
**Jumlah Klub Olahraga Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kota Makassar	71	71	71	71	12
2.	Kab. Gowa	103	103	103	103	103
3.	Kab. Takalar	12	11	10	10	12
4.	Kab. Jeneponto	51	50	51	51	12
5.	Kab. Bantaeng	46	33	11	11	12
6.	Kab. Bulukumba	8	8	8	8	12
7.	Kab. Selayar	192	192	192	192	192
8.	Kab. Sinjai	38	38	125	125	15
9.	Kab. Bone	62	62	12	39	44
10.	Kab. Soppeng	6	6	6	6	6
11.	Kab. Maros	10	10	10	10	20
12.	Kab. Pangkep	10	10	10	10	10
13.	Kab. Barru	6	6	51	51	8
14.	Kota Pare-Pare	47	47	59	59	47
15.	Kab. Pinrang	50	50	50	50	14
16.	Kab. Sidrap	168	168	200	200	200
17.	Kab. Wajo	49	49	36	31	38
18.	Kota Palopo	60	60	60	60	38
19.	Kab. Luwu	10	10	15	15	15
20.	Kab. Luwu Utara	91	91	91	91	91
21.	Kab. Luwu Timur	199	199	199	199	199
22.	Kab. Enrekang	9	9	11	11	13
23.	Kab. Tana Toraja	5	5	5	36	5
24.	Kab. Toraja Utara	8	8	8	93	8
	<b>Jumlah</b>	<b>1.311</b>	<b>1.251</b>	<b>1.394</b>	<b>1.532</b>	<b>1.126</b>

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### c. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2009 kegiatan kepemudaan sebanyak 105 dan meningkat menjadi 175 pada tahun 2013.

**Tabel 2.145**  
**Jumlah Kegiatan Kepemudaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kota Makassar	7	7	7	7	41
2.	Kab. Gowa	3	3	3	3	5
3.	Kab. Takalar	6	6	6	6	5
4.	Kab. Jeneponto	4	4	4	4	3

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
5.	Kab. Bantaeng	3	3	3	2	3
6.	Kab. Bulukumba	3	3	3	3	2
7.	Kab. Selayar	12	12	12	11	5
8.	Kab. Sinjai	4	4	4	1	8
9.	Kab. Bone	3	3	3	16	32
10	Kab. Soppeng	1	1	1	1	2
11	Kab. Maros	4	4	4	16	5
12	Kab. Pangkep	5	5	5	5	5
13	Kab. Barru	2	2	2	2	2
14	Kota Pare-Pare	5	5	5	12	2
15	Kab. Pinrang	5	5	5	5	1
16	Kab. Sidrap	4	4	4	11	2
17	Kab. Wajo	9	9	9	11	9
18	Kota Palopo	6	6	6	8	5
19	Kab. Luwu	2	2	2	5	1
20	Kab. Luwu Utara	1	1	1	1	3
21	Kab. Luwu Timur	6	6	6	6	2
22	Kab. Enrekang	4	4	4	2	2
23	Kab. Tana Toraja	3	3	3	3	13
24	Kab. Toraja Utara	3	3	3	3	17
	<b>Jumlah</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>144</b>	<b>175</b>

Sumber : Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014

#### d. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2009 kegiatan kepemudaan sebanyak 106 kegiatan dan meningkat menjadi 158 kegiatan pada tahun 2013.

**Tabel 2.146**  
**Jumlah Kegiatan Olahraga**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1.	Kota Makassar	7	7	7	7	17
2.	Kab. Gowa	1	1	1	1	5
3.	Kab. Takalar	1	1	1	1	4
4.	Kab. Jeneponto	1	1	1	1	3
5.	Kab. Bantaeng	2	2	2	2	6
6.	Kab. Bulukumba	2	2	2	2	3
7.	Kab. Selayar	9	9	9	9	8
8.	Kab. Sinjai	2	2	2	2	1
9.	Kab. Bone	1	1	10	10	26
10	Kab. Soppeng	2	2	2	2	6
11	Kab. Maros	3	3	9	9	7
12	Kab. Pangkep	3	3	3	3	3

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
13	Kab. Barru	2	2	2	2	3
14	Kota Pare-Pare	5	5	12	12	2
15	Kab. Pinrang	5	5	11	11	1
16	Kab. Sidrap	7	7	9	9	2
17	Kab. Wajo	5	5	7	7	6
18	Kota Palopo	8	8	8	8	7
19	Kab. Luwu	3	3	6	6	2
20	Kab. Luwu Utara	1	1	3	3	8
21	Kab. Luwu Timur	1	1	1	1	3
22	Kab. Enrekang	5	5	5	5	1
23	Kab. Tana Toraja	15	15	15	15	23
24	Kab. Toraja Utara	15	15	15	15	11
	<b>Jumlah</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>158</b>

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014

#### e. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja(Selain Milik Swasta)

Jumlah gelanggang olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami peningkatan, pada tahun 2009 jumlah gelanggang olahraga sebanyak 41 dan meningkat menjadi 43 gelanggang olahraga pada tahun 2012 tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan dengan jumlah sebanyak 35 gelanggang.

Tabel 2.147

#### Jumlah Gelanggang/Balai Remaja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

NO	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
	<b>Jumlah Gelanggang</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>35</b>

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014

#### f. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami penurunan, pada tahun 2009 jumlah lapangan olahraga sebanyak 2.494 dan turun menjadi 2.480 lapangan olahraga pada tahun 2013.

Tabel 2.148

#### Jumlah Gedung/Lapangan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kota Makassar	254	256	256	256	256
2	Kab. Gowa	8	8	8	8	8
3	Kab. Takalar	7	7	7	7	7
4	Kab. Jeneponto	49	32	32	32	32
5	Kab. Bantaeng	43	4	43	43	43
6	Kab. Bulukumba	4	4	4	4	4
7	Kab. Selayar	4	4	4	4	4

No	Kabupaten / Kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
8	Kab. Sinjai	16	31	17	32	32
9	Kab. Bone	226	226	226	226	226
10	Kab. Soppeng	28	29	28	29	29
11	Kab. Maros	23	12	12	13	13
12	Kab. Pangkep	30	30	30	120	120
13	Kab. Barru	11	11	11	11	11
14	Kota Pare-Pare	155	92	82	82	82
15	Kab. Pinrang	5	5	5	5	5
16	Kab. Sidrap	273	273	273	273	273
17	Kab. Wajo	566	571	571	571	571
18	Kota Palopo	64	68	68	68	68
19	Kab. Luwu	56	56	56	58	58
20	Kab. Luwu Utara	55	72	6	72	72
21	Kab. Luwu Timur	159	9	9	9	9
22	Kab. Enrekang	248	386	386	386	386
23	Kab. Tana Toraja	90	103	103	103	103
24	Kab. Toraja Utara	120	68	68	68	68
	<b>Jumlah</b>	<b>2.494</b>	<b>2.357</b>	<b>2.305</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>

Sumber: Dinas Pemuda & Olahraga Prov. Sul-Sel 2014

### 2.3.1.12. Ketahanan Pangan

#### a. Regulasi Ketahanan Pangan

Pada tahun 2009-2013 telah dikeluarkan 1 Perda dan 4 Pergub terkait dengan regulasi pada ketahanan pangan daerah.

**Tabel 2.149**  
**Regulasi Ketahanan Pangan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Regulasi Ketahanan Pangan	Dokumen	1	1	2	1	1

Sumber :Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sul-Sel 2014

#### b. Ketersediaan Pangan Utama

Dari data tabel memperlihatkan bahwa ketersediaan pangan utama (Beras) di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2008-2012 masih tersedia (surplus) 2-3 kali lipat dari kebutuhan konsumsi penduduk Sulawesi Selatan.

**Tabel 2.150**  
**Ketersediaan Pangan Utama**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	Rata rata konsumsi beras	Kg/Kap /Thn	114,4	111,9	109,7	106,4	104,5

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
2.	Konsumsi beras penduduk	Kg/Thn	892.894.746	884.963.276	881.414.927	863.503.883	855.878.199
1	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	%	258,63	274,70	279,49	293,76	352,67

Sumber :Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sul-Sel 2013

**Tabel 2.151**  
**Ketersediaan Pangan Utama Menurut Kab/Kota (Beras)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Kabupaten/Kota	Ketersediaan Pangan Utama (Beras) / Tahun (Ton)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Selayar	5.165	9.703	11.612	12.471	14.952
2	Bulukumba	106.478	111.860	128.769	126.172	124.846
3	Bantaeng	460.646	40.627	49.322	47.120	53.551
4	Jeneponto	47.576	63.852	71.209	66.775	71.662
5	Takalar	68.486	75.851	67.625	70.378	68.760
6	Gowa	139.982	150.550	124.695	152.946	178.120
7	Sinjai	56.638	72.821	64.149	65.168	67.491
8	Maros	122.668	140.816	145.545	137.881	140.243
9	Pangkep	72.313	73.553	67.268	77.726	81.306
10	Barru	54.757	56.344	51.787	56.469	61.249
11	Bone	335.646	387.177	361.946	409.206	361.363
12	Soppeng	160.187	142.127	146.436	151.826	154.690
13	Wajo	252.521	237.596	338.424	397.361	366.888
14	Sidrap	216.035	183.910	240.169	257.691	259.434
15	Pinrang	270.230	280.592	252.542	299.301	296.165
16	Enrekang	33.284	30.402	29.897	26.515	35.573
17	Luwu	182.735	147.023	110.395	138.147	172.294
18	Tana Toraja	85.169	44.787	50.005	51.848	37.927
19	Luwu Utara	74.979	78.706	84.094	89.031	104.067
20	Makassar	7.738	7.576	6.651	8.873	7.848
21	Pare - Pare	2.491	2.384	2.273	2.777	3.433
22	Palopo	13.382	12.243	11.938	14.693	15.944
23	Luwu Timur	81.870	66.060	80.091	79.568	105.393
24	Toraja Utara	-	46.891	39.767	72.962	45.285
	Jumlah ( Sulsel	2.430.735	2.463.450	2.536.607	2.812.904	2.828.484

Sumber :Badan Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sul-Sel 2014

**2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

**a. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Dari data tabel memperlihatkan bahwa rata-rata peningkatan jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selama periode tahun 2008-2012 sebesar 1,38 persen tiap tahunnya.

**Tabel 2.152**  
**Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Kabupaten / Kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM
1	Selayar	74	148	2,00	74	148	2,00	74	222	3,00	74	222	3,00	88	256	2,91
2	Bulukumba	126	252	2,00	126	252	2,00	126	378	3,00	126	378	3,00	136	398	2,93
3	Bantaeng	67	201	3,00	67	201	3,00	67	201	3,00	67	201	3,00	67	201	3,00
4	Jeneponto	113	226	2,00	113	226	2,00	113	339	3,00	113	339	3,00	113	339	3,00
5	Takalar	77	154	2,00	83	166	2,00	83	249	3,00	83	249	3,00	100	283	2,83
6	Gowa	167	501	3,00	167	501	3,00	167	501	3,00	167	501	3,00	167	501	3,00
7	Sinjai	80	240	3,00	80	240	3,00	80	240	3,00	80	240	3,00	80	240	3,00
8	Bone	372	744	2,00	372	744	2,00	372	1116	3,00	372	1116	3,00	372	1116	3,00
9	Maros	103	206	2,00	103	206	2,00	103	309	3,00	103	309	3,00	103	309	3,00
10	Pangkep	102	204	2,00	102	204	2,00	102	306	3,00	102	306	3,00	103	308	2,99

No	Kabupaten / Kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM	JUMLAH LPM	JUMLAH KLP BINAAN LPM	RATA-RATA JUML. LPM
11	Barru	54	108	2,00	54	108	2,00	54	162	3,00	54	162	3,00	55	164	2,98
12	Soppeng	70	140	2,00	70	140	2,00	70	210	3,00	70	210	3,00	70	210	3,00
13	Wajo	176	352	2,00	176	352	2,00	176	528	3,00	176	528	3,00	176	528	3,00
14	Sidrap	105	210	2,00	106	212	2,00	106	318	3,00	106	318	3,00	106	318	3,00
15	Pinrang	104	208	2,00	104	208	2,00	104	312	3,00	104	312	3,00	108	320	2,96
16	Enrekang	112	224	2,00	129	258	2,00	129	387	3,00	129	387	3,00	129	387	3,00
17	Luwu	192	384	2,00	227	454	2,00	227	681	3,00	227	681	3,00	227	681	3,00
18	Tator	310	620	2,00	159	318	2,00	159	477	3,00	160	478	2,99	160	478	2,99
19	Luwu Utara	171	342	2,00	171	342	2,00	171	513	3,00	171	513	3,00	173	517	2,99
20	Luwu Timur	99	198	2,00	99	198	2,00	99	297	3,00	107	305	2,85	127	361	2,84
21	Toraja Utara	0	0	0,00	151	302	2,00	151	453	3,00	151	453	3,00	151	453	3,00
22	Makassar	143	429	3,00	143	429	3,00	143	572	4,00	143	572	4,00	143	572	4,00
23	Pare-Pare	22	66	3,00	22	66	3,00	22	88	4,00	22	88	4,00	22	88	4,00
24	Palopo	48	144	3,00	48	144	3,00	48	192	4,00	48	192	4,00	48	192	4,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.887</b>	<b>6301</b>	<b>2,18</b>	<b>2.946</b>	<b>6419</b>	<b>2,18</b>	<b>2.946</b>	<b>9051</b>	<b>3,07</b>	<b>2.955</b>	<b>9060</b>	<b>3,07</b>	<b>3.024</b>	<b>9220</b>	<b>3,05</b>

Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013

**b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2008 sebesar 3,24 dan pada tahun 2012 menjadi 1,48.

**Tabel 2.153**  
**Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO.	KABUPATEN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1	BANTAENG	2.177	4.865	2,23	2.180	4.871	2,23	2.177	4.596	2,11	2.183	14.912	6,83	2.260	13.473	5,96
2	BULUKUMBA	3.121	7.147	2,29	3.434	6.880	2,00	3.470	6.339	1,83	7.317	12.152	1,66	3.236	3.121	0,96
3	BARRU	876	4.141	4,73	359	2.814	7,84	983	6.756	6,87	901	5.111	5,67	901	1.950	2,16
4	BONE	8.704	24.909	2,86	7.739	38.787	5,01	7.783	49.982	6,42	6.691	24.158	3,61	6.691	8.441	1,26
5	ENREKANG	1.691	7.276	4,30	1.698	7.733	4,55	816	7.475	9,16	1.043	6.798	6,52	990	2.289	2,31
6	GOWA	5.911	19.823	3,35	29.758	22.281	0,75	5.808	16.880	2,91	4.755	15.289	3,22	6.071	6.462	1,06
7	JENEPONTO	2.666	24.235	9,09	2.806	17.787	6,34	3.591	14.993	4,18	2.981	16.354	5,49	2.586	5.735	2,22
8	LUWU	6.730	12.385	1,84	6.730	11.994	1,78	6.730	12.458	1,85	4.799	6.813	1,42	3.338	4.387	1,31
9	LUWU UTARA	1.487	7.194	4,84	1.502	7.111	4,73	1.591	6.260	3,93	1.145	4.817	4,21	1.454	2.438	1,68
10	LUWU TIMUR	1.825	5.635	3,09	530	5.471	10,32	2.574	6.678	2,59	3.665	5.636	1,54	3.665	3.069	0,84

NO.	KABUPATEN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK	Jumlah PKK	Juml. Klp. Binaan	Rata-rata JMLH KLP Binaan PKK
1	2	3	4	5 = 4/3	6	7	8=7/6	9	10	11=10/9	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
11	MAKASSAR	5.737	14.302	2,49	5.849	14.544	2,49	5.804	14.666	2,53	5.808	13.965	2,40	5.960	6.914	1,16
12	MAROS	2.132	5.301	2,49	2.132	5.275	2,47	2.091	5.138	2,46	1.683	4.214	2,50	1.663	2.314	1,39
13	PALOPO	865	5.918	6,84	1.129	5.011	4,44	1.090	4.526	4,15	3.322	8.734	2,63	1.007	5.897	5,86
14	PARE - PARE	514	2.468	4,80	453	1.707	3,77	419	1.736	4,14	419	1.739	4,15	419	1.585	3,78
15	PANGKEP	2.032	4.582	2,25	2.082	4.946	2,38	2.120	4.600	2,17	1.603	4.786	2,99	1.669	1.318	0,79
16	PINRANG	2.215	5.590	2,52	2.297	8.874	3,86	2.152	9.326	4,33	2.344	8.098	3,45	2.344	4.160	1,77
17	SELAYAR	787	3.691	4,69	1.043	3.680	3,53	950	3.651	3,84	600	4.191	6,99	600	1.992	3,32
18	SINJAI	2.442	5.629	2,31	2.345	6.155	2,62	2.345	5.909	2,52	5.352	4.615	0,86	5.352	3.268	0,61
19	SIDRAP	1.935	4.498	2,32	2.040	4.962	2,43	2.040	5.042	2,47	1.806	6.008	3,33	1.806	3.716	2,06
20	SOPPENG	2.068	8.683	4,20	939	4.640	4,94	1.874	7.737	4,13	2.110	5.197	2,46	1.926	2.383	1,24
21	TANA TORAJA	4.383	15.478	3,53	4.083	15.477	3,79	4.083	15.460	3,79	4.083	9.566	2,34	4.083	2.869	0,70
22	TORAJA UTARA	-	-	-	1.995	9.894	4,96	1.994	10.025	5,03	1.995	7.645	3,83	1.966	2.707	1,38
23	TAKALAR	1.714	2.878	1,68	2.031	3.448	1,70	2.122	4.482	2,11	1.947	4.676	2,40	1.631	2.015	1,24
24	WAJO	3.450	15.211	4,41	3.454	14.918	4,32	3.419	11.174	3,27	2.798	10.121	3,62	2.804	3.043	1,09
	<b>J U M L A H</b>	65.462	211.839	3,24	88.608	229.260	2,59	68.026	235.889	3,47	71.350	205.595	2,88	64.422	95.562	1,48

Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013

**c. Jumlah LPM Berprestasi**

persentase jumlah LPM Berprestasi dari tahun 2008 hingga tahun 2012 tidak mengalami perubahan yang berarti, selama kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata persentase LPM berprestasi hanya tumbuh 0,1 persen.

**Tabel 2.154**  
**Jumlah LPM Berprestasi Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Kabupaten / Kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)
1	Selayar	74	12	16,22	74	12	16,22	74	12	16,22	74	12	16,22	88	12	13,64
2	Bulukumba	126	12	9,52	126	12	9,52	126	12	9,52	126	12	9,52	136	12	8,82
3	Bantaeng	67	12	17,91	67	12	17,91	67	12	17,91	67	12	17,91	67	12	17,91
4	Jeneponto	113	12	10,62	113	12	10,62	113	12	10,62	113	12	10,62	113	12	10,62
5	Takalar	77	12	15,58	83	12	14,46	83	12	14,46	83	12	14,46	100	12	12,00
6	Gowa	167	12	7,19	167	12	7,19	167	12	7,19	167	12	7,19	167	12	7,19
7	Sinjai	80	12	15,00	80	12	15,00	80	12	15,00	80	12	15,00	80	12	15,00
8	Bone	372	12	3,23	372	12	3,23	372	12	3,23	372	12	3,23	372	12	3,23
9	Maros	103	12	11,65	103	12	11,65	103	12	11,65	103	12	11,65	103	12	11,65
10	Pangkep	102	12	11,76	102	12	11,76	102	12	11,76	102	12	11,76	103	12	11,65
11	Barru	54	12	22,22	54	12	22,22	54	12	22,22	54	12	22,22	55	12	21,82
12	Soppeng	70	12	17,14	70	12	17,14	70	12	17,14	70	12	17,14	70	12	17,14
13	Wajo	176	12	6,82	176	12	6,82	176	12	6,82	176	12	6,82	176	12	6,82
14	Sidrap	105	12	11,43	106	12	11,32	106	12	11,32	106	12	11,32	106	12	11,32
15	Pinrang	104	12	11,54	104	12	11,54	104	12	11,54	104	12	11,54	108	12	11,11

No	Kabupaten / Kota	2008			2009			2010			2011			2012		
		JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BER PRESTASI (%)	JUMLAH LPM	JUMLAH LPM BER PRESTASI	LPM BERPRESTASI (%)
16	Enrekang	112	12	10,71	129	12	9,30	129	12	9,30	129	12	9,30	129	12	9,30
17	Luwu	192	12	6,25	227	12	5,29	227	12	5,29	227	12	5,29	227	12	5,29
18	Tator	310	12	3,87	159	12	7,55	159	12	7,55	160	12	7,50	160	12	7,50
19	Luwu Utara	171	12	7,02	171	12	7,02	171	12	7,02	171	12	7,02	173	12	6,94
20	Luwu Timur	99	12	12,12	99	12	12,12	99	12	12,12	107	12	11,21	127	12	9,45
21	Toraja Utara	0	0	0,00	151	12	7,95	151	12	7,95	151	12	7,95	151	12	7,95
22	Makassar	143	12	8,39	143	12	8,39	143	12	8,39	143	12	8,39	143	12	8,39
23	Pare-Pare	22	12	54,55	22	12	54,55	22	12	54,55	22	12	54,55	22	12	54,55
24	Palopo	48	12	25,00	48	12	25,00	48	12	25,00	48	12	25,00	48	12	25,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.887</b>	<b>276</b>	<b>9,56</b>	<b>2.946</b>	<b>288</b>	<b>9,78</b>	<b>2.946</b>	<b>288</b>	<b>9,78</b>	<b>2.955</b>	<b>288</b>	<b>9,75</b>	<b>3.024</b>	<b>288</b>	<b>9,52</b>

Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013

**d. PKK Aktif**

Persentase Jumlah PKK aktif dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata-rata sebesar 97 persen tiap tahunnya, hal ini tentunya suatu prestasi yang membanggakan dikarenakan hampir semua jumlah PKK yang ada merupakan PKK yang aktif.

**Tabel 2.155**  
**PKK Aktif Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO.	KABUPATEN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)
1	2	3	4	5 = 4/3x100%	6	7	8=7/6x100%	9	10	11=10/9x100%	12	13	14=13/12x100%	15	16	17=16/15x100%
1	BANTAENG	2.177	2.177	100,00	2.180	2.180	100,00	2.177	2.177	100,00	2.183	2.183	100,00	2.260	2.260	100,00
2	BULUKUMBA	3.121	3.059	98,00	3.434	3.365	98,00	3.470	3.401	98,00	7.317	7.171	98,00	3.236	3.203	99,00
3	BARRU	876	867	99,00	359	355	99,00	983	973	99,00	901	892	99,00	901	892	99,00
4	BONE	8.704	8.530	98,00	7.739	7.584	98,00	7.783	7.627	98,00	6.691	6.557	98,00	6.691	6.557	98,00
5	ENREKANG	1.691	1.657	98,00	1.698	1.664	98,00	816	800	98,00	1.043	1.022	98,00	990	980	99,03
6	GOWA	5.911	5.793	98,00	29.758	29.163	98,00	5.808	5.692	98,00	4.755	4.660	98,00	6.071	5.950	98,00
7	JENEPONTO	2.666	2.133	80,00	2.806	2.245	80,00	3.591	2.909	81,00	2.981	2.444	82,00	2.586	2.146	83,00
8	LUWU	6.730	6.326	94,00	6.730	6.326	94,00	6.730	6.394	95,00	4.799	4.607	96,00	3.338	3.204	96,00
9	LUWU UTARA	1.487	1.457	98,00	1.502	1.472	98,00	1.591	1.559	98,00	1.145	1.122	98,00	1.454	1.425	98,00
10	LUWU TIMUR	1.825	1.789	98,00	530	519	98,00	2.574	2.523	98,00	3.665	3.592	98,00	3.665	3.592	98,00
11	MAKASSAR	5.737	5.622	98,00	5.849	5.732	98,00	5.804	5.688	98,00	5.808	5.750	99,00	5.960	5.900	99,00
12	MAROS	2.132	2.132	100,00	2.132	2.132	100,00	2.091	2.091	100,00	1.683	1.683	100,00	1.663	1.663	100,00
13	PALOPO	865	848	98,00	1.129	1.106	98,00	1.090	1.068	98,00	3.322	3.256	98,00	1.007	987	98,00

NO.	KABUPATEN/KOTA	2008			2009			2010			2011			2012		
		Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)	Jumlah PKK	Juml. PKK Aktif	PKK Aktif (%)
14	PARE - PARE	514	504	98,00	453	448	99,00	419	419	100,00	419	411	98,00	419	411	98,00
15	PANGKEP	2.032	1.991	98,00	2.082	2.040	98,00	2.120	2.078	98,00	1.603	1.571	98,00	1.669	1.636	98,00
16	PINRANG	2.215	1.750	79,00	2.297	1.838	80,00	2.152	1.722	80,00	2.344	1.899	81,00	2.344	1.899	81,00
17	SELAYAR	787	771	98,00	1.043	1.022	98,00	950	931	98,00	600	588	98,00	600	588	98,00
18	SINJAI	2.442	2.393	98,00	2.345	2.298	98,00	2.345	2.298	98,00	5.352	5.245	98,00	5.352	5.245	98,00
19	SIDRAP	1.935	1.742	90,00	2.040	1.836	90,00	2.040	1.856	91,00	1.806	1.662	92,00	1.806	1.680	93,00
20	SOPPENG	2.068	2.027	98,00	939	920	98,00	1.874	1.837	98,00	2.110	2.068	98,00	1.926	1.887	98,00
21	TANA TORAJA	4.383	4.383	100,00	4.083	4.083	100,00	4.083	4.083	100,00	4.083	4.083	100,00	4.083	4.083	100,00
22	TORAJA UTARA	-	-	0,00	1.995	1.955	98,00	1.994	1.954	98,00	1.995	1.955	98,00	1.966	1.927	98,00
23	TAKALAR	1.714	1.680	98,00	2.031	1.990	98,00	2.122	2.080	98,00	1.947	1.908	98,00	1.631	1.598	98,00
24	WAJO	3.450	3.381	98,00	3.454	3.385	98,00	3.419	3.351	98,00	2.798	2.742	98,00	2.804	2.748	98,00
	<b>J U M L A H</b>	<b>65.462</b>	<b>69.146</b>	<b>94,67</b>	<b>88.608</b>	<b>85.661</b>	<b>96,67</b>	<b>68.026</b>	<b>65.508</b>	<b>96,30</b>	<b>71.350</b>	<b>69.069</b>	<b>96,80</b>	<b>64.422</b>	<b>62.792</b>	<b>97,47</b>

Sumber: BPPMDK Prov. Sul-Sel 2013

**e. Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**

Swadaya masyarakat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 pada beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan tiap tahunnya, Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan cukup pesat, dimana pada tahun 2008 sebesar 4,41 persen dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 36,31 persen.

**Tabel 2.156**  
**Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Kabupaten	Nilai Swadaya Masyarakat				
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012
1	Selayar	4.77%	2.28%	1.53%	1.32%	2.72%
2	Bulukumba	0.37%	0.35%	0.15%	1.42%	1.26%
3	Bantaeng	0.00%	0.00%	6.91%	3.32%	7.74%
4	Jeneponto	7.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	Takalar	0.48%	0.11%	5.10%	0.00%	0.98%
6	Gowa	1.56%	1.97%	1.22%	0.17%	0.07%
7	Sinjai	0.44%	1.66%	2.77%	3.01%	0.69%
8	Maros	6.32%	8.75%	6.30%	6.16%	5.85%
9	Pangkajene Kepulauan	9.38%	0.00%	0.00%	0.03%	0.00%
10	Barro	3.76%	10.51%	6.42%	5.36%	6.06%
11	Bone	10.93%	0.35%	0.54%	1.17%	0.13%
12	Soppeng	0.17%	1.59%	0.21%	1.57%	0.44%
13	Wajo	1.45%	4.51%	2.08%	2.01%	1.88%
14	Sidenreng Rappang	4.38%	3.78%	2.88%	2.07%	1.30%
15	Pinrang	6.53%	17.60%	4.08%	2.50%	2.02%
16	Enrekang	13.70%	12.86%	26.62%	17.76%	12.08%
17	Luwu	2.64%	13.22%	5.35%	9.65%	5.41%
18	Tana Toraja	10.69%	0.00%	1.87%	9.13%	11.85%
19	Luwu Utara	10.58%	9.14%	4.24%	2.11%	3.21%
20	Luwu Timur	4.41%	11.32%	21.72%	31.22%	36.31%

Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013

**f. Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat**

**Tabel 2.157**  
**Pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Kabupaten	Nilai Swadaya Masyarakat				
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012
1	Selayar	4.77%	2.24%	1.52%	1.31%	2.69%
2	Bulukumba	0.37%	0.34%	0.15%	1.41%	1.25%

No	Kabupaten	Nilai Swadaya Masyarakat				
		Thn 2008	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012
3	Bantaeng	0.00%	0.00%	6.89%	3.29%	7.65%
4	Jeneponto	7.46%	0.43%	0.36%	0.45%	0.60%
5	Takalar	0.48%	0.10%	5.08%	0.32%	0.96%
6	Gowa	1.56%	1.94%	1.22%	0.17%	0.07%
7	Sinjai	0.44%	1.63%	2.76%	2.99%	0.68%
8	Maros	6.32%	8.61%	6.27%	6.11%	5.78%
9	Pangkajene Kepulauan	9.38%	0.54%	0.00%	0.03%	0.60%
10	Barru	3.76%	10.34%	6.40%	5.32%	5.99%
11	Bone	10.93%	0.35%	0.54%	1.16%	0.12%
12	Soppeng	0.17%	1.57%	0.21%	1.56%	0.44%
13	Wajo	1.45%	4.44%	2.07%	1.99%	1.86%
14	Sidenreng Rappang	4.38%	3.72%	2.87%	2.05%	1.28%
15	Pinrang	6.53%	17.32%	4.06%	2.48%	1.99%
16	Enrekang	13.70%	12.66%	26.52%	17.63%	11.94%
17	Luwu	2.64%	13.01%	5.34%	9.58%	5.34%
18	Tana Toraja	10.69%	0.61%	1.87%	9.06%	11.71%
19	Luwu Utara	10.58%	9.00%	4.22%	2.10%	3.17%
20	Luwu Timur	4.41%	11.14%	21.65%	30.98%	35.88%

Sumber: BPMPDK Prov. Sul-Sel 2013

**2.3.1.14. Kearsipan**

**a. Tabel Peningkatan Sdm Pengelola Kearsipan**

**Tabel 2.158**  
**Pengelolaan Arsip & Peningkatan SDM**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Pengelolaan Arsip Secara Baku	%	32	46	54	58,5	64,6
b.	Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	Orang	500	700	1.000	1.500	2.340

Sumber: Sekretariat KPID Prov. Sul-Sel 2013

**2.3.1.15. Komunikasi Dan Informatika**

**a. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal**

**Tabel 2.159**  
**Jumlah Lembaga Penyiaran**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang Urusan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
a.	Televisi	10	17	23	13	4

No	Bidang Urusan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
b.	Radio Swasta	7	1	1	9	4
c.	Radio Publik	-	2	2	3	2
d.	Radio Komunitas	1	3	1	4	7
	<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>17</b>

Sumber: Sekretariat KPID Prov. Sul-Sel 2013

### 2.3.1.16. Perpustakaan

**Tabel 2.160**  
**Jumlah Perpustakaan, Pengunjung & Koleksi Buku Perpustakaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
a.	Jml Perpustakaan	746	910	1.393	1.595	1.728
b.	Jml Pengunjung Perpustakaan	236.913	236.913	249.716	308.305	310.953
c.	Jml Koleksi Buku	219.052	219.052	230.375	234.166	236.672

Sumber Data : Badan Arsip & Perpustakaan Prov. Sul-Sel 2013

### 2.3.3. Fungsi Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan yang telah di Perdakan sangat diperlukan dalam tahap proses pelaksanaan pembangunan, ketersediaan dokumen tersebut berupa dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.

**Tabel 2.161**  
**Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD**  
**(Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Tersedianya Dokumen RPJPD	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028					
2	Tersedianya Dokumen RPJMD	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028					
3	Tersedianya Dokumen RKPD	Peraturan Gubernur No. 20 tahun 2007	Peraturan Gubernur No. 28 tahun 2008	Peraturan Gubernur No. 104 tahun 2009	Peraturan Gubernur No. 43 tahun 2010	Peraturan Gubernur No. 29 tahun 2011	Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012
4	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	55	55	55	55	55	56

Sumber : Bappeda Sulawesi Selatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

### 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Fokus layanan urusan pilihan diarahkan pada urusan pertanian, kehutanan, energi, sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

#### 2.3.2.1. Pertanian

##### a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Data tabel di bawah menunjukkan terjadi penurunan produktivitas padi dan jagung pada tahun 2010 karena pada tahun 2010 terjadi perubahan iklim dimana hampir sepanjang tahun terjadi hujan.

**Tabel 2.162**  
**Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Padi	%	50,16	49,44	50,74	50,98	51,22
b.	Jagung	%	46,58	44,27	47,80	46,58	45,62
c.	Kedelai	%	16,00	15,11	15,73	15,00	14,77

Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sul-Sel 2014

##### b. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB

**Tabel 2.163**  
**Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Sektor Pertanian	%	28,02	25,83	25,32	24,79	23,90
b.	Sektor Perkebunan	%	6,05	5,35	5,05	4,48	

Sumber : Dinas Pertanian Prov. Sul-Sel 2013

##### c. Produksi Daging (Kg) dari berbagai komoditas ternak di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Peningkatan produksi daging terjadi pada semua komoditas ternak di Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan peternakan dalam kurun 5 tahun terakhir (2009-2013). Produksi daging sapi dan ayam ras pedaging yang merupakan sumber utama dalam penyediaan daging merupakan komoditas paling konsisten, yakni tanpa pernah mengalami penurunan produksi dengan rata-rata masing-masing 11,49% dan 13,64%, ini merupakan dampak dari Program Sejuta Sapi Tahun 2007-2013. Komoditas lain umumnya sempat mengalami penurunan produksi pada kurun waktu tahun 2009-2011, namun demikian secara keseluruhan pertumbuhan produksi dicapai pada semua komoditas, dengan pertumbuhan tertinggi pada komoditas daging kambing dan daging ayam petelur yang masing-masing mencapai 21,26% dan 19,00%. pertumbuhan terendah dicapai pada produksi daging itik dan kerbau yang hanya 4,29% dan 4,74%. Konsistensi dan laju pertumbuhan yang rendah pada komoditas kerbau dan domba terjadi karena minat peternak dan produktivitas reproduksi yang rendah. Sementara pertumbuhan

produksi daging unggas (ayam dan itik) yang tinggi didorong oleh siklus produksi yang pendek dan penguasaan teknologi budidaya yang baik.

**Tabel 1.164**  
**Produksi Daging (Kg) dari Berbagai Komoditas Ternak**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Jenis Ternak	Tahun					R2 (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	
1	Sapi	8.215.598	9.055.961	11.025.604	12.724.604	15.715.945	17,7
2	Kerbau	2.169.070	1.546.125	1.825.745	2.689.851	3.495.332	16,9
3	Kuda	420.250	805.375	868.375	1.108.305	810.975	25,1
4	Kambing	583.347	885.785	1.631.941	1.675.451	1.590.559	33,4
5	Domba	1.286	1.399	935	1.460	1.126	4,5
6	Babi	1.699.042	1.863.357	2.541.143	2.397.305	3.938.117	26,2
7	Ayam Buras	5.127.604	5.373.582	5.483.403	6.261.320	23.553.115	74,3
8	Ayam Ras Petelur	2.999.102	1.371.055	1.440.884	1.823.570	6.082.872	52,7
9	Ayam Ras Pedaging	10.709.824	10.692.339	11.594.378	11.072.667	24.378.434	31,0
10	Itik	844.807	765.238	668.170	742.176	1.954.521	38,1

Sumber ; Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan

### 2.3.2.2. Kehutanan

#### a. Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis

Kondisi kerusakan hutan dan lahan di Sulawesi Selatan selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan kualitas melalui penanganan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, yakni dari luas total hutan dan lahan kritis sebanyak 1.183.017 Ha tahun 2008 menjadi 615.056 Ha tahun 2012. Penanganan kerusakan hutan dan lahan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Sulawesi Selatan dilakukan secara bersinergi antara Pemerintah, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah kabupaten/kota.

**Tabel 2.165**  
**Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	17.920,00	32.831,00	68.398,33	147.389,28	115.628,91
b.	Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	1.183.007	682.784	669.652	642.293	615.065
	<b>Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis</b>	<b>%</b>	<b>1,51</b>	<b>4,81</b>	<b>10,21</b>	<b>22,94</b>	<b>18,80</b>

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013

Berdasarkan data, jumlah luas hutan yang direhabilitasi setiap tahun mengalami peningkatan, yakni dari 17,92 ribu ha tahun 2008 meningkat menjadi 115,63 ribu ha tahun 2012 atau dari 1,51 persen menjadi 18,80 persen. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan kondisi hutan yang telah rusak sehingga bisa menjaga keseimbangan ekosistem hutan.

**Tabel 2.166**  
**Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis Menurut Kabupaten/Kota**  
**Di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Kabupaten / Kota	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Makassar		926	252	929	881
2	Gowa	975	2,075	3,752	7,206	6,872
3	Takalar	350	675	1,026	3,839	2,942
4	Jeneponto	750	775	2,027	11,225	3,610
5	Bantaeng	378	400	2,277	4,731	3,204
6	Bulukumba	529	475	3,401	4,307	6,237
7	Selayar	359	1,175	1,875	2,743	1,832
8	Sinjai	775	725	4,003	8,381	3,579
9	Maros	775	875	3,000	12,465	3,997
10	Pangkep	1,100	1,350	2,775	6,977	1,997
11	Barru	800	925	1,727	4,859	8,890
12	Pare-Pare	-	20	1,054	914	120
13	Sidrap	175	600	1,400	4,314	2,576
14	Soppeng	600	1,125	5,001	8,583	10,783
15	Wajo	1,025	600	3,747	15,566	3,816
16	Bone	300	2,480	3,502	7,324	6,420
17	Pinrang	540	3,300	3,140	3,687	4,058
18	Enrekang	2,186	2,850	1,317	4,266	5,974
19	Tana Toraja	3,200	3,700	3,739	5,338	8,500
20	Luwu	-	745	11,496	14,836	6,756
21	Palopo	1,520	1,335	1,142	2,007	2,217
22	Luwu Utara	533	3,600	3,913	3,837	13,344
23	Luwu Timur	1,050	2,100	1,453	3,627	2,999
24	Toraja Utara	-	-	1,377	5,428	4,026
<b>Jumlah</b>		<b>17,920</b>	<b>32,831</b>	<b>68,398</b>	<b>147,389</b>	<b>115,628</b>

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013

#### **b. Kerusakan Kawasan Hutan**

Luas kerusakan kawasan hutan selama kurun waktu 2008-2012 cenderung mengalami penurunan, yakni dari 336.346 ha atau sebesar 15,94 persen tahun 2008 menurun menjadi 271.399 ha atau sebesar 10,75 persen tahun 2012. Penurunan luas kerusakan kawasan hutan di Sulawesi Selatan merupakan upaya yang saling bersinergi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta pelibatan masyarakat mengingat hutan merupakan salah satu sumber daya pembangunan Sulawesi Selatan..

**Tabel 2.167**  
**Kerusakan Kawasan Hutan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Luas kerusakan kawasan hutan	Ha	336.346	366.793	380.603	349.696	271.399
b.	Luas kawasan hutan	Ha	2.109.612	2.109.612	2.523.494	2.523.494	2.523.494

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
	Kerusakan Kawasan Hutan	%	15,94	17,39	15,08	13,86	10,75

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013

Tabel 2.168

**Kerusakan Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Kabupaten / Kota	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Luas Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)				
			2008	2009	2010	2011	2012
1	Makassar	-	-	-	-	-	-
2	Gowa	73,321	31,674	30,699	28,624	26,549	19,343
3	Takalar	7,536	5,612	5,262	4,587	3,912	73
4	Jeneponto	9,600	2,659	1,909	1,134	359	359
5	Bantaeng	5,792	1,468	1,090	790	390	390
6	Bulukumba	12,793	294	235	235	235	235
7	Selayar	450,836	162	162	162	162	162
8	Sinjai	18,913	1,036	775	725	725	725
9	Maros	65,323	17,852	17,077	16,202	15,327	2,862
10	Pangkep	27,558	11,962	10,862	9,512	8,162	1,185
11	Barru	68,180	20,469	19,669	18,744	17,819	12,960
12	Pare-Pare	2,313	2,107	2,107	2,087	2,067	1,153
13	Sidrap	69,721	9,893	9,718	9,118	8,518	4,204
14	Soppeng	47,275	5,328	4,728	3,603	2,478	2,478
15	Wajo	24,149	6,024	4,999	4,399	3,799	3,816
16	Bone	140,135	41,838	41,538	39,058	36,578	29,254
17	Pinrang	71,605	26,577	26,037	22,737	19,437	15,750
18	Enrekang	82,089	20,717	18,531	15,681	12,831	8,565
19	Tana Toraja	113,000	51,138	47,938	44,238	40,538	35,200
20	Luwu	259,944	10,472	10,472	9,727	8,982	6,756
21	Palopo	10,290	2,217	7,285	5,950	4,615	2,608
22	Luwu Utara	378,901	39,917	39,384	35,784	32,184	28,347
23	Luwu Timur	533,943	26,932	66,316	64,216	62,116	58,489
24	Toraja Utara	50,277	-	-	43,290	41,913	36,485
<b>JUMLAH</b>		<b>2,523,494</b>	<b>336,346</b>	<b>366,793</b>	<b>380,603</b>	<b>349,696</b>	<b>271,399</b>

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013

**c. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB**

Tabel 2.169

**Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor kehutanan	Milyar	98,05	112,51	122,50	138,05	138,05
b.	Jumlah PDRB	Milyar	85.143,19	99.954,59	117.862,21	137.389,98	137.389,98

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	%	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Sul-Sel 2013

### 2.3.2.3 Energi Dan Sumber Daya Mineral

#### a. Pertambangan Tanpa Ijin

Sampai saat ini, izin pertambangan di Sulawesi Selatan semakin diperketat dengan maksud untuk menghindari terjadinya penambang-penambang liar dan apabila masih ada yang melakukan pelanggaran akan diberi sanksi tegas. Selama periode 2008-2012, pertambangan tanpa izin sebesar 53,33 persen tahun 2008 cenderung mengalami penurunan menjadi 46,83 persen tahun 2012. Begitu pula luas penambangan liar yang ditertibkan dan luas area penambangan liar juga mengalami penurunan.

**Tabel 2.170**  
**Pertambangan Tanpa Ijin**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
			2008	2009	2010	2011	2012
a.	Luas penambangan liar yang ditertibkan	Ha	60,00		31,93		12,160
b.	Luas area penambangan liar	Ha	112,50		76,45		25,97
	<b>Pertambangan Tanpa Ijin</b>	<b>%</b>	<b>53,33</b>		<b>41,77</b>		<b>46,83</b>

Sumber : Dinas ESDM Prov. Sul-Sel 2013

Sesuai data, jumlah luas penambangan liar yang ditertibkan pada tahun 2008 sebanyak 60,00 ha menurun menjadi 12,16 ha pada tahun 2012. Sementara luas area penambangan liar pada tahun 2008 sebanyak 122,50 ha juga mengalami penurunan menjadi 25,97 ha pada tahun 2012.

#### b. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Sulawesi Selatan terus mengalami penurunan setiap tahunnya, yakni dari 7,26 persen tahun 2008 menurun menjadi 5,63 persen tahun 2012. Walaupun sektor pertambangan bukan menjadi sektor unggulan namun kontribusinya terhadap PDRB diharapkan bisa lebih ditingkatkan.

**Tabel 2.171**  
**Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	%	7,26	5,51	5,63	5,51	5,63

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel 2013

### 2.3.2.4. Pariwisata

#### a. Kunjungan Pariwisata

Potensi pariwisata di Sulawesi Selatan sangat beranekaragam jenisnya sehingga daerah ini cukup memberi kontribusi terhadap nasional mengenai jumlah kunjungan wisatawan. Selama periode 2009-2013, kunjungan wisatawan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 24,37 persen, yakni dari 2,7 juta orang tahun 2008 meningkat menjadi 5,49 juta jiwa tahun 2013.

**Tabel 2.172**

**Kunjungan Pariwisata  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
Kunjungan Wisata	orang	2,751,427	3,810,623	4,523,381	4,936,567	5,492,411

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan PariwisataProv. Sul-Sel 2014

Hal ini tentu tidak terlepas dari Program Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang setiap tahunnya melaksanakan event-event pariwisata setiap tahunnya antara lain Lovely December, Expedition Takabonerate Island, dan berbagai event kepariwisataan lainnya.

#### b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

**Tabel 2.173**

**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Lapangan usaha	Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Wisata (per Tahun)					Jumlah
		2008	2009	2010	2011	2012	
a.	Hotel	171.496,12	201.694,68	247.744,46	294.242,65	358.047,59	1.273.225,50
b.	Restoran	1.082.522,41	1.282.431,48	1.504.949,82	1.751.934,80	2.045.051,21	7.666.889,72
c.	Hiburan dan Rekreasi	55.455,54	74.816,49	99.166,58	117.579,84	141.679,95	488.698,40
<b>Total (Juta Rp.)</b>		<b>1.309.474,07</b>	<b>1.558.942,65</b>	<b>1.851.860,86</b>	<b>2.163.757,29</b>	<b>2.544.778,75</b>	<b>9.428.813,62</b>
<b>Total (%)</b>		<b>1,54</b>	<b>1,56</b>	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>	<b>1,60</b>	<b>1,57</b>

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan PariwisataProv. Sul-Sel 2013

### 2.3.2.5. Perikanan & Kelautan

#### a. Produksi Perikanan

Selama kurun waktu 2009-2013, produksi perikanan di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2013, produksi ikan berhasil melampaui target sebesar 194,68 persen atau selisih sebesar 1,40 juta ton, dimana produksi ikan yang dicapai sebesar 2,88 juta ton sementara target hanya sebesar 1,48 juta ton. Pada tahun 2014, peningkatan produksi perikanan dari target mencapai 113,28 persen hal ini disebabkan karena penyesuaian target produksi sesuai dengan target RPJMD 2013-2018. Produksi perikanan didukung dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dimana untuk produksi perikanan tangkap fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan perikanan tangkap sedangkan perikanan budidaya fokus pada peningkatan produksi. Capaian kinerja produksi perikanan dapat melampaui target karena tingginya produksi Rumput Laut selain itu juga dukungan prasarana, pengawasan

dan konservasi sumber daya ikan serta peningkatan dan pembinaan mutu produksi perikanan.

**Tabel 2.174**  
**Produksi Perikanan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah produksi ikan	ton	1.142.376,20	1.852.336,10	2.036.522,70	2.495.576,20	2.884.006,7
b.	Target daerah	ton	1.223.292,80	1.316.443,80	1.363.245,00	1.416.629,00	1.481.387,2
	<b>Produksi Perikanan</b>	<b>%</b>	<b>93,40</b>	<b>140,70</b>	<b>149,40</b>	<b>176,20</b>	<b>194,68</b>
c.	Jumlah produksi perikanan tangkap	ton	226.476,50	223.807,90	237.807,90	259.881,00	277.894
d.	Target daerah	ton	316.176,00	324.578,00	332.891,8	341.632,00	262.480,3
	<b>Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>%</b>	<b>71,63</b>	<b>68,87</b>	<b>71,44</b>	<b>76,07</b>	<b>105,87</b>
e.	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	915.899,70	1.629.077,80	1.798.714,80	2.235.654,80	2.591.769,10
f.	Target Daerah	ton	907.117,00	991.865,50	1.030.353,00	1.074.997,00	1.313.004,20
	<b>Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>%</b>	<b>100,97</b>	<b>164,24</b>	<b>117,13</b>	<b>210,83</b>	<b>197,39</b>

Sumber: Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Sul-Sel 2014

#### b. Komoditi Unggulan

Komoditi unggulan udang, bandeng dan rumput laut merupakan komoditi yang dominan pada produksi perikanan propinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2010 sampai tahun 2014, produksi komoditi unggulan secara fluktuatif mengalami peningkatan, dan pada tahun 2013 dilakukan penyesuaian target produksi komoditi unggulan sesuai RPJMD 2013-2018. Sejalan hal tersebut masih terdapat permasalahan dalam pengembangan komoditi unggulan yaitu lahan tambak yang pemanfaatannya masih terbatas dibandingkan dengan potensi daerah dan adanya wabah penyakit ikan atau virus yang sering terjadi pada usaha pembudidayaan.

**Tabel 2.175**  
**Produksi Komoditi Unggulan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
I.	UDANG						
a.	Jumlah produksi Udang	Ton	17.829	22.840	26.825	28.145,6	34.420,7
b.	Target daerah	Ton	21.490,0	23.918,9	26.772,9	30.714,0	33.200,0
	Produksi Udang	%	82,96	95,49	100,19	91,64	103,67
II.	BANDENG						
a.	Jumlah produksi Bandeng	ton	64.790	78.188	83.309	89.708	119.887,1
b.	Target daerah	ton	63.928,9	71.881,0	73.318,6	76.984,5	91.502,30
	Produksi Bandeng	%	93,4	140,7	149,4	176,2	131,02
III	RUMPUT LAUT						
e.	Jumlah produksi Rumput Laut	Ton	824.027	1.517.690	1.675.807	2.104.446	<b>2.422.154,2</b>

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
f.	Target Daerah	Ton	810.640,0	880.577	915.161	951.876	2.233.259,7
	Produksi R.Laut	%	93,4	140,7	149,4	176,2	108,46

Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya dan strategi pengembangan dalam menangani permasalahan tersebut yaitu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pembudidaya dalam menghadapi virus penyakit udang dan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Kemudian hal yang masih perlu dilakukan yaitu dukungan dan perhatian pemerintah dalam peningkatan produksi, mutu dan distribusi produksi dari hulu ke hilir.

### c. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan di Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun sehingga pada tahun 2013 konsumsi ikan berhasil melampaui target sebesar 105,47 persen, dimana konsumsi ikan yang dicapai sebesar 44,30kg sementara target daerah hanya sebesar 42,00 kg.

**Tabel 2.176**

#### Konsumsi Ikan

##### Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah konsumsi ikan	Kg	35,60	37,70	40,30	41,80	44,30
b.	Target daerah	Kg	40,70	40,90	41,20	41,40	42,00
	<b>Konsumsi Ikan</b>	<b>%</b>	<b>87,50</b>	<b>92,20</b>	<b>97,80</b>	<b>100,90</b>	<b>105,47</b>

Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014

Capaian kinerja konsumsi ikan berhasil melampaui target karena Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mencanangkan program gemar makan ikan sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat konsumsi protein asal ikan.

### d. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan yang mendapat bantuan di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan, yakni 0,35 persen tahun 2009 meningkat menjadi 0,54 persen tahun 2013 atau dari 163 kelompok menjadi 544 kelompok.

**Tabel 2.177**

#### Cakupan Bina Kelompok Nelayan

##### Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan	Jml	163	383	342	551	544
b.	Jumlah Kelompok Nelayan	Jml	47.214	55.448	56.000	98.411	99.395
c.	<b>Cakupan Bina Kelompok Nelayan</b>	<b>%</b>	<b>0,35</b>	<b>0,69</b>	<b>0,61</b>	<b>0,56</b>	<b>0,54</b>

Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014

Apabila dibandingkan dengan jumlah kelompok nelayan yang ada, tentu sangat sedikit yang mendapat bantuan. Dari hasil analisis terlihat bahwa terlihat bahwa peningkatan jumlah kelompok nelayan selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan sebesar **21,24** persen. Jika hal ini tidak mendapat perhatian, maka jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan akan semakin mengecil setiap tahunnya.

#### e. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Sesuai data terlihat bahwa kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan dan pembudidaya pada tahun 2009 sebesar  $\pm$  394 ton meningkat menjadi  $\pm$  1,4juta ton pada tahun 2014. Begitu pula bila dibandingkan dengan jumlah produksi ikan di Sulawesi Selatan selama periode 2009-2013 mengalami peningkatan, maka kontribusi produksi ikan dari kelompok nelayan rata-rata sebesar **57,83** persen tiap tahun. Selain itu jumlah produksi ikan dari tahun 2009 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar **21,97** persen.

**Tabel 2.178**  
**Produksi Perikanan Kelompok Nelayan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
			2009	2010	2011	2012	2013
a.	Jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan (pembudidaya)	Ton	394.348	1.279.409	1.243.704	1.402.741	1.475.608
b.	Jumlah Produksi Ikan di Daerah	Ton	1.093.367	1.142.376	2.036.523	2.495.536	2.884.006
	<b>Produksi Perikanan Kelompok Nelayan</b>	%	<b>34,52</b>	<b>69,07</b>	<b>61,07</b>	<b>56,21</b>	<b>51,16</b>

Sumber: Dinas Kelautan& Perikanan Prov. Sul-Sel 2014

Namun dari data tersebut dapat dikatakan bahwa persentase antara jumlah produksi ikan di daerah terdiri atas kontribusi produksi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan cenderung menurun dari tahun 2010 sampai tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa apabila bantuan pemerintah lebih ditingkatkan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan akan berimplikasi terhadap kontribusinya terhadap total produksi ikan di daerah.

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah produksi ikan di daerah terdiri atas kontribusi produksi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini menunjukkan bahwa apabila bantuan pemerintah lebih ditingkatkan pada kelompok nelayan dan pembudidaya ikan akan berimplikasi terhadap kontribusinya terhadap total produksi ikan di daerah.

## 2.3.2.6. Perdagangan

## a. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Tabel 2.179

Kontribusi Sektor Perdagangan & Industri Terhadap PDRB  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

No	Uraian	Tahun									
		2008		2009		2010		2011		2012	
		milyar	%	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%	Milyar	%
1.	Perdagangan, Hotel & Restoran	13.913,80	16,34	16.690,29	0,17	20.434,95	0,17	20.434,95	0,17	24.136,35	0,18
2.	Industri Pengolahan	11.060,44	12,99	12.514,89	0,13	14.457,26	0,13	14.457,26	0,12	16.789,29	0,12
3.	Pertambangan	6.201,50	0,07	5.503,78	0,06	7.168,66	0,06	8.345,80	0,07	8.803,04	6,42
4.	Konsumsi Rumah tangga	47.393,16	0,56	52.780,92	0,53	59.616,78	0,51	66.264,06	0,48	75.278,70	0,47

Sumber : Dinas Perindustrian &amp; Perdagangan Prov. Sul-Sel 2013

## b. Tabel Ekspor Bersih Perdagangan

Tabel 2.180

Ekspor Bersih Perdagangan  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012

Kegiatan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
EKSPOR (Juta US\$)	1.892,92	1.344,32	2.016,91	1.773,57	1.446,19
IMPOR (Juta US\$)	871,56	649,11	987,32	1.305,41	1.302,41
<b>SURPLUS (Juta US\$)</b>	<b>1021,4</b>	<b>695,21</b>	<b>1029,6</b>	<b>468,16</b>	<b>143,78</b>

Sumber : Dinas Perindustrian &amp; Perdagangan Prov. Sul-Sel 2013

## c. Rasio Tempat Ibadah

Ketersediaan tempat ibadah merupakan salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tempat ibadah yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Sulawesi Selatan pada tahun 2008 sebesar 1,48 dan pada tahun 2013 bertambah menjadi 1,5.

Tabel 2.181

Rasio Tempat Ibadah  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013

No.	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
a.	<b>Jumlah Tempat Ibadah</b>	<b>unit</b>	<b>20.408</b>	<b>17.098</b>	<b>19.295</b>	<b>20.147</b>	<b>20.147</b>	<b>18.051</b>
	Mesjid	unit	11.562	10.403	12.670	13.424	13.424	13.103
	Langgar	unit	563	747	747	747	747	747
	Musholah	unit	1.001	1.351	1.351	1.400	1.400	1.400
	Gereja Katholik	unit	387	300	2.064	422	422	407
	Gereja Protestan	unit	2.053	2.050	372	2.064	2.064	2.134
	Pura Hindu	unit	4.819	2024	2.065	2.064	2.064	229

No.	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
	Wihara Budha	unit	23	23	26	26	26	31
<b>b.</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Jiwa</b>	<b>7.805.024</b>	<b>7.908.519</b>	<b>8.034.776</b>	<b>8.115.638</b>	<b>8.115.638</b>	<b>8.342.047</b>
	<b>Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk</b>		1,48	1,32	1,58	1,65	1,65	1,5

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2013

**Tabel 2.182**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama yang Dianut Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011**

No	Kabupaten/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Kepulauan Selayar	157.516	1	29	143	-	-
2	Bulukumba	317.033	394	178	17	176	-
3	Bantaeng	148.837	266	173	5	29	-
4	Jeneponto	297.906	37	16	2	-	-
5	Takalar	229.956	71	-	8	4	-
6	Gowa	648.344	2.021	1.125	128	223	-
7	Sinjai	206.265	56	17	6	-	-
8	Maros	264.345	471	-	54	51	-
9	Pangkep	264.465	387	441	42	-	-
10	Barru	137.718	61	-	-	-	-
11	Bone	678.843	1.058	834	37	138	-
12	Soppeng	194.357	525	62	17	7	-
13	Wajo	317.827	82	-	-	-	-
14	Sidrap	269.973	1.000	137	22.238	32	-
15	Pinrang	281.438	4.505	3.447	-	-	-
16	Enrekang	175.665	435	64	4	-	-
17	Luwu	285.483	8.604	8.965	86	14	-
18	Tana Toraja	44.623	290.653	82.840	11.144	16	-
19	Luwu Utara	216.808	30.804	2.337	7.428	10	-
20	Luwu Timur	179.887	38.536	4.909	13.204	10	-
21	Toraja Utara	-	-	-	-	-	-
22	Makassar	1.833.735	181.546	43.377	8.038	11.673	-
23	Pare Pare	102.030	5.296	2.627	1.131	777	-
24	Palopo	122.521	5.741	13.058	220	349	-
<b>Sulawesi Selatan</b>		<b>7.375.573</b>	<b>572.551</b>	<b>164.635</b>	<b>63.954</b>	<b>13.509</b>	<b>-</b>

Sumber : Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2014

### 2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Ketersediaan dokumen perencanaan yang telah di Perdakan sangat diperlukan dalam tahap proses pelaksanaan pembangunan, ketersediaan dokumen tersebut berupa dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.

**Tabel 2.183**  
**Tersedianya Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana SKPD**  
**(Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA)**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2013**

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Tersedianya Dokumen RPJPD	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028					

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)  
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025

No	Bidang/Urusan	Tahun					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
2	Tersedianya Dokumen RPJMD	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028					
3	Tersedianya Dokumen RKPD	Peraturan Gubernur No. 20 tahun 2007	Peraturan Gubernur No. 28 tahun 2008	Peraturan Gubernur No. 104 tahun 2009	Peraturan Gubernur No. 43 tahun 2010	Peraturan Gubernur No. 29 tahun 2011	Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2012
4	Tersedianya Dokumen Renstra SKPD	55	55	55	55	55	56

Sumber : Bappeda Sulawesi Selatan Prov. Sul-Sel Tahun 2014

## 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

### 2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi RT / Kapita, pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, produktifitas total daerah, serta nilai tukar petani.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan daerah yang strategis karena merupakan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang memiliki keunggulan kompetitif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disamping itu, Sulawesi Selatan memiliki potensi yang besar, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang sangat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi regional dan bahkan nasional.

#### 2.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian daerah Sulawesi Selatan tumbuh cukup baik selama kurun waktu 2008-2012 dengan rata-rata pertumbuhan 7,60 persen per tahun. Perkembangan PDRB Sulawesi Selatan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp 85,14 triliun pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 159,43 triliun pada tahun 2012. PDRB per kapita pada tahun 2008 mencapai Rp 10,83 juta mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu Rp 19,19 juta pada tahun 2012.

Dari sisi penggunaan perekonomian Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2008-2012 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga mencapai 55,66 persen tahun 2008 mengalami penurunan kontribusi hingga mencapai 47,22 persen tahun 2012 dan konsumsi pemerintah pada kurun waktu yang sama terus mengalami peningkatan kontribusi, yakni dari sebesar 17,29 persen menjadi 31,99 persen. Sementara untuk komponen lainnya yang memiliki peran yang cukup besar adalah komponen ekspor dan impor. Komponen ekspor pada tahun 2008 sebesar 37,76 persen menurun menjadi 19,73 persen tahun 2012, sementara impor sebesar 33,15 persen menjadi 19,73 persen. Sedangkan proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kurun waktu yang sama mencapai 20,25 persen mencapai 27,61 persen dan Lembaga Swasta Nirlaba hanya sebesar 0,67 persen menjadi 0,79 persen.

### 2.4.1.1 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

#### a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk pengeluaran makanan di Sulawesi Selatan pada tahun 2011 adalah sebesar 51,40 persen atau mengalami penurunan sebesar 6,31 poin jika dibandingkan dengan tahun 2010. Kalau diamati perbedaan pengeluaran pada kedua golongan pengeluaran tersebut (makanan dan non makanan) maka terlihat dengan jelas bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat masih digunakan untuk keperluan konsumsi makanan tetapi untuk saat ini cenderung bergeser. Masih dominannya pengeluaran konsumsi makanan dibanding pengeluaran konsumsi non makanan merupakan gambaran kesejahteraan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan akan tetapi tahun 2011 sudah terlihat ada perubahan pergeseran pola hidup masyarakat yang mengarah ke konsumsi non makanan yang menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.184**  
**persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Total Pengeluaran RT Pangan	1,134,554	1,727,885	1,726,021	2,048,77
2	Jumlah RT	1,783,932	1,865,662	1,848,068	1,892,944
3	<b>J u m l a h</b>	<b>63.60</b>	<b>92.62</b>	<b>93.40</b>	<b>108.23</b>

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel 2013

Pengeluaran rata-rata per kapita menurut golongan pengeluaran di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008 hingga 2012 mengalami pergeseran. Jumlah rumah tangga dengan golongan pengeluaran di bawah 200 ribu rupiah cenderung mengalami penurunan sedangkan jumlah rumah tangga dengan golongan pengeluaran lebih besar dari 200 ribu rupiah cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan pendapatan di tingkat rumah tangga.

#### b. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Selama periode 2008-2011, persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Sulawesi Selatan masih didominasi oleh kelompok bahan pangan yang persentasenya cenderung menurun sehingga berbanding terbalik dengan persentase kelompok bahan non pangan yang cenderung meningkat.

**Tabel 2.185**  
**persentase Konsumsi RT non-Pangan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Total Pengeluaran RT Non Pangan	438,601	746,327	729,903	995,636
2	Total Pengeluaran	1,134,554	1,727,885	1,726,021	2,048,777
3	<b>Rasio (1/2)</b>	<b>38,66</b>	<b>63,19</b>	<b>42,29</b>	<b>48,60</b>

Sumber: BPS Prov. Sul-Sel 2013

persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Sulawesi Selatan untuk kelompok bahan pangan selama periode 2008-2011 cenderung menurun, yakni dari 61.34 persen menjadi 51.40 persen. Sementara persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk kelompok bahan non pangan cenderung meningkat dan hampir berimbang, yakni dari 38.66 persen menjadi 48.60 persen.

Selama kurun waktu 2008-2011, data pengeluaran konsumsi makanan menunjukkan kecenderungan menurun sebaliknya untuk non makanan kecenderungannya meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan pola konsumsi dari makanan ke non makanan. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

### c. Produktivitas Total Daerah

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta membawa tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih sejahtera, tetapi pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, sedangkan masyarakat lain tidak menikmati. Untuk itu kemampuan ekonomi dapat dilihat dari produktivitas pada masing-masing sektor lapangan usaha PDRB Sulawesi Selatan. Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Dari Sembilan sektor, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Sulawesi Selatan adalah sektor pertanian, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa, dan sektor industri pengolahan. Sektor yang kontribusinya paling kecil adalah sektor pertambangan dan penggalian.

**Tabel 2.186**  
**Produktivitas Per Sektor**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Kabupaten/Kota	2 0 0 8		2 0 0 9		2 0 1 0		2 0 1 1		2 0 1 2	
		( Rp Milyar )	%	( Rp Milyar )	%	( Rp Milyar )	%	( Rp Milyar )	%	( Rp Milyar )	%
1	<b>P D R B (Atas Dasar Harga Berlaku)</b>	<b>85.143,20</b>		<b>99.954,61</b>		<b>117.862,20</b>		<b>137.389,88</b>		<b>159.427,10</b>	
	Pertanian	25.071,81	29,45	28.008,21	28,02	30.442,43	25,83	34.788,23	25,32	39.518,40	24,79
	Pertambangan dan Penggalian	6.201,50	7,28	5.503,78	5,51	7.119,68	6,04	8.345,85	6,07	8.803,00	5,52
	Industri Pengolahan	11.060,44	12,99	12.514,89	12,52	14.457,26	12,27	16.789,29	12,22	19.492,50	12,23
	Listrik, Gas, dan Air Bersih	838,10	0,98	949,24	0,95	1.087,97	0,92	1.245,91	0,91	1.439,20	0,90
	K o n s t r u k s i	4.253,53	5,00	5.387,79	5,39	6.534,51	5,54	7.760,90	5,65	9.109,80	5,71
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	13.913,80	16,34	16.690,29	16,70	20.434,95	17,34	24.236,35	17,64	28.349,60	17,78
	Pengangkutan dan Komunikasi	6.972,02	8,19	7.953,95	7,96	9.445,57	8,01	10.849,84	7,90	12.982,90	8,14
	Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan	5.203,00	6,11	6.241,52	6,24	7.810,11	6,63	9.513,69	6,92	11.803,30	7,40
	Jasa-Jasa	11.629,00	13,66	16.704,94	16,71	20.529,72	17,42	23.859,82	17,37	27.928,40	17,52
2	<b>Jumlah Angkatan Kerja</b>	<b>3.447.879</b>	<b>100</b>	<b>3.536.920</b>	<b>100</b>	<b>3.571.317</b>	<b>100</b>	<b>3.612.424</b>	<b>100</b>	<b>3.642.426</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Prov. Sul-Sel 2013

#### d. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) diukur dengan cara membandingkan antara indeks yang diterima petani dengan jumlah indeks yang diterima petani. Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa Nilai Tukar Petani di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dari semula pada tahun 2009 sebesar 100,65 meningkat menjadi 107,43 pada tahun 2013.

**Tabel 2.187**  
**Nilai Tukar Petani**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Indeks yang diterima petani (It)	123,10	130,31	142,43	148,52	155,74
2	Indeks yang dibayar petani (Ib)	122,30	128,22	132,99	137,45	144,97
<b>3</b>	<b>Nilai Tukar Petani (NTP)</b>	<b>100,65</b>	<b>101,63</b>	<b>107,09</b>	<b>108,05</b>	<b>107,43</b>

Sumber: BPS Prov. Sul-Sel 2013

Dilihat dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP), menunjukkan bahwa NTP mengalami peningkatan setiap tahun dari tahun 2009 hingga tahun 2012, yaitu sebesar 100,65 meningkat nilainya menjadi 107,43. meningkat nyata pada tahun 2012 dimana saat itu nilainya sebesar 108,05. peningkatan disebabkan oleh produksi komoditas pertanian khususnya padi sawah yang cukup tinggi, sementara harga sarana produksi pertanian terutama pupuk serta harga barang dan jasa yang dikonsumsi petani, saat itu relatif stabil. Kondisi ini menjadikan kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dibutuhkan petani, sehingga petani dapat menikmati keuntungan dari usaha tani serta mencapai perbaikan daya beli. Hal ini memperlihatkan bahwa NTP bertahan di atas angka 100, artinya petani masih menikmati keuntungan dari usahataniannya, meskipun produksi agak mengalami gangguan karena cuaca dan iklim.

#### 2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### 2.4.2.1. Perhubungan

##### a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada tahun 2008 sebesar 0,015 persen dan pada tahun 2012 menjadi 0,013 persen, ini menunjukkan bahwa penambahan panjang jalan tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang ada.

**Tabel 2.188**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Panjang Jalan	24.307,13	24.307,13	32.432	32.432	32.486,391
2.	Jumlah Kendaraan	1.613.240	1.742.861	1.874.851	2.186.263	2.446.819
3.	Rasio	0.015	0.0139	0.017	0.014	0.0132

Sumber : Dinas Bina Marga Prov. Sul-Sel 2013

**Tabel 2.189**  
**Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011**

No	Kabupaten/kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
1	2	3	4	5
1	Kepulauan Selayar	795,700	10,446	0,076
2	Bulukumba	1.512,611	70,171	0,021
3	Bantaeng	609,371	21,292	0,028
4	Jeneponto	1.520,390	26,752	0,056
5	Takalar	943,885	58,373	0,016
6	Gowa	2.700,090	177,793	0,015
7	Sinjai	1.436,676	33,091	0,043
8	Maros	1.479,881	35,084	0,042
9	Pangkep	831,133	70,877	0,011
10	Barru	905,481	27,773	0,032
11	Bone	2.867,842	126,311	0,022
12	Soppeng	939,793	45,809	0,020
13	Wajo	1.565,425	97,803	0,016
14	Sidrap	1.509,164	57,673	0,026
15	Pinrang	863,983	121,715	0,007
16	Enrekang	1.158,879	25,041	0,046
17	Luwu	1.453,999	65,796	0,022
18	Tana Toraja	1.570,627	42,472	0,036
19	Luwu Utara	2.777,185	49,031	0,056
20	Luwu Timur	2.538,993	59,807	0,042
21	Toraja Utara	-	-	
22	Makassar	1.628,827	1,067,351	0,0015
23	Pare Pare	391,909	85,668	0,0045
24	Palopo	484,546	70,690	0,0068
	Jumlah	32.486,391	<b>2.446.819</b>	0,0132

Sumber : Dinas Bina Marga Prov. Sul-Sel Tahun 2012

#### 2.4.2.2. Penataan Ruang

##### a. Ketaatan Terhadap RTRW

Persentase realisasi RTRW terhadap rencana peruntukan RTRW sebesar 0,35 pada tahun 2009, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,52.

**Tabel 2.190**  
**Ketaatan Terhadap RTRW**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012**

No	Uraian	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1.	Realisasi RTRW	93	120	128	138
2.	Rencana Peruntukan RTRW	266	266	266	266
3.	Rasio (1./2.)	0,35	0,45	0,48	0,52

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

##### b. Wilayah Produktif

Persentase luas wilayah produktif terhadap luas seluruh wilayah budidaya sebesar 0,40 pada tahun 2009, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,35.

**Tabel 2.191**  
**persentase Luas Wilayah Produktif**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1.	Luas Wilayah produktif	1.241.313	1.241.313	1.816.757	1.816.757
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	2.551.072	2.551.072	2.551.072	2.551.072
3.	<b>Rasio (1./2.)</b>	<b>0,40</b>	<b>0,49</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>

Sumber : Bappeda Prov. Sul-SelTahun 2013

**c. Luas Wilayah Industri**

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRWP Sulsel menetapkan luasan kawasan budidaya seluas 2.551.072 hektar yang diutamakan untuk pengembangan kawasan yang mendukung komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan pengembangan komoditas unggulan pada pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan pada pengembangan agroindustri komoditas unggulan. Luas wilayah industri di Sulawesi Selatan yang merupakan realisasi luas wilayah industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW sampai tahun 2012 baru mencapai 0,03 dengan membangun industri dan kawasan industri seluas 7,92 Km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.192**  
**persentase Luas Wilayah Industri**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas Wilayah Industri	6.92	6.92	6.92	7.92	7.92
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	25.511	25.511	25.511	25.511	25.511
3.	<b>Rasio</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>	<b>0.03</b>

Sumber : Bappeda Prov. Sul-SelTahun 2013

**Tabel 2.193**  
**persentase Luas Wilayah Industri Menurut Kab/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Industri (Km2)	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Km2)	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kepulauan Selayar	2.14	440.10	0.49
2	Bulukumba	1.09	676.63	0.16
3	Bantaeng	2.89	224.00	1.29
4	Jeneponto	0.78	605.03	0.13
5	Takalar	1.00	365.53	0.27
6	Gowa	0.90	782.56	0.12
7	Sinjai	2.89	393.14	0.74
8	Maros	3.33	1,019.54	0.33

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Industri (Km2)	Luas Seluruh Wil. Budidaya (Km2)	Rasio
9	Pangkep	1.89	659.18	0.29
10	Barru	5.00	673.76	0.74
11	Bone	6.51	2,274.01	0.29
12	Soppeng	0.00	927.42	0.00
13	Wajo	0.00	1,592.30	0.00
14	Sidrap	1.40	1,2545.68	0.11
15	Pinrang	1.17	1,051.34	0.11
16	Enrekang	0.00	1,026.46	0.00
17	Luwu	35.78	1,822.92	1.96
18	Tana Toraja	0.00	1,128.23	0.00
19	Luwu Utara	0.00	4,305.62	0.00
20	Luwu Timur	29.86	3,625.92	0.82
21	Toraja Utara	0.00	378.89	0.00
22	Makassar	2.44	122.63	1.99
23	Pare-Pare	1.73	52.86	3.27
24	Palopo	1.09	117.76	0.93

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

#### d. Luas Wilayah Banjir

Persentase Luas wilayah kebanjiran sebesar 20,20 Ha dari seluruh wilayah budidaya, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 persentase wilayah banjir tidak mengalami perubahan.

**Tabel 2.194**  
**Persentase Luas Wilayah Banjir**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Luas Wilayah Kebanjiran	5,154	5,154	5,154	5,154	5,154
2.	Luas Seluruh Wil. Budidaya	25,511	25,511	25,511	25,511	25,511
3.	Rasio	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20

Sumber : Dinas Tata Ruang & Pemukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

**Tabel 2.195**  
**Persentase Luas Wilayah Banjir Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Kebanjiran	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1	Kepulauan Selayar	0.00	440.10	0.00
2	Bulukumba	332.26	676.63	49.11
3	Bantaeng	110.59	24.00	49.37
4	Jeneponto	338.80	605.03	56.00
5	Takalar	48.38	365.53	13.23

NO	Kabupaten/kota	Luas Wilayah Kebanjiran	Luas Seluruh Wil. Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
6	Gowa	187.11	782.56	23.91
7	Sinjai	125.24	393.14	31.86
8	Maros	534.31	1,019.54	52.41
9	Pangkep	235.97	659.18	35.80
10	Barru	27.96	673.76	4.15
11	Bone	457.99	2,274.01	20.14
12	Soppeng	90.20	927.42	9.73
13	Wajo	32.47	1,592.30	2.04
14	Sidrap	297.97	1,245.68	23.92
15	Pinrang	145.91	1,051.34	13.88
16	Enrekang	9.72	1,026.46	0.95
17	Luwu	1,185.69	1,822.92	65.04
18	Tana Toraja	9.11	1,128.23	0.81
19	Luwu Utara	596.40	4,305.62	13.85
20	Luwu Timur	277.76	3,625.92	7.66
21	Toraja Utara	16.36	378.89	4.32
22	Makassar	51.00	122.63	41.59
23	Pare-Pare	7.49	52.86	14.17
24	Palopo	35.33	117.76	30.00

Sumber : Dinas Tata Ruang& Pemukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang RTRWP Sulsel menetapkan luasan kawasan budidaya seluas 2.551.072 hektar yang diutamakan untuk pengembangan kawasan yang mendukung komoditas unggulan Provinsi Sulawesi Selatan. persentase luas wilayah kebanjiran terhadap luas wilayah budidaya di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 20,20, yang pada umumnya melanda wilayah yang memang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana ditetapkan pada RTRWP Sulsel dan merupakan kawasan sentra produksi pangan sehingga jika tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat menurunkan produktifitas komoditas pertanian dan perikanan di Sulawesi Selatan.

#### e. Luas Wilayah Perkotaan

Persentase luas wilayah perkotaan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 rata mengalami meningkat sebesar 15,96 persen dari luas seluruh wilayah budidaya.

**Tabel 2.196**  
**persentase Luas Wilayah Perkotaan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas Wilayah Perkotaan	4,072.	4,072	4,072	4,072	4,072
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	25,511	25,511	25,511	25,511	25,511
3	Rasio	15.96	15.96	15.06	15.96	15.96

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

**Tabel 2.197**  
**persentase Luas Wilayah Perkotaan Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Perkotaan (Km <sup>2</sup> )	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Km <sup>2</sup> )	Rasio
1	Kepulauan Selayar	136.87	440.10	31.10
2	Bulukumba	187.95	676.63	27.78
3	Bantaeng	28.85	224.00	12.88
4	Jeneponto	69.49	605.03	11.49
5	Takalar	51.24	365.53	14.02
6	Gowa	28.09	782.56	3.59
7	Sinjai	65.51	393.14	16.66
8	Maros	108.24	1,019.54	10.62
9	Pangkep	83.20	659.18	11.62
10	Barru	199.32	673.76	29.58
11	Bone	126.35	2,274.01	2.68
12	Soppeng	278.00	927.42	5.29
13	Wajo	42.67	1,592.30	9.16
14	Sidrap	65.90	1,245.68	4.99
15	Pinrang	96.26	1,051.34	9.16
16	Enrekang	51.24	1,026.46	4.99
17	Luwu	59.26	1.822.92	3.25
18	Tana Toraja	39.75	1,128.23	3.52
19	Luwu Utara	1,088.85	4,305.62	25.29
20	Luwu Timur	721.80	3,625.92	19.91
21	Toraja Utara	10.29	378.89	2.72
22	Makassar	175.77	122.63	143.33
23	Pare Pare	99.33	52.86	187.91
24	Palopo	258.17	117.76	219.23

Sumber : Bappeda Prov. Sul-Sel Tahun 2013

#### **2.4.2.3 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian**

##### **a. Tabel Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan jenisnya, bank di Sulawesi Selatan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yakni jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang masing-masing terdiri Bank Konvensional dan Bank Syariah.

Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia No. 9/7/PBI/2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat

memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial (commercial bank).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

**Tabel 2.198**  
**Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
<b>1</b>	<b>Bank Umum</b>	<b>155</b>	<b>168</b>	<b>176</b>	<b>207</b>	<b>233</b>
	Konvensional	147	158	164	188	210
	Syariah	8	10	12	19	23
<b>2</b>	<b>Bank Perkreditan Rakyat (BPR)</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>40</b>
	Konvensional	21	23	25	25	26
	Syariah	14	14	14	14	14
	<b>T o t a l</b>	<b>190</b>	<b>205</b>	<b>215</b>	<b>246</b>	<b>273</b>

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2013

Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Jenis Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga tersebar di kabupaten/kota, namun masih didominasi oleh Bank Umum Konvensional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.199**  
**Jenis dan Jumlah Bank dan Cabangnya**  
**Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012**

No	Kabupaten / Kota	Bank Umum		BPR	
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah
1	Kepulauan Selayar	2	0	1	0
2	Bulukumba	8	1	1	0
3	Bantaeng	7	0	0	0
4	Jeneponto	6	0	0	0
5	Takalar	6	0	1	1
6	Gowa	13	4	3	3
7	Sinjai	6	0	0	0
8	Maros	8	1	0	1

No	Kabupaten / Kota	Bank Umum		BPR	
		Konvensional	Syariah	Konvensional	Syariah
9	Pangkep	8	1	0	0
10	Barru	7	0	0	0
11	Bone	10	2	1	1
12	Soppeng	7	0	0	1
13	Wajo	10	3	1	2
14	Sidrap	8	0	0	0
15	Pinrang	8	0	0	0
16	Enrekang	6	0	0	0
17	Luwu	9	0	1	0
18	Tana Toraja	5	0	2	0
19	Luwu Utara	7	0	1	0
20	Luwu Timur	6	0	2	0
21	Toraja Utara	5	0	0	0
22	Makassar	35	6	9	4
23	Pare Pare	12	3	0	0
24	Palopo	11	2	3	1
	Jumlah	210	23	28	14

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2013

Jumlah bank dan cabangnya di kabupaten/kota mengalami peningkatan selama tahun 2012. Bank umum masih mendominasi jumlah bank di kabupaten/kota, yakni sebesar 233 buah bank yang terdiri dari 210 bank konvensional dan 23 bank syariah, sementara Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya sebesar 40 buah bank yang terdiri dari 26 bank konvensional dan 14 bank syariah. Jumlah bank dan cabangnya terbanyak di Kota Makassar, yakni sebanyak 54 bank umum yang terdiri dari 35 bank konvensional dan 6 bank syariah serta 13 buah BPR yang terdiri dari 9 bank konvensional dan 4 bank syariah. Sementara terendah di Kabupaten Kepulauan Selayar yang hanya 3 buah bank yang terdiri dari 2 Bank Umum dan 1 Bank Perkreditan Rakyat.

#### b. Tabel Jenis Kelas Dan Jumlah Penginapan/Hotel

Jumlah penginapan/hotel selama ini terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Oleh karena itu, yang perlu mendapat perhatian bahwa bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengunjung sehingga bisa membuat pencitraan yang lebih baik. Kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari jumlah hotel yang ada tetapi juga diukur dari jumlah ketersediaan kamar dan jumlah tempat tidur.

**Tabel 2.200**  
**Jumlah Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2011**

No.	Uraian	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Hotel (Unit)	487	509	552	412
2	Jumlah Kamar (Unit)	9.835	10.114	8.176	6.562
3	Jumlah Tempat Tidur (Buah)	18.222	16.295	16.087	11.013

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2012

#### 2.4.2.4. Lingkungan Hidup

##### a. persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Ketersediaan air bersih sangat esensial untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk untuk bisa hidup sehat. Hidup sehat sangat terkait dengan pola hidup yang bersih, baik bersih lingkungan maupun bersih sumber air. Oleh karena itu, ketersediaan sumber air bersih bagi rumah tangga saat ini belum sebanding dengan jumlah rumah tangga yang ada. Berdasarkan tabel berikut ini, sumber-sumber air bersih berasal dari leding, sumur, mata air, sungai/danau/waduk, pompa air, air hujan, dan air kemasan.

**Tabel 2.201**  
**persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2011**

No	Sumber Air Bersih	Tahun			
		2008	2009	2010	2011
1	Leding (Perpipaan)	371,160	399,228	329,032	274,911
2	Sumur Terlindungi	442,192	452,209	436,422	409,721
3	Sumur Tidak Terlindungi	220,158	193,040	153,474	159,018
4	Mata Air Terlindungi	131,190	180,886	204,126	176,798
5	Mata Air Tidak Terlindungi	128,131	114,798	68,426	100,337
6	Sungai /Danau/Waduk	33,391	28,969	25,878	27,421
7	Pompa air	307,835	318,625	289,025	326,793
8	Air Hujan	10,997	14,381	24,659	22,480
9	Air Kemasan	126,122	158,991	323,259	394,872
10	Lainnya	5,261	4,535	1,901	593
11	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	1.468.602	1.544.403	1.569.811	1.566.153
12	Jumlah Rumah Tangga	1.776.419	1.865.662	1.803.764	1.892.944
13	persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	82,67	82,78	87,03	82,74

Sumber : Dinas Tata Ruang& Pemukiman Prov. Sul-Sel Tahun 2012

#### 2.4.2.5. Komunikasi Dan Informatika

##### a. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Selama periode 2008-2012, ketersediaan daya listrik di Sulawesi Selatan masih mencukupi. Hal ini terlihat kebutuhan dan ketersediaan produksi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Terlihat bahwa kebutuhan daya listrik tahun 2008 sebesar 2.873 GWH meningkat menjadi 3.758 GWH tahun 2012. Di sisi lain ketersediaan produksi listrik juga mengalami peningkatan sebesar 3.304 GWH tahun 2008 menjadi 4.307 GWH tahun 2012. Kebutuhan listrik masih didominasi di tingkat rumah tangga yang setiap tahunnya juga mengalami peningkatan dari 1.441 GWH tahun 2008 menjadi 1.803 GWH. Apabila dibandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan listrik, terlihat bahwa ketersediaan listrik masih surplus sebesar 549 GWH tahun 2012. Tentu hal ini peluang untuk berinvestasi di bidang industri masih bisa kita kembangkan di Sulawesi Selatan.

**Tabel 2.202**  
**Rasio Ketersediaan Daya Listrik**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

Bidang/Urusan	Satuan	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1. Kebutuhan	GWH	2.873	3.071	3.282	3.512	3.758
- Rumah tangga	GWH	1.441	1.532	1.622	1.712	1.803
- Komersial	GWH	438	438	533	588	650
- Publik	GWH	285	309	336	368	403
- Industri	GWH	709	746	791	843	903
2. Susut & losses (T&D)	%	13,0	12,9	12,8	12,7	12,6
3. Susut pemakaian sendiri	%	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4. Total susut & losses	%	15,0	14,9	14,8	14,7	14,6
5. Faktor beban	%	55	55	55	55	55
6. Produksi	GWH	3.304	3.528	3.768	4.028	4.307
7. Beban puncak	MW	686	732	782	836	894
8. Kapasitas terpasang (Existing)	MW	479	470	460	451	442
9. Kapasitas dibutuhkan	MW	960	1.205	1.095	1.170	1.251
10. Total Kapasitas Sistem	MW	<b>1.439</b>	<b>1.675</b>	<b>1.555</b>	<b>1.621</b>	<b>1.693</b>
11. Daya Tambahan	MW	190	556	635	719	809

Sumber : Rencana Umum Kelistrikan Nasional Tahun 2008-2027

**b. persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Listrik**

Penggunaan listrik rumah tangga di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya terpenuhi sesuai jumlah rumah tangga yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan listrik di tingkat rumah tangga, Pemerintah Daerah masih berupaya mencari potensi sumber listrik, baik pembangkit listrik tenaga air maupun pembangkit listrik lainnya.

**Tabel 2.203**  
**Rumah Tangga Pengguna Listrik**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2011**

No	Bidang/Urusan	Satuan	Tahun			
			2008	2009	2010	2011
a.	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik	jml	1.572.637	1.683.033	1.716.768	1.758.212
b.	Jumlah Seluruh Rumah Tangga	jml	1.776.419	1.865.662	1.856.204	1.892.944
	<b>Rumah Tangga Pengguna Listrik</b>	<b>%</b>	<b>88,53</b>	<b>90,21</b>	<b>92,49</b>	<b>92,88</b>

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2012

### 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

#### 2.4.3.1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adminstrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

##### a. Tabel Angka Kriminalitas

Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di daerah. Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

**Tabel 2.204**  
**Angka Kriminalitas**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

NO	Jenis Kriminal	TAHUN									
		2009		2010		2011		2012		2013	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
1	Jml Kasus Narkoba	387	463	460	479	634	577	734	798	743	757
2	Jml Kasus Pembunuhan	110	95	101	92	114	105	94	80	99	79
3	Jml Kasus Seksual	469	344	438	333	523	435	529	433	444	405
4	Jml Kasus Penganiayaan	3,674	2,564	3,896	2,879	4,613	3,307	4,338	3,131	3562	2935
5	Jml Kasus Pencurian	5,310	1,782	6,275	1,964	6,832	1,902	6,830	2,000	7027	4115
6	jml Kasus Penipuan	1,224	678	1,437	789	1,850	609	1,649	883	7160	4137
7	Jml Kasus Pemalsuan Uang	16	18	8	7	23	20	14	10	7	10
8	Total Jml Tindak Kriminal Selama 1 (Satu) Tahun	<b>17,832</b>	<b>5,944</b>	<b>19,276</b>	<b>6,543</b>	<b>22,051</b>	<b>6,955</b>	<b>21,852</b>	<b>7,335</b>	<b>19042</b>	<b>12438</b>
9	Jml Penduduk	7,908,519		8,034,776		8,115,638		8,733,745			
10	Angka Kriminalitas (8)/(9)	<b>225</b>		<b>240</b>		<b>272</b>		<b>250</b>			

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa & Politik Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Jumlah tindak kriminalitas di Sulawesi Selatan selama periode 2008-2012 mengalami peningkatan, yakni sebesar 15.137 kasus tahun 2008 menjadi 21.852 kasus tahun 2012 atau meningkat sebesar 9,61 persen. Dari seratus ribu penduduk terjadi 194 kasus tahun 2008 menjadi 263 kasus tahun 2012.

Angka kriminalitas di Sulawesi Selatan selama periode 2008-2012 juga mengalami peningkatan kecuali kasus pembunuhan dan kasus pemalsuan uang yang mengalami penurunan. Angka kriminalitas masih didominasi kasus pencurian, yakni sebesar 4.350 kasus tahun 2008 meningkat menjadi 6.830 kasus tahun 2012 atau meningkat sebesar 11,94 persen.

### b. Jumlah Demo

Selama periode 2009-2013, jumlah demonstrasi di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni dari 902 demosntrasi tahun 2009 meningkat menjadi 1.315 demonstrasi tahun 2012 atau meningkat sebesar 13,88 persen. Untuk tahun 2012, demostrasi tertinggi terjadi pada bidang politik, yakni sebanyak 98 kali, disusul demonstrasi di bidang ekonomi sebanyak 79 kali, dan demonstrasi terkecil terjadi pada kasus pemogokan kerja sebanyak 6 kali.

**Tabel 2.205**  
**Jumlah Demo**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013**

NO	JENIS KRIMINAL	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Bidang Politik	264	187	47	98	153
2	Bidang Ekonomi	75	128	106	79	93
3	Kasus Pemogokan Kerja	25	11	2	6	60
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	902	1.377	1.183	1.315	523

Sumber : BadanKesatuan Bangsa & Politik Prov. Sul-Sel Tahun 2013

### 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

#### 2.4.4.1. Ketengakerjaan

##### a. Tabel Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Usia ketergantungan penduduk Sulawesi Selatan dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yakni kelompok penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia < 15 Tahun dan > 64 Tahun). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.206**  
**Rasio Ketergantungan**  
**Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2012**

No.	Uraian	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 Tahun	2.449.556	2.423.540	2.482.509	2.507.465	2.487.874
2	Jumlah Penduduk Usia > 64 Tahun	448.705	476.104	442.073	445.856	464.894
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)	2.898.261	2.899.644	2.924.582	2.953.321	2.952.768
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	4.873.410	5.008.875	5.110.194	5.162.317	5.354.080
5	<b>Rasio Ketergantungan (3)/(4)</b>	<b>59,47</b>	<b>57,89</b>	<b>57,23</b>	<b>57,21</b>	<b>55,15</b>

Sumber : BPS Prov. Sul-Sel Tahun 2013

Rasio ketergantungan pada periode 2008-2012 mengalami penurunan, yakni dari 59.47 persen pada tahun 2008 menjadi 55.15 persen pada tahun 2012 atau menurun sebesar 1.90 persen. artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 59 orang pada tahun 2008 menurun menjadi 55 orang tahun 2012 yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2012 penduduk usia kerja di Sulawesi Selatan masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

## **BAB III**

### **ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Permasalahan Pembangunan**

Mencermati pelaksanaan pembangunan daerah wilayah Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir memperlihatkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Dari hasil kinerja pembangunan daerah yang dicapai sampai saat ini dibandingkan dengan yang direncanakan, terdapat beberapa hal yang belum tercapai sesuai dengan target yang diharapkan. Permasalahan yang mempengaruhi capaian kinerja pembangunan daerah yang perlu menjadi perhatian adalah:

##### **A. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar**

Permasalahan pada tiap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dirumuskan dengan memperhatikan perkembangan capaian indikator kinerja pembangunan daerah lima tahun terakhir.

##### **1. Pendidikan**

Capaian indikator kinerja pembangunan yang belum memperlihatkan kinerja yang diharapkan adalah tingkat pengetahuan masyarakat Sulawesi Selatan hingga tahun 2013 relatif rendah, yang diindikasikan oleh besarnya porsi penduduk yang buta huruf dan rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang mengakibatkan lambatnya pertumbuhan indeks pendidikan. Kinerja pembangunan bidang pendidikan tercermin dalam akumulasi angka IPM Sulawesi Selatan yang masih dibawa angka rata-rata IPM nasional.

Faktor lain penyebab rendahnya kinerja pembangunan bidang pendidikan yang disebabkan ketersediaan dan sebaran sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas dan akses masyarakat ke sekolah. Hal lain adalah alokasi anggaran program dan kegiatan yang belum fokus pada penyelesaian permasalahan utama tersebut diatas. Dampak lain adalah menyebabkan melambatnya adaptasi kreatif dalam bidang ilmu dan teknologi guna mendukung penerapan iptek pada semua sektor pembangunan.

##### **2. Kesehatan**

Pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan memperlihatkan kinerja baik yang tergambarkan dari capaian Angka Harapan Hidup (AHH) yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun demikian, beberapa indikator kunci yang berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan AHH di Sulsel, masih menjadi tantangan pembangunan kesehatan ke depan antara lain Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) yang menggambarkan pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap kesehatan masyarakat.

Untuk lebih meningkatkan Kinerja pembangunan pada bidang kesehatan Pembangunan kesehatan masyarakat terkait indikatorangka harapan hidup perlu mendapatkan perhatian khususnya terkait dengan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, angka kematian balita.

### 3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

#### a. Pekerjaan Umum

Permasalahan pada pekerjaan umum terletak pada langkahnya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah produksi dengan kota-kota terdekat. Kondisi ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap kinerja sistem perekonomian Sulawesi Selatan secara keseluruhan, karena cenderung memicu peningkatan biaya tidak langsung (*indirect cost*) transportasi yang bermuara pada meningkatnya harga jual komoditas sehingga sulit mempertahankan pangsa pasarnya.

#### b. Penataan Ruang

Sepintas ada semacam konflik antara kepentingan memelihara wilayah ekologi dengan pembangunan ekonomi rakyatnya. Pelestarian wilayah ekologi yang optimal adalah dengan cara tidak mengganggu kawasan ini, khususnya kawasan lindung dan kawasan hutan. Namun kenyataannya kawasan habitat flora dan fauna di Sulawesi Selatan adalah juga merupakan ruang mencari nafkah bagi kehidupan rakyat Sulawesi Selatan yang kebanyakan adalah petani. Sehingga pendekatan konservasi yang berarti dalam kawasan pelestarian wilayah ekologi, rakyat dapat memanfaatkan ruang secara terbatas dan terkendali dengan tetap mendukung pelestarian flora dan fauna.

Masih terjadi inkonsistensi terhadap penegakan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah baik perseorangan maupun badan usaha

### 4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Masih terdapat permukiman yang belum layak huni akibat keterbatasan akses terhadap penguasaan lahan dan pembiayaan perumahan, Belum maksimalnya cakupan pelayanan sanitasi terhadap rumah tangga serta belum diterapkannya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh masyarakat, Belum optimalnya pelaksanaan identifikasi lokasi dan kebutuhan penanganan lingkungan permukiman kumuh dan, belum optimalnya pengetahuan dan pemahaman akan perilaku hidup bersih dan sehat.

### 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Jumlah tindak kriminalitas di provinsi Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan antara lain pada kurangnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya personil penegakan perda, dan terbatasnya fasilitas dalam mendukung penegakan perda, demikian juga kecenderungan penurunan rasio jumlah polisi pamong praja terhadap jumlah penduduk, baik di perkotaan maupun yang ada di kab/kota.

### 6. Sosial

Di bidang sosial, keberadaan dan peran lembaga yang sepenuhnya berkiprah dalam misi kemasyarakatan, juga mengalami kemunduran. Organisasi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya menghadapi kesulitan untuk sepenuhnya bermisi sosial tanpa memikirkan profit untuk menjaga kelangsungan lembaga itu sendiri. Pada akhirnya, organisasi kemasyarakatan juga banyak bergantung kepada pemerintah sebagai sponsor kegiatan.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan kelembagaan sosial, belum maksimal dibanding dengan tuntutan fungsi dan perannya. Bahkan cenderung kebijakan pembangunan lebih berorientasi fisik matril dibanding untuk pembentukan jati diri masyarakat Sulsel yang relegius berdasarkan nilai budaya dan Agama.

Belum maksimalnya pengendalian tingkat kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Hal ini menjadi penting bagi pemerintah dalam mengambil keputusan arah dan kebijakan jangka panjang khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Upaya-upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, juga diharapkan dapat mendorong masyarakat agar lebih mampu secara mandiri dalam memenuhi hajat hidupnya.

## **B. Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar**

### **1. Tenaga Kerja**

Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja diperhadapkan pada persaingan yang lebih ketat. Pada tahun 2013, jumlah pengangguran sebesar 176.912 orang. Data ini menunjukkan bahwa porsi penganggur terbuka mencapai 5,10 persen dari total angkatan kerja. Persentase penduduk yang bekerja di Sulawesi selatan relative rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Tenaga kerja di Sulawesi diperkirakan meningkat dari 2,95 juta pada 2005 menjadi 3.46 juta pada tahun 2013 dengan rata-rata tumbuh 2 persen. Pertumbuhan yang tinggi ini meningkatkan tingkat partisipasi tenaga kerja, sementara itu tenaga kerja sector pertanian berkontribusi dengan jumlah 1,42 juta pada tahun 2013 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 0,68% sedangkan tenaga kerja non-pertanian akan meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,03%.

Tidak adanya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan tenaga kerja merupakan masalah tersendiri, belum lagi sistem pendidikan yang belum memprioritaskan pada pendidikan kejuruan sehingga mengakibatkan berkembangnya pengangguran intelek.

Masalah menonjol juga adalah penerapan upah minimum, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan hari tua dan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja melalui asuransi. Termasuk banyaknya tenaga kerja asal Sulawesi Selatan ke luar negeri seperti Malaysia, tidak diproses secara baik melalui BLK dan Balai AKAN, tetap menjadi masalah terus menerus.

### **2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Peran serta dan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan swasta masih sangat rendah, partisipasi perempuan sampai tahun 2013 pada lembaga legislatif baru mencapai 14,23% begitupun pada lembaga pemerintah (eksekutif) partisipasi perempuan di jabatan struktural juga baru mencapai 34,53%, sedangkan peran serta dan partisipasi perempuan yang memegang jabatan strategis di lembaga swasta juga masih rendah hanya 24% dari total tenaga kerja swasta.

Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dikalangan perempuan dan anak-anak semakin tahun mengalami peningkatan tiap tahunnya dan sampai pada tahun 2013 terdapat 728 kasus.

Masih banyak tenaga kerja yang melibatkan anak – anak dalam pekerjaan yang dianggap buruk serta tidak ada jaminan kesehatan dan pendidikan, pada tahun 2013 anak-anak yang telah dipekerjakan mencapai sekitar 264.971 anak.

### 3. Pangan

Konsistensi terhadap regulasi terkait ketahanan pangan masih lemah serta sanksi terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan dan sistem cadangan pangan belum optimal serta belum optimalnya sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam. Disamping itu perlunya menjaga ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan daerah yang cukup di tingkat rumah tangga baik mutu, keamanan maupun harga yang terjangkau.

### 4. Pertanian

Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya legalitas kepemilikan lahan. Belum terintegrasinya penggunaan lahan dengan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah. Belum optimalnya sistem pengelolaan pertanian yang efisien dan efektif serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap hak atas tanah yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi dan demokrasi. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *land reform* serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan.

### 5. Lingkungan Hidup

Kerusakan ekosistem pada kawasan pesisir juga tidak kalah seriusnya dibandingkan dengan yang terjadi di hulu (DAS). Kawasan hutan mangrove berkurang dengan cepat karena dikonversi menjadi kawasan pertambakan atau untuk kegiatan budidaya lainnya. Kerusakan hutan mangrove ini selain memengaruhi kualitas habitat perairan yang pada umumnya bernilai ekonomis tinggi juga meningkatkan potensi abrasi yang gelombang dan pasang air laut, serta akan semakin diperparah oleh kemungkinan kenaikan muka laut akibat pemanasan global. Di samping itu, erosi yang berkepanjangan pada hampir semua sungai besar maupun kecil juga menimbulkan dampak negatif pada kawasan pesisir, antara lain berupa proses sedimentasi (pendangkalan perairan pelabuhan) dan kualitas pengairan tambak.

Menurunnya kualitas lingkungan pada semua DAS dan mayoritas kawasan pesisir yang ada di Sulawesi Selatan, terutama disebabkan oleh semakin maraknya pembukaan lahan yang semakin tidak terkendali, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh kalangan pengusaha menengah dan besar, untuk tujuan ekonomi, seperti pertanian, terutama perkebunan, termasuk kegiatan pertambangan dan penggalian. Pada satu sisi, kegiatan itu memberikan nilai tambah pada perekonomian Sulsel, tetapi pada sisi lain terutama untuk jangka panjang kegiatan-kegiatan itu justru mengancam sustainabilitas perekonomian. Uraian tersebut di atas menggambarkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan secara konsisten di segala bidang.

## 6. Administrasi kependudukan dan catatan sipil

Belum optimalnya pendataan kependudukan yang akurat hal ini terlihat dari masih banyaknya penduduk yang memiliki KTP ganda, penduduk yang meninggal dan yang berpindah tempat tinggal tetapi masih terdaftar di wilayah tempat tinggal yang lama. Perlu kerjasama dengan seluruh lembaga terkait dengan penanganan kependudukan.

## 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Kurang berkembangnya lembaga masyarakat desa yang mampu sebagai motivator membantu masyarakat melakukan proses adaptasi-kreatif terhadap nilai dan kearifan lokal. Kurang Berfungsinya Kelompok Masyarakat pemelihara hasil hasil pembangunan di Desa/Kelurahan dan tidak dianggarkan dalam APBDes pemeliharaan Pasca Program Pemberdayaan Masyarakat. Badan Usaha Milik Desa belum mampu berperan mengembangkan aktifitas perekonomian desa.

## 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Pengendalian penduduk belum dilaksanakan secara terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan di kalangan masyarakat dan stakeholders pemerintah serta terbatasnya tenaga lapangan penyuluh KB utamanya di daerah terpencil, pegunungan dan kepulauan mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat program keluarga berencana, masih rendahnya partisipasi KB pria dan akses berKB masyarakat miskin dan terpencil (pegunungan dan kepulauan ) masih rendah.

## 9. Perhubungan

Penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi umum masih terkonsentrasi atau terpusat di wilayah perkotaan sehingga terjadi ketimpangan pelayanan transportasi antar wilayah perkotaan dan perdesaan serta belum terintegrasinya transportasi antar moda serta belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan antara pelabuhan laut dan pelabuhan udara dengan terminal angkutan darat.

Permasalahan jaringan transportasi darat, laut, sungai dan udara terletak pada langkanya sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah produksi dengan kota-kota terdekat. Hal ini lebih diperparah oleh fakta bahwa wilayah-wilayah penghasil umumnya berskala kecil dan tersebar dalam bentang wilayah yang luas. Kesemuanya membuat pengangkutan komoditas pertanian terpaksa dilakukan dalam satuan volume yang relatif kecil. Mengingat bahwa waktu berkorelasi positif dengan harga komoditas, khususnya untuk komoditas pertanian, maka komoditas pertanian Sulsel sulit memenuhi kebutuhan pangsa pasarnya, terutama di tingkat regional dan internasional. Ekspor komoditas pertanian, udang segar misalnya, menghadapi kendala utama berupa kelangkaan farming road yang memudahkan pengumpulan dan pengangkutan hasil panen, yang diperparah oleh tiadanya penerbangan reguler dari Bandara Hasanuddin ke luar negeri.

#### 10. Komunikasi dan Informatika

Masih terdapat beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi dan informatika yang berkualitas dimana keberadaan surat kabar yang memberikan informasi up to date terutama terkait dengan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah masih terbatas.

Kurangnya tenaga komisioner yang memantau konten penyiaran, terutama penyiaran TV lokal sehingga .Keberadaan stasiun televisi dan siaran radio lokal yang masih terbatas dan kemampuan jangkauan siarannya yang belum mampu menjangkau seluruh wilayah

#### 11. Koperasi, usahan kecil, dan menengah

Kurangnya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sehingga jumlah UMKM yang tidak aktif jauh lebih besar dari UMKM yang aktif.

#### 12. Penanaman Modal

Kurangnya dukungan infrastruktur dan regulasi untuk mendukung masuknya investor di Sulawesi selatan, di samping itu kurangnya penyebarluasan potensi dan peluang investasi pada setiap daerah di kab/kota. Dan diharapkan agar promosi investasi dapat lebih fokus kepada investasi yang dibutuhkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

#### 13. Kepemudaan dan olah raga

Pemberdayaan pemuda belum terpola dengan baik serta koordinasi antara organisasi pemuda belum optimal. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana kegiatan keolahragaan hingga mengakibatkan belum maksimalnya prestasi olahraga di Sulawesi selatan. Aktivitas organisasi kepemudaan belum optimal dalam berpartisipasi dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah.

#### 14. Statistik

Dalam proses perencanaan ketersediaan data dan informasi sangat urgent dalam pengambilan keputusan, namun ketersediaan Database statistik yang tidak tepat waktu data tidak sesuai kebutuhan. Perlu kerjasama antar pemerintah daerah dengan lembaga terkait pengolahan data. Di samping itu masih kurangnya data primer yang diolah menjadi data sekunder untuk kepentingan dalam mengambil keputusan perencanaan

#### 15. Persandian

Sarana dan prasarana di era globalisasi persandian masih terbatas dalam menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju.

#### 16. Kebudayaan

Telah terjadi pergeseran yang paling mendasar yaitu bergesernya nilai-nilai Bahari yang dulunya membuat beberapa daerah di Sulawesi Selatan menjadi unik pada tataran nasional dan regional. Nilai-nilai bahari merupakan hal penting dan mendasar dalam kehidupan, yang lahir secara endogenous dari proses adaptasi-kreatif dengan lingkungan kehidupan dari waktu ke waktu, yang pada komunitas Sulawesi Selatan di masa lalu lingkungan kehidupan yang signifikan adalah laut dan aktivitas kebaharian.

Pergeseran nilai bahari diduga diakibatkan oleh nilai budaya masyarakat Bugis Makassar yang melakukan perantauan untuk mencari tempat menetap yang memberikan peluang untuk kehidupan yang lebih nyaman, secara ekonomi maupun pertimbangan non ekonomi, bukan sebagai perantau temporer yang hanya untuk mengumpulkan kekayaan yang akan dibawa kembali ke kampung halaman. Model remitansi pun, seperti yang terjadi pada beberapa suku bangsa di Indonesia, tidak terjadi secara signifikan.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan kelembagaan sosial, budaya dan keagamaan belum maksimal dibanding dengan tuntutan fungsi dan perannya. Bahkan cenderung kebijakan pembangunan lebih berorientasi fisik matril dibanding untuk pembentukan jati diri masyarakat Sulsel yang relegius berdasarkan nilai budaya dan Agama. Oleh karena itu perlu mendorong budaya inovatif khususnya perubahan pola pikir, transformasi masyarakat dari budaya konsumtif kebudayaan produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **17. Perpustakaan dan arsip**

Kurangnya pemanfaatan perpustakaan dan arsip oleh masyarakat sebagai sarana pembelajaran, disamping kurangnya daya tarik dan ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif. Perlunya dibangun perpustakaan digital.

## **C. Urusan Pemerintahan Pilihan**

### **1. Perikanan dan Kelautan**

Sistem produksi belum terintegrasi dari hulu ke hilir, kualitas sumber daya manusia (SDM) masih rendah dan manajemen pengelolaan belum memadai.

Kurangnya pengawasan akibat terbatasnya sarana dan prasarana serta lemahnya penegakan hukum terhadap illegal fishing. Armada kapal pengawasan umumnya belum mampu menjangkau wilayah perairan yang luas sehingga mengakibatkan masih maraknya illegal fishing.

Manajemen kelembagaan kelompok nelayan belum optimal sehingga Kualitas produk tidak dapat dipertahankan dalam waktu lama begitupun Pola distribusi dan konsumsi ikan belum merata dan Sebagian besar produk hasil perikanan diperdagangkan antar pulau dan ekspor.

### **2. Pariwisata**

Belum optimalnya promosi pada segmen pasar internasional dan terbatasnya akses ke Daerah Tujuan Wisata (DTW) mengakibatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara.

Belum terintegrasinya pemanfaatan kalender wisata oleh pelaku usaha di bidang pariwisata antar daerah tujuan wisata baik lintas provinsi maupun antar kab/kota.

### **3. Pertanian**

Permasalahan sebagian besar di sulawesi selatan adalah pengalihan fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan non pertanian, yang mengakibatkan menurunnya produksi pertanian. Disisi lain produktivitas lahan pertanian juga mengalami penurunan.

Hal ini lebih diperparah oleh fakta bahwa wilayah-wilayah penghasil umumnya berskala kecil dan tersebar dalam bentang wilayah yang luas. Kesemuanya membuat pengangkutan komoditas pertanian terpaksa dilakukan dalam satuan volume yang relatif kecil. Ekspor komoditas pertanian, menghadapi kendala utama berupa kelangkaan *farming road* yang memudahkan pengumpulan dan pengangkutan hasil produksi baik regional maupun internasional.

#### 4. Kehutanan

Masih besarnya laju deforestasi dan degradasi hutan serta masih tingginya perambahan hutan dalam kawasan lindung dan perambahan hutan oleh pelaksana kegiatan di luar sektor kehutanan.

Secara ekonomi kontribusi sektor kehutanan masih rendah namun kontribusi intangiblenya tidak dihitung.

#### 5. Energi dan Sumber Daya Mineral

##### a) Sumber Daya Mineral

Topografi Sulsel yang unik membuat wilayah ini sangat rentang terhadap eksploitasi sumberdaya pertambangan. Dalam jangka panjang masalah yang dihadapi oleh Sulawesi Selatan adalah ketersediaan energi listrik untuk menggerakkan roda perekonomian. Selama ini masih dipasok oleh sumber sumber energi internal yang terbatas. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan ketersediaan atau pasokan air, baik untuk kebutuhan pembangkit listrik maupun untuk pengembangan produksi pertanian. Kondisi ini mempengaruhi perkembangan aktifitas perekonomian secara umum dan pengembangan industri khususnya industri pengolahan kedepan.

Fakta menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan sangat tergantung, terutama di masa depan, kepada pasokan sumber-sumber energi dari luar wilayah. Kondisi ini jelas akan menjadi kendala bagi pengembangan perekonomian Sulawesi Selatan, khususnya sektor industri yang membutuhkan adanya dukungan sumberdaya energi yang memiliki reliabilitas tinggi dan tentu saja murah. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini merupakan upaya strategis yang perlu segera dilaksanakan. Upaya untuk membangun sub-sektor energi merupakan upaya strategis yang perlu segera dilaksanakan.

Masalah yang tidak kalah peliknya adalah jaminan **ketersediaan atau pasokan air**. Seperti telah disinggung sebelumnya, DAS-DAS di Sulawesi Selatan sedang mengalami kondisi yang parah, yang berdampak pada rentannya pasokan air, irigasi maupun air baku lainnya, terutama di musim kemarau. Tanpa penanganan yang serius untuk memperbaiki kondisi DAS tersebut, maka fungsi jaringan tidak akan pernah optimal.

Jaringan air baku untuk air minum dan industri mengalami kondisi yang sama. Pada saat ini, Kota Makassar sangat tergantung kepada pasokan air baku dari Gowa dan Maros. Kesenambungan pasokan air ini mengalami ancaman akibat semakin rusaknya daerah tangkapan pada kedua kabupaten itu. Kondisi ini akan menjadi semakin parah dengan bertambahnya permintaan air baku, baik oleh jumlah penduduk yang bertambah dengan laju yang cukup tinggi setiap tahunnya, dan terutama oleh pertumbuhan industri.

Artinya, tanpa penanganan yang serius pada jaringan ini, maka pertumbuhan ekonomi, baik di sektor pertanian maupun di sektor industri akan mengalami kendala, atau minimal daya tarik Sulsel sebagai daerah tujuan investasi sulit diwujudkan. Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan masih rendah untuk pembangkit listrik baik skala menengah maupun skala kecil masih rendah.

## 6. Perdagangan

Kehadiran lembaga ekonomi modern dalam bentuk Bank dan lembaga keuangan lainnya termasuk variannya berupa Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah, telah menggeser lembaga tradisional, seperti ikatan Ponggawa-Sawi yang memiliki keunikan dalam menawarkan *choice* dan menyalurkan *voice* di kalangan masyarakat perdesaan.

Kehadiran lembaga pasar modern cenderung meminggirkan eksistensi pasar tradisional. Kehadiran pasar modern yang mestinya menambah keragaman, justru melemahkan entitas yang sudah ada. Kehadiran perusahaan besar sebagai lembaga ekonomi yang lebih terkonsentrasi pada bidang otomotif dan konstruksi, kurang mendorong produksi manufaktur dan agroindustri, juga menjadi fenomena di balik rendahnya keragaman dalam kelembagaan ekonomi.

## 7. Perindustrian

Perekonomian Sulawesi Selatan masih didominasi oleh sector pertanian. Pergeseran struktur ekonomi Sulawesi Selatan dari sector pertanian ke sector industri khususnya industri pengolahan menjadi hal yang penting. Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah (*added value*) hasil produksi khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan sektor industri adalah melalui hilirisasi industri.

Kemudian masih besarnya impor bahan baku untuk industri (*intermediat input*) pada beberapa industri di Sulawesi Selatan. Industri yang tidak berbasis pada ketersediaan input yang nilainya besar (dalam input antara), tetapi semata-mata mengandalkan keterkaitan industrial serta final demand-nya. Industri tepung terigu dan industri semen merupakan contoh dari jenis industri dimaksud.

Di Sulawesi Selatan belum optimal dilakukan industri berbasis sumber daya local, dimana hasil prodak industri belum bersertifikasi standar nasional sehingga sulit berdaya saing dengan prodak dari luar Sulawesi selatan.

## 8. Transmigrasi

Hasil pelaksanaan kebijakan program transmigrasi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, akibat akses ke lokasi transmigrasi sangat terbatas. Hal lain adalah pelaksanaan transmigrasi belum bersinergi dengan baik antar lembaga terkait.

### 3.2. Isu Strategis

Mencermati permasalahan pencapaian kinerja pembangunan daerah wilayah provinsi Sulawesi Selatan selama sepuluh tahun terakhir terdapat beberapa hal yang terkait dinamika eksternal yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah. Isu Staregis merupakan hal yang bersifat penting, sangat mendasar dan strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam jangka panjang. Adapun isu strategis yang perlu menjadi perhatian kita bersama kedepan antara lain :

#### 3.2.1 Isu Global

Era keterbukaan masyarakat ekonomi ASEAN dimana tenaga kerja antar Negara ASEAN bebas masuk ke Indonesia dan kita tidak akan mampu bersaing jika kualitas tenaga kerja kita masih rendah. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Sulawesi Selatan saat ini relatif rendah, akan mempengaruhi daya saing sumberdaya manusia.

Diera perdagangan bebas, daya saing produk Sulawesi Selatan tidak akan mampu bersaing dan membendung impor barang dan jasa yang semakin besar dan mengakibatkan defisit neraca perdagangan serta menekan tingkat pertumbuhan ekonomi kita.

Kondisi struktur ekonomi sulawesi selatan yang masih didominasi oleh sektor pertanian belum memperlihatkan kulaitas pertumbuhan yang semakin baik. Hal ini disebabkan oleh karena belum maksimalnya penerapan konsep petik olah jual untuk meningkatkan Nilai Tambah (Value added) dari hasil produksi pertanian. Pertumbuhan sektor industri khususnya industri pengolahan yang relatif masih kecil perlu diakselerasi pertumbuhannya. Pemasaran hasil produksi khususnya untuk ekspor yang masih terkendala dengan tingkat kualitas yang dapat bersaing dipasar internasional. Secara keseluruhan akan mempengaruhi neraca perdagangan Sulawesi Selatan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Semakin banyaknya rumah kaca mengakibatkan terjadinya pemanasan global.

#### 3.2.2 Issu Nasional

##### A. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Jumlah penduduk yang pada tahun 2005 sebesar 219,9 juta orang diperkirakan meningkat mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kelahiran, meningkatnya usia harapan hidup, dan menurunnya angka kematian bayi. Meskipun demikian, pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk penting diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dalam rangka mendukung terjadinya bonus demografi yang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif. Kondisi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas SDM, daya saing, dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, persebaran dan mobilitas penduduk perlu pula mendapatkan perhatian sehingga ketimpangan

persebaran dan kepadatan penduduk antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat dikurangi.

2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis kelamin. Tantangan dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.
3. Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. Hal itu, antara lain, ditandai oleh rendahnya angka indeks pembangunan gender (IPG) dan tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta kurang memadainya kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak. Dengan demikian, tantangan di bidang pembangunan perempuan dan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Sementara itu, tantangan di bidang pemuda dan olahraga adalah mengoptimalkan partisipasi pemuda dalam pembangunan serta meningkatkan budaya dan prestasi olahraga. Tantangan lainnya adalah menurunkan beban permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin beragam dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial, seperti menipisnya nilai budaya dan agama; menurunkan eksese dan gejala sosial dampak dari disparitas kondisi sosial ekonomi masyarakat dan terjadinya bencana sosial

dan bencana alam; dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat.

4. Derasnya arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan jati diri bangsa sekaligus memanfaatkannya untuk pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya dan peningkatan daya saing melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal.
5. Pembangunan manusia pada intinya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukunan intern dan antarumat beragama, serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari tindak kekerasan.

## B. Ekonomi

Tantangan besar kemajuan perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan, hal ini untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Basis kekuatan ekonomi yang masih banyak mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber-sumber daya alam tak terbarukan, untuk masa depan perlu diubah menjadi perekonomian yang produk-produknya mengandalkan keterampilan SDM serta mengandalkan produk-produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global sehingga ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.

Perkembangan ekonomi regional di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan yang pesat dengan tumbuhnya raksasa ekonomi global di masa depan, seperti Cina dan India, merupakan salah satu fokus utama yang perlu dipertimbangkan secara cermat di dalam menyusun pengembangan struktur dan daya saing perekonomian nasional. Dengan demikian, integrasi perekonomian nasional ke dalam proses globalisasi dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dan sekaligus dapat meminimalkan dampak negatif yang muncul.

Secara internal, tantangan tersebut dihadapkan pada situasi pertambahan penduduk nasional yang masih relatif tinggi dan rasio penduduk usia produktif yang diperkirakan mencapai tingkat maksimal (sekitar 50 persen dari total penduduk) pada periode tahun 2020–2030. Dalam periode tersebut, angkatan kerja diperkirakan meningkat hampir dua kali lipat jumlahnya dari kondisi saat ini. Dengan komposisi pendidikan angkatan kerja yang pada tahun 2004 sekitar 50 persen berpendidikan setingkat SD, dalam 20 tahun ke depan komposisi pendidikan angkatan kerja diperkirakan akan didominasi oleh angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMP sampai dengan SMU. Dengan demikian, kapasitas perekonomian pada masa depan dituntut untuk mampu tumbuh dan berkembang agar mampu menyediakan tambahan lapangan kerja yang layak.

1. Tantangan internal yang penting lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di pulau Jawa yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Pada masa yang akan datang, perekonomian juga dituntut untuk mampu berkembang secara lebih proporsional di seluruh wilayah tanah air dengan mendorong perkembangan ekonomi di luar pulau Jawa, dalam rangka

pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan regional. Selain akan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan lingkungan, terutama di pulau Jawa, hal tersebut juga akan berguna untuk memperkuat perekonomian domestik yang ditunjukkan oleh diversifikasi perekonomian sekaligus perbaikan di dalam kesempatan kerja dan berusaha sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat secara nasional.

2. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu bangsa di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kedaulatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri.
3. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, yaitu kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

### **C. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi perkembangan global menuju ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan kesehatan dasar, energi, dan pangan; memperkuat sinergi kebijakan iptek dengan kebijakan sektor lain; mengembangkan budaya iptek di kalangan masyarakat; meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan iptek; mengatasi degradasi fungsi lingkungan; mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam; serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas sumber daya iptek, baik SDM, sarana dan prasarana, maupun pembiayaan iptek.

### **D. Sarana dan Prasarana**

1. Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana

pengendali daya rusak air harus mampu mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan industri baru. Intervensi sarana dan prasarana juga perlu dilakukan untuk mengurangi laju sedimentasi sejalan dengan upaya-upaya konservasi dan reboisasi terutama dengan mengembangkan bangunan-bangunan pengendali sedimen yang dapat dikelola oleh masyarakat. Pengelolaan jaringan irigasi belum diselenggarakan dengan pengutamaan peran masyarakat petani dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak pengguna air irigasi. Peningkatan kemampuan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumber daya air harus terus dikembangkan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu (*integrated water resources management*). Upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.

2. Tantangan yang dihadapi oleh sektor transportasi pada masa yang akan datang adalah mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda sertaselaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya, serta mendukung kesatuan dan persatuan NKRI dan perwujudan negara kepulauan. Tantangan utama dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya agar dapat melaksanakan pembangunan transportasi nasional adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta negara, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan.
3. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang makin meningkat untuk mendapatkan akses informasi menuntut adanya penyempurnaan dalam hal penyelenggaraan pembangunan pos dan telematika. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi antara pendidikan dengan teknologi informasi serta sektor-sektor strategis lainnya. Walaupun pembangunan pos dan telematika saat ini telah mengalami berbagai kemajuan, informasi masih merupakan barang yang dianggap mewah dan hanya dapat diakses dan dimiliki oleh sebagian kecil masyarakat. Oleh sebab itu, tantangan utama yang dihadapi dalam sektor itu adalah meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan teledensitas pelayanan pos dan telematika masyarakat pengguna jasa. Tantangan lainnya adalah konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi dan penyiaran, pendidikan dan etika moral. Pemetaan yang terintegrasi pada pemetaan global yang berisi informasi infrastruktur jalan, sumber daya alam dan demografi akan terus dikembangkan secara detail untuk seluruh kabupaten kota hingga tingkat wilayah kecamatan. Keterbukaan informasi dengan akses global ini akan memberi dampak keterbukaan informasi dan kepercayaan pihak investor pada kesiapan provinsi untuk mendukung investasi di berbagai sektor industri.
4. Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor energi adalah meningkatkan keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana, serta proses dan penyalurannya untuk keperluan domestik karena belum ada kebijakan tarif lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi serta sarana dan prasarannya. Di

samping itu, lokasi sumber daya energi yang potensial yang sebagian besar berada di luar pulau Jawa, selama ini pengembangannya terbatas hanya untuk menyalurkan energi konvensional dari lokasi sumber daya ke pusat permintaan energi, sedangkan sarana dan prasarana energi lainnya terutama energi terbarukan masih sangat tertinggal.

5. Tantangan yang dihadapi untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, adalah (a) melakukan reformasi secara serentak, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; (b) menyempurnakan pola subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan pasti, khususnya subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah; (c) mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan; dan (d) melakukan penguatan swadaya masyarakat dalam pembangunan rumah melalui pemberian fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah. Dengan demikian, penyediaan perumahan dapat diselenggarakan dengan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat, melainkan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
6. Dengan makin terbatasnya sumber dana yang dapat dimobilisasi oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, anggaran pemerintah akan lebih difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang secara ekonomi dan sosial bermanfaat, tetapi secara finansial kurang layak. Untuk proyek sarana dan prasarana yang layak secara finansial akan dibangun dengan memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerja sama dengan badan usaha, terutama swasta dalam rangka penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana. Hal itu, merupakan tantangan yang menuntut dilakukannya berbagai penyempurnaan aturan main, terutama yang berkaitan dengan struktur industri penyediaan sarana dan prasarana serta pentingnya reformasi di sektor keuangan guna memfasilitasi kebutuhan akan dana-dana jangka panjang masyarakat yang tersimpan di berbagai lembaga keuangan.

#### **E. Politik**

1. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang dalam pembangunan politik adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan. Dalam menjaga momentum demokrasi tersebut, tantangan yang akan dihadapi adalah melaksanakan reformasi struktur politik, menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran tercapainya demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai. Tantangan lain yang dihadapi untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis. Proses perubahan yang sudah berlangsung 4 (empat) kali masih menyisakan berbagai persoalan ketidaksempurnaan dalam hal filosofi maupun substansi konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan pelembagaan dan penerapan nilai-nilai demokrasi secara luas.

2. Konsolidasi demokrasi memerlukan dukungan seluruh masyarakat Indonesia yang bersatu padu dalam wadah NKRI. Tantangan utamanya adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan memerhatikan berbagai keanekaragaman latar belakang dan kondisi. Hal itu meliputi aspek desentralisasi, keadilan sosial, serta sensitif politik yang belum tuntas penyelesaiannya, seperti masalah federalisme, masalah pemberlakuan syariat Islam, dan masalah hubungan negara dan agama. Tantangan lain dalam melaksanakan konsolidasi demokrasi adalah melaksanakan rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan dan menuntaskan persoalan-persoalan yang masih mengganjal pada masa yang lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik yang dilakukan atas nama negara. Terkait dengan telah dirumuskannya format hubungan pusat dan daerah yang baru, tantangan ke depan adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI dan tetap menjaga berkembangnya iklim demokrasi hingga ke tingkat lokal atau dinamika di berbagai daerah
3. Tantangan lain untuk menjaga konsolidasi demokrasi adalah perlunya mereformasi birokrasi sipil dan TNI-Polri. Konsolidasi demokrasi memerlukan pelaksana kebijakan yang reformis di dalam pemerintahan dan memerlukan dukungan birokrasi yang memenuhi syarat profesionalisme, kredibilitas dan kapasitas, serta efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, salah satu tantangan demokrasi terbesar adalah masih belum kuatnya masyarakat sipil, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Oleh karena itu, dalam kurun waktu dua puluh tahun ke depan, pendidikan politik akan merupakan alat transformasi sosial menuju demokrasi. Masyarakat sipil yang kuat sangat tergantung kepada kapasitas masyarakat dalam merespon dan memahami dinamika pasar global dan pasar dalam negeri serta saling berinteraksi antara negara, masyarakat sipil, dan pasar dalam mewujudkan negara yang demokratis. Tantangan lain untuk menjaga proses konsolidasi demokrasi adalah mendorong terbangunnya partai politik yang mandiri dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan pendidikan politik rakyat, mengagregasi dan menyalurkan aspirasi politik rakyat, serta menyeleksi pimpinan politik yang akan mengelola penyelenggaraan negara secara profesional.
4. Konsolidasi demokrasi akan dihadapkan pula pada tantangan bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa. Akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka, dalam banyak hal, akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik. Peran media massa yang bebas sangat menentukan dalam proses menemukan, mencegah, mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi. Tantangan lain adalah mengatasi berbagai dampak negatif perkembangan industri pers yang cenderung berpihak pada kepentingan kapitalis dan bukan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Keseluruhan upaya tersebut berada dalam konteks menempatkan peranan pers sebagai salah satu pilar dari perkembangan demokrasi suatu negara.
5. Berkenaan dengan hubungan luar negeri, tantangan dalam dua puluh tahun mendatang adalah menempatkan posisi Indonesia secara tepat atas isi-isu global dengan memanfaatkan posisi strategis Indonesia secara maksimal bagi kepentingan nasional dan merevitalisasi konsep identitas nasional dalam politik luar negeri. Selain itu, bersama negara-negara berkembang lainnya, diplomasi Indonesia juga perlu terus mendorong ke arah terciptanya tatanan ekonomi dunia yang lebih adil, meningkatnya dukungan dan peran berbagai pelaku dalam

menyelenggarakan hubungan luar negeri, dan terlaksananya hubungan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Sikap Pelaksanaan politik luar negeri RI yang bebas dan aktif ditujukan pula untuk mendukung upaya memperkuat peranan kelembagaan regional, terutama untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang pada tingkat regional. Tantangan lain yang dihadapi adalah melaksanakan strategi yang tepat dalam menghadapi potensi konflik teritorial dengan negara-negara tetangga melalui upaya untuk menindaklanjuti *United Nations Convention on Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang merupakan salah satu langkah strategis, baik dalam konteks penguatan perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dari segi hukum internasional maupun pemanfaatan nilai-nilai ekonomi karena Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Di samping itu, kecenderungan-kecenderungan unilateralisme ke depan akan dapat menyebabkan lumpuhnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi utama dalam diplomasi multilateral untuk menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. Untuk menghindari hal tersebut, Indonesia perlu ikut menyuarakan dan memperjuangkan makna penting multilateralisme secara global dengan mengedepankan perlunya reformasi dan demokratisasi PBB menjadi tantangan yang harus diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan.

#### F. Pertahanan Keamanan

1. Perubahan geopolitik internasional yang ditandai dengan memudarnya prinsip multilateralisme dan menguatnya pendekatan unilateralisme yang berdampak pada berkembangnya doktrin pertahanan *pre-emptive strike* akan mengubah sama sekali tataran politik internasional dan dapat menembus batas-batas yurisdiksi sebuah negara di luar kewajaran hukum internasional yang berlaku saat ini. Selain itu, menguatnya kemampuan militer negara tetangga yang secara signifikan melebihi kemampuan pertahanan Republik Indonesia telah melemahkan posisi tawar dalam ajang diplomasi internasional. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama pembangunan kemampuan pertahanan dan keamanan yang harus diatasi pada masa mendatang adalah membangun kekuatan pertahanan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal, sehingga disegani di kawasan regional dan internasional.
2. Potensi dan ancaman konflik berintensitas rendah yang didukung dengan perkembangan metode dan alat teknologi tinggi diperkirakan akan makin meningkat pada masa mendatang. Potensi dan ancaman tersebut adalah terorisme, konflik komunal, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara terutama di wilayah yurisdiksi laut Indonesia dan wilayah perbatasan, serta berkembangnya variasi tindak kriminal konvensional. Tantangan lain dalam pembangunan pertahanan dan keamanan adalah meningkatkan profesionalisme Polri seiring dengan peningkatan kesejahteraan anggotanya agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, menuntaskan tindak kriminalitas, serta meningkatkan profesionalisme TNI seiring dengan peningkatan kesejahteraan prajurit serta penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen dalam rangka menciptakan keamanan nasional.
3. Ancaman dan gangguan bagi kedaulatan negara, keselamatan bangsa, dan keutuhan wilayah sangat terkait dengan bentang dan posisi geografis yang sangat strategis, kekayaan alam yang melimpah, serta belum tuntasnya pembangunan karakter dan kebangsaan, terutama pemahaman mengenai masalah

multikulturalisme yang dapat berdampak pada munculnya gerakan separatisme dan konflik horizontal. Sementara itu, kemampuan pertahanan dan keamanan saat ini dihadapkan pada situasi kekurangan jumlah dan ketidaksiapan alutsista dan alat utama lainnya yang jika tidak dilakukan upaya percepatan penggantian, peningkatan, dan penguatan akan menyulitkan penegakkan kedaulatan negara, penyelamatan bangsa, dan penjagaan keutuhan wilayah di masa mendatang. Keadaan tersebut diperburuk oleh terjadinya kelemahan sistemik komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang merupakan prasyarat berfungsinya sistem pertahanan semesta. Oleh karena itu, tantangan yang juga harus diatasi untuk membangun kemampuan pertahanan dan keamanan adalah meningkatkan jumlah dan kondisi alutsista TNI untuk mencapai kekuatan yang melampaui kekuatan pertahanan minimal; mengembangkan alat utama Polri, lembaga intelijen, dan kontra intelijen sesuai dengan kemajuan teknologi; dan meningkatkan kesiapan komponen cadangan dan pendukung pertahanan termasuk membangun kemampuan industri pertahanan nasional. Upaya lebih lanjut dalam pengembangan industri pertahanan nasional memerlukan dukungan berbagai kalangan agar dapat menciptakan kemandirian alutsista TNI dan alat utama (alut) Polri yang dibarengi dengan penataan lebih lanjut pola interaksi antara TNI dan Polri terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya masing-masing.

4. Upaya memodernkan alutsista TNI secara bertahap terhambat oleh embargo yang dilakukan oleh beberapa negara. Kondisi itu diperparah dengan relatif rendahnya upaya pemanfaatan industri nasional dalam memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan. Ketidaksesuaian di antara kebutuhan peralatan di satu sisi serta kemampuan teknis dan finansial industri nasional di sisi lain juga merupakan salah satu penyebab ketertinggalan dan ketergantungan peralatan pertahanan dan keamanan terhadap negara lain. Dengan demikian, untuk mewujudkan kemandirian dalam pembangunan pertahanan dan keamanan diperlukan industri pertahanan dan keamanan nasional yang tangguh.

### **G. Hukum dan Aparatur**

1. Tantangan ke depan di dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap adalah mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.
2. Saat ini birokrasi belum mengalami perubahan mendasar. Banyak permasalahan belum terselesaikan. Permasalahan itu makin meningkat kompleksitasnya dengan desentralisasi, demokratisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi. Proses demokratisasi yang dijalankan telah membuat rakyat makin sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Untuk itu, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi perlu terus dibangun dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akan membuat aparatur negara tidak dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat. Kesiapan aparatur negara dalam mengantisipasi proses demokratisasi perlu dicermati agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas yang prima dari kinerja organisasi publik. Globalisasi juga membawa perubahan yang mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan. Revolusi teknologi dan informasi (TI) akan mempengaruhi terjadinya perubahan manajemen penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Pemanfaatan TI dalam bentuk *e-*

*government, e-procurement, e-business* dan *cyberlaw* selain akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, juga akan meningkatkan diterapkannya prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

#### H. Wilayah dan Tata Ruang

1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan merupakan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi (a) arahan lokasi kegiatan, (b) batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam, (c) efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antarsektor, dengan tetap memerhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana.
2. Pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah perlu dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, tetapi juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional. Tujuan penting dan mendasar yang akan dicapai untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah bukan untuk pemeratakan pembangunan fisik di setiap daerah, terutama untuk mengurangi kesenjangan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, baik di masing-masing daerah maupun antardaerah. Dalam kaitan itu, perlu diperhatikan pemanfaatan potensi dan peluang dari keunggulan sumber daya alam kelautan yang selama ini belum optimal sebagai satu kesatuan pengelolaan sumber daya alam di dalam setiap wilayah.
3. Sementara itu, dari sisi eksternal secara pasti persaingan global akan semakin kuat berpengaruh pada pembangunan nasional pada masa yang akan datang. Perekonomian nasional akan menjadi lebih terbuka sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah-daerah di Indonesia. Sejak tahun 2003, AFTA telah diberlakukan secara bertahap di lingkup negara-negara ASEAN, dan perdagangan bebas akan berlangsung sepenuhnya mulai tahun 2008. Selanjutnya, mulai tahun 2010 perdagangan bebas di seluruh wilayah Asia Pasifik akan dilaksanakan. Dalam kaitan itu, tantangan bagi daerah-daerah ialah menyiapkan diri menghadapi pasar global untuk mendapatkan keuntungan secara maksimal sekaligus mengurangi kerugian dari persaingan global melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Oleh karena itu, tantangannya ialah memanfaatkan potensi dan peluang keunggulan di masing-masing daerah dalam rangka mendukung daya saing nasional sekaligus meminimalkan dampak negatif globalisasi.

#### I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1. Dengan menelaah kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada tiga ancaman, yaitu krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Ketiga krisis itu menjadi tantangan nasional jangka panjang yang perlu diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat

dan bangsa, yaitu terancamnya persatuan bangsa, meningkatnya semangat separatisme, dan menurunnya kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah penduduk yang pesat menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian produktif lainnya, rendahnya peningkatan produktivitas hasil pertanian, dan menurunnya kondisi jaringan irigasi dan prasarana irigasi. Selain itu, praktik pertanian konvensional mengancam kelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan sistem produksi pertanian. Di lain pihak, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan terganggunya keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air yang mengancam turunnya debit air waduk dan sungai pada musim kemarau serta berkurangnya pasokan air untuk pertanian dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sementara itu, kelangkaan ketersediaan energi tak terbarukan juga terus terjadi karena pola konsumsi energi masih menunjukkan ketergantungan pada sumber energi tak terbarukan. Tantangan utama dalam penyediaan energi adalah meningkatkan kemampuan produksi minyak dan gas bumi yang sekaligus memperbesar penerimaan devisa, memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi (*geothermal*), energi matahari, arus laut, dan tenaga angin. Selain itu, terdapat kemungkinan pengembangan energi tenaga nuklir yang memerlukan penelitian mendalam tentang keamanan teknologi yang digunakan, lokasi geografis, dan risiko yang mungkin akan dihadapi.

2. Kemajuan dapat diperoleh dengan memanfaatkan (a) sumber daya alam daratan (seperti hutan, tambang, dan lahan untuk budidaya yang cakupannya dibatasi oleh wilayah kedaulatan negara) dan (b) sumber daya kelautan, yang tersebar di wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif sampai dengan 200 mil laut dan hak pengelolaan di wilayah laut lepas yang jaraknya dapat lebih dari 200 mil laut. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan agar dapat menjadi tumpuan masa depan bangsa. Sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian nasional yang cukup besar merupakan urutan kedua setelah jasa-jasa. Bahkan, terdapat kecenderungan daya saing industri pada saat ini telah bergeser ke arah industri berbasis kelautan. Pembangunan kelautan pada masa mendatang memerlukan dukungan politik dan pemihakan yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan, yang tentunya menjadi tantangan seluruh komponen bangsa. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia. Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akan adanya perubahan iklim dan pemanasan global yang berdampak pada

aktivitas dan kehidupan manusia. Sementara itu, pemanfaatan keanekaragaman hayati belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah kekayaan keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun mendatang, sehingga memerlukan berbagai penelitian, perlindungan, dan pemanfaatan secara lestari selain upaya ke arah pematenan (hak atas kekayaan intelektual/HAKI). Oleh karena itu, penyelamatan ekosistem beserta flora-fauna di dalamnya menjadi bagian integral dalam membangun daya saing Indonesia.

### 3.2.3. Isu Strategis Daerah

#### a. Sumberdaya Manusia

Penguasaan pengetahuan masyarakat Sulawesi Selatan saat ini relatif rendah, yang diindikasikan oleh besarnya porsi penduduk yang buta huruf dan rendahnya angka rata-rata lama sekolah yang tercermin dalam rendahnya angka IPM. Faktor ini menyebabkan adaptasi kreatif dalam bidang ilmu dan teknologi kurang terjadi. Relatif rendahnya angka IPM Sulsel dapat ditelusuri penyebabnya dengan mengkaji kinerja pembangunan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Faktor utama penyebab rendahnya angka IPM Sulawesi Selatan adalah rendahnya kinerja pendidikan yang disebabkan ketersediaan dan sebaran sarana dan prasarana pendidikan yang terbatas dan akses masyarakat ke sekolah yang diakibatkan keterbatasan keuangan.

Pembangunan kesehatan di Sulawesi Selatan memperlihatkan kinerja baik yang tergambarkan dari capaian Angka Harapan Hidup (AHH) yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Meskipun demikian, beberapa indikator kunci yang berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan AHH di Sulsel, masih menjadi tantangan pembangunan kesehatan ke depan antara lain Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) yang menggambarkan pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap kesehatan masyarakat.

Petumbuhan penduduk yang belum stabil setiap tahun, disatu sisi menjadi beban pembangunan daerah karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya pertambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beban pemerintah dan masyarakat untuk perbaikan pendidikan dan kesehatan hingga tahun 2028 tahun yang akan datang akan semakin berat, karena selain untuk menutupi dan mengejar kekurangan yang ada sekarang, juga untuk memenuhi pertambahan penduduk yang diperkirakan 1,5 kali lipat (bertambah 50%).

Pada tahun 2013, jumlah pengangguran sebesar 581.000 orang. Data ini menunjukkan bahwa porsi penganggur terbuka mencapai 15,93% dari total angkatan kerja. Prosentase penduduk bekerja terhadap total angkatan kerja di Sulawesi Tengah sebesar 92,29%, Sulawesi Tenggara 89,07%, Gorontalo 85,96%, Sulawesi Utara 85,95%. Di bandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 88,76%, Sulawesi Selatan juga lebih rendah.

Tenaga kerja di Sulawesi diperkirakan meningkat dari 2,95 juta pada 2005 dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 2,04%. Pertumbuhan yang tinggi ini meningkatkan tingkat partisipasi tenaga kerja, sementara itu tenaga kerja sector pertanian diperkirakan akan tetap stagnan dengan jumlah 1,4 juta pada tahun 2005 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 0,68% sedangkan tenaga kerja non-pertanian akan meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,03%.

Tidak seimbangnya antara lapangan kerja dan angkatan kerja merupakan masalah tersendiri, belum lagi sistem pendidikan yang belum memprioritaskan pada pendidikan kejuruan / keahlian serta penciptaan sarjana trampil, akan berpotensi menambah jumlah pengangguran intelek. Secara nasional, mulai tahun 2010 hingga 2030 tingkat rasio ketergantungan antara usia produktif dengan usia ketergantungan (anak-anak dan lanjut usia) dalam kisaran 43% dan terus mengalami tren penurunan yang secara optimis dimaknakan sebagai kondisi dengan bonus demografi yang akan mendorong peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, usia produktif jika tidak diimbangi dengan peningkatan daya saing justru akan berdampak pada bencana demografi, dimana usia produktif yang tidak terserap dalam dunia kerja justru akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah. Kondisi ini akan juga diiringi dengan resiko termarjinalnya tenaga kerja lokal akibat persaingan global atas kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) yang membuka peluang sarjana dan tenaga ahli dari negara lain untuk bekerja di Indonesia. Dengan demikian, maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan perguruan tinggi yang berkualitas dan peraturan ketenagakerjaan di tingkat provinsi yang dapat melindungi tenaga kerja lokal dalam persaingan global yang sudah di depan mata.

Masalah menonjol juga adalah penerapan upah minimum, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan hari tua, jaminan PHK dan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja melalui asuransi. Termasuk banyaknya tenaga kerja asal Sulawesi Selatan ke luar negeri seperti Malaysia, tidak diproses secara baik melalui BLK dan Balai AKA, tetap menjadi masalah terus menerus.

## **b. Ekonomi**

Perekonomian daerah pergeseran struktur ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri khususnya industri menjadi hal yang penting untuk mengakselerasi pengolahan laju pertumbuhan dan nilai tambah. Sulawesi Selatan mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, malah lebih tinggi dari rata-rata nasional--pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan rata-rata 7,21% per tahun, sedangkan secara nasional rata-rata 4,71% per tahun --tetapi nilai absolutnya belum cukup memadai untuk mendorong laju peningkatan pengeluaran riil per kapita. masih tetap lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional (619,9)

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam jangka panjang adalah sebagai berikut :

- Menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil bahkan perlu upaya meningkatkan.
- Meningkatkan Nilai Tambah Komoditi unggulan

- Ketimpangan skala ekonomi antar Kab/Kota (PDRB x Potensi peluang pengembangan)
- Tingkat pendapatan perkapita masih dibawah rata-2 Nasional. (Laju pertumb. Penduduk agar < laju Petumb. Ek), dan Pengelolaan potensi sda meningkatkan Nilai Tambah, dan Pemanfaatan peluang)

Keterkaitan paling penting dalam perekonomian adalah jaringan pasar yang merupakan aliran komoditas, bahan mentah dan hasil-hasil produksi antar pusat-pusat permukiman dan pusat produksi, serta aliran modal dan pendapatan. Senyatanya, keterkaitan dimaksud merupakan perwujudan dari keterkaitan dalam proses konsumsi dan produksi--berupa keterkaitan kebelakang (backward linkage) dan keterkaitan kedepan (forward linkage).

Dari sisi spasial, keterkaitan dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori. Pertama, adalah keterkaitan internal, yaitu keterkaitan yang terjadi dalam wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan yang Kedua, keterkaitan eksternal, menunjukkan keterkaitan ekonomi Sulawesi Selatan dengan wilayah lain, di Indonesia maupun di luar negeri.

Kegiatan ekonomi di kawasan perdesaan didominasi oleh sektor primer, sedangkan kegiatan ekonomi di sektor sekunder dan tersier mayoritas terjadi di kawasan perkotaan, khususnya di kota Makassar, serta di Pare-Pare dan di ibukota kabupaten lainnya dengan intensitas yang jauh lebih kecil. Dengan demikian, keterkaitan spasial yang dipicu oleh kegiatan ekonomi masih sangat primitif. Pada satu sisi keterkaitan itu dipicu oleh ketergantungan terhadap produk primer sebagai bahan baku proses industri dan bahan konsumsi di kawasan perkotaan. Sedangkan pada sisi lain berupa adanya ketergantungan bahan-bahan konsumsi (selain bahan makanan) dan kebutuhan untuk menunjang sektor pertanian di kawasan perdesaan.

Keterkaitan ekonomi Sulawesi Selatan dengan kawasan lainnya dapat diketahui dengan mengamati arus barang dan jasa yang keluar dan masuk ke propinsi ini, antar pulau maupun impor dan ekspor. Kuantitas arus barang dan jasa dimaksud yang relatif tinggi dan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi pula menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan memiliki keterkaitan ekonomi yang cukup erat dengan wilayah lain, di Indonesia maupun di luar negeri, sekaligus menunjukkan kontribusi Sulawesi Selatan dalam pengembangan perekonomian nasional dan peningkatan kualitas Ketahanan Nasional.

Ada beberapa upaya dan kebijakan strategis yang dirintis untuk meningkatkan kualitas interkoneksi ekonomi Sulsel dengan lingkungan strategisnya. Pertama, adalah membentuk BKPRS (Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi) yang disepakati oleh seluruh Pemerintah Propinsi di pulau Sulawesi untuk menginisiasi dan melaksanakan kerjasama regional antar propinsi. Badan ini telah berhasil mendorong pemerintan pusat untuk memprioritaskan penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi yang dijadikan sebagai acuan utama dalam perumusan dan pengembangan kerjasama antarpropinsi. Pada beberapa tahun terakhir, implementasi kerjasama dimaksud mengalami penurunan yang salah satu penyebabnya adalah otonomi daerah yang diletakkan pada daerah kabupaten / kota.

Kedua, adalah kerjasama antar beberapa negara Asia Tenggara yang menyepakati membentuk Kawasan Pengembangan Asean Timur, BIMP – EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipine East Asean Growth Area). Pada tataran konsep, keberadaan badan ini akan banyak membantu pengembangan wilayah yang dicakupnya. Walau pun, pada tataran operasional belum banyak hasil yang dicapai, khususnya jika dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan ekspor Sulawesi Selatan.

### c. Pertanian

Masalah pertama di sektor ini terletak pada komposisi Nilai Tambah Bruto. Sebagian besar nilai tambah itu diserap oleh Surplus Usaha (78,49%)—persentase ini lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata seluruh sektor, yaitu sebesar 58,20%, sedangkan Upah dan Gaji hanya sebesar 18,74% yang masih harus dibagi kepada tenaga kerja yang jumlahnya relatif besar, yaitu 50,97% dari seluruh tenaga kerja. Hasilnya adalah pendapatan rata-rata untuk seorang buruh tarsi hanya Rp. 2.318.939/tahun, jauh lebih kecil dari upah rata-rata untuk seluruh sektor, yaitu Rp. 6.332.771/tahun. Inilah penyebab utama ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. Ada 50,97% keluarga yang menikmati pendapatan 18,66 % dari total pendapatan. Ketimpangan ini akan menjadi semakin besar jika diukur per kapita karena jumlah keluarga petani umumnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah keluarga tenaga kerja pada sektor lainnya.

Sebagian besar lahan pertanian di Sulsel memiliki ketergantungan yang semakin besar terhadap input yang umumnya harus diimpor, mulai dari pupuk dan pestisida, bahan bakar untuk traktor dan bahkan bibit. Tanpa input seperti itu, sawah-sawah yang ada hampir tidak mungkin lagi ditanami. Dibandingkan dengan kondisi beberapa dekade sebelumnya di mana sebagian besar input disediakan oleh alam dan kegagalan panen relatif kecil karena varitas yang digunakan sangat sesuai dengan kondisi lingkungannya, maka posisi petani menjadi semakin terjepit. Demi untuk mengejar sasaran yang berkaitan dengan kepentingan nasional (yang diwujudkan dalam peningkatan output sebesar mungkin), maka yang semakin banyak berkorban adalah petani yang notabene merupakan kalangan berpenghasilan paling kecil. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang perlu segera dipecahkan.

Simpulan yang dapat ditarik adalah kemandirian lokal di bidang pertanian menjadi semakin berkurang tanpa adanya kompensasi yang sepadan di bidang lainnya. Apalagai kalau lahan produktif tidak diadakan perlindungan secara baik, akan beralih fungsi tanpa terkendali.

### d. Industri Pengolahan/Strategis

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor Industri Pengolahan adalah ketersediaan sumberdaya energi yang handal dan tentu saja murah. Kondisi seperti ini akan membuat daya tarik Sulsel sebagai daerah tujuan investasi akan meningkat. Oleh karena itu, upaya untuk membangun sub-sektor energi merupakan upaya strategis yang perlu segera dilaksanakan.

Terdapat beberapa industri yang bersifat unik di Sulawesi Selatan, yaitu industri yang tidak berbasis pada ketersediaan input yang nilainya besar (dalam input antara), tetapi semata-mata mengandalkan keterkaitan industrial serta final

demand-nya. Industri tepung terigu dan industri semen merupakan contoh dari jenis industri dimaksud.

Kelompok industri yang memanfaatkan input antara seperti industri terigu di atas dan industri semen memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan perekonomian Sulsel. Oleh karena itu, perlu upaya dan kebijakan tertentu sehingga jenis industri dimaksud dapat berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Dengan kata lain, di perlukan kebijakan yang membuat daya tarik Sulawesi Selatan untuk industri seperti itu semakin meningkat di masa-masa yang akan datang.

Masalah utama industri strategis Sulsel seperti Pabrik Semen adalah kebutuhan tenaga listrik yang tinggi, sementara PLN belum mampu menjangkaunya. Selain itu, Pabrik Gula membutuhkan revitalisasi peralatan dan lahan yang membutuhkan investasi yang besar, namun harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah, bahkan memungkinkan luar daerah Sulsel.

#### **e. Energi dan Sumber Daya Mineral**

Masalah yang dihadapi oleh Sulawesi Selatan adalah ketersediaan energi listrik yang di pasok oleh sumber-sumber energi internal pada saat ini pasokan dimaksud hanya bersumber dari PLTA Bakaru (126 MW) dan PLTGU Sengkang (135 MW), serta sebagian kecil yang berasal dari PLTA yang dioperasikan oleh PT INCO (hanya sekitar 5 MW yang disalurkan ke jaringan PLN, sebagian besar digunakan sendiri dalam pengolahan biji nikel). Pasokan internal itu relatif kecil dibandingkan kebutuhan saat ini, yaitu sebesar 448 MW (2006).

Kekurangan pasokan itu ditutupi oleh pembangkit yang menggunakan sumber energi dari luar Sulawesi Selatan misalnya di Makassar beberapa PLTD Sewatama Tallo (16 MW), di Suppa Pinrang PLTD (60 MW) dan beberapa PLTD lainnya yang terinterkoneksi melalui jaringan tegangan menengah 20 KV yang beroperasi pada beban puncak.

Fakta ini menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan sangat tergantung, terutama dimasa depan, kepada pasokan sumber-sumber energi dari luar wilayah. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini merupakan upaya strategis yang perlu segera dilaksanakan.

Di samping masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan kondisi jaringan, masalah yang tidak kalah peliknya adalah jaminan ketersediaan atau pasokan air. Seperti telah disinggung sebelumnya, DAS-DAS di Sulawesi Selatan sedang mengalami kondisi yang parah, yang berdampak pada rentannya pasokan air, irigasi maupun air baku lainnya, terutama dimusim kemarau. Tanpa penanganan yang serius untuk memperbaiki kondisi DAS tersebut, maka fungsi jaringan tidak akan pernah optimal.

Perlu digarisbawahi bahwa walaupun sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekspor, tetapi pengembangannya membutuhkan kehati-hatian, karena sangat terkait dengan kualitas lingkungan hidup. Topografi Sulsel yang unik membuat wilayah ini sangat rentang terhadap eksploitasi sumberdaya pertambangan.

#### f. Sosial, Budaya dan Agama

Masih lemahnya keterpaduan antar lembaga terkait dalam menangani permasalahan sosial sehingga dampak yang ditimbulkan belum dapat di selesaikan secara optimal

Di bidang keagamaan boleh dikatakan tidak ada lembaga baru, yang terjadi adalah variasi dalam jumlah dan intensitas kegiatan dari lembaga-lembaga tradisional. Telah terjadi pergeseran yang paling mendasar, walaupun hampir tidak disadari, yaitu bergesernya nilai-nilai Bahari yang dulunya membuat beberapa daerah di Sulawesi Selatan menjadi unik pada tataran nasional atau bahkan regional. Yang dimaksud dengan nilai-nilai bahari disini adalah orientasi tentang hal-hal penting dan mendasar dalam kehidupan, yang lahir secara endogenous dari proses adaptasi-kreatif dengan lingkungan kehidupan dari waktu ke waktu, yang pada komunitas Sulawesi Selatan di masa lalu lingkungan kehidupan yang signifikan adalah laut dan aktivitas kebaharian.

Komunitas tradisional yang mampu bertahan saat ini tinggal segelintir, salah satu di antaranya adalah Komunitas Kajang di Kabupaten Bulukumba. Komunitas ini benar-benar merupakan suatu komunitas yang unik dengan identitas yang unik pula. Walaupun, secara sosial ekonomi komunitas ini tidak menunjukkan keunggulan lokal (dari perspektif ekonomi modern), tetapi mungkin saja, mereka memang tidak mengarahkan pengembangan komunitas mereka ke arah itu. Komunitas ini mampu bertahan karena berhasil menutup diri atau setidaknya membatasi interaksi dengan lingkungannya.

Lembaga yang menangani budaya lokal belum berkembang sebagaimana mestinya, padahal inilah yang dibutuhkan untuk melahirkan masyarakat dengan identitas yang unik. Kemandirian lembaga ini juga relatif sangat rendah sehingga pelaksanaan misinya masih jauh dari optimal. Yang memiliki aktivitas dengan intensitas dan frekuensi yang "tinggi" umumnya yang memiliki sponsor atau merupakan cabang dari lembaga sejenis di tingkat nasional dan bahkan internasional. Lembaga yang memiliki misi melindungi dan mengembangkan budaya/nilai tradisional umumnya tidak beroperasi dalam skala yang cukup untuk melaksanakan misinya secara optimal.

Pada bidang ekonomi, lembaga-lembaga yang mengkhususkan diri di bidang ini menunjukkan kecenderungan bertumbuh dengan laju yang cukup tinggi. Walaupun, dari sisi identitas umumnya mirip satu dengan lainnya. Dengan kata lain, kebanyakan lembaga dimaksud menyandang identitas sebagai lembaga ekonomi modern yang memosisikan, keuntungan sebagai orientasi utama dengan seperangkat aturan dan nilai yang cenderung serupa pula. Keberadaan lembaga ini bukannya, menambah kualitas keragaman, tetapi justru sebaliknya, karena memarginalkan lembaga tradisional.

Kehadiran lembaga ekonomi modern dalam bentuk Bank dan Koperasi, termasuk variannya berupa Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah, telah menggeser lembaga tradisional, seperti ikatan Ponggawa-Sawi yang memiliki keunikan dalam menawarkan *choice* dan menyalurkan *voice* di kalangan masyarakat perdesaan.

Kehadiran lembaga pasar modern cenderung meminggirkan eksistensi pasar tradisional. Kehadiran pasar modern yang mestinya menambah keragaman,

justru melemahkan entitas yang sudah ada. Kehadiran perusahaan besar sebagai lembaga ekonomi yang lebih terkonsentrasi pada bidang otomotif dan konstruksi, kurang mendorong produksi manufaktur dan agroindustri, juga menjadi fenomena di balik rendahnya keragaman dalam kelembagaan ekonomi.

Di bidang budaya dan kesenian, sangat sedikit lembaga baru yang berkembang sedangkan lembaga tradisional mengalami kesulitan untuk mempertahankan keberadaannya. Ini ditandai oleh kurang berlangsungnya artikulasi antara ciri tradisional.

Di bidang sains dan teknologi, kehadiran lembaga masyarakat hampir tidak ada, sedangkan pemerintah, melalui lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi, tetapi belum mampu bekerja secara optimal. Penelitian dan program pengabdian masyarakat di perguruan tinggi tidak selalu terkait dengan kebutuhan masyarakat. Singkatnya, perguruan tinggi belum mampu sepenuhnya memperkenalkan teknologi dan nilai (termasuk wawasan) baru kepada masyarakat. Juga belum mampu membantu masyarakat melakukan proses adaptasi-kreatif. Hal ini sangat terkait dengan kemampuan pembiayaan Perguruan Tinggi yang relatif sangat terbatas, sehingga hampir semuanya terserap, untuk kegiatan pendidikan.

Dapat dirangkumkan bahwa kecenderungan yang nampak dengan jelas adalah kehadiran lembaga-lembaga yang menawarkan ide dan gagasan atau bahkan nilai-nilai baru, secara pelan tetapi pasti telah mendesak kelembagaan tradisional, tetapi belum mampu menggantikan posisinya secara utuh, karena belum menyatu (bersenyawa) dengan masyarakat lokal. Inti dari identitas, yaitu budaya telah ikut bergeser atau kehilangan eksistensi. Budaya bahari berkurang digantikan oleh budaya petani. *Spirit entrepreneur* yang dimiliki oleh orang Wajo misalnya, telah terkikis dan hampir tidak punya bekas lagi.

Lembaga dimaksud kebanyakan memiliki misi untuk memperkenalkan nilai-nilai baru (khususnya paham modernisme) kepada masyarakat. Lembaga dimaksud secara sistimatis melakukan penetrasi terhadap nilai-nilai dan kearifan lokal. Menggusur nilai dan kearifan itu dengan nilai dan cara pandang baru.

Masalahnya, lembaga kemasyarakatan baru (pada berbagai bidang kehidupan) pada dasarnya tidak mampu menghadirkan keragaman, karena walaupun bervariasi dalam jumlah, tetapi umumnya berbasis dan menawarkan nilai-nilai yang kurang lebih sama, yaitu nilai-nilai modern (modernisasi). Dengan demikian, lembaga-lembaga itu tidak akan pernah mampu menawarkan keragaman dalam nilai.

Nilai dan pembaharuan yang diperkenalkan oleh lembaga dimaksud memiliki akar budaya yang tidak kompatibel dengan budaya masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya kegamangan dalam masyarakat. Pada satu sisi, yaitu pada lapisan permukaan, nilai dari pembaharuan terlihat memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan, sehingga menarik untuk diadopsi, tetapi pada sisi lain, yaitu pada tataran internal, nilai dan pembaharuan itu masih sulit diadopsi karena terasa bertentangan dengan "naluri budaya" mereka.

Pendapatan masyarakat rata-rata yang relatif rendah memberikan pula kontribusi yang tidak kecil terhadap berkembangnya kelembagaan masyarakat dimaksud. Hal ini lebih diperparah oleh kenyataan bahwa kalangan dan pemuka

masyarakat yang memiliki Tatar belakang finansial yang cukup, umumnya tidak tertarik pada kegiatan ini. Ketimbang menjadi pelopor, kalangan itu umumnya lebih tertarik kepada model kelembagaan modern. Walaupun pada akhir-akhir ini mulai terlihat adanya pembalikan kecenderungan.

Dukungan finansial memang merupakan syarat harus, khususnya untuk kondisi Sulawesi Selatan, bagi tumbuh dan berkembangnya suatu lembaga masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga masyarakat yang mampu mempertahankan kehadirannya di Sulawesi Selatan adalah lembaga-lembaga yang memiliki dukungan finansial yang memadai. Hampir semua partai politik memiliki cabang di Sulsel, karena mereka mendapat dukungan dana dari pemerintah propinsi dan pemerintah daerah melalui APBD masing-masing. Demikian pula halnya dengan kebanyakan LSM. Yang mampu bertahan adalah yang merupakan perpanjangan tangan dari LSM yang ada di Jakarta atau bahkan di tingkat internasional.

Kepernimpinan (*leadership*) dan kemampuan manajemen juga merupakan salah satu penyebab tidak berkembangnya kelembagaan masyarakat ini. Membidani dan mengembangkan kelembagaan baru jelas membutuhkan kualitas kepemimpinan dan kepakaran dalam pengelolaan organisasi. Kebutuhan itu jelas terbentur pada kelangkaan. Dalam kondisi masyarakat Sulsel seperti sekarang, individu yang memiliki keahlian seperti itu telah terserap pada kegiatan-kegiatan yang lebih mapan.

Kebijakan yang sistimatis dan mendasar dari pemerintah, sebagai satu-satunya agen pada saat sekarang yang memiliki peluang dan sumberdaya, untuk menginisiasi pembaharuan. Hal ini sangat mungkin disebabkan oleh--sebagaimana telah disinggung sebelumnya- pendekatan pembangunan yang sangat bias fisik dan oleh asumsi bahwa model kelembagaan modern merupakan alternatif terbaik bagi terselenggaranya kegiatan pembangunan.

Program lembaga-lembaga modern yang hanya berkonsentrasi pada pengenalan nilai dan pembaharuan itu. Sangat kurang yang memperhatikan atau menaruh perhatian pada pentingnya proses reaktualisasi dan revitalisasi budaya masyarakat agar dapat bersenyawa (menerima) pembaharuan nilai-nilai dan wawasannya.

#### **g. Wilayah dan Tata Ruang**

Sulsel merupakan wilayah yang memiliki kawasan yang relatif sudah mengalami degradasi kualitas wilayah ekologisnya. Karena itu, Sulsel perlu berusaha mengembalikan kelestarian ekologisnya, terutama pelestarian keunikan ragam hayati Wallacea, sehingga konsep pola ruang wilayah ekologis Sulsel perlu disusun secara cermat. Keragaman hayati baik flora maupun fauna sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi. Keseimbangan ekologi pada akhirnya mempengaruhi kualitas lingkungan yang dibutuhkan manusia.

Sepintas, ada semacam “konflik” antara kepentingan memelihara wilayah ekologi dengan pembangunan ekonomi rakyatnya. Pelestarian wilayah ekologi yang optimal adalah dengan cara tidak mengganggu kawasan ini, khususnya kawasan lindung dan kawasan hutan. Namun, kenyataannya kawasan habitat flora dan fauna di Sulsel adalah juga merupakan ruang mencari nafkah bagi kehidupan rakyat Sulsel yang kebanyakan adalah petani. Sehingga pendekatan

konservasi yang berarti dalam kawasan pelestarian wilayah ekologi, rakyat dapat memanfaatkan ruang secara terbatas dan terkendali dengan tetap mendukung pelestarian flora dan faunanya.

Agar interkoneksi antar pusat-pusat kegiatan, serta pelayanan sarana wilayah efisien dan efektif maka perlu diwujudkan sistem Interkoneksi kawasan perkotaan dan perdesaan yang sinergis simbiosis mutualistik. Pengembangan Sistem Perkotaan di Provinsi Sulawesi Selatan ditentukan sebagai berikut:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berupa Kawasan Perkotaan Makassar – Maros – Sungguminasi - Takalar (Mamminasata) dan Selayar;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Pangkajene, Jeneponto, Palopo, Watampone, Bulukumba, Barru dan Parepare;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan pusat-pusat kegiatan skala kabupaten dan kota, sebagai pusat kegiatan industri dan jasa, serta simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan, sehingga semua kota dan ibukota kabupaten juga berfungsi sebagai PKL.

Pusat Kegiatan Sub Lokal (PKSL) merupakan kawasan pengembangan ekonomi lokal termasuk sentra-sentra produksi pertanian termasuk kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan dan perikanan, sentra produksi pertambangan, pusat-pusat industri manufaktur, pusat perdagangan, kawasan wisata, pusat pelayanan jasa yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Sulsel.

Kawasan andalan di wilayah Provinsi Sulsel yang ditetapkan berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis nasional yaitu:

- a. Kawasan andalan Mamminasata dan sekitarnya;
- b. Kawasan andalan Palopo dan sekitarnya;
- c. Kawasan andalan Bulukumba-Watampone dan sekitarnya;
- d. Kawasan andalan Parepare dan sekitarnya;
- e. Kawasan andalan laut Kapoposang dan sekitarnya;
- f. Kawasan andalan laut Teluk Bone dan sekitarnya ;
- g. Kawasan andalan laut Singkarang-Takabonerate dan sekitarnya;
- h. Kawasan andalan laut Selat Makassar.

Sedangkan Kawasan Strategis Provinsi dibedakan berdasarkan:

- a. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan terpadu pelabuhan, industri, pergudangan dan perdagangan umum, Kawasan agropolitan, Kawasan pariwisata budaya dan alam : Tana Toraja dan Bulukumba dan Kawasan Pariwisata Bahari : Spermonde, Kapoposang dan Takabonerate;
- b. Kepentingan Sosial dan Budaya yaitu Kawasan Tana Toraja, Bulukumba, Maros, Gowa dan Makassar.

- c. Kepentingan Pedayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi yaitu Kawasan Stasiun Bumi LAPAN : Parepare, Kawasan Penambangan Nikel Soroako dan Kawasan Wilayah Minyak dan Gas Bumi.
- d. Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu wilayah yang merupakan daerah lahan kritis berdasarkan Peta Kekritisian DAS dan Pola Ruang.

#### **h. Pemerintahan dan Politik**

Pada tataran kabupaten, keragaman internal juga sangat kurang. Malah, kabupaten-kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan sangat mirip satu dengan lainnya. Senyatanya, kabupaten belum mewujud sebagai komunitas, tetapi lebih merupakan—dan memang didisain untuk itu—satuan administrasi pemerintahan. Struktur administrasi dan pemerintahan seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan pada umumnya mirip satu dengan lainnya, karena mengacu kepada acuan yang sama yang ditetapkan pemerintah pusat.

Hampir semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan belum mampu menemukan dan mengembangkan potensi spesifik yang dimiliki yang membuatnya berbeda dengan daerah lain. Hal ini bermuara pada pada struktur sosial-ekonomi Sulsel yang sangat homogen yang masih didominasi oleh sektor primer. Daerah kabupaten malah belum mampu mendorong pengembangan sektor sekunder, berupa industri pengolahan hasil-hasil pertanian (agroindustri) dan agrobisnis, dari sektor primer itu. Kegiatan sekunder dimaksud lebih berpusat di Makassar dan sebagian kecil di Pare-Pare. Contoh lain, penggaraman rakyat di Takalar dan Jeneponto belum mampu beranjak dari posisi yang dipegangnya sejak zaman dahulu. Padahal, di sisi lain Indonesia masih mengimpor garam dalam jumlah yang relatif besar.

Pembangunan juga sangat bias fisik sehingga menelantarkan pembangunan budaya (lokal), dalam kondisi seperti itu identitas lokal sulit menemukan ruang untuk berkembang. Dengan kata lain, pembangunan sangat sedikit terkait dengan upaya untuk memer kaya identitas. Hampir tidak ada upaya sistematis yang diarahkan untuk melakukan reaktualisasi dan revitalisasi budaya lokal. Malah ada kecenderungan meminggirkan atau bahkan melupakannya sama sekali.

Dominasi budaya tertentu yang membonceng kekuasaan pemerintah merupakan pula faktor yang mempercepat memudanya budaya bahari yang menjadi akar dari hampir semua budaya lokal di Sulawesi Selatan.

Puncak dari kebijakan pemerintah yang berdampak pada memudanya identitas lokal adalah ketika memosisikan desa sebagai daerah administrasi pemerintahan yang dikelola tentunya dengan sistem administrasi yang seragam yang ditetapkan secara terpusat. Kebijakan ini telah menghapus sama sekali eksistensi keragaman dalam mengelola kepentingan bersama. Menggusur eksistensi desa sebagai komunitas masyarakat yang dikelola secara unik. Kebijakan itu merupakan pula awal dari kematian kreatifitas masyarakat lokal, karena kebijakan lokal hampir tidak dibutuhkan lagi karena adanya aturan yang dijalankan secara konsisten oleh aparat pemerintahan desa.

Di samping kebijakan pemerintah dan pendekatan pembangunan yang disebutkan di atas, pudarnya identitas lokal juga ikut dipicu oleh aktivitas

lembaga-lembaga kemasyarakatan modern yang ditopang oleh lembaga sejenis pada tingkat nasional atau bahkan internasional. Senyatanya, kebijakan pembangunan yang dianut pemerintah secara langsung maupun tidak langsung juga ikut pula merangsang tumbuh dan berkembangnya kelembagaan ini. Seperti telah disinggung sebelumnya, pemerintah secara tersirat melihat kelembagaan masyarakat modern merupakan model terbaik yang perlu diadopsi untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil-hasil pembangunan.

Di samping itu, wawasan pemerintah yang masih terfokus sebagai pusat prakarsa dan pelaku pembangunan sehingga tidak membutuhkan adanya mitra lain. Dengan kata lain, pemerintah melihat bahwa pengembangan kelembagaan masyarakat yang akan berfungsi sebagai mitra dalam pembangunan daerah, belum merupakan prioritas. Setidaknya, dugaan ini tercermin dari program dan alokasi dana pembangunan pada APBD pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pada gilirannya, wawasan ini semakin menyulitkan posisi pemerintah karena keterbatasan keuangan yang dimiliki. Keterbatasan itu disiasati dengan merancang kebijakan daerah untuk menggali potensi yang ada (untuk meningkatkan pendapatan daerah). Pada umumnya kebijakan ini justru membebani masyarakat sekaligus menghambat kelancaran aktifitas perekonomian daerah (*high-cost economy*). Muaranya, peluang bagi berkembangnya lembaga-lembaga masyarakat yang mandiri (karena ditunjang secara finansial oleh kalangan masyarakat) semakin tertutup.

Belum mewujudnya daerah sebagai komunitas atau minimal sebagai satu satuan sosial-ekonomi yang memiliki keunggulan lokal menunjukkan bahwa **interkoneksi antar faktor** yang menjadi unsur pembentuk belum berlangsung secara optimal. Faktor fisik atau sumberdaya alam yang tersedia tidak atau belum mendorong terbentuk kelembagaan yang setara dan sepadan (kompetibel) dalam mengelolanya. Sebaliknya juga benar, bahwa kelembagaan masyarakat, dan juga pemerintah—dalam hal ini mawujud dalam bentuk organisasi yang memiliki identitas yang spesifik—tidak sepenuhnya setara dan sepadan dengan sumberdaya yang ada. Tiadanya interkoneksi, tidak ada pula "persenyawaan" yang dihasilkannya, yaitu berupa komunitas yang unik. Penyebabnya terdiri atas beberapa hal.

**Pertama**, adalah bahwa kabupaten memang didisain sebagai satuan administrasi pemerintahan, bukan sebagai komunitas. Walaupun ada beberapa kabupaten yang awalnya berupa *swapraja*. Sebagai satuan administrasi pemerintahan, maka kebijakan yang berlaku ditetapkan secara terpusat (*uniform*), sehingga bermuara pada terbentuknya daerah-daerah administrasi yang homogen pula. Malah, Desa sebagai satuan permukiman yang terkecil yang secara alamiah merupakan komunitas, telah ditransformasikan menjadi daerah administrasi pemerintahan.

Struktur pemerintahan yang disusun mengikuti arahan dari pemerintah pusat dalam banyak hal tidak kompatibel dengan kondisi spesifik daerah. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah tidak mampu mendayagunakan potensinya seoptimal mungkin untuk membangun kelembagaan masyarakat di dalam wilayah administrasi pemerintahannya.

**Kedua**, sikap, wawasan dan kualitas aparatur pemerintahan yang tidak kompatibel dengan kondisi yang ingin diwujudkan. Walaupun pada saat ini era otonomi telah diakui dan dilaksanakan, tetapi mayoritas aparat pemerintah belum berhasil membiasakandiri dengan gaya yang diperlukan di era otonomi daerah. Senyatanya, konsep otoda belum sepenuhnya dimengerti apalagi diimple mentasikan. Otoda di interpretasikan sempit, yaitu hanya sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, bukan sebagai kebijakan untuk memberi peluang kepada daerah guna mengembangkan diri seoptimal mungkin dengan mengandalkan sumber daya lokal dengan cara yang sesuai dengan budaya lokal.

Wawasan dan sikap, aparatur pemerintah belum bergeser jauh dari masa-masa sebelumnya. Lebih berwawasan sebagai regulator ketimbang motivator dan Belum mampu bergeser menjadi steering ke timbang rowing. Di samping itu, aparatur pemerintah belum mampu membiasakan diri untuk berfikir dan bertindak kreatif-inovatif untuk memanfaatkan potensi sumberdaya yang spesifik.

**Ketiga**, lembaga kemasyarakatan modern yang ada di tingkat propinsi belum mampu berperan aktif mendorong terbentuknya kawasan dan daerah menjadi suatu komunitas. Ini adalah konsekuensi logis dari ketidakmampuan lembaga-lembaga dimaksud untuk memerankan fungsinya secara optimal sebagaimana telah disinggung sebelumnya.

**Keempat**, adalah dampak reformasi berupa terjadinya diskontinuitas dalam kebijakan pemerintahan dan pendekatan pembangunan. Padahal, pembangunan kelembagaan masyarakat dan komunitas membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan kata lain, diperlukan adanya kebijakan pembangunan yang di laksanakan secara konsisten. Prasyarat ini menjadi tidak terpenuhi dengan adanya reformasi yang mengubah hampir semua kebijakan tanpa kecuali.

Di bidang politik, kecenderungan yang sama juga terjadi. Lembaga-lembaga politik dalam bentuk partai politik berkembang sangat pesat dilihat dari sisi jumlah. Hampir semua partai politik memiliki perwakilan di tingkat propinsi dan di mayoritas kabupaten. Walaupun, ada kecenderungan bahwa partai-partai tersebut belum mampu menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara optimal. Itu misalnya terlihat dari hasil Pilkada yang tidak selalu sejalan dengan hasil Pemilu Legislatif. Malah, organisasi sosial politik belum mampu memberikan suasana yang kondusif dan cenderung memecah belah kekerabatan yang ada dimasyarakat, namun fenomena, ini merupakan suatu proses pendewasaan berpolitik masyarakat.

Selama ini permasalahan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan perencanaan pembangunan itu tidak dilaksanakan sepenuhnya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Pertama, penyelenggaraan program pembangunan hampir tidak pernah mengacu kepada nilai- nilai dasar yang dicantumkan pada dokumen perencanaan tersebut, karena pembangunan lebih diartikan sebagai kegiatan fisik untuk mencapai sasaran-sasaran yang bersifat fisik pula, bukan pembangunan manusia (dalam arti sebenarnya) dan kelebagaannya yang lebih berdimensi budaya.

## BAB IV

### VISI DAN MISI DAERAH

#### 4.1. Visi

Visi dalam RPJPD ini diartikan sebagai rumusan umum mengenai kondisi ideal Sulawesi Selatan yang diinginkan terwujud pada akhir periode RPJPD yakni tahun 2025. Visi ini dirumuskan dengan memperhatikan visi RPJPN, isu-isu strategis pembangunan daerah dan aspirasi pemangku kepentingan daerah. Visi ini selanjutnya diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD guna menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun RPJMD berkenaan. Adapun visi daerah Sulawesi Selatan 2005-2025 adalah:

**”Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka Di Indonesia  
Dengan Pendekatan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan  
Keagamaan”**

Visi daerah Sulawesi Selatan ini mengarah pada pencapaian visi pembangunan nasional yaitu ”Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur sebagaimana tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2007.

Pada visi ini terdapat tiga pokok visi yakni provinsi terkemuka, kemandirian lokal dan bernafaskan keagamaan. Ketiga pokok visi ini merupakan kesatuan holistik dalam menyatakan kondisi yang hendak diwujudkan oleh tatanan Sulawesi Selatan. Provinsi terkemuka adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai terkait dengan capaian kinerja pada aspek-aspek pembangunan tertentu serta tingkat akselerasi dalam proses pencapaian kinerja tersebut. Kemandirian lokal adalah gambaran tentang pendekatan yang ditempuh dalam mencapai posisi sebagai provinsi terkemuka. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa posisi terkemuka Sulawesi Selatan di Indonesia terwujud melalui kemandirian dari wilayah dan masyarakat yang berinterkoneksi satu sama lain. Bernafaskan keagamaan adalah landasan etik dan moral bagi kemandirian lokal dalam terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai daerah terkemuka di Indonesia. Dengan demikian, rumusan visi ini mengaitkan antara kondisi tentang posisi Sulawesi Selatan yang hendak diwujudkan, kondisi tentang pendekatan pembangunan yang hendak dijalankan, dan kondisi tentang landasan etik dan moral dalam perwujudan posisi terkemuka dan perwujudan pendekatan kemandirian lokal. Indikasi-indikasi penting dari setiap pokok visi ini adalah sebagai berikut.

**Provinsi terkemuka** diindikasikan oleh perwujudan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah yang capaiannya berada dalam kelompok provinsi di atas rata-rata Indonesia. Dalam perwujudan itu, Sulawesi Selatan menjelma sebagai tatanan yang berkualitas, dalam arti memiliki kapasitas yang tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap pergeseran aspirasi masyarakat dan dinamika lingkungan, mampu menyediakan berbagai pilihan pada semua aspek kehidupan (*choice*) dan memiliki kekuatan dalam menentukan pilihan (*voice*), serta berperan dalam memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

**Kemandirian Lokal** ditandai oleh kemandirian daerah (kabupaten/kota) dan kemandirian masyarakat (kelompok dan kelembagaan), dimana entitas wilayah dan masyarakat tersebut berinterkoneksi satu sama lain dalam mengelola sumberdaya lokal dan menghasilkan sumberdaya baru (*emerging resources*). Proses pemanfaatan sumberdaya

tersebut berbasiskan pada pengetahuan asli dan kearifan lokal sambil mengadopsi pengetahuan luar dan kearifan global, dengan tetap memmanifestasikan identitas diri (*self reference*) tatanan provinsi Sulawesi Selatan, dan ini tergambarkan dalam bentuk produk spesifik yang memiliki keunggulan lokal.

**Bernafaskan Keagamaan** ditandai oleh kondisi dimana agama berfungsi sebagai acuan utama dalam proses aktualisasi nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan dalam rangka proses adaptasi-kreatif terhadap dinamika lingkungan strategis serta pergeseran aspirasi dari tatanan-tatanan pembentuk Sulawesi Selatan. Pokok visi ini menegaskan bahwa proses pembangunan senantiasa mengacu dan dinafasi oleh tatanan keagamaan yang membentuk perilaku manusia religius dengan nilai-nilai spritual yang merupakan ciri dasar dan tetap melekat pada kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan. Seluruh gerak pembangunan diharapkan muaranya adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan sikap hidup relegius sehingga terbina suasana kehidupan sosial yang aman dan tenteram. Indikasi dari pokok visi ini adalah terpeliharanya landasan akhlak-moral dan spriritualitas kehidupan dan teraktualisikannya nilai-nilai budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

## 4.2 Misi

Misi dalam RPJPD ini dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dijalankan dalam mewujudkan visi. Dengan demikian, misi ini merupakan pilihan jalan (*the chosen track*) bagi pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi *stakeholder* secara keseluruhan. Rumusan misi ini memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Rumusan misi dalam RPJPD ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Berdasarkan pemahaman demikian, maka misi RPJPD ini dirumuskan sebagai berikut.

### 1. Mewujudkan Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan

Kualitas manusia mengandung arti memiliki jatidiri dan wawasan yang luas sehingga selain mampu mengaktualisasikan dirinya secara mandiri juga mampu bersikap dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota dari tatanan pada berbagai strata dan sebagai makhluk menyadari bahwa ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu keniscayaan. Misi ini mencakup upaya-upaya umum dalam peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, peningkatan identitas dan daya adaptif budaya, peningkatan kualitas pemuda dan olah raga, peningkatan kualitas relasi gender dan perlindungan anak, dengan berbasis pada peningkatan kehidupan spiritual keagamaan sebagai landasannya.

### 2. Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar

Sebagai komunitas pembelajar mengandung arti memiliki kemampuan adaptasi-kreatif yang prima karena didukung oleh keberadaan tatanan internal berupa lembaga-lembaga masyarakat yang tangguh dan mandiri di semua bidang kehidupan dan daerah Kabupaten/Kota yang telah mewujud sebagai komunitas mandiri yang memiliki keunggulan lokal. Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong kapasitas kelembagaan masyarakat sebagai *learning community*, menopang kemandirian daerah

kabupaten/kota, mendukung perwujudan otonomi desa, mendorong interkonesitas antar kelembagaan masyarakat, mendorong kerjasama kabupaten/kota, dan menguatkan daya saing daerah.

### **3. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif**

Sebagai wilayah yang kondusif mengandung arti terselenggaranya aktivitas sosial ekonomi, politik, dan budaya serta terbukanya peluang bagi setiap individu dan setiap tatanan untuk melakukan aktualisasi diri. Misi ini mencakup upaya umum dalam penataan kelembagaan pemerintah dan reformasi birokrasi; pengembangan informasi dan komunikasi; pembinaan kesadaran hukum dan budaya hukum; pemeliharaan ketertiban, keamanan, kenyamanan dan penanganan konflik; penataan batas-data wilayah daerah dan desa; penataan keasatuan bangsa dan penanganan bencana.

### **4. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan**

Sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan mengandung arti melalui penataan ruang yang mengedepankan pertimbangan kepentingan sosial ekonomi, kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam perspektif masa kini dan masa depan, serta pemanfaatan teknologi. Penataan struktur tata ruang diarahkan untuk meningkatkan kualitas keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan jasa pelayanan. Sedangkan alokasi pemanfaatan ruang difokuskan kepada upaya-upaya untuk menumbuhkan kawasan pengembangan ekonomi yang memiliki keunggulan lokal sehingga membuka peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru yang menjamin distribusi pendapatan yang proporsional/berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat. Misi ini mencakup upaya-upaya pokok dalam penataan ruang; pengelolaan lingkungan hidup dan hutan; pembangunan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dalam suatu sistem agribisnis; pembangunan industri dan usaha kecil/menengah; pengembangan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan; pengelolaan energi dan sumberdaya mineral/pertambangan; pengembangan daya saing investasi; pembangunan infrastruktur wilayah; pengelolaan sumberdaya air; pengembangan teknologi dan inovasi daerah; penguatan daya saing tenaga kerja; pengembangan kawasan ekonomi unggulan.

### **5. Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional.**

Peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri, maju dan kuat mengandung arti peningkatan kualitas keterkaitan dan pelayanan sosial ekonomi antar wilayah dan antar kawasan di Indonesia, serta keterpaduan sosial budaya melalui reaktualisasi, revitalisasi dan reinterpretasi budaya bahari sebagai upaya untuk membangun dan memperkuat identitas ke-Indonesia-an. Pembangunan kemaritiman diupayakan sebagai jawaban atas tuntutan yang selama ini belum diakomodir secara proporsional, sehingga potensi kelautan belum tergarap dengan baik. Misi ini mencakup upaya umum dalam menempatkan Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring/hub dalam pembangunan kawasan timur Indonesia pada aspek transportasi, perhubungan dan telekomunikasi; pembangunan kemaritiman dalam arti luas; dan revitalisasi budaya bahari secara sosial budaya.

Sebagai upaya umum untuk perwujudan visi, keterkaitan antara lima misi ini dengan pokok-pokok visi tidak sepenuhnya bersifat tunggal dan terpisah satu sama lain,

melainkan ada tumpang tindih. Namun demikian, bila dilihat dari komponen misi yang dominan dan substansi pokok visi yang relevan, maka keterkaitan misi dengan pokok visi dapat ditunjukkan sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Hubungan antara misi dengan pokok visi RPJPD.**

Misi	Pokok Visi
1. Mewujudkan Peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan	Bernafaskan Keagamaan
2. Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar	Kemandirian Lokal
3. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif	Provinsi Terkemuka
4. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan	
5. Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional.	

#### 4.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dalam RPJPD ini diartikan sebagai keadaan yang hendak diubah dalam 20 tahun ke depan. Rumusan tujuan ini dijabarkan dari setiap misi. Sasaran dalam RPJPD ini diartikan sebagai hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka perwujudan tujuan. Rumusan sasaran ini dijabarkan dari setiap tujuan. Setiap sasaran dirumuskan juga indikator kinerjanya

**Tabel 4.2**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJPD**

Misi	Tujuan 2025	Sasaran 2025
Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan (M1)	Meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara individual dan kemasyarakatan terutama dalam capaian pendidikan, kesehatan dan ekonomi (T1)	Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Selatan sebagai dampak dari keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada berbagai level wilayah (kabupaten/ kota dan provinsi) dalam berbagai upaya pembangunan. (S1)
	Mewujudkan perluasan akses dan kualitas pendidikan bagi pembentukan dasar-dasar manusia profesional yang memiliki watak dan mental yang berbasis pada budaya lokal (T 2)	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dengan luaran yang profesional dan memiliki mentalitas/ karakter yang mencirikan manusia Indonesia seutuhnya serta tetap berbasis pada nilai-nilai lokal Sulawesi Selatan. (S2)
	Mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat agar dapat mencapai peningkatan derajat dan kualitas kesehatan yang lebih baik.(T 3)	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mencapai dan memelihara derajat kesehatan yang tinggi dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses untuk semua lapisan dan golongan. (S3)
	Meningkatkan daya saing tenaga kerja dalam merespons tuntutan profesionalisme bidang-bidang pekerjaan yang berkembang dalam persaingan skala daerah, nasional dan internasional (T 4)	Meningkatnya keterserapan angkatan kerja pada bidang pekerjaan yang berkembang dan berdaya saing secara lokal, nasional dan internasional. (S4)
	Meningkatkan kualitas kehidupan dan prestasi pemuda, olah raga, keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kehidupan keluarga (T 5)	Meningkatnya kualitas kehidupan kepemudaan dan aktivitas keolahragaan. (S5) Meningkatnya kualitas kehidupan pada institusi keluarga, relasi gender dan perlindungan terhadap anak. (S6)
		Terkendalikannya pertumbuhan penduduk dalam menjamin kesejahteraan

Misi	Tujuan 2025	Sasaran 2025
		keluarga. (S7)
	Meningkatkan peran kebudayaan Sulawesi Selatan dalam percaturan kebudayaan global (T6)	Berkembangnya kebudayaan masyarakat yang memiliki karakteristik identitas sekali-gus mampu adaptif-inklusif dengan kebudayaan lain. (S8)
	Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai dan ajaran agama dalam mencapai kualitas keimanan dan ketaqwaan serta mewujudkan suasana kondusif dalam interaksi antar umat beragama. (T 7)	Meningkatnya manifestasi spiritual, amal saleh dan pengamalan nilai dan ajaran keagamaan dalam mendukung perkembangan daerah. (S9) Berkembangnya rasa saling percaya, harmoni antar kelompok, toleransi dan kerukunan, serta kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan dan interaksi umat beragama. (S 10)
<b>Pokok Visi: Kemandirian Lokal</b>		
Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar (M2)	Menguatkan ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai pem-belajar ( <i>learning community</i> ) yang tangguh dan mandiri dan mampu mendukung terseleng-garanya pembangunan yang dijalankan sendiri oleh masyarakat ( <i>community driven development</i> ) (T 8)	Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah sosial budaya(S11)
		Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah ekonomi (S12)
		Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah sosial-politik (S13)
		Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam perkembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi (S14)

Misi	Tujuan 2025	Sasaran 2025
	Menguatkan kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa (T 9)	Menguatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa sesuai karakteristik adat-istiadat lokal dan dinamika kemajuan desa (S15)
	Menguatkan kapasitas dan kerjasama antar daerah kabupaten/kota dan antar daerah provinsi dalam pembangunan daerah (T 10)	Menguatnya kapasitas otonomi dan kerjasama daerah kabupaten/kota dalam pemecahan masalah lintas daerah (S 16)
		Efektifnya kerjasama antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain dalam pemecahan masalah lintas daerah (S 17)
<b>Pokok Visi: Provinsi Terkemuka</b>		
Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif (M3)	Memelihara situasi dan kondisi tertib, tenteram, aman dan harmonis serta kepatuhan kepada hukum dan penghargaan terhadap hak asasi manusia (T 11)	Terpeliharanya situasi dan kondisi tertib, tenteram, aman dan harmonis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kewilayahan (S 18)
	Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang mengedepankan pelayanan umum serta mengikuti prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan profesionalisme aparatur pemerintah yang terus meningkat sesuai tuntutan perkembangan (T 12)	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, bersih dan partisipatif ( <i>clean and good governance</i> ) (S 19)
Berkembangnya sistem pelayanan yang efektif dalam pencapaian standar pelayanan minimal (S 20)		
Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan (M4)	Menguatkan struktur ekonomi dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T 13)	Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat (S 21)
		Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S22)
		Meningkatnya kualitas keadilan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan (S23)

Misi	Tujuan 2025	Sasaran 2025
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani, peternak dan nelayan/pembudidaya ikan (S 24)
	Tumbuhnya rumpun industri yang kuat dan sehat dalam lingkungan usaha yang kondusif (S 25)	
	Berkembangnya jaringan perdagangan komoditas unggulan sehingga menjangkau pasar-pasar komoditas dunia (S 26)	
	Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana wilayah sebagai elemen utama struktur tata ruang yang mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai entitas sosial-ekonomi yang utuh, dan memiliki interkoneksi fisik-wilayah yang handal (T 14)	Tercukupinya sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi yang menjamin keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar-daerah (sub-wilayah) (S 27)
		Berkembangnya sarana-prasarana perhubungan udara, laut dan darat yang menempatkan Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring lintasan perhubungan kawasan timur Indonesia (S 28)
		Terkelolanya sumberdaya energi dan mineral dari berbagai sumber dengan pasokan daya yang mencukupi kebutuhan seluruh wilayah serta nilai ekonomi sumberdaya mineral yang mensejahterakan masyarakat (S 29)
		Berkembangnya Sulawesi Selatan sebagai kesatuan kawasan komunikasi yang handal serta mendukung berkembangnya <i>e-commerce</i> , <i>e-government</i> , <i>e-learning</i> dan menjadi simpul jejaring/hub dalam layanan komunikasi di Sulawesi dan Indonesia (S 30)
		Terwujudnya fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan dalam menjamin kebutuhan pokok hidup dan meningkatkan

Misi	Tujuan 2025	Sasaran 2025
		kesejahteraan masyarakat (S 31)
	Meningkatkan pengelolaan kawasan andalan, kawasan tertinggal, kawasan kritis dan kawasan perbatasan (T 15)	Terlindunginya kawasan lahan pangan berkelanjutan dari konversi lahan dan degradasi lahan demi terpeliharanya kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan bagi Sulawesi Selatan sebagai daerah surplus pangan nasional (S 32)
		Meningkatnya akselerasi pertumbuhan dan kecukupan sarana/prasarana wilayah pada kawasan andalan cepat tumbuh serta kawasan tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang letaknya jauh dari daratan utama (S 33)
		Berkembangnya wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas sosial-ekonomi dengan provinsi tetangga, sehingga pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sedangkan pada sisi lain mendorong berkembangnya sinergi antar provinsi. (S 34)
	Memelihara fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup (T 16)	Terpeliharanya daya dukung lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pesisir, seiring dengan terkendalikannya pencemaran lingkungan, serta rehabilitasi lahan kritis secara terus-menerus, melalui keterlibatan multipihak yang kapasitasnya memadai (S 35)
		Meningkatnya kapasitas penanganan bencana skala lintas kabupaten/kota.(S 36)
	Mengakselerasi pembangunan perkotaan dan perdesaan (T 17)	Terwujudnya kawasan perkotaan dengan akses dan jangkauan pelayanan sosial ekonomi yang memuaskan bagi masyarakatnya ( S 37)

Misi	Tujuan 2025	Sasaran 2025
		Terwujudnya perdesaan sebagai kawasan yang layak huni, berkeadilan dan berbudaya, dan fungsional dalam peningkatan produktivitas masyarakat, serta mewujudkan pusat pelayanan sosial ekonomi dan pemerintahan yang baik.(S 38))
Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional. (M5)	Merevitalisasi budaya dan kekuatan maritim Sulawesi Selatan (T 18)	<p>Kondisi peningkatan jumlah perahu/kapal yang berlabuh pada pelabuhan Sulawesi Selatan (S 39)</p> <p>Jumlah unit pertahanan/keamanan nasional yang berpangkalan di Sulawesi Selatan (S 40)</p>

**BAB V**  
**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN**  
**JANGKA PANJANG DAERAH**

**5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah**

**5.1.1. Sasaran Pokok Jangka Panjang Daerah**

Sasaran pembangunan jangka panjang dalam RPJPD ini dimaksudkan sebagai sasaran yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJPD yakni 2025. Sasaran jangka panjang ini dirumuskan untuk setiap misi, dimana setiap misi merupakan upaya untuk mewujudkan pokok visi yang relevan. Berdasarkan substansi yang termuat dalam setiap misi maka sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1.**  
**Sasaran Pokok, Indikator Kinerja Sasaran Pokok**  
**dan Target Kinerja Sasaran Pokok 2025**

<b>Visi 2005-2025:</b>			
Sulawesi Selatan Menjadi Provinsi Terkemuka Di Indonesia Dengan Pendekatan Kemandirian Lokal Yang Bernafaskan Keagamaan			
<b>Misi 1:</b>			
<b>Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan</b>			
No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2025
1.	Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Selatan sebagai dampak dari keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada berbagai level wilayah (kabupaten/kota dan provinsi) dalam berbagai upaya pembangunan. (S1)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Akselerasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kebahagiaan (IK) Sulawesi Selatan berada pada kelompok tengah-atas di antara seluruh provinsi di Indonesia (75,33)
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dengan luaran yang profesional dan memiliki mentalitas/ karakter yang mencirikan manusia Indonesia seutuhnya serta tetap berbasis pada nilai-nilai lokal Sulawesi Selatan. (S2)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah 8,0 Tahun dan Harapan Lama Sekolah 16,83 Tahun atau berada di atas rata-rata Indonesia
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mencapai dan memelihara derajat kesehatan yang tinggi dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses untuk semua	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka harapan hidup 71,44 Tahun atau berada di atas rata-rata Indonesia

	lapisan dan golongan. (S3)		
4.	Meningkatnya keterserapan angkatan kerja pada bidang pekerjaan yang berkembang dan berdaya saing secara lokal, nasional dan internasional. (S4)	Persentase Angka Pengangguran Terbuka	2,7-2,3
5.	Meningkatnya kualitas kehidupan kepemudaan dan aktivitas keolahragaan. (S5)	Persentase Jumlah Organisasi Pemuda dan Cabang Olah Raga yang Aktif	85 %
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan pada institusi keluarga, relasi gender dan perlindungan terhadap anak. (S6)	Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA)	Indeks Pembangunan Gender meningkat, dan IKA menurun
7.	Terkendalikannya pertumbuhan penduduk dalam menjamin kesejahteraan keluarga. (S7)	Persentase Rata-Rata Pertumbuhan Penduduk	0,74%
8.	Berkembangnya kebudayaan masyarakat yang memiliki karakteristik identitas sekaligus mampu adaptif-inklusif dengan kebudayaan lain. (S8)	Persentase keragaman budaya dan kekayaan budaya yang memperoleh pembinaan/pelestarian	100%
9.	Meningkatnya manifestasi spiritual, amal saleh dan pengamalan nilai dan ajaran keagamaan dalam mendukung perkembangan daerah. (S9)	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	100%
10.	Berkembangnya rasa saling percaya, harmoni antar kelompok, toleransi dan kerukunan, serta kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan dan interaksi umat beragama. (S 10)	Jumlah insiden terkait kehidupan intra dan antar umat beragama	Tidak ada insiden
<b>Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar</b>			
11.	Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah sosial budaya(S11)	Kondisi peningkatan aktivitas kelembagaan sosial-budaya (Ormas, LSM, yayasan, asosiasi) dalam masyarakat	Jumlah kelembagaan masyarakat yang berfungsi efektif sebagai wadah pembelajaran untuk penyelesaian masalah secara

			mandiri pada berbagai bidang kehidupan terus meningkat
12.	Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah ekonomi (S12)	Persentase jumlah koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang aktif	100 %
13.	Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah sosial-politik (S13)	Persentase jumlah organisasi sosial-politik, LSM, lembaga kajian yang aktif	100 %
14.	Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam perkembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi (S14)	Persentase peningkatan jumlah unit science park, technopark, asosiasi keilmuan, lembaga kajian ilmiah yang aktif	100 %
15.	Menguatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa sesuai karakteristik adat-istiadat lokal dan dinamika kemajuan desa (S15)	Jumlah desa adat yang dibina	meningkat
16.	Menguatnya kapasitas otonomi dan kerjasama daerah kabupaten/kota dalam pemecahan masalah lintas daerah (S 16)	Jumlah kerjasama dan dialog pembangunan antar kabupaten/kota yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi	Meningkatnya jumlah kerja sama dan dialog yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
17.	Efektifnya kerjasama antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain dalam pemecahan masalah lintas daerah (S 17)	Jumlah kegiatan kerja sama antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain	Meningkatnya jumlah kegiatan kerjasama antara Prov. Sul-Sel dengan Provinsi lain.
<b>Misi 3:</b>			
<b>Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif</b>			
18.	Terpeliharanya situasi dan kondisi tertib, tenteram, aman dan harmonis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kewilayahan (S 18)	Kondisi Penurunan Angka Kriminalitas dan Gangguan Kamtibmas	Indeks kriminalitas= di bawah rata-rata provinsi di Indonesia

19.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, bersih dan partisipatif ( <i>clean and good governance</i> ) (S 19)	Opini Laporan Keuangan	Opini laporan keuangan=WTP
20.	Berkembangnya sistem pelayanan yang efektif dalam pencapaian standar pelayanan minimal (S 20)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkat
Misi 4: Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan			
21.	Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat (S 21)	PDRB Per Kapita dan Gini-Ratio	Rp. 124,5 GR=0,34
22.	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S22)	Angka Kemiskinan dan persen PMKS yang terlayani	5,20-3,40
23.	Meningkatnya kualitas kedaulatan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan (S23)	Ranking Indeks ketahanan pangan	Meningkatnya Ranking Indeks Ketahanan Pangan
24.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani, peternak dan nelayan/pembudidaya ikan (S 24)	Nilai Tukar Petani (NTP)	126,0
25.	Tumbuhnya rumpun industri yang kuat dan sehat dalam lingkungan usaha yang kondusif (S 25)	Persentase kontribusi industri dan UMKM terhadap PDRB	Meningkatnya persentase kontribusi industri dalam UMKM terhadap PDRB
26.	Berkembangnya jaringan perdagangan komoditas unggulan sehingga menjangkau pasar-pasar komoditas dunia (S 26)	Volume dan nilai perdagangan dalam negeri dan ekspor	Meningkatnya.
27.	Tercukupinya sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi yang menjamin keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar-daerah (sub-wilayah) (S 27)	Persentase keman-tapan jalan, kapa-sitas/kualitas baik, dan konektivikasi	92,07%
28.	Berkembangnya sarana-prasarana perhubungan udara, laut dan darat yang menempatkan Sulawesi Selatan sebagai simpul	Persentase peningkatan jumlah penumpang yang melewati bandara, pelabuhan, dan terminal	100%

	jejaring lintasan perhubungan kawasan timur Indonesia (S 28)		
29.	Terkelolanya sumberdaya energi dan mineral dari berbagai sumber dengan pasokan daya yang mencukupi kebutuhan seluruh wilayah serta nilai ekonomi sumberdaya mineral yang mensejahterakan masyarakat (S 29)	Rasio elektrifikasi	96,32%
30.	Berkembangnya Sulawesi Selatan sebagai kesatuan kawasan komunikasi yang handal serta mendukung berkembangnya <i>e-commerce, e-government, e-learning</i> dan menjadi simpul jejaring/hub dalam layanan komunikasi di Sulawesi dan Indonesia Timur (S 30)	Persentase wilayah yang memiliki jaringan komunikasi dengan <i>bandwidth</i> yang cukup	100%
		Jumlah perusahaan seluler yang menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub dalam beroperasi	10 Operator
31.	Terwujudnya fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan dalam menjamin kebutuhan pokok hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (S 31)	Luas lahan budidaya yang terairi jaringan irigasi (Ha);	953,141 Ha
		Persentase cakupan pelayanan air minum (% rumah tangga akses air bersih)	88,2%
32.	Terlindunginya kawasan lahan pangan berkelanjutan dari konversi lahan dan degradasi lahan demi terpeliharanya kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan bagi Sulawesi Selatan sebagai daerah surplus pangan nasional (S 32)	Persentase luas lahan pangan berkelanjutan yang terlindungi	Meningkatnya persentase luas lahan pangan berkelanjutan yang terlindungi
33.	Meningkatnya akselerasi pertumbuhan dan kecukupan sarana/prasarana wilayah pada kawasan andalan cepat tumbuh serta kawasan tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang letaknya jauh dari daratan utama (S 33)	Persentase pertumbuhan ekonomi kawasan strategis nasional (Kawasan Mamminasata) dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dasar pada kawasan tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang letaknya jauh dari daratan utama	Meningkat

34.	Berkembangnya wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas sosial-ekonomi dengan provinsi tetangga, sehingga pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sedangkan pada sisi lain mendorong berkembangnya sinergi antar provinsi. (S 34)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dasar pada wilayah perbatasan.	Semakin meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasar pada wilayah perbatasan
35.	Terpeliharanya daya dukung lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pesisir, seiring dengan terkendalikannya pencemaran lingkungan, serta rehabilitasi lahan kritis secara terus-menerus, melalui keterlibatan multipihak yang kapasitasnya memadai (S 35)	Luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi;	339,885 Ha
		Indeks Mutu Lingkungan yang semakin membaik	3 DAS
36.	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana skala lintas kabupaten/kota.(S 36)	Persentase korban bencana skala provinsi yang tertangani	Berkurang
37	Terwujudnya kawasan perkotaan dengan akses dan jangkauan pelayanan sosial ekonomi yang memuaskan bagi masyarakatnya ( S 37)	Jumlah kota yang efektif berkembang sebagai kawasan yang nyaman dengan pelayanan social ekonomi yang memuaskan	Meningkatnya jumlah kota yang nyaman dengan pelayanan social ekonomi yang memuaskan
38.	Terwujudnya perdesaan sebagai kawasan yang layak huni, berkeadilan dan berbudaya, dan fungsional dalam peningkatan produktivitas masyarakat, serta mewujudkan pusat pelayanan sosial ekonomi dan pemerintahan yang baik.(S 38))	Persentase desa kualifikasi mandiri.	Persentase desa dengan kualifikasi mandiri meningkat
<b>Misi 5:</b>			
<b>Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional</b>			
39.	Berkembangnya posisi Sulawesi Selatan sebagai pilar budaya bahari dan penggerak interkoneksi maritim di Indonesia Timur (S 39)	Kondisi peningkatan jumlah perahu/kapal yang berlabuh pada pelabuhan Sulawesi Selatan	Unit kapal dan volume logistik serta barang lainnya yang diangkut dari dan menuju pelabuhan Makassar terus meningkat

40	Menguatnya posisi strategis wiayah kepulauan Sulawesi Selatan dalam mendukung ketahanan nasional (S 40)	Jumlah unit Pertahanan/keamanan nasional yang berpangkalan di Sulawesi Selatan	meningkat
----	---	--	-----------

### 5.1.2. Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah

Untuk mencapai target kinerja sasaran pokok jangka panjang daerah maka diperlukan implementasi sejumlah kebijakan. Rumusan kebijakan untuk pencapaian masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1.**

**Sasaran Pokok, Indikator Kinerja Sasaran Pokok dan Target Kinerja Sasaran Pokok 2025**

No.	Sasaran	Arah Kebijakan
<b>Misi 1: Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan</b>		
1.	Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Selatan sebagai dampak dari keterlibatan seluruh pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat) pada berbagai level wilayah (kabupaten/kota dan provinsi) dalam berbagai upaya pembangunan. (S1)	(1) Pemberian prioritas dan peletakan dasar-dasar bagi peningkatan kualitas manusia, khususnya dalam hal perekonomian dan dilanjutkan dengan pendidikan dan kesehatan; (2) Pemantapan kordinasi antar sektor dan antar kabupaten/kota dalam upaya pencapaian target-target peningkatan kualitas manusia baik terkait pendidikan dan kesehatan maupun perekonomian. (3) Akselerasi dukungan pemerintah Provinsi pada kabupaten dengan capaian pembangunan manusia yang berada di bawah rata-rata provinsi.
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan dengan luaran yang profesi-onal dan memiliki mentalitas/ karakter yang mencirikan manusia Indonesia seutuhnya serta tetap berbasis pada nilai-nilai lokal Sulawesi Selatan. (S2)	(1) Reformasi sistem pendidikan pada semua jenjang yang membentuk dasar-dasar manusia profesional yang memiliki sikap mental/watak dan moral yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal; (2) Penerapan standar pelayanan minimal pada semua jenjang pendidikan; (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan inovatif;(4) Penyediaan anggaran pendidikan yang memadai, termasuk untuk mendukung pendidikan gratis secara proporsional; (5) Pemberantasan buta aksara secara fungsional.
3.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam mencapai dan memelihara derajat kesehatan yang tinggi dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses untuk semua lapisan dan golongan.	(1) Penumbuhan dan pengembangan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik; (2) Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas, perbaikan sanitasi

No.	Sasaran	Arah Kebijakan
	(S3)	dan kesehatan lingkungan serta penyediaan air bersih; (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis antara lain dengan mengembangkan asuransi kesehatan masyarakat dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota; (4) Perwujudan standar pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan yang konsisten pada semua pihak; (5) Perbaikan gizi masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan; (6) Pengendalian angka kelahiran dan angka kematian ibu hamil dan anak balita; (7) Pengelolaan RSUD Daerah dan Unit Pelayanan Kesehatan yang professional dan berstandar tinggi.
4.	Meningkatnya keterserapan angkatan kerja pada bidang pekerjaan yang berkembang dan berdaya saing secara lokal, nasional dan internasional. (S4)	(1) Peningkatan daya saing tenaga kerja dengan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga-lembaga pendidikan keterampilan yang di-selenggarakan oleh masyarakat; (2) Peningkatan fungsi dan peran organisasi pekerja untuk dapat bermitra secara baik dengan pengusaha; (3) Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan lapangan kerja; (4) Pemberian per-lindungan kepada tenaga kerja untuk pemenuhan hak-haknya secara wajar; (5) Pengembangan Asuransi Sosial Tenaga Kerja; (6) Pengembangan wirausaha perdesaan.
5.	Meningkatnya kualitas ke-hidupan kepemudaan dan aktivitas keolahragaan. (S5)	(1) Peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, serta pembinaan mental dan spiritual pemuda; (2) Peningkatan fasilitas kegiatan kepemudaan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas; (3) Pembinaan organisasi kepemudaan yang produktif dan kreatif serta efektif dalam memberdayakan anggotanya; (4) Peningkatan sarana/prasarana olahraga yang dapat memperbaiki prestasi untuk level nasional dan internasional; (5) Pembinaan organisasi KONI dan induk cabang-cabang olahraga berprestasi; (6) Peningkatan pembibitan, pembinaan dan minat olahraga yang dilakukan secara sistematis dan terpadu.

No.	Sasaran	Arah Kebijakan
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan pada institusi keluarga, relasi gender dan perlindungan terhadap anak. (S6)	(1) Peningkatan pembinaan gerakan keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga; (2) Pembinaan kelembagaan masyarakat berbasis gender dengan menggali dan melakukan reinterpretasi, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai yang mengarah kepada kesetaraan dan keadilan; (3) Peningkatan kualitas peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam penyusunan, pelaksanaan dan penerimaan manfaat dari kebijakan pemerintah daerah serta mendukung akses secara nasional; (4) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perdagangan perempuan (trafiking), serta penerapan peraturan perundangan-undangan terkait secara baik.
7.	Terkendalikannya pertumbuhan penduduk dalam menjamin kesejahteraan keluarga. (S7)	(1) Peningkatan koordinasi pembinaan keluarga berencana; (2) Pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga; (3) Peningkatan gerakan Sayang Ibu dan Anak
8	Berkembangnya kebudayaan masyarakat yang memiliki karakteristik identitas sekaligus mampu adaptif-inklusif dengan kebudayaan lain. (S8)	(1) Penggalan dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sulawesi Selatan secara berkesinambungan melalui upaya reinterpretasi, re-aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya tradisional; (2) Pengembangan ketahanan budaya yang senantiasa serasi dan setara dengan spirit zaman, proaktif mengkaji nilai-nilai baru yang dibawa oleh pergaulan global, dan menyepadankan dengan nilai-nilai tradisional untuk mengembangkan dan memperkaya nilai-nilai dasar masyarakat Sulawesi Selatan; (3) Pengembangan kebebasan berkreasi dalam berkesenian serta menjamin adanya perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta bagi pelaku seni dan budaya; (4) Penguatan peran perguruan tinggi dan lembaga budaya/organisasi kesenian tradisional sebagai ujung tombak upaya-upaya penggalan dan pengembangan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan.

No.	Sasaran	Arah Kebijakan
9.	Meningkatnya manifestasi spiritual, amal saleh dan pengamalan nilai dan ajaran keagamaan dalam mendukung perkembangan daerah. (S9)	(1) Fasilitasi organisasi keagamaan, forum kerukunan antar umat beragama, dan tokoh-tokoh agama, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam meningkatkan peng-hayatan dan pengamalan agama secara baik; (2) Pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan serta pembinaan ekonomi umat pada keluarga yang tidak mampu.
10.	Berkembangnya rasa saling percaya, harmoni antar kelompok, toleransi dan kerukunan, serta kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan dan interaksi umat beragama. (S 10)	(1) Penguatan budaya dialogis antar tokoh agama dan pemimpin organisasi keagamaan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis dan saling menghargai; (2) Peningkatan kesadaran umat beragama untuk tidak mudah terprovokasi dalam menerima ajaran agama yang sesat, penghasut dan perusuh.
<b>Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar</b>		
11.	Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah sosial budaya(S11)	Fasilitasi penguatan kelembagaan komunitas masyarakat yang beragam (ormas, LSM, yayasan, asosiasi), sehingga tercipta komunitas yang mampu mandiri; (2) Pengembangan situasi kondusif bagi aktivitas kelompok/organisasi masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial-budaya.
12.	Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah ekonomi (S12)	(1) Peningkatan sinergitas antar pelaku ekonomi dan mendorong kemampuan adaptasi terhadap dinamika perekonomian global serta akses yang proposional bagi pelaku ekonomi terhadap sumber daya modal;(2) Pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah,dan industri kecil termasuktermasuk unitEkonomi Syariah; (3) Pengembangan kelembagaan ekonomi modern, organisasi usaha dan kelompok produktif masyarakat; (4) Fasilitasi berkembangnya kelembagaan masya-rakat yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi maraknya upaya kreatif-inovatif pada bidang teknologi dan manajemen industrial yang diperlukan untuk mempercepat per-tumbuhan perekonomian daerah; (5) Pergeseran struktur

No.	Sasaran	Arah Kebijakan
		<p>perekonomian menuju perekonomian berbasis pengetahuan (<i>knowledge-based economy</i>) dan teknologi; (6) Pemeliharaan iklim investasi yang baik, termasuk fasilitasi ketersediaan tanah bagi investasi pada berbagai bidang.</p>
13.	<p>Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah sosial-politik (S13)</p>	<p>(1) Penguatan peran masyarakat sipil dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis; (2)Fasilitasi partai politik dalam membangun budaya politik sesuai nilai-nilai dasar Pancasila dan tatanan budaya lokal; (3) Pemeliharaan tatanan kehidupan sosial yang kondusif dan tanggap terhadap berbagai kerawanan dan kerentanan sosial.</p>
14.	<p>Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam perkembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi (S14)</p>	<p>(1) Pengembangan penelitian kebijakan, penelitian terapan dan riset daerah; (2) Fasilitasi pembangunan pusat-pusat penelitian dan pemanfaatan iptek pada kabupaten/kota; (3) Penguatan Dewan Riset Daerah sebagai mediator yang menjamin terwujudnya sinergitas antar lembaga iptek daerah dan nasional atau bahkan internasional; (4) Fasilitasi pengembangan science-park dan techno-park; (5)Fasilitasi terwujudnya masyarakat melek iptek antara lain melalui upaya pengenalan iptek sejak dini pada generasi muda.</p>
15.	<p>Menguatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa sesuai karakteristik adat-istiadat lokal dan dinamika kemajuan desa (S15)</p>	<p>(1) Penguatan teknostruktur (kelembagaan dan teknologi) masyarakat desa dalam menunjang peningkatan kapasitas/kualifikasi desa; (2) Pembinaan dan pengembangan desa adat dan komunitasnya; (3) Penataan pemerintahan desa.</p>
16.	<p>Menguatnya kapasitas otonomi dan kerjasama daerah kabupaten/kota dalam pemecahan masalah lintas daerah (S 16)</p>	<p>(1) Peningkatan koordinasi antar kabupaten/kota dalam pencapaian target-target pembangunan nasional; (2) Pengembangan kerjasama lintas kabupaten/kota.</p>
17.	<p>Efektifnya kerjasama antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain dalam pemecahan masalah lintas daerah (S 17)</p>	<p>Pengembangan kerjasama pembangunan antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain.</p>
<p><b>Misi 3:</b> <b>Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif</b></p>		
18.	<p>Terpeliharanya situasi dan kondisi tertib, tenteram, aman dan harmonis dalam kehidupan sosial</p>	<p>(1) Pengembangan sistem penanganan terpadu (pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat) dalam penanganan gangguan</p>

No.	Sasaran	Arah Kebijakan
	kemasyarakan dan kewilayahan (S 18)	ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat; (2) Pengembangan sistem pengamanan dan perlindungan masyarakat secara swakarsa pada tataran desa/kelurahan yang sepenuhnya di bawah bimbingan pemerintah desa/kelurahan serta dibina secara teknis oleh aparat keamanan setempat; (3) Pengembangan sistem deteksi dini potensi konflik sosial.
19.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, bersih dan partisipatif ( <i>clean and good governance</i> ) (S 19)	(1) Pengembangan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk mendukung proses perumusan kebijakan yang mengedepankan aspirasi masyarakat;(2) Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.(3) Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah.
20.	Berkembangnya sistem pelayanan yang efektif dalam pencapaian standar pelayanan minimal (S 20)	(1) Perwujudan kelembagaan pemerintah dengan paradigma yang mengedepankan pelayanandibandingpengendaliandengan mengacu pada kepuasan masyarakat terhadap pencapaian standar pelayanan minimal; (2) Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa basis profesionalisme adalah kompetensi dan kapasitas belajar yang didasarkan pada etika dan moral yang tinggi.
<b>Misi 4: Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan</b>		
21.	Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat (S 21)	(1) Penguatan basis-basis ekonomi kerakyatan dalam pemanfaatan potensi-potensi perekonomian masyarakat dengan teknologi dan manajemen; (2) Peningkatan akses masyarakat kepada aset produktif serta revitalisasi lembaga ekonomi masyarakat kecil; (3) Pengembangan jalur-jalur pemerataan dalam hal peluang kerja dan peluang usaha; (4) Pengembangan sistem upah kerja yang mendorong peningkatan pendapatan pekerja.
22.	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (S22)	(1) Peningkatan kordinasi SKPD pro-vinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan daerah; (2) Penajaman implementasi program pada

No.	Sasaran	Arah Kebijakan
		kabupaten/kota yang angka kemiskinannya paling tinggi; (3) Pelibatan secara efektif dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial korporasi; (4) Peningkatan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) baik oleh pemerintah daerah maupun secara berkolaborasi dengan unsure masyarakat.
23.	Meningkatnya kualitas ke-daulatan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan (S23)	(1) Peningkatan kordinasi dalam distribusi untuk keterjangkauan pangan yang baik secara merata pada seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan pemenuhan pangan provinsi lain; (2) Promosi diversifikasi pangan dalam pencapaian pola pangan harapan; (3) Pelibatan multipihak dalam penanganan keamanan pangan.
24.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani, peternak dan nelayan/pembudidaya ikan (S 24)	(1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui keterpenuhan sarana produksi dan dukungan penyuluhan untuk akses teknologi; (2) Penguatan akses pasar dengan daya saing harga yang tinggi bagi produk petani, peternak dan nelayan; (3) Penguatan kelembagaan petani, peternak dan nelayan.
25.	Tumbuhnya rumpun industri yang kuat dan sehat dalam lingkungan usaha yang kondusif (S 25)	(1) Penciptaan lingkungan usaha yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui pengembangan rantai pertambahan nilai dalam diversifikasi produk; (2) hilirisasi produk unggulan untuk pengembangan industri strategis;(3) penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung.
26.	Berkembangnya jaringan perdagangan komoditas unggulan sehingga menjangkau pasar-pasar komoditas dunia (S 26)	(1) Penciptaan nilai tambah produk komoditas perdagangan yang didukung oleh peningkatan SDM, teknologi informasi, dan distribusi yang lancar;(2) Pengembangan kerjasama regional dan promosi perdagangan.
27.	Tercukupinya sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung kegiatan sosial- ekonomi yang menjamin keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar-	(1) Pemeliharaan jalan dan jembatan dalam menjamin konektivitas antar sub-wilayah di Sulawesi Selatan; (2) Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan khususnya pada jalur interkoneksi antar wilayah yang

No.	Sasaran	Arah Kebijakan
	daerah (sub-wilayah) (S 27)	penggunanya sudah sangat padat;(3) Pengembangan jaringan transportasi kereta apidalam mengakselerasi pereknomian Sulawesi Selatan dan lintas Sulawesi.
28.	Berkembangnya sarana-pra-sarana perhubungan udara, laut dan darat yang menempatkan Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring lintasan perhubungan kawasan timur Indonesia (S 28)	(1) Pengembangan sarana/prasarana perhubungan darat dalam mendukung mobilitas penumpang dan pergerakan barang lintas kabupaten/kota; (2) Pengembangan sarana-prasarana ban-dara bertaraf internasional yang bisa menampung dengan baik pertumbuhan penumpang; (3) Pengembangan sarana-prasarana pelabuhan yang dapat mengakselerasi posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat interkoneksi logistik di kawasan Timur Indonesia.
29.	Terkelolanya sumberdayaenergi dan mineral dari berbagai sumber dengan pasokan daya yang mencukupi kebutuhan seluruh wilayah serta nilai ekonomi sumberdaya mineral yang mensejahterakan masyarakat (S 29)	(1) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik; (2) Pengembangan sumber energi listrik alternatif (PLTMH, energi bayu) terbarukan; (3) Pengelolaan pertambang-an berorientasi pengolahan secara berkelanjutan.
30.	Berkembangnya Sulawesi Selatan sebagai kesatuan kawasan komunikasi yang handal serta mendukung berkembangnya <i>e-commerce, e-government, e-learning</i> dan menjadi simpul jejaring/hub dalam layanan komunikasi di Sulawesi dan Indonesia Timur (S 30)	(1) Fasilitasi penyedia jasa layanan telekomunikasi untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub bagi jaringan pelayanan telekomunikasi; (2) Fasilitasi berkembangnya kota cerdas ( <i>smart city</i> ) di Sulawesi Selatan; (3) Fasilitasi berkembangnya <i>e-commerce, e-government, e-learning</i> , dan jenis pelayanan lainnya yang berbasis komunikasi elektronik.
31.	Terwujudnya fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan dalam menjamin kebutuhan pokok hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (S 31)	(1) Pembangunan waduk/bendungan dan jaringan irigasi baru sesuai kapasitas dukungan sumberdaya air pada wilauah hulu; (2) Pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada dengan orientasi pada efektivitas pemanfaatan air secara bersinergi dengan teknologi budidaya padi sawah; (3) Penataan komprehensif terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya air terutama dalam menjamin keberlanjutan keterpenuhan kebutuhan air perkotaan.
32.	Terlindunginya kawasan lahan pangan berkelanjutan dari konversi lahan dan degradasi lahan demi	(1) Penetapan luas dan lokasi kawasan lahan pangan berkelanjutan dan cadanga lahan berkelanjutan dalam RTRW; (2) Perlindungan

No.	Sasaran	Arah Kebijakan
	terpeliharanya kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan bagi Sulawesi Selatan sebagai daerah surplus pangan nasional (S 32)	terhadap lahan pangan berkelanjutan melalui mekanisme insentif dan disinsentif; (3) pemanfaatan secara lestari atas lahan pangan berkelanjutan;(4) kordinasi kabupaten/kota dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
33.	Meningkatnya akselerasi pertumbuhan dan kecukupan sarana/prasarana wilayah pada kawasan andalan cepat tumbuh serta kawasan tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang letaknya jauh dari daratan utama (S 33)	(1) Penjabaran rencana pengembangan kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu ke dalam RTRW Provinsi secara konsisten; (2) Pemberian fasilitasi bagi investasi sektor swasta pada kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu; (3) Kordinasi dan fasilitasi akselerasi capaian kinerja pembangunan pada kawasan tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang jauh dari daratan utama.
34.	Berkembangnya wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas sosial-ekonomi dengan provinsi tetangga, sehingga pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sedangkan pada sisi lain mendorong berkembangnya sinergi antar provinsi. (S 34)	(1) Penataan kondisi fisik wilayah perbatasan dengan provinsi lain agar secara simbolik mencitrakan kemajuan provinsi Sulawesi Selatan kepada provinsi tetangga; (2) Pengembangan ekonomi lokal masyarakat pada wilayah perbatasan; (3) Pengembangan kerjasama dan sinergi pembangunan antar provinsi pada wilayah perbatasan.
35.	Terpeliharanya daya dukung lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pesisir, seiring dengan pencemaran lingkungan yang terkendalikan,serta rehabilitasi lahan kritis secara terus-menerus, melalui keterlibatan multipihak yang kapasitasnyamemadai (S 35)	(1) Pengendalian pencemaran melalui pemantauan terhadap kondisi tanah, air dan udara, penerapan standar pengelolaan lingkungan pada kawasan-kawasan yang peka terhadap kerusakan lingkungan, implementasi rekomendasi Amdal terhadap penyelenggaraan proyek pembangunan, dan penegakan hukum lingkungan yang konsisten; (2) Rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan serta pengembangan jasa lingkungan pada wilayah yang memungkinkan.(3) Fasilitasi dan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pemeliharaan dan pemulihan kondisi ekologis daerah aliran sungai serta danau dan kawasan pesisir; (4) Peningkatan kapasitas multipihak dalam pelaksanaan pencegahan,penyelamatan, dan perbaikan kerusakan lingkungan.
36.	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana skala lintas kabupaten/kota.(S 36)	(1) Pemetaan lokasi/wilayah rawan bencana untuk berbagai jenis bencana utama yang sering terjadi di Sulawesi Selatan; (2) Peningkatan

No.	Sasaran	Arah Kebijakan
		kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder masyarakat dan swasta dalam deteksi dini bencana, penanganan saat bencana dan pemulihan pasca bencana; (3) Penyediaan secara cukup sarana/prasarana dan logistik dalam menghadapi tanggap darurat bencana.
37.	Terwujudnya kawasan per-kotaan dengan akses dan jangkauan pelayanan sosial ekonomi yang memuaskan bagi masyarakatnya ( S 37)	(1) Pemberian dukungan bagi per-kembangan ibukota kabupaten dan kota dalam akselerasi kemajuan untuk layanan pendidikan khususnya pendidikan tinggi, layanan kesehatan yang memuaskan serta keterpenuhan unsur-unsur bagi perkembangan sektor jasa dan perdagangan; (2) Fasilitasi pengembang-an kota cerdas dan masyarakat kota berbasis pengetahuan ( <i>knowledge based society</i> ).
38.	Terwujudnya perdesaan se-bagai kawasan yang layak huni, berkeadilan dan berbudaya, dan fungsional dalam peningkatan produk-tivitas masyarakat, serta mewujudkan pusat pelayanan sosial ekonomi dan pemerintahan yang baik.(S 38))	(1) Dukungan pengembangan sarana-prasarana kawasan perdesaan dalam menunjang pemanfaatan potensi spesifik kawasan dan daya tarik kawasan perdesaan dalam menahan laju urbanisasi; (2) Dukungan pengembang-an interaksi perdesaan-perkotaan serta pertumbuhan kawasan agropolitan dan minapolitan.
<b>Misi 5: Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional</b>		
39.	Berkembangnya posisi Sulawesi Selatan sebagai pilar budaya bahari dan penggerak interkoneksi maritim di Indonesia Timur (S 39)	(1) Penggalian dan revitalisasi nilai-nilai serta kearifan lokal kebaharian serta mempromosikannya dalam kancah jagad maritim nusantara; (2) Revitalisasi dan penguatan jalur-jalur perkapalan/pe-layaran niaga Bugis-Makassar dalam mendukung pergerakan logistik Nusantara.
40.	Menguatnya posisi strategis wiayah kepulauan Sulawesi Selatan dalam mendukung ketahanan nasional (S 40)	(1) Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang diarahkan untuk mendukung ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pada pulau-pulau di Sulawesi Selatan; (2) Pemberian dukungan kepada kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dalam operasi strategis pertahanan dan keamanan NKRI.

## 5.2. Tahapan dan Prioritas

### 5.2.1. Arah Pembangunan pada Setiap Tahapan

#### (1) Arah Pembangunan Lima Tahun Pertama (2005-2009)

Dari segi perencanaan pembangunan, tahap ini merupakan periode awal berlakunya UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga banyak diwarnai dengan konsolidasi dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan Resntra SKPD) berdasarkan UU tersebut, termasuk dalam keterkaitannya dokumen perencanaan nasional (RPJPN, RPJMN, dan Renstra Kementerian/Lembaga). Di Sulawesi Selatan, pembangunan lima tahun pertama diarahkan untuk meletakkan dasar-dasar untuk mendorong kemajuan pembangunan bagi tahapan-tahapan berikutnya. Perwujudan visi dan pelaksanaan misi terkerangkakan dalam cara pikir peletakan dasar-dasar perubahan tersebut.

Secara garis besar, upaya umum pembangunan yang dijalankan pada tahap ini mencakup (1) Pengembangan ekonomi kerakyataan; (2) Pengembangan kehidupan mental spiritual masyarakat; (3) Pembangunan infrastruktur wilayah; (4) Pembangunan pendidikan dan kesehatan; (5) Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (6) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Misi-1 RPJPD yakni “Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan” dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pemberian prioritas dan peletakan dasar-dasar bagi peningkatan kualitas manusia, khususnya dalam hal perekonomian dan dilanjutkan dengan pendidikan dan kesehatan; (2) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan inovatif; (3) Pemberantasan buta aksara secara fungsional. (4) Penumbuhan dan pengembangan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik; (5) Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas, perbaikan sanitasi dan kesehatan lingkungan serta penyediaan air bersih; (6) Perbaikan gizi masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan; (7) Pengendalian angka kelahiran dan angka kematian ibu hamil dan anak balita; (8) Peningkatan fungsi dan peran organisasi pekerja untuk dapat bermitra secara baik dengan pengusaha; (9) Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja untuk pemenuhan hak-haknya secara wajar; (10) Pengembangan wirausaha perdesaan; (11) Peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, serta pembinaan mental dan spiritual pemuda; (12) Peningkatan fasilitas kegiatan kepemudaan untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas; (14) Peningkatan sarana/prasarana olahraga yang dapat memperbaiki prestasi untuk level nasional dan internasional; (15) Peningkatan pembinaan gerakan keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga; (16) Peningkatan kordinasi pembinaan keluarga berencana; (17) Penggalan dan pengembangan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sulawesi Selatan secara berkesinambungan melalui upaya reinterpretasi, re-aktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya tradisional; (18) Pengembangan ketahanan budaya yang senantiasa serasi dan setara dengan spirit zaman, proaktif mengkaji nilai-nilai baru yang dibawa oleh pergaulan global, dan menyepadankan dengan nilai-nilai tradisional untuk mengembangkan dan memperkaya nilai-nilai dasar masyarakat Sulawesi Selatan; (19) Fasilitasi organisasi keagamaan, forum kerukunan antar ummat beragama, dan tokoh-tokoh agama, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam meningkatkan peng-hayatan dan pengamalan agama secara baik; (20) Pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan serta membina ekonomi ummat pada keluarga yang tidak mampu; (21) Penguatan budaya

dialogis antar tokoh agama dan pemimpin organisasi keagamaan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis dan saling menghargai.

Misi-2RPJPD yakni "Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pemeliharaan situasi kondusif bagi aktivitas kelompok/organisasi yang bergerak dalam kehidupan sosial-budaya; (2) Peningkatan sinergitas antar pelaku ekonomi dan mendorong kemampuan adaptasi terhadap dinamika perekonomian global serta akses yang proposional bagi pelaku ekonomi terhadap sumber daya modal; (3) Pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan industri kecil termasuk termasuk unit Ekonomi Syariah; (4) Pemeliharaan iklim investasi yang baik, termasuk fasilitasi ketersediaan tanah bagi investasi pada berbagai bidang; (5) Fasilitasi partai politik dalam membangun budaya politik sesuai nilai-nilai dasar Pancasila dan tatanan budaya lokal; (6) Pemeliharaan tatanan kehidupan sosial yang kondusif dan tanggap terhadap berbagai kerawanan dan kerentanan sosial; (7) Pengembangan penelitian kebijakan, penelitian terapan dan riset daerah; (8) Penguatan Dewan Riset Daerah sebagai mediator yang menjamin terwujudnya sinergitas antar lembaga iptek daerah dan nasional atau bahkan internasional; (9) Penguatan teknostruktur (kelembagaan dan teknologi tepat guna) masyarakat desa dalam menunjang peningkatan kapasitas/kualifikasi desa; (10) Pengembangan kerjasama lintas kabupaten/kota; (11) Pengembangan kerjasama pembangunan antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain.

Misi 3 RPJPD yakni "Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pengembangan sistem penanganan terpadu (pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat) dalam penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat; (2) Pengembangan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk mendukung proses perumusan kebijakan yang mengedepankan aspirasi masyarakat; (3) Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa basis profesionalisme adalah kompetensi dan kapasitas belajar yang di dasarkan pada etika dan moral yang tinggi.

Misi 4 RPJPD yakni "Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Penguatan basis-basis ekonomi kerakyatan dalam pemanfaatan potensi-potensi perekonomian masyarakat dengan perbaikan teknologi dan manajemen; (2) Peningkatan kordinasi SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan daerah; (3) Promosi diversifikasi pangan dalam pencapaian pola pangan harapan; (4) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui keterpenuhan sarana produksi dan dukungan penyuluhan untuk akses teknologi; (5) Penguatan kelembagaan petani, peternak dan nelayan. (6) Penciptaan lingkungan usaha yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui pengembangan rantai pertambahan nilai dalam diversifikasi produk; (7) Penciptaan nilai tambah produk komoditas perdagangan yang didukung oleh peningkatan SDM, teknologi informasi, dan distribusi yang lancar; (8) Pemeliharaan jalan dan jembatan dalam menjamin konektivitas antar sub-wilayah di Sulawesi Selatan; (9) Pengembangan sarana/prasarana perhubungan darat dalam mendukung mobilitas penumpang dan pergerakan barang lintas kabupaten/kota; (10) Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik; (11) Pengelolaan pertambangan berorientasi pengolahan secara berkelanjutan. (12) Fasilitasi berkembangnya *e-commerce, e-government, e-learning*, dan jenis

pelayanan lainnya yang berbasis komunikasi elektronik; (13) Pemeliharaan jaringan irigasi dengan orientasi pada efektivitas pemanfaatan air secara bersinergi dengan teknologi budidaya padi sawah; (14) Penjabaran rencana pengembangan kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu ke dalam RTRW Provinsi secara konsisten; (15) Penataan kondisi fisik wilayah perbatasan dengan provinsi lain agar secara simbolik mencitrakan kemajuan provinsi Sulawesi Selatan kepada provinsi tetangga; (16) Pengendalian pencemaran melalui pemantauan terhadap kondisi tanah/air/udara, penerapan standar pengelolaan lingkungan pada kawasan-kawasan yang peka terhadap kerusakan lingkungan, implementasi rekomendasi Amdal terhadap penyelenggaraan proyek pembangunan, dan penegakan hukum lingkungan yang konsisten; (17) Rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan serta pengembangan jasa lingkungan pada wilayah yang memungkinkan. (18) Penyediaan secara cukup sarana/prasarana dan logistik dalam menghadapi tanggap darurat bencana; (19) Dukungan pengembangan sarana-prasarana kawasan perdesaan dalam menunjang pemanfaatan potensi spesifik kawasan.

Misi 5 RPJPD yakni "Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Penggalan dan revitalisasi nilai-nilai serta kearifan lokal kebaharian serta mempromosikannya dalam kancah jagad maritim nusantara; (2) Pemberian dukungan kepada kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dalam operasi strategis pertahanan dan keamanan NKRI.

Keseluruhan kebijakan prioritas pada masing-masing misi diarahkan untuk berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja sasaran pokok yang bersesuaian dengan kebijakan tersebut. Penetapan target kinerja sasaran pokok untuk tahap 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel sasaran pokok setiap tahapan RPJPD ini.

## **(2) Arah Pembangunan Lima Tahun Kedua (2010-2014)**

Pembangunan lima tahun tahap kedua diarahkan kepada pemenuhan hak dasar masyarakat yang diukur dengan laju peningkatan capaian IPM dalam memperbaiki ranking IPM Sulawesi Selatan dibanding dengan provinsi lain. Pemenuhan hak dasar dimaksud adalah pemberian fasilitas kepada masyarakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah provinsi berupa pelayanan pembangunan dan regulasi.

Secara garis besar upaya umum pembangunan yang dijalankan pada tahap ini yakni: (1) Meningkatkan kualitas pelayanan untuk pemenuhan hak dasar masyarakat yang meliputi ketersediaan pangan terjangkau dan aman; layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas; layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas; kesempatan kerja dan lapangan usaha; layanan perumahan dan sanitasi; akses air bersih; kepastian pemilikan dan penguasaan tanah; sumberdaya alam dan lingkungan hidup; rasa aman dan tenteram; partisipasi dalam kehidupan sosial-politik; (2) Mengakselerasi laju peningkatan dan pemerataan kesejahteraan melalui penguatan ekonomi berbasis masyarakat; (3) Mewujudkan keunggulan lokal untuk memicu laju pertumbuhan ekonomi wilayah; (4) Menciptakan iklim kondusif bagi kehidupan yang inovatif; (5) Memperkuat kelembagaan dalam perwujudan tatakelola yang baik.

Misi-1 RPJPD yakni "Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pemantapan koordinasi antar sektor dan antar kabupaten/kota dalam upaya pencapaian target-target peningkatan kualitas manusia baik terkait pendidikan dan kesehatan maupun perekonomian; (2) Penerapan standar pelayanan minimal pada semua jenjang pendidikan; (3) Penyediaan anggaran pendidikan yang memadai, termasuk untuk mendukung pendidikan gratis

secara proporsional; (4) Pemberantasan buta aksara secara fungsional; Penumbuhan dan pengembangan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik; (5) Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas, perbaikan sanitasi dan kesehatan lingkungan serta penyediaan air bersih; (6) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis antara lain dengan mengembangkan asuransi kesehatan masyarakat dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota; (7) Perwujudan standar pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan yang konsisten pada semua pihak; (8) Perbaikan gizi masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan; (9) Pengendalian angka kelahiran dan angka kematian ibu hamil dan anak balita; (10) Peningkatan daya saing tenaga kerja dengan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga-lembaga pendidikan keterampilan yang di-selenggarakan oleh masyarakat; (11) Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan dan lapangan kerja; (12) Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja untuk pemenuhan hak-haknya secara wajar; (13) Pembinaan organisasi kepemudaan yang produktif dan kreatif serta efektif dalam memberdayakan anggotanya; (14) Peningkatan sarana/prasarana olahraga yang dapat memperbaiki prestasi untuk level nasional dan internasional; (15) Peningkatan pembibitan, pembinaan dan minat olahraga yang dilakukan secara sistematis dan terpadu; (16) Peningkatan kualitas peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam penyusunan, pelaksanaan dan penerimaan manfaat dari kebijakan pemerintah daerah serta mendukung akses secara nasional; (17) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perdagangan perempuan (trafiking), serta penerapan peraturan perundangan-undangan terkait secara baik; (18) Pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga; (19) Peningkatan gerakan Sayang Ibu dan Anak; (20) Pengembangan ketahanan budaya yang senantiasa serasi dan setara dengan spirit zaman, proaktif mengkaji nilai-nilai baru yang dibawa oleh pergaulan global, dan menyepadankan dengan nilai-nilai tradisional untuk mengembangkan dan memperkaya nilai-nilai dasar masyarakat Sulawesi Selatan; (21) Pengembangan kebebasan berkreasi dalam berkesenian serta menjamin adanya perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta bagi pelaku seni dan budaya; (22) Fasilitasi organisasi keagamaan, forum kerukunan antar ummat beragama, dan tokoh-tokoh agama, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam meningkatkan peng-hayatan dan pengamalan agama secara baik; (23) Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan serta membina ekonomi ummat pada keluarga yang tidak mampu; (24) Penguatan budaya dialogis antar tokoh agama dan pemimpin organisasi keagamaan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis dan saling menghargai.

Misi-2 RPJPD yakni "Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Fasilitasi penguatan kelembagaan komunitas masyarakat yang beragam (ormas, LSM, yayasan, asosiasi), sehingga tercipta komunitas yang mampu mandiri; (2) Peningkatan sinergitas antar pelaku ekonomi dan mendorong kemampuan adaptasi terhadap dinamika perekonomian global serta akses yang proposional bagi pelaku ekonomi terhadap sumber daya modal; (3) Pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan industri kecil termasuk unit Ekonomi Syariah; (4) Fasilitasi berkembangnya kelembagaan masyarakat yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi maraknya upaya kreatif-inovatif pada bidang teknologi dan manajemen industrial yang diperlukan untuk mempercepat per-tumbuhan perekonomian daerah; (5) Pemeliharaan iklim investasi yang baik, termasuk fasilitasi ketersediaan tanah bagi investasi pada berbagai bidang; (6) Penguatan peran masyarakat sipil dalam

menciptakan kehidupan politik yang demokratis; (7) Fasilitasi partai politik dalam membangun budaya politik sesuai nilai-nilai dasar Pancasila dan tatanan budaya lokal; (8) Pengembangan penelitian kebijakan, penelitian terapan dan riset daerah; (9) Fasilitasi pembangunan pusat-pusat penelitian dan pemanfaatan iptek pada kabupaten/kota; (10) Fasilitasi terwujudnya masyarakat melek iptek antara lain melalui upaya pengenalan iptek sejak dini pada generasi muda; (11) Penguatan teknostruktur (kelembagaan dan teknologi) masyarakat desa dalam menunjang peningkatan kapasitas/kualifikasi desa; (12) Penataan pemerintahan desa; (13) Pengembangan kerjasama lintas kabupaten/kota; (14) Pengembangan kerjasama pembangunan antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain.

Misi 3 RPJPD yakni “Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif” dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pengembangan sistem penanganan terpadu (pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat) dalam penanganan gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan masyarakat; (2) Pengembangan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk mendukung proses perumusan kebijakan yang mengedepankan aspirasi masyarakat; (3) Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Perwujudan kelembagaan pemerintahan dengan paradigma yang mengedepankan pelayanandibandingpengendalian dengan mengacu pada kepuasan masyarakat terhadap pencapaian standar pelayanan minimal; (4) Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa basis profesionalisme adalah kompetensi dan kapasitas belajar yang di dasarkan pada etika dan moral yang tinggi.

Misi 4 RPJPD yakni “Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan” dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1)Penguatan basis-basis ekonomi kerakyatan dalam pemanfaatan potensi-potensi perekonomian masyarakat dengan teknologi dan manajemen; (2) Peningkatan akses masyarakat kepada aset produktif serta revitalisasi lembaga ekonomi masyarakat kecil; (3) Pengembangan sistem upah kerja yang mendorong peningkatan pendapatan pekerja; (4) Peningkatan kordinasi SKPD provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penanggulangan kemiskinan daerah; (5) Peningkatan kordinasi dalam distribusi untuk keterjangkauan pangan yang baik secara merata pada seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan pemenuhan pangan provinsi lain; (6) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui keterpenuhan sarana produksi dan dukungan penyuluhan untuk akses teknologi; (7) Penguatan akses pasar dengan daya saing harga yang tinggi bagi produk petani, peternak dan nelayan; (8) Penguatan kelembagaan petani, peternak dan nelayan; (9) Penciptaan lingkungan usaha yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui pengembangan rantai pertambahan nilai dalam diversifikasi produk; (10) proses hilirisasi produk unggulan untuk pengembangan industri strategis;(11) Penciptaan nilai tambah produk komoditas perdagangan yang didukung oleh peningkatan SDM, teknologi informasi, dan distribusi yang lancar; (12) Pengembangan kerjasama regional dan promosi perdagangan; (13) Pemeliharaan jalan dan jembatan dalam menjamin konektivitas antar sub-wilayah di Sulawesi Selatan; (14) Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan khususnya pada jalur interkoneksi antar wilayah yang penggunaanya sudah sangat padat; (15)Pengembangan sarana/prasarana perhubungan darat dalam mendukung mobilitas penumpang dan pergerakan barang lintas kabupaten/kota; (16) Pengembangan sarana-prasarana bandara bertaraf internasional yang bisa menampung dengan baik pertumbuhan penumpang; (17)

Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik; (18) Pengelolaan pertambangan berorientasi pengolahan secara berkelanjutan; (19) Fasilitasi penyedia jasa layanan telekomunikasi untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub bagi jaringan pelayanan telekomunikasi; (20) Pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada dengan orientasi pada efektivitas pemanfaatan air secara bersinergi dengan teknologi budidaya padi sawah; (21) Penjabaran rencana pengembangan kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu ke dalam RTRW Provinsi secara konsisten; (22) Pemberian fasilitasi bagi investasi sektor swasta pada kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu; (23) Pengembangan ekonomi lokal masyarakat pada wilayah perbatasan; (24) Pengembangan kerjasama dan sinergi pembangunan antar provinsi pada wilayah perbatasan; (25) Pengendalian pencemaran melalui pemantauan terhadap kondisi tanah, air dan udara, penerapan standar pengelolaan lingkungan pada kawasan-kawasan yang peka terhadap kerusakan lingkungan, implementasi rekomendasi Amdal terhadap penyelenggaraan proyek pembangunan, dan penegakan hukum lingkungan yang konsisten; (26) Rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan serta pengembangan jasa lingkungan pada wilayah yang memungkinkan; Pemetaan lokasi/wilayah rawan bencana untuk berbagai jenis bencana utama yang sering terjadi di Sulawesi Selatan; (27) Penyediaan secara cukup sarana/prasarana dan logistik dalam menghadapi tanggap darurat bencana; (28) Pemberian dukungan bagi perkembangan ibukota kabupaten dan kota dalam akselerasi kemajuan untuk layanan pendidikan khususnya pendidikan tinggi, layanan kesehatan yang memuaskan, serta keterpenuhan unsur-unsur bagi perkembangan sektor jasa dan perdagangan; (29) Dukungan pengembangan sarana-prasarana kawasan perdesaan dalam menunjang pemanfaatan potensi spesifik kawasan dan daya tarik kawasan perdesaan dalam menahan laju urbanisasi.

Misi 5 RPJPD yakni "Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Penggalan dan revitalisasi nilai-nilai serta kearifan lokal kebaharian serta mempromosikannya dalam kancah jagad maritim nusantara; (2) Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang diarahkan untuk mendukung ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pada pulau-pulau di Sulawesi Selatan; (3) Pemberian dukungan kepada kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dalam operasi strategis pertahanan dan keamanan NKRI.

Keseluruhan kebijakan prioritas pada masing-masing misi ini diarahkan untuk berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja sasaran pokok yang bersesuaian dengan kebijakan tersebut. Penetapan target kinerja sasaran pokok untuk tahap 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel sasaran pokok setiap tahapan RPJPD ini. Pencapaian atas target kinerja sasaran pokok tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan prioritas pada periode berikutnya.

### **(3) Arah Pembangunan Lima Tahun Ketiga (2015-2019)**

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan pada lima tahun tahap kedua (2010-2014) yang fokusnya pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang dijalankan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal layanan pendidikan dan kesehatan, maka arah pembangunan lima tahun ketiga beranjak dari capaian-capaian tersebut. Bila pembangunan lima tahun tahap kedua memprioritaskan pelayanan hak-hak dasar masyarakat, maka pembangunan lima tahun tahap ketiga memprioritaskan loncatan dalam perekonomian, khususnya dalam capaian PDRB perkapita, yang dengan

itu capaian berbagai aspek pembangunan lainnya diharapkan memposisikan Sulawesi Selatan sebagai pilar pembangunan nasional dan simpul jejaring dalam dinamika perubahan kawasan timur Indonesia atau bahkan luar Jawa. Ini merupakan konsekuensi logis dari capaian pembangunan tahap sebelumnya yang berhasil mendorong perbaikan kualitas manusia dan pertumbuhan ekonomi.

Upaya umum yang diprioritaskan pada pembangunan lima tahun ketiga berkisar pada pengembangan kehidupan religious dan kerukunan antar dan intra umat beragama, dimana upaya ini merupakan substansi landasan bagi perubahan yang diamanahkan oleh visi RPJPD ini. Upaya umum lainnya adalah meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan; meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global; meningkatkan kualitas demokrasi dan kepastian hukum; meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan kesatuan bangsa; dan meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Misi-1 RPJPD yakni "Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pemantapan koordinasi antar sektor dan antar kabupaten/kota dalam upaya pencapaian target-target peningkatan kualitas manusia baik terkait pendidikan dan kesehatan maupun perekonomian; (2) Akselerasi dukungan pemerintah Provinsi pada kabupaten dengan capaian pembangunan manusia yang berada di bawah rata-rata provinsi; (3) Reformasi sistem pendidikan pada semua jenjang yang membentuk dasar-dasar manusia profesional yang memiliki sikap mental/watak dan moral yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan budaya lokal; (4) Penerapan standar pelayanan minimal pada semua jenjang pendidikan; (5) Penyediaan anggaran pendidikan yang memadai, termasuk untuk mendukung pendidikan gratis secara proporsional dan pemberian beasiswa pendidikan tinggi; (6) Pemberantasan buta aksara secara fungsional; (7) Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas, perbaikan sanitasi dan kesehatan lingkungan serta penyediaan air bersih; (8) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis antara lain dengan mengembangkan asuransi kesehatan masyarakat dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota; (9) Perwujudan standar pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan yang konsisten pada semua pihak; (10) Perbaikan gizi masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan; (11) Pengelolaan RSUD Daerah dan Unit Pelayanan Kesehatan yang profesional dan berstandar tinggi; (12) Peningkatan daya saing tenaga kerja dengan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga-lembaga pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat; (13) Pengembangan Asuransi Sosial Tenaga Kerja; (14) Pengembangan wirausaha perdesaan; (15) Peningkatan sarana/prasarana olahraga yang dapat memperbaiki prestasi untuk level nasional dan internasional; (16) Pembinaan organisasi KONI dan induk cabang-cabang olahraga berprestasi; (17) Pembinaan kelembagaan masyarakat berbasis gender dengan menggali dan melakukan reinterpretasi, reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai yang mengarah kepada kesetaraan dan keadilan; (18) Peningkatan kualitas peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam penyusunan, pelaksanaan dan penerimaan manfaat dari kebijakan pemerintah daerah serta mendukung akses secara nasional; (19) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perdagangan perempuan (trafiking), serta penerapan peraturan perundangan-undangan terkait secara baik; (20) Pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga; (21) Peningkatan gerakan Sayang Ibu dan Anak; (22) Pengembangan ketahanan budaya yang senantiasa serasi dan setara dengan spirit zaman, proaktif mengkaji nilai-nilai baru

yang dibawa oleh pergaulan global, dan menyepadankan dengan nilai-nilai tradisional untuk mengembangkan dan memperkaya nilai-nilai dasar masyarakat Sulawesi Selatan; (23) Pengembangan kebebasan berkreasi dalam berkesenian serta menjamin adanya perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta bagi pelaku seni dan budaya; (24) Fasilitasi organisasi keagamaan, forum kerukunan antar ummat beragama, dan tokoh-tokoh agama, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama secara baik; (25) Pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan serta pembinaan ekonomi ummat pada keluarga yang tidak mampu; (26) Penguatan budaya dialogis antar tokoh agama dan pemimpin organisasi keagamaan untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun, harmonis dan saling menghargai; (27) Peningkatan kesadaran ummat beragama untuk tidak mudah terprovokasi dalam menerima ajaran agama yang sesat, penghasut dan perusuh.

Misi-2 RPJPD yakni "Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Fasilitasi penguatan kelembagaan komunitas masyarakat yang beragam (ormas, LSM, yayasan, asosiasi), sehingga tercipta komunitas yang mampu mandiri; (2) Pengembangan situasi kondusif bagi aktivitas kelompok/organisasi masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial-budaya. (3) Pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan industri kecil termasuk termasuk unit Ekonomi Syariah; (4) Pengembangan kelembagaan ekonomi modern, organisasi usaha dan kelompok produktif masyarakat; (5) Fasilitasi berkembangnya kelembagaan masyarakat yang mendukung penciptaan iklim yang kondusif bagi maraknya upaya kreatif-inovatif pada bidang teknologi dan manajemen industrial yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah; (6) Pemeliharaan iklim investasi yang baik, termasuk fasilitasi ketersediaan tanah bagi investasi pada berbagai bidang; (7) Penguatan peran masyarakat sipil dalam menciptakan kehidupan politik yang demokratis; (8) Fasilitasi pengembangan science-park dan techno-park; (9) Fasilitasi terwujudnya masyarakat melek iptek antara lain melalui upaya pengenalan iptek sejak dini pada generasi muda; (10) Penguatan teknostruktur (kelembagaan dan teknologi) masyarakat desa dalam menunjang peningkatan kapasitas/kualifikasi desa; (11) Penataan pemerintahan desa; (12) Peningkatan kordinasi antar kabupaten/kota dalam pencapaian target-target pembangunan nasional; (13) Pengembangan kerjasama lintas kabupaten/kota; (14) Pengembangan kerjasama pembangunan antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain.

Misi 3 RPJPD yakni "Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pengembangan sistem pengamanan dan perlindungan masyarakat secara swakarsa pada tataran desa/kelurahan yang sepenuhnya di bawah bimbingan pemerintah desa/kelurahan serta dibina secara teknis oleh aparat keamanan setempat; (2) Pengembangan sistem deteksi dini potensi konflik sosial; (3) Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik; (4) Perwujudan kelembagaan pemerintah dengan paradigma yang mengedepankan pelayanandibandingpengendalian dengan mengacu pada kepuasan masyarakat terhadap pencapaian standar pelayanan minimal; (5) Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa basis profesi-onalisme adalah kompetensi dan kapasitas belajar yang di dasarkan pada etika dan moral yang tinggi; (6) Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Misi 4 RPJPD yakni "Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Peningkatan akses masyarakat kepada aset produktif serta revitalisasi lembaga ekonomi

masyarakat kecil (2) Pengembangan jalur-jalur pemerataan dalam hal peluang kerja dan peluang usaha; (3) Pengembangan sistem upah kerja yang mendorong peningkatan pendapatan pekerja; (4) Penajaman implementasi program pada kabupaten/kota yang angka kemiskinannya paling tinggi; (5) Pelibatan secara efektif dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial korporasi; (6) Peningkatan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) baik oleh pemerintah daerah maupun secara berkolaborasi dengan unsur masyarakat; (7) Peningkatan kordinasi dalam distribusi untuk keterjangkauan pangan yang baik secara merata pada seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan pemenuhan pangan provinsi lain; (8) Pelibatan multipihak dalam penanganan keamanan pangan; (9) Peningkatan produksi dan produk-tivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan melalui keterpenuhan sarana produksi dan dukungan penyuluhan untuk akses teknologi; (10) Penguatan akses pasar dengan daya saing harga yang tinggi bagi produk petani, peternak dan nelayan; (11) Penguatan kelembagaan petani, peternak dan nelayan; (12) Hilirisasi produk unggulan untuk pengembangan industri strategis; (13) penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung; (14) Pengembangan kerjasama regional dan promosi perdagangan; (15) Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan khususnya pada jalur interkoneksi antar wilayah yang penggunaannya sudah sangat padat; (16) Pengembangan jaringan transportasi kereta api dalam mengakselerasi perekonomian Sulawesi Selatan dan lintas Sulawesi; (17) Pengembangan sarana-prasarana ban-dara bertaraf internasional yang bisa menampung dengan baik pertumbuhan penumpang; (18) Pengembangan sarana-prasarana pelabuhan yang dapat mengakselerasi posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat interkoneksi logistik di kawasan Timur Indonesia; (19) Pengembangan sumber energi listrik alternatif (PLTMH, energi bayu) terbarukan; (20) Pengelolaan pertambangan berorientasi pengolahan secara berkelanjutan; (21) Fasilitasi penyedia jasa layanan telekomunikasi untuk menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub bagi jaringan pelayanan telekomunikasi; (22) Pembangunan waduk/bendungan dan jaringan irigasi baru sesuai kapasitas dukungan sumberdaya air pada wilauah hulu; (23) Penetapan luas dan lokasi kawasan lahan pangan berkelanjutan dan cadanga lahan berkelanjutan dalam RTRW; (23) pemanfaatan secara lestari atas lahan pangan berkelanjutan; (24) Pemberian fasilitasi bagi investasi sektor swasta pada kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu; (25) Pengembangan kerja-sama dan sinergi pembangunan antar provinsi pada wilayah perbatasan; (26) Pengendalian pencemaran melalui pemantauan terhadap kondisi tanah, air dan udara, penerapan standar pengelolaan lingkungan pada kawasan-kawasan yang peka terhadap kerusakan lingkungan, implementasi rekomendasi Amdal terhadap penyelenggaraan proyek pembangunan, dan penegakan hukum lingkungan yang konsisten; (27) Rehabilitasi lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan serta pengembangan jasa lingkungan pada wilayah yang memungkinkan; (28) Peningkatan kapasitas multipihak dalam pelaksanaan pencegahan, penyelamatan, dan perbaikan kerusakan lingkungan; (29) Pemetaan lokasi/wilayah rawan bencana untuk berbagai jenis bencana utama yang sering terjadi di Sulawesi Selatan; (30) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder masyarakat dan swasta dalam deteksi dini bencana, penanganan saat bencana dan pemulihan pasca bencana; (31) Pemberian dukungan bagi per-kembangan ibukota kabupaten dan kota dalam akselerasi kemajuan untuk layanan pendidikan khususnya pendidikan tinggi, layanan kesehatan yang memuaskan serta keterpenuhan unsur-unsur bagi perkembangan sektor jasa dan perdagangan; (32) Pemberian dukungan

pengembangan interaksi perdesaan-perkotaan serta pertumbuhan kawasan agropolitan dan minapolitan.

Misi 5 RPJPD yakni "Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Penggalian dan revitalisasi nilai-nilai serta kearifan lokal kebaharian serta mempromosikannya dalam kancah jagad maritim nusantara; (2) Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang diarahkan untuk mendukung ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pada pulau-pulau di Sulawesi Selatan; (3) Pemberian dukungan kepada kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dalam operasi strategis pertahanan dan keamanan NKRI.

#### **(4) Arah Pembangunan Lima Tahun Keempat (2020-2025)**

Pembangunan lima tahun tahap keempat merupakan tahap terakhir dari RPJPD 2005-2025. Berdasarkan capaian kinerja pembangunan pada lima tahun tahap ketiga (2015-2019) yang fokusnya pada loncatan dalam perekonomian dan posisi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional, pada pembangunan lima tahun tahap keempat pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pertumbuhan yang berkeadilan menjadi prioritas utama. Prioritas ini sekaligus untuk mengatasi efek pertumbuhan pada tahapan sebelumnya yang menyebabkan kesenjangan sosial-ekonomi antar lapisan dan antar wilayah.

Upaya umum yang diprioritaskan pada pembangunan lima tahun keempat difokuskan dalam mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan berkelanjutan, menguatkan daya saing daerah dan kemandirian lokal, meningkatkan kualitas pelayanan umum, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam, mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dan menciptakan situasi kondusif bagi kehidupan spiritual dan pengamalan agama. Pelaksanaan upaya-upaya umum ini diletakkan dalam prinsip untuk mengejar target-target sasaran yang belum tercapai dan mendorong keseimbangan berbagai aspek dalam komposisi target kinerja sasaran.

Misi-1 RPJPD yakni "Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Akselerasi dukungan pemerintah Provinsi pada kabupaten dengan capaian pembangunan manusia yang berada di bawah rata-rata provinsi; (2) Penerapan standar pelayanan minimal pada semua jenjang pendidikan; (3) Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan untuk menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif, efisien dan inovatif; (4) Perwujudan standar pelayanan kesehatan dengan pelaksanaan yang konsisten pada semua pihak; (5) Pengelolaan RSUD Daerah dan Unit Pelayanan Kesehatan yang profesional dan berstandar tinggi; (6) Peningkatan daya saing tenaga kerja dengan memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga-lembaga pendidikan keterampilan yang diselenggarakan oleh masyarakat; (7) Pengembangan wirausaha perdesaan; Peningkatan wawasan kebangsaan, integritas diri, serta pembinaan mental dan spiritual pemuda; (8) Peningkatan pembibitan, pembinaan dan minat olahraga yang dilakukan secara sistematis dan terpadu; (9) Peningkatan kualitas peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam penyusunan, pelaksanaan dan penerimaan manfaat dari kebijakan pemerintah daerah serta mendukung akses secara nasional; (10) Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pencegahan perdagangan perempuan (trafiking), serta penerapan peraturan perundangan-undangan terkait secara baik; (11) Peningkatan koordinasi pembina-an keluarga berencana; (12) Pengembangan kebebasan

berkreasi dalam berkesenian serta menjamin adanya perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta bagi pelaku seni dan budaya; (13) Penguatan peran perguruan tinggi dan lembaga budaya/organisasi kesenian tradisional sebagai ujung tombak upaya-upaya penggalian dan pengembangan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan; (14) Fasilitasi organisasi keagamaan, forum kerukunan antar ummat beragama, dan tokoh-tokoh agama, sehingga dapat melaksanakan fungsi dan perannya dalam meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama secara baik; (15) Peningkatan kesadaran ummat beragama untuk tidak mudah terprovokasi dalam menerima ajaran agama yang sesat, penghasut dan perusuh.

Misi-2 RPJPD yakni "Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pengembangan situasi kondusif bagi aktivitas kelompok/organisasi masyarakat yang bergerak dalam kehidupan sosial-budaya; (2) Pergeseran struktur perekonomian menuju perekonomian berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) dan teknologi; (3) Pemeliharaan iklim investasi yang baik, termasuk fasilitasi ketersediaan tanah bagi investasi pada berbagai bidang; (4) Pemeliharaan tatanan kehidupan sosial yang kondusif dan tanggap terhadap berbagai kerawanan dan kerentanan sosial; (5) Fasilitasi pengembangan science-park dan techno-park; (6) Fasilitasi terwujudnya masyarakat melek iptek antara lain melalui upaya pengenalan iptek sejak dini pada generasi muda; (7) Pembinaan dan pengembangan desa adat dan komunitasnya; (8) Peningkatan koordinasi antar kabupaten/kota dalam pencapaian target-target pembangunan nasional; (9) Pengembangan kerjasama pembangunan antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain.

Misi 3 RPJPD yakni "Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pengembangan sistem pengamanan dan perlindungan masyarakat secara swakarsa pada tataran desa/kelurahan yang sepenuhnya di bawah bimbingan pemerintah desa/kelurahan serta dibina secara teknis oleh aparat keamanan setempat; (2) Pengembangan sistem deteksi dini potensi konflik sosial; (3) Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik; Penyelenggaraan agenda reformasi birokrasi dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. (3) Penertiban pengelolaan keuangan dan asset daerah; (4) Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan bahwa basis profesionalisme adalah kompetensi dan kapasitas belajar yang di dasarkan pada etika dan moral yang tinggi.

Misi 4 RPJPD yakni "Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Pengembangan jalur-jalur pemerataan dalam hal peluang kerja dan peluang usaha; (2) Pengembangan sistem upah kerja yang mendorong peningkatan pendapatan pekerja; (3) Penajaman implementasi program pada kabupaten/kota yang angka kemiskinannya paling tinggi; (4) Pelibatan secara efektif dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial korporasi; (5) Pelibatan multipihak dalam penanganan keamanan pangan; (6) Penguatan akses pasar dengan daya saing harga yang tinggi bagi produk petani, peternak dan nelayan; (7) hilirisasi produk unggulan untuk pengembangan industri strategis; (8) Pengembangan kerjasama regional dan promosi perdagangan; (9) Peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan khususnya pada jalur interkoneksi antar wilayah yang penggunaanya sudah sangat padat; (10) Pengembangan jaringan transportasi kereta api dalam mengakselerasi perekonomian Sulawesi Selatan dan lintas Sulawesi; (11) Pengembangan sarana-prasarana pelabuhan yang dapat mengakselerasi posisi Sulawesi Selatan sebagai pusat interkoneksi logistik

di kawasan Timur Indonesia; (12) Pengembangan sumber energi listrik alternatif (PLTMH, energi bayu) terbarukan; (13) Pengelolaan pertambangan berorientasi pengolahan secara berkelanjutan; (14) Fasilitasi berkembangnya kota cerdas (smart city) di Sulawesi Selatan; (15) Penataan komprehensif terhadap pemanfaatan berbagai sumber daya air terutama dalam menjamin keberlanjutan keterpenuhan kebutuhan air perkotaan; (16) Perlindungan terhadap lahan pangan berkelanjutan melalui mekanisme insentif dan disinsentif; (17) Pemanfaatan secara lestari atas lahan pangan berkelanjutan; (18) Koordinasi kabupaten/ kota dalam perlindungan lahan pangan berkelanjutan; (19) Pemberian fasilitasi bagi investasi sektor swasta pada kawasan andalan cepat tumbuh/kawasan wilayah terpadu; (20) Koordinasi dan fasilitasi akselerasi capaian kinerja pembangunan pada kawasan tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang jauh dari daratan utama; (21) Pengembangan kerjasama dan sinergi pembangunan antar provinsi pada wilayah perbatasan; (22) Pengendalian pencemaran melalui pemantauan terhadap kondisi tanah, air dan udara, penerapan standar pengelolaan lingkungan pada kawasan-kawasan yang peka terhadap kerusakan lingkungan, implementasi rekomendasi Amdal terhadap penyelenggaraan proyek pembangunan, dan penegakan hukum lingkungan yang konsisten; (23) Fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota dalam pemeliharaan dan pemulihan kondisi ekologis daerah aliran sungai serta danau dan kawasan pesisir; (24) Peningkatan kapasitas multipihak dalam pelaksanaan pencegahan, penyelamatan, dan perbaikan kerusakan lingkungan; (25) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder masyarakat dan swasta dalam deteksi dini bencana, penanganan saat bencana dan pemulihan pasca bencana; (26) Fasilitasi pengembangan kota cerdas dan masyarakat kota berbasis pengetahuan (*knowledge based society*); (27) Dukungan pengembangan interaksi perdesaan-perkotaan serta pertumbuhan kawasan agropolitan dan minapolitan.

Misi 5 RPJPD yakni "Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional" dijalankan melalui kebijakan yang diprioritaskan pada: (1) Penggalan dan revitalisasi nilai-nilai serta kearifan lokal kebaharian serta mempromosikannya dalam kancah jagad maritim nusantara; (2) Revitalisasi dan penguatan jalur-jalur perkapalan/pe-layaran niaga Bugis-Makassar dalam mendukung pergerakan logistik Nusantara; (3) Pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumberdaya alam kelautan melalui perumusan tata ruang kawasan pesisir dan laut yang diarahkan untuk mendukung ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pada pulau-pulau di Sulawesi Selatan; (4) Pemberian dukungan kepada kekuatan pertahanan dan keamanan nasional dalam operasi strategis pertahanan dan keamanan NKRI.

### 5.2.2. Sasaran Pokok

Pelaksanaan kebijakan prioritas dalam arah pembangunan setiap tahapan pembangunan lima tahun RPJPD memiliki target kinerja berdasarkan sasaran pokok yang hendak dicapai. Adapun target kinerja sasaran pokok pada setiap tahapan pembangunan lima tahun RPJPD ini dapat dilihat pada Tabel 5.3.

**Tabel 5.3**  
**Sasaran Pokok Setiap Tahapan Pembangunan Lima Tahun**  
**RPJPD Sulawesi Selatan**

No.	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Sasaran Pokok	Target RPJPD Periode 2005-2009	Target RPJPD Periode 2010-2014	Target RPJPD Periode 2015-2019	Target RPJPD Periode 2020-2024	Target Akhir RPJPD 2025
<b>Misi 1:</b> <b>Mewujudkan peningkatan kualitas manusia Sulawesi Selatan</b>							
1.	Meningkatnya kualitas manusia Sulawesi Selatan sebagai dampak dari keterlibatan se-luruh pihak (pemerin-tah, swasta dan masya-rakat) pada berbagai level wilayah (kabupa-ten/kota dan provinsi) dalam berbagai upaya pembangunan. (S1)	Indeks Pembangunan Manusia	70,94 (Tahun Dasar 2000)	68,49 (Tahun Dasar 2010)	70,43 (Tahun Dasar 2010)	74,71 (Tahun Dasar 2010)	75,33 (Tahun Dasar 2010)
2.	Meningkatnya akses dan kualitas pendidik-an pada berbagai jenjang pendidikan dengan luaran yang profesional dan memi-lik mentalitas/karak-ter yang mencirikan manusia Indonesia seutuhnya serta tetap berbasis pada nilai-nilai lokal Sulawesi Selatan. (S2)	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Tahun	7,41 (Tahun Dasar 2000)	7,49 (Tahun Dasar 2010)	7,74 (Tahun Dasar 2010)	7,99 (Tahun Dasar 2010)	8,0(Tahun Dasar 2010)
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	-	12,9 (Tahun Dasar 2010)	14,68 (Tahun Dasar 2010)	16,47 (Tahun Dasar 2010)	16,83 (Tahun Dasar 2010)

3.	Meningkatnya keber-dayaan masyarakat dalam mencapai dan memelihara derajat kesehatan yang tinggi dengan pelayanan ke-sehatan yang berkuali-tas dan mudah diakses untuk semua lapisan dan golongan. (S3)	Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir	69,80 (Tahun Dasar 2000)	69,60 (Tahun Dasar 2010)	70,43 (Tahun Dasar 2010)	71,27 (Tahun Dasar 2010)	71,44 (Tahun Dasar 2010)
4.	Meningkatnya keter-serapan angkatan kerja pada bidang pekerjaan yang berkembang dan berdaya saing secara lokal, nasional dan internasional. (S4)	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	8,90	5,10	4,30-3,50	3,50-2,70	2,70-2,30
5.	Meningkatnya kualitas kehidupan kepemuda-an dan aktivitas keolahragaan. (S5)	Persentase Jumlah Organisasi Pemuda dan Cabang Olah Raga yang Aktif	70%	70%	80%	80%	85%
6.	Meningkatnya kualitas kehidupan pada insti-tusi keluarga, relasi gender dan perlin-dungan terhadap anak. (S6)	Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Kekerasan Terhadap Anak (IKA)	IPG Meningkat IKA Menurun	IPG Meningkat IKA Menurun	IPG Meningkat IKA Menurun	IPG Meningkat IKA Menurun	IPG Meningkat IKA Menurun
7.	Terkendalikannya per-tumbuhan penduduk dalam menjamin ke-sejahteraan keluarga. (S7)	Persentase Rata-Rata Pertumbuh-an Penduduk	1,33	1,07	0,96	0,77	0,74
8.	Berkembangnya kebudayaan masyarakat yang memiliki karakteristik identitas	Persentase keraga-man budaya dan kekayaan	60%	70%	80%	90%	100%

	sekali-gus mampu adaptif-inklusif dengan kebudayaan lain. (S8)	budaya yang memperoleh pembinaan/pelestarian					
9.	Meningkatnya manifestasi spiritual, amal saleh dan pengamalan nilai dan ajaran keagamaan dalam mendukung perkembangan daerah. (S9)	Persentase kegiatan keagamaan yang mendapatkan dukungan/fasilitasi	80%	80%	85%	90%	100%
10.	Berkembangnya rasa saling percaya, harmoni antar kelompok, toleransi dan kerukunan, serta kebersamaan dan kekeluargaan dalam kehidupan dan interaksi umat beragama. (S 10)	Jumlah insiden terkait kehidupan intra dan antar umat beragama	Tidak ada insiden	Tidak ada insiden	Tidak ada insiden	Tidak ada insiden	Tidak ada insiden
<b>Misi 2:</b>							
<b>Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai Komunitas Pembelajar</b>							
11.	Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah sosial budaya(S11)	Kondisi peningkatan aktivitas kelembagaan sosial-budaya (Ormas, LSM, yayasan, asosiasi) dalam masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
12.	Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah ekonomi (S12)	Persentase jumlah koperasi dan UMKM yang aktif	80%	90%	100%	100%	100%
13.	Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar	Persentase jumlah organisasi sosial-politik,	60%	70%	75%	80%	100%

	yang tangguh dan mandiri dalam penyelesaian masalah sosial-politik (S13)	LSM, lembaga kajian yang aktif					
14.	Menguatnya ketahanan kelembagaan masyarakat sebagai komunitas pembelajar yang tangguh dan mandiri dalam perkembangan ilmu-pengetahuan dan teknologi (S14)	Persentase jumlah unit science park, technopark, asosiasi keilmuan, lembaga kajian ilmiah yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Menguatnya kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa sesuai karakteristik adat-istiadat lokal dan dinamika kemajuan desa (S15)	Jumlah desa adat yang dibangun	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
16.	Menguatnya kapasitas otonomi dan kerjasama daerah kabupaten/kota dalam pemecahan masalah lintas daerah (S 16)	Jumlah kerjasama dan dialog pembangunan antar kabupaten/kota yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
17.	Efektifnya kerjasama antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain dalam pemecahan masalah lintas daerah (S 17)	Jumlah kegiatan kerjasama antara provinsi Sulawesi Selatan dengan provinsi lain	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
<b>Misi 3: Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Wilayah yang Kondusif</b>							
18.	Terpeliharanya situasi dan kondisi tertib, tenteram, aman dan harmonis dalam	Kondisi Penurunan Angka Kriminalitas dan	Indeks kriminalitas= di	Indeks kriminalitas=	Indeks kriminalitas=	Indeks kriminalitas=	Indeks kriminalitas=

	kehidupan sosial kemasyarakatan dan kewilayahan (S 18)	Gangguan Kamtibmas	bawah rata-rata provinsi di Indonesia	di bawah rata-rata provinsi di Indonesia	di bawah rata-rata provinsi di Indonesia	di bawah rata-rata provinsi di Indonesia	di bawah rata-rata provinsi di Indonesia
19.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, bersih dan partisipatif ( <i>clean and good governance</i> ) (S 19)	Opini Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	Berkembangnya sistem pelayanan yang efektif dalam pencapaian standar pelayanan minimal (S 20)	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
<b>Misi 4:</b> <b>Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan</b>							
21.	Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat (S 21)	PDRB Per Kapita &  Gini Ratio	Rp. 12,56 (Tahun Dasar 2000)  GR= 0,39	Rp. 35,59 (Tahun Dasar 2010)  GR = 0,42	Rp. 65,7 (Tahun Dasar 2010)  GR = 0,38	Rp. 120,5 (Tahun Dasar 2010)  GR = 0,36	Rp. 124,5 (Tahun Dasar 2010)  GR = 0,34
22.	Berkurangnya penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (S22)	Angka Kemiskinan dan persen PMKS yang terlayani	21,31	8,50	7,90-6,00	6,00-5,20	5,20-3,40

23.	Meningkatnya kualitas ke-daulatan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan (S23)	Ranking Indeks ketahanan pangan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
24.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani, peternak dan nelayan/pembudidaya ikan (S 24)	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,65	110,70	116,50	122,50	126,0
25.	Tumbuhnya rumpun industri yang kuat dan sehat dalam lingkungan usaha yang kondusif (S 25)	Kontribusi industri dan UMKM terhadap PDRB	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
26.	Berkembangnya jaringan per-dagangan komoditas unggul-an sehingga menjangkau pasar-pasar komoditas dunia (S 26)	Volume dan nilai perdagangan dalam negeri dan ekspor	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
27.	Tercukupinya sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung kegiatan sosial- ekonomi yang menjamin keseimbangan dan pemerata-an pembangunan antar-daerah (sub-wilayah) (S 27)	Persentase keman-tapan jalan, kapa-sitas/kualitas baik, dan konektivikasi	79,83	82,05	86,56	91,31	92,07
28.	Berkembangnya sarana-pra-sarana perhubungan udara, laut dan darat yang menempatkan Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring lintasan perhubungan	Persentase peningkat-an jumlah penum-pang yang melewati bandara, pelabuhan, dan terminal	75%	77,73%	90%	95%	100%

	kawasan timur Indonesia (S 28)						
29.	Tersedianya pasokan listrik dan energi dari berbagai sumber dengan jaringan yang menjangkau seluruh wilayah Sulawesi Selatan sebagai bagian dari jaringan interkoneksi pulau Sulawesi (S 29)	Rasio elektrifikasi (%)	76,28	81,14	86,2	91,26	96,32
30.	Berkembangnya Sulawesi Selatan sebagai kesatuan kawasan komunikasi yang handal serta mendukung berkembangnya <i>e-commerce</i> , <i>e-government</i> , <i>e-learning</i> dan menjadi simpul jejaring/hub dalam layanan komunikasi di Sulawesi dan Indonesia Timur (S 30)	Persentase wilayah yang memiliki jaring-an komunikasi dengan <i>bandwidth</i> yang cukup (persen)	90	100	100	100	100
		jumlah perusahaan seluler yang menjadikan Sulawesi Selatan sebagai hub dalam beroperasi	5 Operator	7 Operator	8 Operator	9 Operator	10 Operator
31.	Terwujudnya fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan dalam menjamin kebutuhan pokok hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (S 31)	Luas lahan budidaya yang terairi jaringan irigasi (Hektar)	336,141	476,141	635,141	794,141	953,141
		Persentase rumah tangga berakses air bersih	82,6	84	85,4	86,8	88,2

32.	Terlindunginya kawasan lahan pangan berkelanjutan dari konversi lahan dan degradasi lahan demi terpeliharanya kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan bagi Sulawesi Selatan sebagai daerah surplus pangan nasional (S 32)	Pesentase luas lahan pangan berkelanjutan yang terlindungi	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
33.	Meningkatnya akselerasi pertumbuhan dan kecukupan sarana/prasarana wilayah pada kawasan andalan cepat tumbuh serta kawasan tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang letaknya jauh dari daratan utama (S 33)	Persentase pertumbuhan ekonomi kawasan strategis nasional (Kawasan Mamminasata, Kapet Parepare) dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dasar pada kawasan tertinggal, terpencil dan pulau-pulau yang letaknya jauh dari daratan utama	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
34.	Berkembangnya wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas sosial-ekonomi dengan provinsi tetangga, sehingga pada satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sedangkan pada sisi lain mendorong berkembangnya sinergi antar provinsi. (S 34)	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan dasar pada wilayah perbatasan.	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

35.	Terpeliharanya daya dukung lingkungan pada daerah aliran sungai (DAS) dan kawasan pesisir, seiring dengan terkendalikannya pencemaran lingkungan, serta rehabilitasi lahan kritis secara terus-menerus, melalui keterlibatan multipihak yang kapasitasnya memadai (S 35)	Luas lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan yang direhabilitasi;	445,219 (Ha)	497,885 (Ha)	445,189 (Ha)	392,523 (Ha)	339,885 (Ha)
		Indeks Mutu Lingkungan yang semakin membaik	3 DAS	3 DAS	3 DAS	3 DAS	3 DAS
36.	Meningkatnya kapasitas penanganan bencana skala lintas kabupaten/kota.(S 36)	Persentase korban bencana skala provinsi yang tertangani	Berkurang	Berkurang	Berkurang	Berkurang	Berkurang
37	Terwujudnya kawasan perkotaan dengan akses dan jangkauan pelayanan sosial ekonomi yang memuaskan bagi masyarakatnya ( S 37)	Jumlah kota yang efektif berkembang sebagai kawasan yang nyaman dengan pelayanan social ekonomi yang memuaskan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
38.	Terwujudnya perdesaan sebagai kawasan yang layak huni, berkeadilan dan berbudaya, dan fungsional dalam peningkatan produktivitas masyarakat, serta mewujudkan pusat pelayanan sosial ekonomi dan pemerintahan yang baik.(S	Persentase desa kualifikasi mandiri.	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

	38))						
<b>Misi 5:</b>							
<b>Meningkatkan peran Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang mandiri dan maju dalam memperkuat ketahanan nasional</b>							
39.	Berkembangnya posisi Sulawesi Selatan sebagai pilar budaya bahari dan penggerak interkoneksi maritim di Indonesia Timur (S 39)	Kondisi peningkatan jumlah perahu/kapal yang berlabuh pada pelabuhan Sulawesi Selatan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat
40	Menguatnya posisi strategis wilayah kepulauan Sulawesi Selatan dalam mendukung ketahanan nasional (S 40)	Jumlah unit pertahanan/keamanan nasional yang berpangkalan di Sulawesi Selatan	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

## **BAB VI**

### **KAIDAH PELAKSANAAN**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi, terutama dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Gubernur Sulawesi Selatan berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menjabarkannya dalam dokumen RPJMD dengan memperhatikan kebijakan tahapan RPJPD. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi, dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu harus disosialisasikan secara luas kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder), untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing.
2. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya serta menjabarankannya kedalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya, terutama kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten dan Kota yang belum dan akan menyusun RPJP Daerahnya, mengacu pada Perubahan RPJPD Provinsi dan memperhatikan RPJP Nasional, dan bagi daerah yang telah menyusun RPJPD melakukan penyerasian dalam menyusun RPJMD atau menjadi acuan dalam proses perencanaan dan penganggaran yang dituangkan dalam RKPD dan APBD.
4. Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, organisasi sosial, kalangan dunia usaha, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, diharapkan ikut bertanggungjawab dalam menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaannya.
5. Perguruan tinggi di daerah ini, ikut bertanggungjawab dalam pengawasan pada penjabaran lebih lanjut dalam dokumen perencanaan daerah maupun dalam pelaksanaannya oleh pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan (stakeholder).

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025, yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan pedoman pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah hingga tahun 2025.

Dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang ditetapkan dengan perundang-undangan daerah yakni Peraturan Daerah (PERDA), tentu saja harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan terkait dengan perencanaan.

Pada akhirnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang akan memperkuat jati diri masyarakat Sulawesi Selatan dalam suasana demokratis, tenteram dan damai yang mengacu pada nilai-nilai budaya lokal yang bernafaskan keagamaan.

Sehubungan dengan itu, semua pihak (stakeholders) perlu berperan aktif menurut fungsi dan kemampuan masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 menurut Peraturan Daerah ini yang harus dipedomani dan diimplementasikan secara optimal.

Diakui bahwa berhasilnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang disesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah, tergantung pada sejauhmana peran aktif, sikap mental, tekad dan semangat kedisiplinan, profesional, transparan, partisipasi dan akuntabilitas segenap aparatur pemerintah/pemerintah daerah dan lembaga legislatif serta masyarakat luas termasuk dunia usaha.

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

**SYAHRUL YASIN LIMPO**